

GAMBAR 3.3

PENGAWASAN OJK



BPK telah melaksanakan pemeriksaan kepatuhan atas pengaturan dan pengawasan kegiatan perkreditan dan pembiayaan sektor perbankan dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) pada OJK. Pemeriksaan pengawasan OJK dilakukan untuk mengawal pelaksanaan PP 8.10- pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, khususnya KP pendalaman sektor keuangan. Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-8 terutama target 8.1- mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional, serta target 8.10- memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi, dan jasa keuangan bagi semua.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa kegiatan pengawasan OJK telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian. Simpulan tersebut didasarkan atas permasalahan antara lain sebagai berikut:

Penguatan pengaturan pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) belum optimal, yaitu: (1) *Roadmap* Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025 belum memuat strategi penguatan permodalan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Syariah sesuai dengan tujuan pendirian BPD sebagaimana diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah; dan (2) Pengaturan perihal penerapan tata kelola bagi BUS dan UUS belum ditetapkan dalam Peraturan OJK dan masih mengacu pada Peraturan Bank Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan meningkatnya dampak risiko reputasi, risiko strategi, dan risiko operasional atas penyediaan dan pengelolaan BUS dan UUS.

BPK merekomendasikan Ketua Dewan Komisiner OJK agar menginstruksikan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan untuk: (1) Menyempurnakan *Roadmap* Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia melalui penyusunan program kerja turunan dari *roadmap*; dan (2) Memerintahkan Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan supaya menyusun dan mengusulkan ketentuan tentang penyelenggaraan dan penerapan tata kelola bagi BUS dan UUS sesuai *roadmap* perbankan syariah yang telah disempurnakan untuk selanjutnya ditetapkan oleh Ketua Dewan Komisiner OJK.



Hasil pemeriksaan atas Perusahaan Pembiayaan terhadap tersedianya neraca penutupan atas pembubaran perusahaan pembiayaan dan dicabut izin usahanya menunjukkan OJK belum optimal dalam memastikan tersedianya neraca penutupan.

Pengawas tidak melakukan pemeriksaan untuk memastikan tersedianya neraca pencabutan izin usaha dan tidak melakukan pemantauan terhadap 29 perusahaan pembiayaan yang telah dicabut izin usahanya tersebut. Sampai dengan pemeriksaan berakhir, tidak terdapat neraca penutupan 29 perusahaan pembiayaan yang telah dicabut izin usahanya tersebut maupun hasil pemantauan OJK atas penyelesaian likuidasi pada 29 perusahaan pembiayaan tersebut. Hal ini mengakibatkan OJK tidak dapat memastikan nilai aset yang dapat digunakan untuk dapat memulihkan kewajiban perusahaan pembiayaan terhadap kreditor.

BPK merekomendasikan Ketua Dewan Komisiner OJK agar menginstruksikan Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya untuk memerintahkan Deputi Komisiner Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya supaya: (1) Mengarahkan Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya agar memastikan tersedianya neraca penutupan atas pembubaran dan pencabutan izin usaha Perusahaan Pembiayaan; dan (2) Mengarahkan Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Jasa Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya agar menyusun peraturan turunan terkait kewajiban tersedianya neraca penutupan untuk perusahaan pembiayaan yang akan melakukan pembubaran usahanya sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.



Hasil Pemeriksaan pada proses pengawasan atas pemantauan penghimpunan dan penyaluran dana pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang berstatus Bank Dengan Pengawasan Khusus (BDPK), diketahui bahwa OJK belum sepenuhnya melakukan pemantauan terhadap penghimpunan dan penyaluran dana.

Masih terdapat penghimpunan dana dalam bentuk tabungan dan deposito sebesar Rp2,43 miliar pada 3 BPR/BPRS saat bank tersebut telah ditetapkan status BDPK. Pemeriksaan lebih lanjut atas mekanisme pembayaran dana pihak ketiga oleh LPS, diketahui bahwa Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tidak melakukan penelitian mendalam atas adanya pembentukan simpanan baru pada rentang waktu bank berstatus BDPK sampai dengan bank Cabut Izin Usaha (CIU). Hal tersebut mengakibatkan adanya risiko terjadinya potensi klaim LPS yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp2,43 miliar.

BPK merekomendasikan Ketua Dewan Komisiner OJK agar menginstruksikan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan selaku Anggota Dewan Komisiner *ex officio* OJK pada LPS berkoordinasi dengan Anggota Dewan Komisiner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank LPS untuk menelaraskan ketentuan pengawasan atas penghimpunan dan penyaluran dana pada saat BPR/BPRS yang dinyatakan BDPK dengan Peraturan LPS.



Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas kegiatan pengawasan OJK mengungkapkan **15 temuan** yang memuat

18 permasalahan → Meliputi → **17 permasalahan SPI** **1 permasalahan ketidakpatuhan**

Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas kegiatan pengawasan OJK disajikan pada **Lampiran D.2.**

laboratorium Perum Peruri dalam penyempurnaan dan penambahan parameter *Fluorescent under UV light: Negative* pada spesifikasi kertas uang TE 2022 dan selanjutnya menuangkannya dalam KAK dan RKS sebagai bagian tidak terpisahkan dalam kontrak pengadaan bahan uang.

- Kepala DPS untuk mengatur dan menetapkan informasi bank koresponden calon pemasok bahan uang dalam RKS penyediaan bahan uang serta berkoordinasi dengan Kepala DPPT dalam menetapkan mekanisme koordinasi untuk melakukan konfirmasi *Relationship Management Application* atas bank koresponden yang diajukan pemasok bahan uang.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan Rupiah mengungkapkan 3 temuan yang memuat 7 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 4 kelemahan SPI dan 3 ketidakpatuhan. Rekapitulasi matriks klasifikasi temuan pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan Rupiah disajikan pada *Lampiran D.2*.

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)

PADA semester II tahun 2023, BPK telah menyampaikan 7 laporan hasil pemeriksaan (LHP) kepatuhan yang terkait dengan tema pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Pengelolaan Kepesertaan, Iuran, dan Belanja Manfaat BPJS Kesehatan

SISTEM Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun. Negara membentuk Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang mensinkronisasikan penyelenggaraan berbagai bentuk jaminan sosial yang dilaksanakan oleh beberapa penyelenggara agar dapat menjangkau kepesertaan yang lebih luas serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi setiap peserta.

Dengan ditetapkannya UU Nomor 40 Tahun 2004 bangsa Indonesia telah memiliki sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan SJSN dibentuklah BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan melalui UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik yang bertujuan mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan kesehatan yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya sebagai pemenuhan kebutuhan dasar hidup penduduk Indonesia.

Sesuai UU Nomor 24 Tahun 2011, BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan, yaitu dengan mengelola Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan. Sumber dana utama aset DJS adalah iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang besarnya ditetapkan melalui peraturan presiden. Sementara itu, penggunaan dana utama aset DJS Kesehatan adalah untuk pembayaran manfaat/klaim sesuai dengan besaran tarif dan ruang lingkup manfaat yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan kepesertaan, iuran dan belanja manfaat tahun 2021 s.d. semester I tahun 2023 pada BPJS Kesehatan dan instansi terkait. Pemeriksaan dilakukan untuk mendukung PP 2 – penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, khususnya KP SJSN. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-1 terutama target 1.2 – menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.



Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan kepesertaan, iuran, dan belanja manfaat tahun 2021 s.d. semester I tahun 2023 pada BPJS Kesehatan telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian. Simpulan tersebut didasarkan atas permasalahan antara lain sebagai berikut:

- Pengelolaan kepesertaan dan iuran peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) belum sesuai dengan ketentuan yang mengakibatkan kelebihan penerimaan iuran PBI JK sebesar Rp458,86 miliar, terdiri atas: (1) Peserta Bayi Baru Lahir (BBL) yang berusia lebih dari 3 bulan yang belum dimutakhirkan NIK sejak dilahirkan sebesar Rp2,28 miliar; (2) Peserta dengan status nonaktif ganda dan telah pindah segmen kepesertaan berdasarkan laporan mutasi BPJS Kesehatan sebesar Rp0,55 miliar; (3) Peserta tidak masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari hasil verifikasi Kementerian Sosial sebesar Rp42,37 miliar; (4) Peserta yang telah meninggal dunia sebesar Rp360,84 miliar; dan (5) Peserta PBI JK dan BBL PBI JK yang telah dihapuskan dari SK Menteri Sosial sebesar Rp52,83 miliar.

BPK merekomendasikan agar Direktur Utama BPJS Kesehatan, antara lain untuk: (1) Mengusulkan kepada Kementerian Kesehatan untuk menyusun mekanisme koordinasi antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, BPJS Kesehatan, dan instansi terkait lainnya dalam rangka pemutakhiran dan proses terwujudnya satu data kepesertaan JKN; dan (2) Memerintahkan Deputi Direksi Bidang Kebijakan dan Data Kepesertaan dan Deputi Direksi Bidang Manajemen Iuran untuk menyelesaikan kelebihan penerimaan iuran peserta PBI JK.

- Iuran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta Bukan Pekerja (BP) dengan manfaat pelayanan di ruangan perawatan Kelas III (PBPU dan BP Kelas III) dibayar oleh peserta dan juga mendapat bantuan iuran oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Apabila peserta menunggak iuran yang menjadi kewajibannya, maka peserta diberhentikan sementara keaktifannya. Akan tetapi, BPJS Kesehatan tetap melakukan penagihan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah atas peserta PBPU dan BP Kelas III yang sedang diberhentikan sementara keaktifannya. Permasalahan tersebut mengakibatkan pemberian bantuan iuran atas tunggakan iuran peserta PBPU dan BP Kelas III tahun 2020-Juni 2023 membebani pemerintah sebesar Rp903,02 miliar.

BPK merekomendasikan agar Direktur Utama BPJS Kesehatan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan dalam rangka menyelesaikan kelebihan penerimaan bantuan iuran atas peserta tertunggak dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

- Perhitungan belanja manfaat kapitasi tidak sesuai ketentuan, seperti terdapat 5.874.888 peserta yang memiliki status Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak aktif dengan dana kapitasi yang dibayarkan sebesar Rp32,05 miliar, 16.764.152 peserta meninggal yang masih dibayarkan kapitasinya sebesar Rp100,50 miliar, dan peserta di atas umur 90 tahun yang belum dilakukan aktivasi/*update* data administrasi kependudukan. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran belanja manfaat kapitasi minimal sebesar Rp132,55 miliar atas peserta potensi ganda dengan NIK tidak aktif dan peserta yang telah meninggal dunia, serta potensi kelebihan pembayaran belanja manfaat kapitasi atas data peserta di atas 90 tahun yang berisiko telah meninggal dunia.

BPK merekomendasikan agar Direktur Utama BPJS Kesehatan menginstruksikan Deputi Direksi Bidang Kebijakan dan Data Kepesertaan antara lain agar: (1) Berkoordinasi dengan kantor cabang dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dalam memperhitungkan kelebihan pembayaran belanja manfaat kapitasi atas peserta potensi ganda dengan NIK tidak aktif, meninggal dunia, dan berusia di atas 90 tahun yang berisiko telah meninggal dunia; dan (2) Melakukan aktivasi/*update* data administrasi kependudukan untuk peserta yang berusia lebih dari atau sama dengan 90 tahun.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan kepesertaan, iuran dan belanja manfaat tahun 2021 s.d. semester I tahun 2023 pada BPJS Kesehatan mengungkapkan 18 temuan yang memuat 35 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 19 kelemahan SPI dan 16 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp2,02 triliun. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan kepesertaan, iuran dan belanja manfaat tahun 2021 s.d. semester I tahun 2023 pada BPJS Kesehatan disajikan pada *Lampiran D.2*.

Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

PERGURUAN Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh pemerintah yang berstatus sebagai badan hukum publik yang otonom. Pendanaan PTN BH dapat bersumber dari APBN dan selain APBN. Pendanaan yang bersumber dari APBN diberikan dalam bentuk bantuan pendanaan PTN BH dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pendanaan PTN BH yang bersumber dari selain APBN, bersumber dari masyarakat, biaya pendidikan, pengelolaan dana abadi, usaha PTN BH, kerja sama tridarma perguruan tinggi, pengelolaan kekayaan PTN BH, APBD, dan/atau pinjaman.

Pada semester II tahun 2023, BPK telah menyelesaikan 6 laporan hasil pemeriksaan atas pengelolaan PTN BH. Hasil pemeriksaan secara terperinci dapat dilihat pada *Gambar 3.4*.

GAMBAR 3.4

PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

Pada semester II tahun 2023, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan atas pengelolaan PTN BH terhadap 6 objek pemeriksaan, yaitu Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Brawijaya (UB), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Universitas Diponegoro (Undip). Pemeriksaan ini meliputi kegiatan pengelolaan pendapatan, belanja, dan aset PTN BH tahun 2022-2023.



Pengelolaan PTN BH dilakukan untuk mendukung PN 3 Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing, pada PP 7 - produktivitas dan daya saing, khususnya KP penguatan pendidikan tinggi berkualitas. Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-4 terutama target 4.3 – menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan pendapatan, belanja, dan aset pada UI, UGM, USU, UB, ITB, dan Undip telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian. Permasalahan yang ditemukan antara lain:

Penetapan dan pemungutan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan iuran pengembangan institusi (IPI) pada UI, UGM, USU, UB, ITB, dan Undip belum sesuai dengan Ketentuan Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 dan Kepmendikbud Nomor 81/E/KPT/2020, seperti: (1) UKT pada fakultas dan program studi pada jalur regular (seleksi jalur nasional dan mandiri) dan jalur nonregular (paralel, internasional, dan ekstensi) ditetapkan melebihi Biaya Kuliah Tunggal (BKT) yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek; (2) Pemungutan UKT penuh kepada mahasiswa semester akhir (semester 9 bagi mahasiswa S1/D4 dan semester 7 bagi mahasiswa D3) yang mengambil mata kuliah kurang atau sama dengan 6 Sistem Kredit Semester (SKS); (3) Pemungutan UKT kepada mahasiswa yang cuti kuliah/akademik; dan (4) Mahasiswa selain program diploma dan program sarjana dikenakan IPI/sumbangan pengembangan institusi. Hal tersebut mengakibatkan potensi kelebihan pemungutan UKT dan IPI sebesar Rp742,67 miliar pada 6 universitas tersebut.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada rektor universitas terkait untuk menghentikan pemungutan UKT yang melebihi BKT, tagihan UKT atas mahasiswa yang menjalani cuti dan mahasiswa yang mengambil mata kuliah kurang dari/atau sama dengan 6 SKS, serta pemungutan IPI pada mahasiswa baru selain program diploma dan sarjana.

Terdapat pemanfaatan sumber daya dan kekayaan intelektual ITB yang tidak memberikan kontribusi pendapatan ke ITB, yaitu kegiatan kerja sama penelitian dan pengabdian masyarakat menggunakan sumber daya manusia ITB oleh Yayasan Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri (LAPI) ITB yang bukan merupakan unit usaha atau lembaga resmi ITB. Hal tersebut mengakibatkan potensi pendapatan yang hilang atas Dana Pengembangan Institusi kerja sama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebesar Rp8,09 miliar dan US\$78,63 ribu (sebelum dipotong pajak), serta terdapat risiko konflik kepentingan antara unit usaha ITB dengan Yayasan LAPI ITB.

BPK merekomendasikan kepada Rektor ITB agar membuat aturan yang tegas untuk mewajibkan seluruh sivitas akademika agar melakukan kerja sama penelitian dan pemberdayaan kepada masyarakat melalui unit usaha ITB atau lembaga/badan/unit kerja di dalam ITB dalam rangka mewujudkan ITB *Enterprises* dan menjalankan otonomi ITB dalam bidang akademik, tata kelola, keuangan, dan sumber daya secara lebih optimal, serta melakukan sosialisasi peraturan tersebut kepada semua sivitas akademika di lingkungan ITB.



PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN YANG TIDAK SESUAI KETENTUAN

ALOKASI INSTITUTIONAL FEE TIDAK SESUAI KETENTUAN

PERHITUNGAN INSENTIF BERBASIS KINERJA (IBK)

PEMANFAATAN SUMBER DAYA DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL YANG TIDAK BERKONTRIBUSI



Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pada Unit Kerja Khusus (UKK) Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (PPM) UI tidak sesuai ketentuan, antara lain: (1) Realisasi belanja tahun 2022 dan 2023 pada UKK Indonesia Human Development (Hudev) tidak didukung dokumen pertanggungjawaban yang lengkap dan terdapat selisih kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada tahun 2023; (2) Pemberian bonus pegawai dan gaji ke-13 jasa produksi tahun 2022 kepada pegawai 3 UKK tidak sesuai ketentuan, yaitu bonus diberikan pada saat laporan keuangan UKK mengalami defisit dan terdapat pemberian bonus yang tidak ditetapkan melalui rapat tahunan, dan (3) Realisasi belanja untuk keperluan pribadi serta belanja pegawai berupa tunjangan kemahalan tahun 2022 tidak didukung dasar hukum dan rumusan yang jelas pada UKK Center for Computing and Information Technology (CCIT). Hal ini mengakibatkan: (1) Belanja tidak dapat diyakini kebenarannya sebesar Rp13,66 miliar serta indikasi kekurangan kas sebesar Rp737,06 juta; (2) Kelebihan pembayaran atas pemberian bonus pegawai dan gaji ke-13 jasa produksi tahun 2022 sebesar Rp1,97 miliar pada 3 UKK; dan (3) Kelebihan pembayaran realisasi belanja yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp369,07 juta pada UKK CCIT.

BPK merekomendasikan Rektor UI agar memerintahkan: (1) Kepala UKK Hudev untuk mempertanggungjawabkan indikasi kekurangan kas sebesar Rp737,06 juta dengan penyetoran ke kas UKK Hudev dan mempertanggungjawabkan realisasi belanja sebesar Rp13,66 miliar dengan melengkapi dokumen pertanggungjawaban sesuai ketentuan, apabila tidak dapat dipertanggungjawabkan agar disetorkan ke kas UKK Hudev; (2) Kepala UKK terkait untuk mempertanggungjawabkan pembayaran pemberian bonus pegawai dan gaji ke-13 jasa produksi yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1,97 miliar melalui penyetoran ke kas UKK terkait; dan (3) Kepala UKK CCIT untuk mengembalikan kelebihan pembayaran dan disetorkan ke kas UKK CCIT sebesar Rp369,07 juta.

Pendapatan kontrak kerja sama tridarma perguruan tinggi dialokasikan kepada pelaksana dan *institutional fee* atau kontribusi yang wajib diberikan dari setiap kontrak kepada rektorat dan fakultas/Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)/ Badan Pengelola Usaha (BPU), dengan besaran persentase telah ditetapkan dalam peraturan rektor. **Hasil pemeriksaan pada UB menunjukkan alokasi kontrak kerja sama tridarma perguruan tinggi yang diterima pelaksana pada 262 kontrak lebih tinggi dari ketentuan sehingga alokasi *institutional fee* menjadi lebih kecil dari yang seharusnya sebesar Rp3,72 miliar.** Selain itu, terdapat penerimaan kerja sama tridarma perguruan tinggi dengan pemerintah daerah yang tidak tercatat sebagai penerimaan UB dan belum dikenakan *institutional fee* sebesar Rp20,60 juta. Hal ini mengakibatkan kekurangan penerimaan *institutional fee* sebesar Rp3,74 miliar.

BPK merekomendasikan kepada Rektor UB agar menarik kekurangan *institutional fee* sebesar Rp3,74 miliar dan disetorkan ke rekening penerimaan PTN BH UB.

Perhitungan Insentif Berbasis Kinerja (IBK) pada UGM tidak sesuai ketentuan, yaitu terdapat pembayaran IBK kepada dosen dan tenaga kependidikan yang berstatus cuti, tidak aktif, melaksanakan tugas belajar, dan sedang menjalani hukuman disiplin; pembayaran Insentif Kinerja (IKA) tenaga kependidikan di Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) UGM Prof. Soedomo yang tidak sesuai dengan kelas jabatan yang seharusnya, serta pembayaran *gross up* pajak sebagai penambah penghasilan IBK kepada pegawai dengan penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran IBK dan IKA sebesar Rp2,02 miliar.

BPK merekomendasikan kepada Rektor UGM agar menarik kelebihan pembayaran pembayaran IBK dan IKA sebesar Rp2,02 miliar dari para pegawai UGM dan menyetorkan ke kas UGM.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan PTN BH mengungkapkan **95 temuan yang memuat**

169 permasalahan Meliputi **86 kelemahan SPI** **79 permasalahan Ketidakpatuhan** **4 permasalahan 3E sebesar Rp3,68 miliar.**

Selama proses pemeriksaan berlangsung, beberapa PTN BH telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara/PTN BH sebesar **Rp1,10 miliar**. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan PTN BH disajikan pada **Lampiran D.2**

Penguatan Infrastruktur

PADA semester II tahun 2023, BPK telah menyampaikan 1 LHP kepatuhan yang terkait dengan tema penguatan infrastruktur pada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)/PT SMI.

Pembiayaan Infrastruktur

PT SMI didirikan dengan tujuan untuk mendorong percepatan penyediaan pembiayaan infrastruktur dan mendorong percepatan pembiayaan pembangunan lainnya berdasarkan penugasan pemerintah. Pengelolaan pembiayaan infrastruktur PT SMI merupakan kegiatan mulai dari perencanaan, analisis, persetujuan, perjanjian, pencairan, penggunaan, pemantauan, penyelamatan dan penyelesaian, serta monitoring dan evaluasi pembiayaan pada bidang infrastruktur. Jenis pembiayaan pada PT SMI meliputi pembiayaan komersial, pembiayaan publik reguler maupun pembiayaan publik Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2020-2021 yang merupakan penugasan Pemerintah dhi. Kementerian Keuangan.

BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan DTT atas pengelolaan pembiayaan infrastruktur tahun 2020 sampai dengan semester I tahun 2022 pada PT SMI dan instansi terkait lainnya. Pemeriksaan ini dilaksanakan untuk mengawal pelaksanaan PP 1 – infrastruktur pelayanan dasar, serta PP – 2 infrastruktur ekonomi. Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan dalam upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-9, khususnya target 9.1 - mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.



Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan pembiayaan infrastruktur tahun 2020 s.d. semester I tahun 2022 telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian pada beberapa permasalahan. Permasalahan signifikan yang ditemukan berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban pembiayaan infrastruktur di antaranya sebagai berikut.

- Plafon pinjaman PEN Daerah tidak termanfaatkan sebesar Rp7,71 triliun. PT SMI sampai dengan tahun 2022 telah menyetujui pemberian pinjaman PEN Daerah dan dukungan PEN kepada 98 pemda sebesar Rp35,68 triliun dan telah dicairkan sebesar Rp27,97 triliun (78,39%), sehingga terdapat sisa plafon sebesar Rp7,71 triliun. Hal tersebut mengakibatkan PT SMI kehilangan potensi pendapatan berupa penerimaan biaya provisi sebesar Rp77,10 miliar (1% x Rp7,71 triliun).

BPK merekomendasikan Direktur Utama PT SMI untuk memberikan pembinaan kepada Kepala Divisi Pembiayaan Publik (DPPU) I dan Kepala DPPU III PT SMI atas kekurangoptimalannya dan untuk selanjutnya agar lebih optimal dalam melakukan analisis dan evaluasi pemberian fasilitas pinjaman PEN Daerah.

- PT SMI belum menganalisis pemberian pinjaman PEN Daerah secara memadai, seperti belum melakukan verifikasi perhitungan kesesuaian kebutuhan dana dalam KAK dengan kebutuhan sebenarnya pada 4 pemda, serta verifikasi kesesuaian nomenklatur kegiatan dalam KAK dengan DIPA dan RPJMD belum dilakukan. Selain itu, terdapat perjanjian pinjaman dengan 3 pemda tidak selaras dengan Peraturan menteri Keuangan (PMK) Pinjaman PEN Daerah, karena digunakan untuk penyertaan modal kepada BUMD, pengadaan tanah, bantuan keuangan dan bantuan langsung kepada pemkab/pemkot. Selain itu, terdapat pemberian pinjaman untuk peningkatan infrastruktur jalan yang bukan kewenangan pemprov. Akibatnya, tujuan pembiayaan pinjaman PEN Daerah sesuai PMK Nomor 105/PMK.07/2020 dan PMK nomor 43/PMK.07/2021 tidak tercapai, serta dana pinjaman PEN Daerah minimal senilai Rp74,11 miliar dipergunakan tidak sesuai dengan perjanjian pembiayaan.

BPK merekomendasikan kepada Direktur Utama PT SMI untuk memberikan pembinaan kepada: (1) Kepala DPPU I dan Kepala DPPU III agar lebih cermat dalam melakukan analisis dan evaluasi pemberian fasilitas pinjaman PEN Daerah dan memonitor penggunaan dana pinjaman; dan (2) Kepala Divisi Hukum PT SMI agar lebih cermat dalam menyetujui persyaratan keputusan gubernur terkait kewenangan pengelolaan jalan provinsi.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan pembiayaan infrastruktur mengungkapkan 19 temuan yang memuat 24 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 19 kelemahan SPI dan 5 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp15,68 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan pengelolaan pembiayaan infrastruktur disajikan pada *Lampiran D.2*.

Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli

PADA semester II tahun 2023, BPK telah melaksanakan pemeriksaan investigatif pada BUMN atas permintaan penegak hukum. Jumlah LHP investigatif yang diterbitkan sebanyak 1 LHP dengan nilai indikasi kerugian negara sebesar Rp924,96 miliar. LHP investigatif tersebut, telah disampaikan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.

Sementara itu, BPK telah menyelesaikan dan menerbitkan 6 laporan hasil Penghitungan Kerugian Negara (PKN) pada BUMN berdasarkan permintaan instansi yang berwenang dalam rangka penanganan kasus tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara sebesar Rp1,90 triliun.

Sebagai tindak lanjut dari PKN, BPK juga telah memberikan keterangan ahli di lingkungan BUMN sebanyak 4 kali pada 3 kasus di tahap penyidikan serta 10 kali pada 5 kasus di tahap persidangan tindak pidana korupsi.

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BUMN dan Badan Lainnya

SECARA keseluruhan, hasil pemeriksaan atas 22 objek pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya mengungkapkan 301 temuan yang memuat 515 permasalahan sebesar Rp3,62 triliun. Permasalahan tersebut meliputi 255 kelemahan SPI, 215 permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp3,52 triliun, dan 45 permasalahan 3E sebesar Rp102,21 miliar. Selama proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/perusahaan sebesar Rp2,65 miliar. Hasil pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya disajikan pada *Tabel 3.1*.

**Tabel 3.1 Hasil Pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya
(nilai dalam Rp juta)**

Uraian	Hasil Pemeriksaan Kinerja		Hasil Pemeriksaan DTT *		Total	
	Perma- salahan	Nilai	Perma- salahan	Nilai	Perma- salahan	Nilai
A. Kelemahan SPI	-	-	255	-	255	--
• Kelemahan SPI	-	-	255	-	255	-
B. Ketidapatuhan	1	20.466,36	214	3.497.913,71	215	3.518.380,07
• Ketidapatuhan yang dapat mengakibatkan:						
▶ Kerugian	-	-	78	485.992,42	78	485.992,42
▶ Potensi Kerugian	-	-	26	679.818,01	26	679.818,01
▶ Kekurangan Penerimaan	1	20.466,36	45	2.332.103,28	46	2.352.569,64
Subtotal	1	20.466,36	149	3.497.913,71	150	3.518.380,07
• Penyimpangan administrasi	-	-	65	-	65	-
C. Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan	11	-	34	102.214,70	45	102.214,70
• Ketidakhematan	-	-	24	90.594,70	24	90.594,70
• Ketidakefisienan	-	-	-	-	-	-
• Ketidakefektifan	11	-	10	11.620,00	21	11.620,00
Total (A+B+C)	12	20.466,36	503	3.600.128,41	515	3.620.594,77
Nilai penyerahan aset/ penyetoran ke kas negara/ daerah/perusahaan		-		2.650,37		2.650,37
Jumlah Temuan		8		293		301
Jumlah Rekomendasi		27		790		817
Jumlah LHP		1		21		22

Keterangan :

*Jumlah tersebut tidak termasuk hasil PI, PKN, dan PKA.



**IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER II TAHUN 2023**



BAB IV

Hasil Pemeriksaan Prioritas Nasional Pengembangan Wilayah dan Revolusi Mental & Pembangunan Kebudayaan

HPS II Tahun 2023 memuat hasil pemeriksaan atas prioritas nasional mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (selanjutnya disebut Pengembangan Wilayah) dan Revolusi Mental & Pembangunan Kebudayaan pada 190 objek pemeriksaan (obrik) yang terdiri atas 19 obrik pemerintah pusat, 144 obrik pemerintah daerah (pemda), dan 27 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pemeriksaan tersebut meliputi 147 obrik kinerja dan 43 obrik dengan tujuan tertentu (DTT)-kepatuhan.

Daftar LHP prioritas nasional Pengembangan Wilayah dan Revolusi Mental & Pembangunan Kebudayaan dapat dilihat pada *Lampiran A.4*.

Pelaksanaan pembangunan nasional mengalami tekanan sejak meluasnya penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Indonesia pada bulan Maret tahun 2020. Pemerintah Indonesia terus merespons dinamika pandemi COVID-19 dengan berbagai kebijakan pengendalian yang dilakukan secara komprehensif. Berbagai kebijakan tersebut ditujukan untuk melindungi kehidupan dan penghidupan masyarakat dari dampak pandemi COVID-19. Kebijakan pengendalian COVID-19 juga ditujukan untuk memastikan proses pemulihan ekonomi berjalan secara inklusif dan berkelanjutan sesuai koridor pembangunan jangka menengah.

Sebagai upaya melanjutkan estafet pembangunan, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 mengusung tema “**Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**”. Penetapan tema tersebut mempertimbangkan hasil evaluasi pembangunan tahun 2021, kebijakan pembangunan tahun 2022, serta hasil forum konsultasi publik dan kerangka ekonomi makro. Penetapan tema tersebut juga mempertimbangkan isu strategis dan dinamika pandemi COVID-19, serta konsistensi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Tema pembangunan tersebut menekankan pentingnya **peningkatan produktivitas melalui**: (1) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan; (2) mendorong pemulihan dunia usaha; (3) pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN); serta (4) peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas. **Upaya transformasi ekonomi yang inklusif dilakukan melalui**: (1) percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; (2) peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan; dan (3) penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang antara lain meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Selanjutnya, arah **pembangunan berkelanjutan difokuskan** untuk dapat mendorong pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan perubahan iklim. Hal tersebut dilaksanakan dalam koridor pengembangan wilayah dan desa.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 selanjutnya dituangkan ke dalam 7 Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2023, yang merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2023 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini juga ditujukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

Untuk mengukur keberhasilan atas RKP Tahun 2023, pemerintah menetapkan indikator keberhasilan dengan realisasi sebagaimana disajikan pada *Gambar 4.1*.

Pencapaian atas indikator sasaran tahun 2023 tersebut dilakukan melalui pelaksanaan 7 prioritas nasional yaitu: 1) Penguatan Ketahanan Ekonomi (PN1); 2) Pengembangan Wilayah (PN2); 3) Pembangunan SDM (PN3); 4) revolusi mental & pembangunan kebudayaan (PN4); 5) Penguatan Infrastruktur (PN5); 6) Pembangunan Lingkungan Hidup (PN6); serta 7) Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7).

GAMBAR 4.1

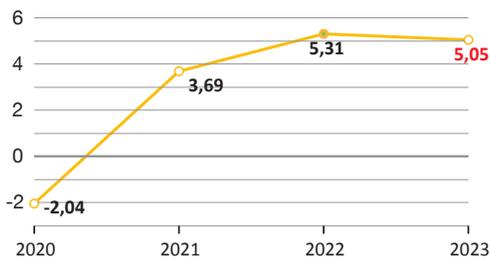
SASARAN, INDIKATOR, DAN TARGET SERTA REALISASI PEMBANGUNAN TAHUN 2020-2023

Sasaran dan target pembangunan nasional pada RKP Tahun 2023 difokuskan pada 3 agenda utama yaitu: **(1) peningkatan produktivitas dengan indikator** (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, (d) nilai tukar petani, dan (e) nilai tukar nelayan; **(2) penguatan pemulihan sosial dan ekonomi yang inklusif dengan indikator** (a) indeks pembangunan manusia dan (b) tingkat kemiskinan; serta **(3) pembangunan yang berkelanjutan** dengan indikator berupa penurunan emisi gas rumah kaca/GRK. Capaian indikator sasaran tahun 2023 sebagai berikut.

Peningkatan Produktivitas.

A. Pertumbuhan ekonomi (%)

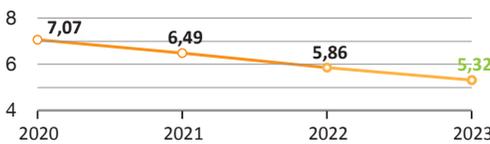
Target 2023: 5,3 – 5,9



Pertama: peningkatan produktivitas. Pada tahun 2023, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,05% lebih rendah dibanding capaian tahun 2022 sebesar 5,31%, di bawah target sebesar 5,3-5,9%. Meskipun sedikit melambat dari pertumbuhan tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dikatakan tetap kuat di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat tersebut didukung oleh permintaan domestik yang solid, di mana konsumsi rumah tangga tumbuh, seiring dengan kenaikan mobilitas yang terus berlanjut, daya beli masyarakat yang stabil, serta keyakinan konsumen yang masih tinggi. Sementara itu, meski ekspor secara keseluruhan berkontraksi akibat turunnya ekspor barang sejalan dengan perlambatan ekonomi global, ekspor jasa tetap tumbuh kuat didukung kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara.

B. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

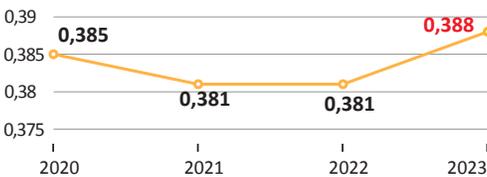
Target 2023: 5,3 – 6,0



Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) Agustus 2023 adalah sebesar 5,32%, sesuai range target yang ditetapkan yaitu sebesar 5,3%-6,0%. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu menyerap tenaga kerja yang merupakan sinyal positif pemulihan kondisi perekonomian di Indonesia. Dari sisi pemerataan, Rasio Gini pada Maret 2023 adalah sebesar 0,388, lebih tinggi dari tahun 2022 dan dari target sebesar 0,375 - 0,385. Walaupun belum ada perbaikan dibanding tahun lalu, hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dirasakan dampaknya secara merata oleh masyarakat.

C. Rasio Gini

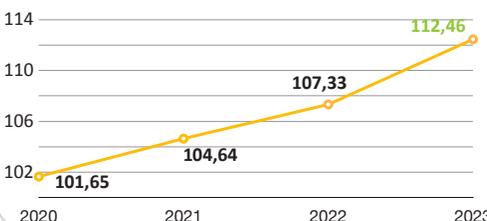
Target 2023: 0,375 - 0,385



Selain indikator-indikator tersebut, terdapat Indikator nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar nelayan (NTN). Indeks tersebut merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani dan nelayan. NTP dan NTN juga menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk pertanian/perikanan dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Sehingga nilai tukar adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani/nelayan (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani/nelayan (Ib). Secara nasional NTP Januari–Desember 2023 sebesar 112,46 lebih tinggi dari NPT tahun 2022 sebesar 107,33. Sedangkan NTN tahun 2023 adalah sebesar 105,40, lebih rendah dari NTN tahun 2022 sebesar 106,45.

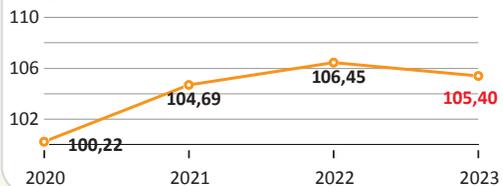
D. Nilai Tukar Petani (nilai)

Target 2023: 105 - 107



E. Nilai Tukar Nelayan (nilai)

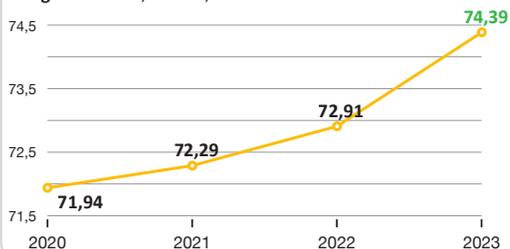
Target 2023: 107 – 108



Penguatan Pemulihan Sosial dan Ekonomi yang Inklusif

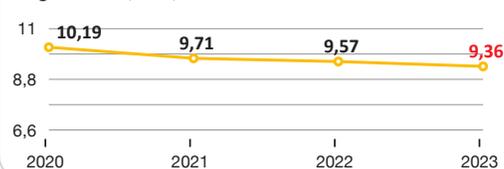
A. Indeks Pembangunan Manusia (%)

Target 2023: 73,31 – 73,49



B. Tingkat Kemiskinan (%)

Target 2023: 7,5 – 8,5



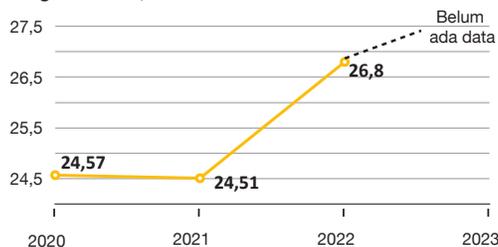
Kedua: penguatan pemulihan sosial dan ekonomi yang inklusif. Pada tahun 2023, indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia mencapai 74,39, meningkat dibandingkan capaian tahun 2022 sebesar 72,91. Peningkatan IPM 2023 terjadi pada semua dimensi, terutama pada panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Pertumbuhan IPM 2023 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya.

Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 9,36%, lebih rendah dibanding tingkat kemiskinan pada September 2022 (9,57%). Dari sisi jumlah, jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta orang, menurun 0,46 juta orang terhadap September 2022 dan menurun 0,26 juta orang terhadap Maret 2022. Penurunan jumlah kemiskinan tersebut menunjukkan kinerja perekonomian yang baik karena Garis Kemiskinan pada Maret 2023 meningkat dibanding pada September 2022. Garis Kemiskinan pada Maret 2023 tercatat sebesar Rp550.458,00/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp408.522,00 (74,21%) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp141.936,00 (25,79%).

Pembangunan yang Berkelanjutan

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%) Menuju target 29% di Tahun 2030

Target 2023: 27,02



Ketiga: pembangunan yang berkelanjutan. Proses pemulihan aktivitas ekonomi dan sosial di tahun 2023 diproyeksikan berdampak pada meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK) di tahun tersebut. Namun, dengan semakin luasnya upaya penerapan pembangunan rendah karbon sebagai tulang punggung ekonomi hijau, penurunan emisi GRK diproyeksikan dapat menguat dari 26,80% pada tahun 2022 menjadi 27,02 pada tahun 2023. Beberapa penguatan aksi pembangunan rendah karbon dilakukan melalui upaya aksi restorasi gambut dan reforestasi, serta perluasan penerapan energi terbarukan. Sampai dengan IHPS ini diterbitkan, data capaian penurunan emisi GRK tahun 2023 belum tersedia.

Sesuai dengan Renstra BPK Tahun 2020-2024 serta dengan memperhatikan isu strategis yang perlu mendapat perhatian (pandemi COVID-19), pada tahun 2020 BPK memprioritaskan pemeriksaan atas Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang hasilnya telah dilaporkan pada IHPS II Tahun 2020. Selanjutnya, pada tahun 2021 dan 2022 BPK melakukan pemeriksaan prioritas nasional Penguatan Ketahanan Ekonomi (PN1), Pembangunan SDM (PN3), Penguatan Infrastruktur (PN5), dan Penguatan Stabilitas Polhukhankam & Transformasi Pelayanan Publik (PN7) yang hasilnya telah dilaporkan pada IHPS II Tahun 2021 dan 2022. Dan pada tahun 2023, BPK melakukan pemeriksaan prioritas nasional Pengembangan Wilayah (PN2) dan Revolusi Mental & Pembangunan Kebudayaan (PN4) yang hasilnya dilaporkan di Bab IV pada IHPS II Tahun 2023 ini. Sementara itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pemeriksaan atas prioritas nasional, pada tahun 2023 ini BPK juga melakukan pemeriksaan atas prioritas nasional lainnya (selain PN2 dan PN4) yang hasilnya dilaporkan di Bab I, II, dan III pada IHPS II 2023.

Hasil pemeriksaan atas 2 prioritas nasional yaitu Pengembangan Wilayah dan Revolusi Mental & Pembangunan Kebudayaan sebagai berikut.

Pengembangan Wilayah

KEBIJAKAN pembangunan wilayah pada RKP Tahun 2023 diarahkan untuk (1) menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa, (2) mempercepat pemulihan dampak pandemi COVID-19, (3) melanjutkan transformasi sosial ekonomi, (4) mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan (5) meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah.

Pada tahun 2023 keberhasilan prioritas nasional pengembangan wilayah diukur pada 2 sasaran yaitu: (1) meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KTI, (b) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di KTI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KTI; dan (2) terjaganya

pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan PDRB KBI, (b) IPM di KBI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KBI.

Pencapaian sasaran prioritas nasional pengembangan wilayah dilakukan melalui 7 Program Prioritas (PP). BPK melaksanakan pemeriksaan tematik di tahun 2023 pada 7 PP dan 5 KP yang difokuskan pada pemeriksaan-pemeriksaan yang disajikan pada *Gambar 4.2*.

Hasil Pemeriksaan

PADA semester II tahun 2023, BPK memeriksa prioritas nasional Pengembangan Wilayah mencakup PP: (1) Pembangunan Wilayah Sumatera; (2) Pembangunan Wilayah Jawa-Bali; (3) Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara; (4) Pembangunan Wilayah Kalimantan; (5) Pembangunan Wilayah Sulawesi; (6) Pembangunan Wilayah Maluku; dan (7) Pembangunan Wilayah Papua. Fokus kegiatan prioritas (KP) yang diperiksa meliputi (1) Pengembangan Kawasan Strategis; (2) Pengembangan Sektor Unggulan; (3) Pengembangan Kawasan Perkotaan; (4) Pengembangan Daerah Tertinggal, Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi; dan (5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah.

Pemeriksaan prioritas nasional pengembangan wilayah dilakukan pada 158 obrik pada 10 pemerintah pusat, dan 121 pemda, dan 27 BUMD. Pemeriksaan meliputi 117 obrik kinerja dan 41 obrik DTT-kepatuhan.

Tujuan dan simpulan hasil pemeriksaan menurut obrik atas prioritas nasional Pengembangan Wilayah disajikan pada *Lampiran 5.1* pada *flash disk*.

Hasil pemeriksaan atas prioritas nasional pengembangan wilayah mengungkapkan 1.689 temuan yang memuat 2.209 permasalahan sebesar Rp1,47 triliun. Permasalahan tersebut meliputi 517 kelemahan SPI, 394 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (selanjutnya disebut ketidakpatuhan) sebesar Rp1,23 triliun dan 1.298 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (3E) sebesar Rp236,63 miliar. Pada saat pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau

GAMBAR 4.2

FOKUS PEMERIKSAAN ATAS PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN WILAYAH TAHUN 2023



KP1
Pengembangan Kawasan Strategis



KP2
Pengembangan Sektor Unggulan



KP3
Pengembangan Kawasan Perkotaan



KP4
Pengembangan Daerah Tertinggal, Perbatasan, Perdesaan & Transmigrasi



KP5
Kelembagaan dan Keuangan Daerah

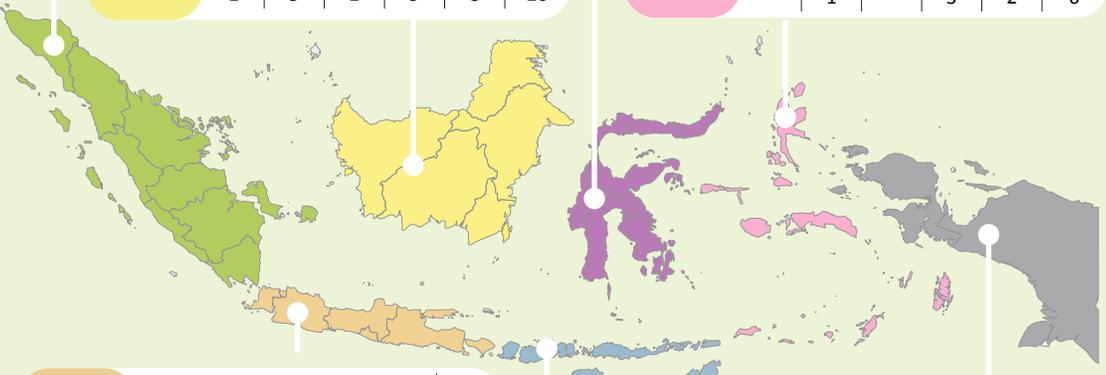
Total PP1-PP5	Jumlah Obrik					Total
	KP1	KP2	KP3	KP4	KP5	
	11	22	7	49	69	158

Wilayah Sumatera (PP1)	Jumlah Obrik					Total
	KP1	KP2	KP3	KP4	KP5	
	2	7	2	10	20	41

Wilayah Sulawesi (PP5)	Jumlah Obrik					Total
	KP1	KP2	KP3	KP4	KP5	
	1	5	1	10	11	28

Wilayah Kalimantan (PP4)	Jumlah Obrik					Total
	KP1	KP2	KP3	KP4	KP5	
	2	5	2	9	8	26

Wilayah Maluku (PP6)	Jumlah Obrik					Total
	KP1	KP2	KP3	KP4	KP5	
	-	1	-	3	2	6



Wilayah Jawa - Bali (PP2)	Jumlah Obrik					Total
	KP1	KP2	KP3	KP4	KP5	
	6	2	2	10	15	35

Wilayah Papua (PP7)	Jumlah Obrik					Total
	KP1	KP2	KP3	KP4	KP5	
	-	1	-	2	8	11

Wilayah Nusa Tenggara (PP3)	Jumlah Obrik					Total
	KP1	KP2	KP3	KP4	KP5	
	-	1	-	5	5	11

penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp19,47 miliar. Perincian selengkapnya disajikan pada *Gambar 4.3*.

Sementara itu, rekapitulasi hasil pemeriksaan prioritas nasional Pengembangan Wilayah menurut cakupan dan jenis pemeriksaan disajikan pada *Lampiran E.1* dan *Lampiran 5.2* pada *flash disk*.

Berikut ini hasil pemeriksaan atas prioritas pengembangan wilayah pada pemerintah pusat, pemda, dan BUMD.

Pengembangan Kawasan Strategis

PENGEMBANGAN kawasan strategis meliputi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), dan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP). Fokus pemeriksaan BPK mencakup pengembangan KEK yang merupakan kawasan dengan batas tertentu yang tercakup dalam daerah atau wilayah untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional. Pada dasarnya KEK dibentuk untuk membuat lingkungan kondusif bagi aktivitas investasi, ekspor, dan perdagangan guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi serta sebagai katalis reformasi ekonomi. KEK diharapkan mampu menarik para investor, terutama investor asing untuk berinvestasi dan menciptakan lapangan kerja.

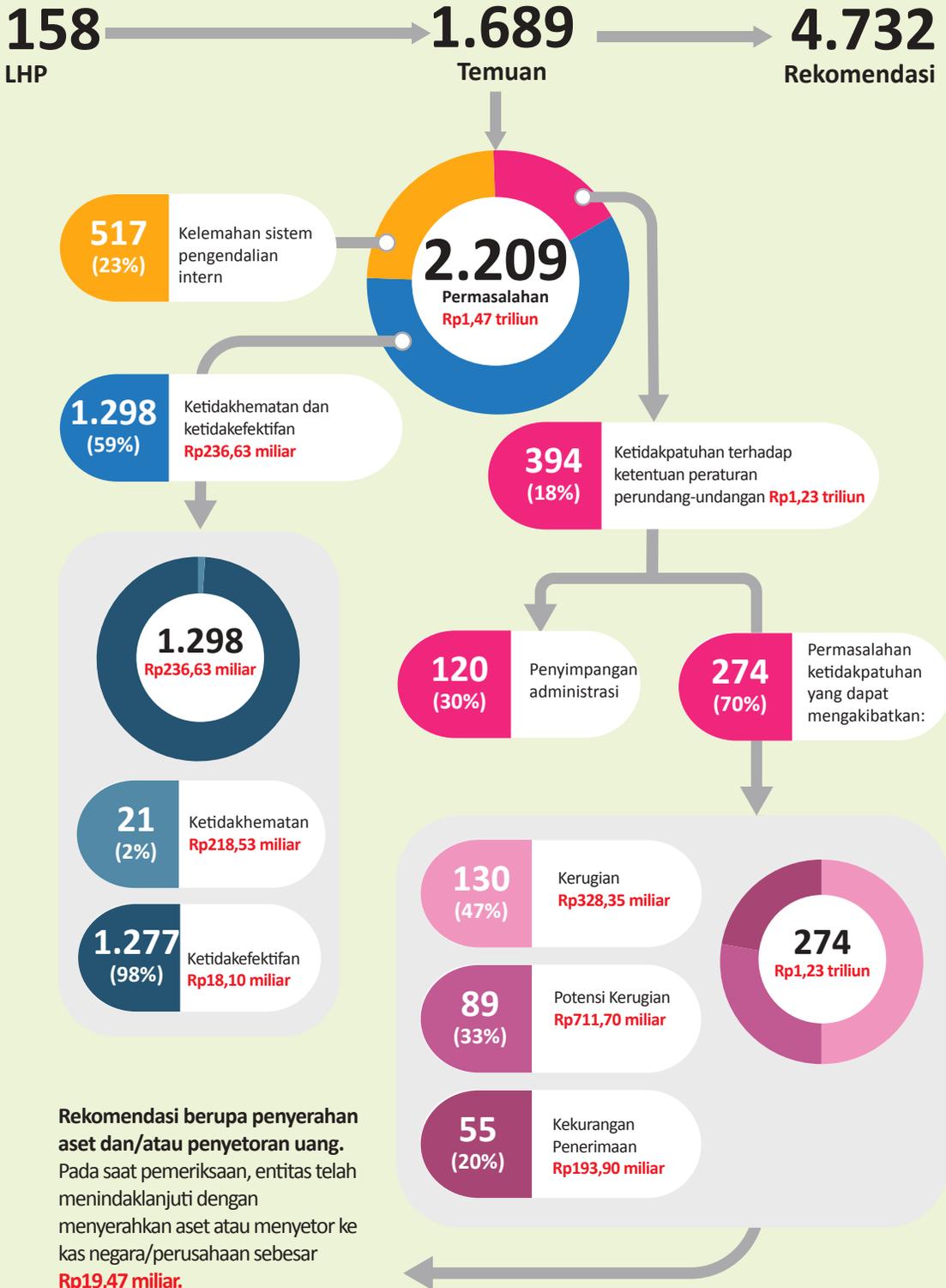
Hal tersebut juga sejalan dengan upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan ke-10 terutama target 10.1 pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.



Untuk mendorong pelaksanaan agenda pembangunan nasional tersebut, BPK melakukan pemeriksaan meliputi: 1) 2 obrik pemerintah pusat, yaitu 1 obrik DTT kepatuhan atas penyelenggaraan KEK pada Dewan Nasional KEK dan Kemenko Bidang Perekonomian dan 1 obrik kinerja atas efektivitas penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS), serta 2) 9 obrik pemerintah daerah yaitu pemeriksaan kinerja atas pengembangan KEK (1) Sei Mangkei (Provinsi

GAMBAR 4.3

RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS PENGEMBANGAN WILAYAH



HASIL PEMERIKSAAN PENGEMBANGAN WILAYAH

(Nilai dalam Rp Juta)

PEMERINTAH	JENIS PEMERIKSAAN	Permasalahan Kelemahan SPI	Permasalahan Ketidapatuhan	Permasalahan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan	Penyetoran uang/ Penyerahan Aset Selama Proses Pemeriksaan
		Jumlah	Jumlah Nilai	Jumlah Nilai	Nilai
1. PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS (KP1)					
Pemerintah pusat	Kinerja	-	-	<u>11</u>	-
	DTT	<u>8</u>	<u>5</u> 183,80	-	-
Pemerintah daerah	Kinerja	-	-	<u>96</u>	-
2. PENGEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN (KP2)					
Pemerintah pusat	DTT	<u>6</u>	<u>13</u> 2.111,70	<u>3</u> 13.298,13	930,89
Pemerintah daerah	Kinerja	-	-	<u>269</u>	-
3. PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN (KP3)					
Pemerintah pusat	Kinerja	-	-	<u>14</u>	-
Pemerintah daerah	Kinerja	-	-	<u>65</u>	-
4. PENGEMBANGAN DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, PERDESAAN DAN TRANSMIGRASI (KP4)					
Pemerintah pusat	Kinerja	-	-	<u>20</u>	-
Pemerintah daerah	Kinerja	-	-	<u>472</u>	-
5. KELEMBAGAAN DAN KEUANGAN DAERAH (KP5)					
Pemerintah pusat	Kinerja	-	-	<u>30</u>	-
Pemerintah daerah	Kinerja	<u>1</u>	<u>6</u> 35.021,92	<u>295</u>	-
	DTT	<u>140</u>	<u>141</u> 39.088,72	<u>12</u> 13.791,41	5.407,48
BUMD	DTT	<u>362</u>	<u>229</u> 1.157.565,60	<u>11</u> 209.548,92	13.132,08
TOTAL		517	394 1.233.971,74	1.298 236.638,46	19.470,45



Sumatera Utara & Kabupaten Simalungun); (2) Kendal (Provinsi Jawa Tengah); (3) Singhasari (Provinsi Jawa Timur); (4) Tanjung Lesung (Provinsi Banten & Kabupaten Pandeglang); (5) Maloy Batuta Trans Kalimantan/MBTK (Provinsi Kalimantan Timur & Kabupaten Kutai Timur); dan (6) Bitung (Provinsi Sulawesi Utara).

Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka pengembangan kawasan strategis pada KEK antara lain:

- BPKS telah mengidentifikasi potensi kawasan Sabang dalam rangka pengembangan kawasan, serta kelemahan dan hambatan atas pelaksanaan pengembangan potensi kawasan Sabang dalam rangka menarik calon investor.
- Perencanaan Kawasan Ekonomi Khusus
 - ▶ Pemprov Sumatera Utara telah menyediakan sarana prasarana KEK melalui pengelolaan sumber daya air, penyediaan perlengkapan jalan provinsi, meningkatkan sarpras dan utilitas umum (PSU), melaksanakan *feasibility study* pembangunan rusunawa terintegrasi, melaksanakan latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi dan mengawasi ketenagakerjaan, menetapkan kebijakan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal, serta menyusun rencana umum penanaman modal daerah provinsi.
 - ▶ Pemprov Sulawesi Utara telah melaksanakan koordinasi pelaksanaan program *Low Carbon Model Town (LCMT)*, mengkaji dan menyusun peta potensi investasi, memfasilitasi kerja sama investasi penanaman modal, menetapkan kebijakan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal, menyediakan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem, serta menetapkan kebijakan penataan ruang.
- Kelembagaan Kawasan Ekonomi Khusus
 - ▶ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pandeglang telah menggunakan Online Submission System (OSS) dan telah menggunakan OSS Risk Based Approach (RBA) sejak tahun 2021. Administrator KEK mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati Pandeglang, Gubernur Banten, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan dari Menteri Perdagangan. DPMPTSP telah menggunakan akun

administrator KEK Tanjung Lesung untuk pengurusan perizinan atas pelaku usaha di wilayah KEK Tanjung Lesung, dan akun DPMPSTSP di luar wilayah KEK Tanjung Lesung.

- ▶ Administrator KEK Sei Mangkei telah menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha melalui aplikasi OSS, perizinan lainnya berupa ekspor dan impor melalui aplikasi Sistem Indonesia National Single Window (SINSW), dan pelayanan nonperizinan secara manual.
- Dukungan Sarpras dan Fasilitas Kawasan Ekonomi Khusus
 - ▶ Pemprov Sumatera Utara dan Badan Usaha Pembangunan dan Pengelola (BUPP) KEK Sei Mangkei telah melakukan promosi penyelenggaraan KEK dalam kegiatan *North Sumatera Investment (NSI)*; serta administrator KEK Sei Mangkei telah memberikan fasilitas dan kemudahan perizinan melalui sistem OSS dan SINSW.
 - ▶ Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Timur telah menyediakan dukungan sarpras dan fasilitas kemudahan, antara lain gedung perkantoran dan lahan seluas 509 Ha, jalan dalam kawasan, insentif dan kemudahan baik di tingkat pusat maupun Provinsi Kaltim telah ditetapkan sesuai kewenangannya, serta telah melakukan promosi.
 - ▶ Pemprov Sulawesi Utara telah memfasilitasi kemudahan bagi tenaga kerja asing (TKA) dalam penyelenggaraan KEK Bitung.
- Dampak Limpahan
 - ▶ Pemprov Jawa Tengah dan Pemkab Kendal telah mengupayakan pemenuhan fasilitas dan kemudahan ketenagakerjaan dalam penyelenggaraan KEK antara lain Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan PT Kawasan Industri Kendal/KIK selaku BUPP dan pelaku usaha di KEK melalui Kesepakatan Bersama tentang kerja sama keterpautan dan kesepadanan (*link and match*) kompetensi vokasi di Jawa Tengah.
 - ▶ Pemprov Jawa Timur dan BUPP KEK Singhasari telah melibatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam penyelenggaraan KEK; Pemprov Jawa Timur, Pemkab Malang, dan BUPP telah berkoordinasi dalam fasilitasi kebutuhan tenaga kerja dari masyarakat sekitar KEK dalam penyelenggaraan KEK, serta telah berkoordinasi dalam fasilitasi kerja sama antara pelaku usaha/UMKM dan investor dalam penyelenggaraan KEK.

Selain itu, hasil pemeriksaan mengungkapkan 108 temuan yang memuat permasalahan antara lain:

Pemerintah Pusat

- **Badan Pengusahaan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Sabang**
 - ▶ Dokumen perencanaan dalam penyelenggaraan KPBPB Sabang belum memadai. Permasalahannya antara lain dokumen perencanaan dalam penyelenggaraan KPBPB belum selaras dengan RPJMN. Perencanaan indikator capaian KPBPB Sabang dalam RPJMN tidak sepenuhnya tercermin dalam Renstra 2020-2024. RPJMN telah merencanakan tiga kegiatan proyek prioritas nasional pada BPKS, yaitu pembangunan Pelabuhan Nasional Balohan, penyelenggaraan pembangunan Jembatan Penghubung Aroih Lampuyang untuk mendukung kemudahan berusaha, dan pengembangan diversifikasi dan intensifikasi pendapatan sektor kepelabuhanan, namun pada arah dan kebijakan BPKS pada Renstra 2020-2024 hanya menyebutkan dua kegiatan strategis yang akan dilaksanakan, yaitu pembangunan jalan dan jembatan Aroih Lampuyang, dan peningkatan diversifikasi dan intensifikasi kepelabuhanan. Selain itu, indikator kinerja utama belum selaras dalam setiap dokumen perencanaan dimana terdapat ketidaksinkronan rencana strategi bisnis (RSB) dan Renstra karena penyusunan RSB masih mengacu pada draft Renstra 2020-2024. Akibatnya, dokumen perencanaan yang telah disusun oleh BPKS belum menggambarkan potensi Kawasan Sabang secara komprehensif dan sistematis serta ukuran keberhasilan atas perencanaan pengembangan Kawasan Sabang oleh BPKS belum dapat dinilai.
 - ▶ Ketersediaan sarana prasarana belum mendukung penyelenggaraan KPBPB Sabang, di antaranya perencanaan pemanfaatan sarana prasarana untuk mendukung penyelenggaraan KPBPB Sabang belum memadai. Pembangunan berbagai sarana dan prasarana yang telah direncanakan dalam Renstra 2020-2024 mengalami berbagai perubahan, antara lain karena perubahan kebijakan pimpinan dan perubahan kebijakan penganggaran oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Adanya kendala tersebut membuat BPKS melakukan penyesuaian dengan mengurangi alokasi anggaran pada seluruh pembangunan sarana dan prasarana, sehingga berpengaruh atas pembangunan yang sedang dalam proses. Selain itu, BPKS

belum pernah melakukan *feasibility study* atas seluruh obyek pembangunan sarana dan prasarana yang telah dibangun di Kawasan Sabang.

- ▶ Pengelolaan perizinan di KPBPB Sabang belum dilaksanakan oleh unit pelaksana pelayanan yang merupakan perwakilan dari instansi Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemkot Sabang dan Pemkab Aceh Besar sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 83 Tahun 2010. Selain itu, penerbitan perizinan berusaha di KPBPB Sabang tidak dilaksanakan seluruhnya oleh Kepala BPKS. Akibatnya, tugas dan fungsi kewenangan BPKS khususnya dalam mengelola perizinan di KPBPB Sabang tidak optimal, dan pelaku usaha di wilayah KPBPB Sabang belum memperoleh proses perizinan yang efisien.
- Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian
 - ▶ Dewan Nasional KEK belum menetapkan standar pengelolaan KEK yang mengatur antara lain standar infrastruktur dan kesiapan beroperasi. Hal tersebut mengakibatkan kesiapan beroperasi KEK tidak dapat diukur dan dievaluasi.
 - ▶ Belum seluruh Dewan Kawasan dan Administrator menyampaikan laporan pengelolaan KEK kepada Dewan Nasional KEK secara periodik dan belum terdapat standar pelaporan dan pengelolaan KEK. Hal tersebut mengakibatkan Dewan Nasional KEK tidak dapat melakukan penilaian atau pengukuran dalam pengambilan keputusan strategis atas pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan KEK secara reguler.
 - ▶ Hasil evaluasi Dewan Nasional menunjukkan terdapat enam KEK yang memiliki kinerja tidak optimal yaitu KEK Palu, KEK Morotai, KEK Bitung, KEK MBTK, KEK Likupang, dan KEK Sorong. Hambatan dalam pengembangan dan pengelolaan KEK dengan kinerja tidak optimal tersebut terus berulang dan belum terselesaikan. Hal tersebut mengakibatkan tidak meningkatnya status KEK dengan kinerja tidak optimal.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada:

- Dewan Kawasan Strategis (DKS) antara lain agar:
 - ▶ Memberikan perintah/persetujuan kepada BPKS untuk melaksanakan kewenangan di bidang perizinan dan kewenangan lainnya sesuai Undang-Undang (UU) Pemerintahan Aceh.

- ▶ Bersama BPKS agar membentuk unit pelaksana gabungan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang merupakan perwakilan dari instansi Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kota Sabang dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
- Kepala BPKS antara lain agar:
 - ▶ Menginstruksikan Deputi Teknik Pengembangan dan Tata Ruang melakukan reviu penyempurnaan Master Plan dan Business Plan 2021-2041 untuk diselaraskan dengan dokumen perencanaan lainnya, serta dilakukan pemutakhiran terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala BPKS.
 - ▶ Menginstruksikan masing-masing kedeputian berkoordinasi untuk menyusun perencanaan pemenuhan sarana dan prasarana jangka panjang dan jangka menengah yang berkelanjutan dan menyusun perencanaan pembangunan aset milik BPKS dilengkapi dengan *feasibility study* yang memadai.
- Dewan Kota Sabang agar memberikan perintah/persetujuan kepada BPKS untuk melaksanakan kewenangan di bidang perizinan dan kewenangan lainnya sesuai Undang-Undang Pemerintahan Aceh.
- Menko Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional KEK agar memerintahkan Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK untuk:
 - ▶ Segera menyusun standar pengelolaan KEK untuk kemudian ditetapkan oleh Dewan Nasional KEK.
 - ▶ Lebih proaktif dalam melakukan monitoring atas pemenuhan laporan pengelolaan KEK oleh Dewan Kawasan dan laporan pengawasan dan pengendalian operasionalisasi KEK oleh Administrator serta segera menyusun standar pelaporan pengelolaan KEK untuk Dewan Kawasan dan Administrator KEK.
 - ▶ Lebih optimal dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara khusus pada KEK dengan kinerja tidak optimal.

Pemerintah Daerah

- Kelembagaan KEK
 - ▶ Struktur organisasi Sekretariat Dewan Kawasan tidak sesuai dengan ketentuan dan belum didukung tata kerja yang jelas, serta Dewan

Kawasan belum menetapkan langkah strategis penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan KEK dan belum melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam kelembagaan KEK. Kondisi tersebut mengakibatkan Dewan Kawasan tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal guna membantu Dewan Nasional dalam penyelesaian permasalahan strategis sehingga berpotensi menghambat perkembangan investasi di KEK.

- ▶ BUPP KEK Bitung dan KEK MBTK belum melakukan kewajibannya terkait dengan penyelenggaraan KEK, yaitu belum merealisasikan pencapaian target, belum membangun dan mengembangkan prasarana dan sarana, belum menyelenggarakan pengelolaan pelayanan prasarana dan sarana, belum menyelenggarakan promosi, dan belum didukung dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Kondisi tersebut mengakibatkan pengelolaan KEK oleh BUPP belum optimal sehingga upaya untuk menciptakan iklim investasi yang baik belum tercapai dan memengaruhi minat calon investor untuk berinvestasi.
- ▶ Administrator KEK Kendal dan KEK Singhasari tidak memiliki akses OSS dan belum berkoordinasi dengan Dewan Nasional dalam memproses sistem yang terintegrasi terkait penerbitan Nomor Pendaftaran Barang (NPB). Akibatnya, pelayanan perizinan berusaha, nonperizinan, dan perizinan lainnya kepada BUPP dan pelaku usaha belum maksimal.
- Sarana Prasarana Infrastruktur dan Insentif Fiskal. Pemda belum menyediakan sistem penyediaan air bersih/air minum yaitu pada KEK Tanjung Lesung, sarana prasarana jalan di dalam dan/atau luar kawasan pada KEK Bitung dan KEK Sei Mangkei, penyediaan tempat pengolahan akhir (TPA) dan instalasi pengolahan air limbah (ipal) pada KEK Sei Mangkei, KEK Tanjung Lesung, dan KEK MBTK. Pemda juga belum menetapkan Perda dan/atau Perkada terkait dengan insentif berupa pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak daerah dan/atau retribusi daerah dalam penyelenggaraan KEK Kendal, KEK Sei Mangkei, KEK MBTK, KEK Singhasari, dan KEK Tanjung Lesung. Hal tersebut mengakibatkan pengelolaan KEK oleh BUPP belum optimal sehingga upaya untuk menciptakan iklim investasi yang baik belum tercapai dan memengaruhi minat calon investor untuk berinvestasi.

- Dampak Limpahan. Pemerintah daerah belum melakukan koordinasi dengan BUPP dan pihak terkait dalam memfasilitasi pemanfaatan tenaga kerja dan/atau UMKM pada KEK Sei Mangkei, KEK Bitung, KEK MBTK, KEK Tanjung Lesung, dan KEK Kendal, dan pemanfaatan bahan baku pada KEK Bitung. Akibatnya, keberadaan KEK belum berdampak bagi peningkatan taraf ekonomi setempat, membantu atau mendukung perekonomian lokal, serta menciptakan lapangan kerja di wilayah sekitar KEK.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada:

- Dewan Kawasan agar (1) Menetapkan struktur organisasi Sekretariat Dewan Kawasan sesuai dengan ketentuan dan dilengkapi dengan tata kerja yang jelas; (2) Menetapkan langkah strategis penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan KEK; dan (3) Berkoordinasi dengan Dewan Nasional dan pihak terkait dalam pemberian hak akses dan pengintegrasian aplikasi OSS.
- BUPP agar melakukan upaya untuk memenuhi sarana dan prasarana, serta peningkatan promosi yang menjadi tanggung jawab BUPP.
- Kepala Daerah agar (1) Mempercepat proses penyediaan sarana prasarana infrastruktur untuk mendukung penyelenggaraan KEK; (2) Mempercepat proses penetapan Perda dan/atau Perkada terkait pemberian insentif pajak daerah; dan (3) Menginstruksikan Kepala OPD terkait untuk berkoordinasi dengan BUPP dan pihak terkait dalam memfasilitasi pemanfaatan tenaga kerja, UMKM, dan bahan baku.

Pengembangan Sektor Unggulan

BERDASARKAN dokumen pemutakhiran RKP Tahun 2023, pengembangan sektor unggulan tidak terbatas pada sektor hulu yang semata-mata menghasilkan komoditas atas hasil produksi dari alam, namun juga harus memperhatikan pemberian nilai tambah dengan melakukan inovasi atas komoditas unggulan agar dapat menjadi produk unggulan pada sektor hilir yang memiliki daya tarik bagi konsumen.

Terciptanya kesinambungan antara sektor hulu dan hilir memerlukan peran upaya pemerintah baik pusat maupun daerah antara lain dengan penetapan strategi pengembangan, penyediaan sarana dan prasarana tertentu termasuk peningkatan kualitas infrastruktur, jaminan kepastian usaha, mitigasi risiko usaha, strategi pemberdayaan dan bantuan

permodalan, penelitian dan pengembangan terkait komoditas dan produk unggulan, peningkatan kualitas daya tarik produk unggulan daerah (PUD), peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat atau swasta, peningkatan peran serta masyarakat, dan upaya perlindungan terhadap PUD.

Pemeriksaan BPK dilaksanakan untuk mendorong pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan ke-2 terutama target 2.4 yaitu menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh.



Pemeriksaan BPK meliputi pemeriksaan DTT Kepatuhan atas pelaksanaan belanja barang dan belanja modal mendukung pengembangan komoditas unggulan tahun 2022 s.d. triwulan III tahun 2023 pada Kementerian Pertanian dan instansi terkait lainnya, serta pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemda dalam pengembangan produk unggulan TA 2021 s.d. semester I tahun 2023 pada 21 pemda.

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui 21 pemda telah melakukan upaya, antara lain:

- Strategi pengembangan komoditas unggulan pada sektor hulu:
 - ▶ Pemkab Ngada dan Pemkab Barito Utara telah mengembangkan komoditas unggulan dengan melakukan penetapan komoditas tertentu sebagai komoditas unggulan dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ▶ Pemkab Bengkayang dan Pemkab Wajo telah menyusun *master plan* pembangunan pertanian dan atau *road map* pengembangan industri sebagai acuan atau pedoman dalam menetapkan kebijakan-kebijakan, program, dan kegiatan yang terkait dengan pengembangan komoditas unggulan.
- Strategi pengembangan produk unggulan pada sektor hilir:
 - ▶ Pemkab Bengkayang melakukan kerja sama dengan Cowater International dan Global Affairs Canada (GAC) yang difasilitasi oleh Bappenas melalui Program Dana Inovasi Responsif yang bertujuan untuk pengembangan budi daya dan produk jagung di Kawasan Agroindustri Ledo.

- ▶ Pemkab Ngada, Pemkab Fakfak, dan Pemkab Berau mengupayakan sertifikat indikasi geografis atas produk unggulan, sehingga dapat memperjelas identifikasi produk, mengangkat reputasi suatu kawasan indikasi geografis, serta melestarikan keindahan alam, pengetahuan tradisional, serta sumber daya hayati.

Selain itu, hasil pemeriksaan mengungkapkan 232 temuan yang memuat permasalahan antara lain:

Pemerintah Pusat

- Kementerian Pertanian

Pengadaan dan penyaluran bantuan benih kopi dan kakao, pupuk dan pestisida, sarana pembeku lateks, alat mesin pertanian, dan *screen house* tahun 2022-2023 dalam rangka pengembangan komoditas unggulan belum sepenuhnya sesuai ketentuan, antara lain:

- ▶ Penyaluran benih kopi tidak tepat sasaran, bantuan benih kopi dan kakao yang diberikan telah berakhir/segera berakhir masa edar benih serta benih kopi dan kakao tidak didukung hasil uji mutu atau tidak lulus hasil uji mutu. Hal tersebut mengakibatkan pembelian benih yang telah berakhir dan segera berakhir masa edarnya serta pemberian bantuan kepada penerima yang tidak sesuai kriteria berpotensi tidak dapat memberikan hasil yang optimal bagi pengembangan komoditas unggulan pertanian.
- ▶ Pengadaan sarana produksi (saprodi) berupa pupuk dan pestisida untuk mendukung komoditas unggulan tidak didukung dengan hasil uji mutu serta laporan hasil uji mutu atas saprodi tidak diyakini kebenarannya. Hal tersebut mengakibatkan potensi kelebihan pembayaran atas benih yang tidak didukung hasil uji mutu dan tidak lulus uji mutu, saprodi yang tidak dapat diyakini kesesuaian mutu dengan spesifikasi barang dalam kontrak maupun hasil uji mutu yang tidak diyakini kebenarannya.
- ▶ Penentuan lokasi penerima bantuan alat mesin pertanian (alsintan) tidak sepenuhnya mempertimbangkan analisis kebutuhan dan ketersediaan di wilayah tersebut, bantuan alsintan belum ditetapkan calon penerima, belum didistribusikan ke penerima bantuan atau tidak dimanfaatkan. Hal tersebut mengakibatkan potensi terhambatnya pencapaian tujuan pengembangan komoditas unggulan, serta potensi penyalahgunaan penyaluran

alsintan dan tidak dapat segera dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan komoditas unggulan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Pertanian antara lain agar:

- Memerintahkan Dirjen Perkebunan untuk melaksanakan penyaluran sesuai dengan juknis yang berlaku dan menginstruksikan PPK untuk menambahkan persyaratan batas masa edar dan mempertimbangkan waktu tanam.
- Memerintahkan Inspektur Jenderal untuk melakukan pemeriksaan atas pengadaan benih pada Ditjen Perkebunan dan Ditjen Tanaman Pangan yang belum dilengkapi hasil atau tidak lulus uji mutu, mencari nilai selisih harga benih yang tidak dilengkapi hasil/lulus uji mutu dengan benih lulus uji mutu. Selanjutnya, menarik kelebihan dari selisih harga benih tersebut dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan berikut bukti setor kepada BPK.
- Menegur dan menginstruksikan masing-masing KPA terkait supaya memerintahkan masing-masing PPK untuk melakukan verifikasi kembali atas dokumen pengujian mutu dan mengunggah dalam aplikasi bantuan pemerintah, serta memberikan sanksi berupa masuk daftar hitam kepada para penyedia dan menyeteror ke kas negara jika pengadaan pupuknya terbukti tidak dilengkapi dengan hasil pengujian mutu.
- Menginstruksikan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian untuk (1) Memerintahkan PPK untuk mempertimbangkan analisis kebutuhan alsintan per wilayah dalam merencanakan dan menyalurkan alsintan; dan (2) Berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menunjuk dan menetapkan petugas pengawas alsintan agar melaksanakan pengawasan pemanfaatan alsintan.

Pemerintah Daerah

- Strategi pengembangan produk unggulan pada sektor hulu
 - ▶ Strategi pengembangan komoditas unggulan belum optimal pada 10 pemda (Pemkab Buleleng, Pemkab Bengkayang, Pemkab Barito Utara, Pemkab Kapuas, Pemkab Ngada, Pemkab Fakfak, Pemkab Mamuju, Pemkab Banggai, Pemkab Poso dan Pemkab Maluku Tengah), antara lain: (1) Belum menetapkan komoditas

unggulan daerah dan/atau kawasan komoditas unggulan; (2) Belum membuat perencanaan jangka panjang dan jangka menengah atas pengembangan komoditas unggulan atau perencanaan pengembangan komoditas unggulan yang ada belum selaras dengan pembangunan daerah; (3) Belum menyusun *roadmap*/peta jalan pengembangan komoditas unggulan; dan (4) Belum memutakhirkan peraturan tata ruang sebagai dasar perencanaan jangka panjang dalam menentukan wilayah pengembangan komoditas unggulan. Akibatnya, tujuan dan sasaran pengembangan komoditas unggulan pertanian/perkebunan dan perikanan tidak optimal atau berpotensi tidak tercapai.

- ▶ Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pada 12 pemda (Pekab Bengkayang, Pekab Tanah Laut, Pekab Barito Utara, Pekab Kapuas, Pekab Berau, Pekab Ngada, Pekab Mamuju, Pekab Wajo, Pekab Banggai, Pekab Poso, Pekab Maluku Tengah, dan Pekab Kepulauan Siau Tagulandang Biaro) belum optimal, antara lain: (1) Belum mengidentifikasi atau menyusun rencana dan target pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pertanian/perkebunan; (2) Belum memprioritaskan penyediaan sarana dan prasarana pertanian; (3) Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang ada belum berfungsi optimal; dan (4) Belum adanya koordinasi antar SKPD terkait dengan penyediaan prasarana untuk komoditas unggulan. Akibatnya, produksi/produktivitas komoditas unggulan berpotensi tidak maksimal atau pencapaian target produksi terhambat.
- ▶ Peningkatan kapasitas produksi sektor hulu secara kualitas dan kuantitas pada 2 pemda (Pekab Buleleng dan Pekab Kepulauan Siau Tagulandang Biaro) belum optimal, antara lain: (1) Tidak melaksanakan kegiatan penyaluran bibit, pupuk, pestisida; (2) Petugas penyuluh lapangan (PPL) belum sepenuhnya memahami pedoman teknis komoditas unggulan yang baik dan petani belum sepenuhnya menerapkan pedoman teknis produk unggulan yang baik (pedoman mengenai jarak tanam, tanaman penayang, pembibitan/penanaman, pemupukan, pemangkasan/peremajaan, proses panen dan proses pascapanen); (3) Kuantitas produk unggulan belum diperoleh dari data yang valid; dan (4) Belum melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap para petani terkait dengan tata cara panen dan pascapanen untuk meningkatkan kualitas produk unggulan. Akibatnya, belum tercapainya peningkatan

produksi produk unggulan secara kualitas dan kuantitas dan bahkan berpotensi menurunnya kualitas produk unggulan.

- Strategi pengembangan produk unggulan pada sektor hilir
 - ▶ Peningkatan kualitas daya tarik PUD pada 4 pemda (Pemkab Barito Utara, Pemkab Bengkayang, Pemkab Buleleng, dan Pemkab Fakfak) belum optimal, antara lain: (1) belum menerapkan atau memfasilitasi inovasi pada tahap produksi; (2) belum mengembangkan keragaman jenis produk baik melalui studi tiru atau penelitian dan pengembangan; (3) belum melakukan upaya-upaya peningkatan kapasitas produksi PUD dan bahkan belum memiliki data kapasitas produksi; dan (4) belum meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengembangan produk, antara lain melalui pelatihan. Akibatnya, produk belum memiliki nilai tambah berupa daya tarik dalam hal inovasi, keragaman, dan SDM untuk menjadi keunggulan daerah, pemda tidak dapat mengambil langkah strategis untuk mengembangkan industri terkait produk unggulan, serta daya saing produk unggulan yang dihasilkan rendah.
 - ▶ Peningkatan kerja sama antara pemda dan pemerintah pusat atau pihak swasta dalam rangka pengembangan produk unggulan daerah pada 4 pemda (Pemkab Berau, Pemkab Kapuas, Pemkab Ngada, Pemkab Kepulauan Siau Tagulandang Biaro) belum optimal, antara lain pemda: (1) tidak terlibat dalam kerja sama yang dilakukan oleh pengusaha dengan pihak ketiga; (2) belum memfasilitasi kerja sama antar pelaku usaha dalam menjaga dan meningkatkan kualitas produk; (3) belum sepenuhnya menyusun kebijakan/menjalin kerja sama atau bantuan permodalan untuk menjaga stabilitas harga produk; dan (4) belum membentuk tim pengembangan ekspor serta belum memfasilitasi promosi dan informasi pengembangan ekspor. Akibatnya, kualitas produk hilir tidak diminati pasar, harga produk tidak stabil sehingga pelaku usaha berpotensi tidak mendapat perlindungan harga dan tidak mau memproduksi, serta kebijakan daerah atas percepatan ekspor produk unggulan belum tersedia.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala Daerah antara lain:

- Menetapkan komoditas atau produk tertentu sebagai komoditas atau produk unggulan daerah dengan keputusan kepala daerah dan menetapkan atau menyusun kebijakan arah pengembangan

komoditas/produk unggulan dalam bentuk *roadmap*/rencana pengembangan/rencana induk/rencana makro perkebunan/rencana budi daya pertanian dan atau *action plan* pengembangan kawasan pertanian kabupaten/rencana pembangunan industri kabupaten yang selanjutnya disusun dalam RPJPD/RTRW/RPJMD/Renstra Dinas terkait.

- Menginstruksikan Kepala Dinas terkait agar meningkatkan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana dengan:
 - ▶ Menyusun rencana dan target pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana komoditas unggulan tertentu, menetapkan prioritas serta strategi pemenuhannya.
 - ▶ Memerintahkan Kepala Dinas terkait untuk meningkatkan jaminan kepastian usaha dengan menetapkan kawasan komoditas unggulan dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk dicantumkan dalam RTRW termasuk melakukan pengawasan terhadap kesesuaian RTRW dengan realisasinya.
- Memerintahkan Kepala Dinas terkait agar melakukan upaya pencapaian target produksi dan menjaga kualitas produk unggulan dengan:
 - ▶ Meningkatkan kompetensi petani dan pelaku usaha pengolahan produk unggulan.
 - ▶ Menetapkan kebijakan hilirisasi produk unggulan melalui strategi peningkatan kapasitas pelaku usaha produk unggulan, fasilitasi pembiayaan dalam pengembangan usaha, peningkatan kualitas SDM dan penyebarluasan informasi Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM).
- Memerintahkan Kepala Dinas terkait untuk meningkatkan daya tarik produk unggulan dengan:
 - ▶ Melakukan pendataan pelaku usaha untuk pemetaan keragaman jenis, kapasitas produksi dan SDM.
 - ▶ Melakukan kajian atau penelitian pengembangan atas inovasi produk unggulan dan melakukan survei pangsa pasar untuk mengetahui potensi produk unggulan yang dapat dikembangkan dan memiliki daya saing.

- Memerintahkan Kepala dinas terkait agar meningkatkan kerjasama dengan:
 - ▶ Menyusun kebijakan perencanaan kerja sama dengan pihak terkait dalam rangka peningkatan kualitas dan stabilitas harga produk, antara lain dalam kegiatan penelitian dan pengembangan keragaman jenis produk unggulan, dalam menjaga dan meningkatkan kualitas produk unggulan yang dihasilkan pelaku usaha.
 - ▶ Memfasilitasi penyediaan informasi ekspor komoditas pala melalui koordinasi dengan kementerian terkait.

Pengembangan Kawasan Perkotaan

PERENCANAAN perkotaan merupakan bagian dari RPJMN 2020-2024, yang meliputi pengembangan kawasan perkotaan, perizinan pengembangan kawasan, dan desain kawasan perkotaan dalam rangka menciptakan pembangunan berkelanjutan. Pengembangan kawasan perkotaan berkelanjutan bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena di perkotaan, khususnya terkait dengan perubahan tata ruang kawasan dan strategi pembangunan berkelanjutan.

Keterbatasan akses perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau, menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi masyarakat yang tinggal di kota-kota besar di Indonesia menjadi salah satu hambatan dalam pengembangan wilayah perkotaan. Permasalahan utama yang terjadi pada kawasan perkotaan adalah terkait permukiman kumuh atau ilegal dan permasalahan sampah yang merupakan permasalahan lingkungan yang dapat merusak ekosistem apabila tidak mendapat perhatian serius dari berbagai pihak.

Selain itu, pemindahan Ibu Kota Negara (selanjutnya disebut Ibu Kota Nusantara/IKN) merupakan salah satu proyek prioritas strategis (major project) yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024, sebagai bagian dari pelaksanaan agenda pembangunan pengembangan wilayah (PN2). Pemindahan IKN bertujuan untuk meningkatkan pembangunan Kawasan Timur Indonesia (KTI) untuk pemerataan wilayah. Pemindahan IKN ini antara lain didasari oleh terpusatnya kegiatan perekonomian di Jakarta dan Jawa yang mengakibatkan kesenjangan ekonomi Jawa dan luar Jawa. Pemindahan IKN ke luar Jawa diharapkan dapat mendorong percepatan pengurangan kesenjangan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah di luar Jawa terutama KTI.

Pemeriksaan BPK dilaksanakan untuk mendorong pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan ke-11 terutama target 11.1 pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh; target 11.3 pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara; dan target 11.5 pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.



Pemeriksaan BPK meliputi pemeriksaan kinerja pembangunan IKN TA 2022 s.d. (triwulan III) sebagai bagian pembangunan tahap I tahun 2022-2024 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan instansi terkait lainnya, serta pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemda dalam pengembangan kawasan perkotaan tahun 2021 s.d. semester I 2023 pada 6 pemkot yaitu: (1) Kota Batam; (2) Kota Dumai; (3) Kota Bogor; (4) Kota Banjarmasin; (5) Kota Makassar; dan (6) Kota Denpasar.

Hasil pemeriksaan menunjukkan pemerintah pusat dan pemda telah berupaya dalam pengembangan kawasan perkotaan, antara lain:

- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 - ▶ Sejak 25 Juli 2019, Kementerian PUPR telah membentuk Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur IKN yang bertugas membantu Menteri PUPR dalam mengoordinasikan dan mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur IKN, dengan pendekatan keterpaduan, inovatif, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
 - ▶ Hingga Triwulan III tahun 2023, Kementerian PUPR telah dan sedang melaksanakan 80 paket pekerjaan pembangunan infrastruktur IKN tahap I, dengan total realisasi TA 2022 dan 2023 (Triwulan III) masing-masing sebesar Rp5,36 triliun dan Rp8,67 triliun.
 - ▶ Kementerian PUPR telah mengidentifikasi elemen nilai tambah digital atau teknologi untuk memberikan manfaat yang lebih besar pada IKN, sebagai upaya memadukan 3 konsep perkotaan, yaitu IKN

sebagai kota hutan (*forest city*), kota spons (*sponge city*), dan kota cerdas (*smart city*) sebagai prinsip dasar pengembangan Kawasan IKN.

- RPJMD Kota Dumai dan Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026 telah disusun selaras dengan RTRW Tahun 2019-2039. Pemkot Batam dan Pemkot Bogor telah menyusun Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) sebagai dokumen perencanaan umum penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas wilayah administratif.
- Pelaksanaan Penataan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh, antara lain Pemkot Batam dan Pemkot Banjarmasin telah bekerja sama dengan pihak swasta dalam bentuk *Corporate Social Responsibility* melalui Kolaborasi Satker KOTAKU dan telah menghasilkan penataan permukiman kumuh dan penataan kawasan permukiman kumuh di bantaran sungai yang mengikutsertakan masyarakat.
- Pemkot Makassar dan Pemkot Denpasar telah membuat *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Tahun 2021-2031 dan 2016-2026 dan memiliki *Masterplan* Persampahan pada Tahun 2016 dan Tahun 2017.

Namun demikian, hasil pemeriksaan mengungkapkan 77 temuan yang memuat permasalahan antara lain:

Pemerintah Pusat

- Pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya selaras dengan RPJMN Tahun 2020-2024, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR Tahun 2020-2024, dan Rencana Induk IKN, serta perencanaan pendanaan belum sepenuhnya memadai, antara lain sumber pendanaan alternatif selain APBN berupa KPBU dan swasta murni/BUMN/BUMD belum dapat terlaksana.
- Persiapan pembangunan infrastruktur belum memadai, di antaranya persiapan lahan pembangunan infrastruktur IKN masih terkendala mekanisme pelepasan kawasan hutan, 2.085,62 Ha dari 36.150 Ha tanah masih dalam penguasaan pihak lain karena belum diterbitkannya hak pengelolaan lahan (HPL), serta belum selesainya proses sertifikasi atas 5 area hasil pengadaan tanah.

- Pelaksanaan manajemen rantai pasok dan peralatan konstruksi untuk pembangunan infrastruktur IKN Tahap I belum optimal, di antaranya kurangnya pasokan material dan peralatan konstruksi untuk pembangunan IKN, harga pasar material batu split dan sewa kapal tongkang tidak sepenuhnya terkendali, pelabuhan bongkar muat untuk melayani pembangunan IKN belum dipersiapkan secara menyeluruh, dan kurangnya pasokan air untuk pengolahan beton.
- Kementerian PUPR belum sepenuhnya memiliki rancangan serah terima aset, rencana alokasi anggaran operasional, serta mekanisme pemeliharaan dan pengelolaan aset dari hasil pembangunan infrastruktur IKN Tahap I.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR, antara lain:

- Menginstruksikan Direktur Jenderal unit organisasi terkait dan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) untuk melakukan sinkronisasi penyusunan Renstra Kementerian PUPR dan Renstra Eselon I dengan berpedoman pada RPJMN periode selanjutnya, serta berkooordinasi dengan Kementerian Keuangan, dalam merencanakan dan menetapkan skema pendanaan pembangunan infrastruktur IKN tahap II guna memitigasi risiko munculnya permasalahan terkait pendanaan.
- Meningkatkan koordinasi antarpihak/instansi terkait, terutama dalam hal sinkronisasi peraturan dan kebijakan pengadaan tanah bagi kepentingan umum, termasuk merumuskan solusi dan rencana aksi percepatan dalam proses pembebasan lahan.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi kebutuhan material dan peralatan konstruksi berdasarkan kondisi lapangan secara berkala dan melakukan koordinasi dengan: (1) Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Perdagangan terkait dengan jalur logistik pembangunan infrastruktur IKN; (2) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan pemutakhiran harga material batu split; (3) *Stakeholder* terkait di luar Kementerian PUPR guna bersama-sama merencanakan suatu skema atau rencana mengenai kebutuhan air untuk industri yang mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur IKN; dan (4) Pihak Otorita IKN dalam menerima dan mengelola aset hasil pengadaan dan/atau

pembangunan pada pembangunan infrastruktur IKN tahap I dan tahap selanjutnya dengan cara merancang timeline serah terima aset.

- Melakukan koordinasi dengan *stakeholder* terkait dalam menyusun: (1) Ketentuan tata kelola aset atas hasil pembangunan infrastruktur IKN tahap I dan tahap selanjutnya, sebelum diserahkan kepada Otorita IKN; dan (2) Ketentuan yang lebih spesifik tentang peralihan aset dari K/L kepada Otorita IKN.

Pemerintah Daerah

- Pemda belum memiliki perencanaan strategis untuk mendukung pengembangan kawasan perkotaan berupa dokumen Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan (RP2P) yang mengakibatkan fasilitas pelayanan perkotaan belum lengkap dan terstandarisasi.
- Pemda belum memiliki regulasi pengarahannya mobilitas penduduk yang memadai dalam mendukung pengembangan kawasan perkotaan yang mengakibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak memiliki pedoman yang memadai untuk merencanakan dan melaksanakan program pengarahannya mobilitas penduduk, perangkat daerah belum dapat melaksanakan pengarahannya mobilitas penduduk, dan pemantauan orang asing belum memiliki payung hukum sebagai aturan teknis pelaksanaannya.
- Kegiatan pembatasan timbulan sampah di Pemkot Makassar belum dilaksanakan secara memadai mengakibatkan target pengurangan sampah tidak tercapai. Pemkot Makassar telah melakukan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi dan sosialiasasi, tetapi belum berdampak pada peningkatan partisipasi pelaku usaha dan masyarakat untuk melakukan pembatasan timbulan sampah serta data evaluasi atas kegiatan pembatasan timbulan sampah belum didukung dengan data yang riil sehingga partisipasi masyarakat dalam pembatasan timbulan sampah belum dapat terukur.
- Pelaksanaan program pengelolaan persampahan di tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) dalam mendukung pengembangan kawasan perkotaan belum efektif mengakibatkan permasalahan sampah di Kota Denpasar tidak mampu segera tertangani, dan terjadi penumpukan sampah di tempat penampungan sementara.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar:

- Wali Kota terkait berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri mengenai perkembangan pedoman penyusunan RP2P bagi pemda.
- Wali Kota terkait menyusun regulasi Program Pengarahan Mobilitas Penduduk dan menetapkan perangkat daerah yang bertanggung jawab atas program tersebut beserta uraian tugasnya.
- Wali Kota Makassar merancang mekanisme pembinaan yang efektif dan efisien kepada sekolah-sekolah untuk menerapkan perilaku pembatasan timbulan sampah dan melakukan kegiatan sosialisasi, informasi, dan edukasi dengan materi timbulan sampah secara intensif dan melakukan pengukuran target dan capaian yang akurat atas jumlah pengurangan sampah plastik.
- Wali Kota Denpasar mempersiapkan sarana prasarana pengelolaan sampah yang mendukung pencapaian kapasitas maksimal pengelolaan sampah.

Pengembangan Daerah Tertinggal, Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi

POKOK-POKOK kegiatan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020-2024 ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, sedangkan pelaksanaannya mengacu pada beberapa mandat peraturan perundang-undangan, yaitu: (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009, (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal serta ketentuan pelaksanaannya.

Pemeriksaan BPK atas pengembangan daerah tertinggal, perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi dilaksanakan untuk mendorong pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan ke-10 terutama



target 10.1 pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Pemeriksaan BPK meliputi pemeriksaan kinerja atas efektivitas pembangunan kawasan perbatasan untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan tahun 2021 s.d. semester I tahun 2023 pada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam penetapan batas desa dan peningkatan kapasitas pemerintahan desa untuk mendukung pembangunan desa terpadu, dan pemeriksaan kinerja atas pengembangan kawasan transmigrasi prioritas nasional pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), serta pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemda dalam pengembangan daerah tertinggal, perbatasan, perdesaan dan transmigrasi tahun 2021 s.d. semester I 2023 pada 46 pemda.

Hasil pemeriksaan menunjukkan upaya pemerintah yang telah dilakukan dalam pengembangan daerah tertinggal, perbatasan, perdesaan dan transmigrasi, antara lain:

- Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) telah menetapkan regulasi dan kebijakan yang mendukung proses perencanaan serta pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN-KP) yang terdiri atas pedoman penyusunan renaksi, dan telah menyusun dan menetapkan indikator keberhasilan atas pelaksanaan program/kegiatan pengelolaan BWN-KP pada Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) melalui Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN serta telah melakukan penilaian setiap tahun.
- Kemendagri telah menetapkan peraturan dan Surat Edaran (SE) sebagai pedoman dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPB Des), dan menyusun Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Rapermendagri) tentang Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa (PKPD), Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa (LKAD), dan Lembaga Kerja Sama Desa, serta Rancangan Induk Strategi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa (RI SPKAD).
- Kemendesa PDTT telah menetapkan sejumlah perangkat regulasi bidang ketransmigrasian dalam bentuk Permendesa PDTT dan Kepmendesa PDTT, membangun tiga sistem informasi/aplikasi bidang ketransmigrasian, membentuk Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi (KIPT) Tingkat Nasional, melakukan

intervensi pada Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional (KTPN), dan menyelenggarakan kegiatan evaluasi perkembangan kawasan transmigrasi melalui pengukuran Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi (IPKTrans).

- Pemda telah berhasil melampaui batas nilai minimal suatu daerah yang dinyatakan dapat entas dari kategori daerah tertinggal pada beberapa indikator, antara lain indikator desa yang mempunyai Sekolah Dasar; desa yang mudah mencapai fasilitas kesehatan; desa yang mudah mencapai Sekolah Menengah Pertama; dan angka partisipasi Sekolah Menengah Pertama.
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan; Nilai rata-rata Indeks Desa Membangun (IDM) pada beberapa kecamatan di kawasan perbatasan lokasi prioritas (Lokpri) mengalami peningkatan; Pemda telah merealisasikan anggaran pembangunan untuk kawasan perbatasan seluruhnya sebesar Rp373,43 miliar yang berasal dari dana APBD tahun 2021 s.d. semester I 2023.
- Pada aspek regulasi dan kelembagaan, terdapat pemda yang telah menetapkan kawasan perdesaan dengan peraturan daerah dan lokasi kawasan dengan keputusan kepala daerah, menetapkan kebijakan pembangunan kawasan perdesaan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK) dan RPJMD, serta menetapkan kelembagaan, tugas dan fungsi Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) Kabupaten dan TKPKP Kawasan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.
- Pada aspek perencanaan dan pendanaan, terdapat pemda yang telah memiliki Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) dan/ atau RPKP Perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah, dan telah menetapkan RPKP yang memuat isu strategis kawasan perdesaan, tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan, strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan, program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan, indikator capaian kegiatan, serta kebutuhan pendanaan.
- Pada aspek pembinaan dan pengawasan, terdapat pemda yang melaksanakan kerja sama desa dan peningkatan kapasitas lembaga kerja sama desa, telah memiliki regulasi dan kebijakan yang lengkap

terkait dengan pengendalian penggunaan Dana Desa; dan telah memfasilitasi pendaftaran nama BUMDesa pada Sistem Informasi Desa Kemendesa PDTT.

Selain itu, hasil pemeriksaan mengungkapkan 424 temuan yang memuat permasalahan antara lain:

Pemerintah Pusat

- Badan Nasional Pengelola Perbatasan
 - ▶ Dalam pengelolaan program/kegiatan untuk mewujudkan kawasan perbatasan negara sebagai pusat pertumbuhan melalui peningkatan kegiatan ekonomi berbasis potensi unggulan, dan peningkatan kualitas SDM, serta sebagai upaya hadirnya negara dalam melaksanakan pemerataan penyediaan fasilitas pelayanan sosial dasar:
 - Dukungan kelembagaan belum sepenuhnya efektif. UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah menjabarkan kewenangan pemerintah pusat dan pemda dalam pembangunan kawasan perbatasan, namun kewenangan tersebut tidak diatur secara lengkap dalam peraturan di bawahnya sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dalam pembangunan kawasan perbatasan antara pemda dan pemerintah pusat tidak didukung pemahaman atas tugas dan kewenangan masing-masing. Hasil pemeriksaan di daerah menunjukkan bahwa pemda belum seluruhnya membentuk badan pengelola perbatasan daerah. Selain itu, pola koordinasi terkait perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan evaluasi antara Sekretariat Tetap (Settap) BNPP dengan K/L dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) belum diatur, sehingga implementasi terhadap rencana induk (renduk) dan rencana aksi (renaksi) belum sepenuhnya dilaksanakan oleh K/L dan pemda dalam menyusun perencanaan sampai dengan pemantauan dan evaluasi. Akibatnya, sebanyak 569 dari 910 program renduk belum direncanakan pada renaksi, sebanyak 887 dari 2062 program renaksi Tahun 2022 tidak terlaksana, dan peran pemda belum tampak dalam pembangunan kawasan perbatasan di daerah.

- Perencanaan program/kegiatan belum sepenuhnya efektif. Penyusunan renaksi pengelolaan pembangunan kawasan perbatasan belum sepenuhnya memedomani renduk, yaitu sebanyak 569 dari 910 program/kegiatan belum ada dalam Program Renaksi Tahun 2021-2023. Renduk Tahun 2020-2024 terlambat ditetapkan melewati penetapan renaksi tahun 2021. Selain itu, program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam renaksi belum seluruhnya dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL). Akibatnya, pengukuran kinerja berbasis indikator capaian atas program/kegiatan pengelolaan pembangunan kawasan perbatasan tidak dapat dilaksanakan, dan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2022 pada 15 provinsi yang memiliki kawasan perbatasan sebanyak 2 provinsi mendekati target dan 6 masih jauh dari target RKP.
- Kementerian Dalam Negeri
 - ▶ Kemendagri belum melakukan penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan PPB Des, di antaranya adalah pelaksanaan Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 belum berjalan dengan optimal dan belum didukung dengan pedoman pelaksanaan yang memadai, serta pembagian tugas Personel Tim PPB Des Tingkat Pusat belum memadai. Akibatnya, pemda dan Tim PPB Des tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota tidak memiliki pedoman yang lengkap dan jelas dalam melaksanakan PPB Des dan Tim PPB Des tingkat Pusat tidak berfungsi secara optimal.
 - ▶ Kemendagri belum menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam mendukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) secara lengkap. Akibatnya, peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pengurus LKD di lingkup Kemendagri dan pemda tidak memiliki arah yang jelas.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
 - ▶ Koordinasi dan integrasi penyelenggaraan transmigrasi belum memadai, yaitu belum seluruh provinsi dan kabupaten yang memiliki KTPN membentuk Tim KIPT, pelaksanaan koordinasi dan integrasi penyelenggaraan transmigrasi belum optimal, serta pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap

penyelenggaraan urusan ketransmigrasian belum memadai. Akibatnya, kegiatan tersebut belum optimal untuk menjadi daya ungkit yang signifikan dalam pengembangan KTPN.

- ▶ Pengukuran Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi pada 52 KTPN belum memadai, yaitu indikator untuk mengukur perkembangan kawasan transmigrasi belum memadai, pengukuran perkembangan kawasan transmigrasi belum dilaksanakan secara memadai, dan evaluasi kegiatan pengukuran IPKTrans belum dimanfaatkan untuk perencanaan penyelenggaraan kawasan transmigrasi periode berikutnya. Akibatnya, arah kebijakan perencanaan pengembangan KTPN tidak sesuai kebutuhan masing-masing kawasan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada:

- Kepala BNPP, antara lain agar:
 - ▶ Berkoordinasi dengan Pengarah BNPP dan Anggota BNPP untuk menyusun pengaturan yang menjabarkan antara lain: (1) pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal pengelolaan pembangunan kawasan perbatasan yang lebih terinci dan lengkap; (2) mengatur pola koordinasi Sekretariat Tetap BNPP dengan unit kerja K/L di bawah menteri terkait dan unit kerja pemda dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan kawasan perbatasan; dan (3) Penyusunan renduk pengelolaan BWN-KP.
 - ▶ Memerintahkan Sekretaris BNPP bersama para Deputi untuk memutakhirkan pedoman penyusunan renaksi pengelolaan BWN-KP terkait kedudukan renaksi agar selaras dengan perencanaan nasional dan hasil evaluasi sebagai bahan masukan pada penyusunan renaksi.
- Menteri Dalam Negeri untuk menginstruksikan Dirjen Bina Pemdes agar melaksanakan langkah-langkah, antara lain:
 - ▶ Menerbitkan penjelasan lebih lanjut tentang penegasan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu PPB Des; pembagian tugas Tim PPB Des Kabupaten/Kota dan Tim PPB Des Provinsi; struktur dan tugas fungsi Tim PPB Des Pusat; mekanisme pelaksanaan verifikasi yuridis dan teknis; keanggotaan tenaga teknis dalam Tim PPB Des tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi; dan merevisi Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 sesuai ketentuan.

- ▶ Menginstruksikan Dirjen Bina Pemdes supaya menyusun dan menetapkan peraturan pelaksanaan yang digunakan sebagai arah dan kebijakan strategi dalam peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pengurus LKD dan merevisi NSPK dengan menambah aspek peningkatan kapasitas pengurus LKD.
- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, antara lain:
 - ▶ Menyampaikan usulan regulasi terkait penegasan komitmen kementerian/lembaga anggota Tim KIPT Tingkat Nasional serta pemda dalam penyelenggaraan transmigrasi kepada Presiden.
 - ▶ Menyelenggarakan kegiatan evaluasi secara komprehensif atas kegiatan penyusunan peubah dan indikator serta metode pelaksanaan pengukuran IPKTrans.
 - ▶ Menyusun matriks risiko kegiatan pengukuran IPKTrans dan memantau secara berkala pelaksanaan tindak lanjut pengendaliannya serta mengoptimalkan koordinasi dan integrasi dengan pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan data dukung pengukuran IPKTrans.

Pemerintah Daerah

- Pembangunan Daerah Tertinggal
 - ▶ Pemda belum menyusun Strategi Daerah (Strada) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) pada penyediaan sarana dan prasarana, aksesibilitas, dan SDM. Akibatnya, pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal yang terkait penyediaan sarana dan prasarana, aksesibilitas dan SDM berpotensi menjadi kurang terarah dan belum dapat dilaksanakan secara efektif.
 - ▶ Program dan kegiatan terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana, aksesibilitas, dan SDM dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal pada pemda belum memberikan dampak secara signifikan terhadap peningkatan indeks komposit daerah tertinggal pada indikator desa, antara lain, yang mempunyai pertokoan, fasilitas kesehatan, dokter, dan sekolah menengah pertama. Akibatnya, nilai indeks komposit daerah tertinggal atas indikator tersebut belum mencapai nilai minimal suatu daerah yang dinyatakan dapat entas dari kategori daerah tertinggal.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala Daerah terkait, antara lain:

- ▶ Menginstruksikan Sekretaris Daerah, Kepala OPD teknis terkait bersama Bappeda untuk: (1) Berkoordinasi dengan Bappeda Pemerintah Provinsi terkait dalam penyusunan Strada dan RAD PPDT Kabupaten; dan (2) Menyusun dan mengusulkan dokumen Strada Kabupaten serta mensosialisasikannya kepada OPD teknis terkait dan selanjutnya menetapkan Strada dan RAD PPDT Kabupaten.
 - ▶ Menginstruksikan Kepala OPD teknis terkait untuk: (1) Memprioritaskan penyusunan dan penggunaan anggaran dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan yang dapat meningkatkan nilai indikator penetapan daerah tertinggal; dan (2) Memprioritaskan pelaksanaan program dan kegiatan di wilayah desa yang masuk dalam kategori desa tertinggal dan sangat tertinggal.
- Pengembangan Kawasan Perbatasan
 - ▶ Aspek kelembagaan belum sepenuhnya efektif, hal ini ditunjukkan oleh beberapa permasalahan antara lain: (1) pelaksanaan tugas dan fungsi BPPD Kabupaten Nunukan belum didukung dengan tata kerja yang memadai, seperti juknis/SOP/tata kerja yang mengatur pelaksanaan fungsi penyusunan rencana aksi pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan; (2) BPPD Kabupaten belum melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara horizontal antar-SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu dan secara vertikal dengan BPPD Provinsi NTT dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP); dan (3) Pemerintah Kabupaten Sambas belum menetapkan unit kerja yang spesifik melakukan fungsi pengelolaan pembangunan kawasan perbatasan. Kondisi tersebut mengakibatkan kebijakan program pembangunan perbatasan, penetapan rencana kebutuhan anggaran, koordinasi pelaksanaan, dan pelaksanaan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan tidak dapat dilaksanakan secara optimal.
 - ▶ Aspek perencanaan program/kegiatan belum sepenuhnya efektif, hal ini ditunjukkan oleh beberapa permasalahan antara lain rencana aksi pengelolaan BWN-KP Kabupaten Sambas, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Belu tahun 2021 s.d. 2023 belum disusun sesuai

dengan ketentuan. Akibatnya, pelaksanaan program/kegiatan tidak terintegrasi dan tidak ada harmonisasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan antar SKPD.

- ▶ Aspek pelaksanaan dan pemanfaatan program/kegiatan belum sepenuhnya efektif, hal ini ditunjukkan oleh beberapa permasalahan antara lain: (1) kualitas infrastruktur jalan dan pasar belum merata dan belum memberikan dampak terhadap perkembangan kawasan perbatasan; dan (2) pelaksanaan pembangunan perbatasan di sektor pertanian melalui program *food estate* dan sektor peternakan belum dapat meningkatkan potensi unggulan. Permasalahan tersebut mengakibatkan program pembangunan di kawasan perbatasan belum dapat meningkatkan dan mengembangkan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat/sentra pertumbuhan ekonomi, industri, dan perdagangan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala Daerah terkait antara lain agar:

- ▶ Menetapkan Tim Sekretariat/Tim Teknis pengelolaan pembangunan kawasan perbatasan yang melibatkan BPPD dan SKPD terkait dengan Keputusan Bupati.
 - ▶ Memerintahkan Sekretaris Daerah menyusun dan menetapkan rencana aksi pengelolaan kawasan perbatasan, serta menyusun pedoman dan/atau regulasi untuk dijadikan acuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan kawasan perbatasan.
 - ▶ Menginstruksikan Kepala BPPD agar terlibat dan ikut serta dalam upaya-upaya mengatasi permasalahan di sektor pertanian, peternakan dan sektor lainnya dalam rangka pengelolaan program/kegiatan di kawasan perbatasan sesuai dengan kewenangannya.
- Pembangunan Kawasan Perdesaan
 - ▶ Pada aspek regulasi dan kelembagaan masih terdapat permasalahan antara lain belum seluruh pemda menetapkan (1) Kawasan perdesaan dengan peraturan daerah dan lokasi kawasan dengan keputusan kepala daerah; (2) Perda tentang insentif dan kemudahan investasi yang mendukung pembangunan kawasan perdesaan; (3) Kebijakan pembangunan kawasan perdesaan dalam RTRWK dan

RPJMD; (4) Kelembagaan, tugas dan fungsi TKPKP Kabupaten dan TKPKP Kawasan dengan SK Kepala Daerah; dan (5) TKPKP yang terdiri atas unsur pemda, pemdes, badan permusyawaratan desa dan tokoh masyarakat. Kondisi tersebut mengakibatkan pemda belum memiliki dasar peraturan dan/atau acuan dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, program dan kegiatan kawasan perdesaan menjadi tidak terpadu, serta OPD pelaksana tidak dapat sepenuhnya melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan.

- ▶ Pada aspek perencanaan dan pendanaan masih terdapat permasalahan antara lain belum seluruh pemda (1) Memiliki Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) dan/atau RPKP perubahan yang ditetapkan dengan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah; (2) Menetapkan RPKP yang memuat: isu strategis kawasan perdesaan, tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan, strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan, program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan, indikator capaian kegiatan, dan kebutuhan pendanaan; (3) Menetapkan RPKP yang berlaku selama 5 (lima) tahun dan sudah menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan kawasan; (4) Menetapkan program kegiatan pada RPKP/RPKP Perubahan yang selaras dengan RPJMD Kabupaten/Kota dan RKPD Kabupaten/Kota; (5) Menetapkan program kegiatan pada RPKP/RPKP Perubahan yang mendukung capaian Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP); (6) Menganggarkan program kegiatan pembangunan kawasan perdesaan pada APBD Kabupaten sesuai RPKP; dan (7) Mengupayakan pendanaan pembangunan kawasan perdesaan selain dari APBD Kabupaten sesuai RPKP (APBN, APBD Provinsi, APBDesa serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat). Kondisi tersebut mengakibatkan pemda tidak memiliki strategi, arah kebijakan, perencanaan, program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan, program kegiatan pembangunan kawasan perdesaan belum mendukung tujuan pembangunan jangka menengah daerah dan capaian di IPKP.
- ▶ Pada aspek pelaksanaan masih terdapat permasalahan antara lain belum seluruh pemda (1) Melakukan pengembangan komoditas unggulan kawasan perdesaan mulai dari hulu (produksi), pengolahan, sampai pemasaran (hilir); (2) Melibatkan masyarakat dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) baik di dalam

maupun di luar kawasan (*spillover*) dalam pengembangan komoditas unggulan; (3) Mendorong BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama dalam pengembangan komoditas unggulan; (4) Mempromosikan kawasan maupun produk unggulan baik di aras lokal, nasional maupun internasional (film pendek, *website*, *leaflet*, festival, dll); (5) Mendorong peningkatan kualitas produk unggulan yang dihasilkan untuk mendapatkan sertifikasi/standardisasi; (6) Mengoptimalkan peran pendamping dalam pengembangan kawasan perdesaan; (7) Menyediakan prasarana jalan antardesa di dalam kawasan perdesaan dan ke sentra komoditas unggulan; dan (8) Menyediakan dan/atau memfasilitasi sarana dan prasarana yang mendukung pembangunan komoditas unggulan. Kondisi tersebut mengakibatkan pengembangan komoditas unggulan belum dapat menjangkau seluruh masyarakat dan UMKM di kawasan perdesaan, produk unggulan belum dikenal baik di aras lokal, nasional maupun internasional, kualitas produk unggulan belum memenuhi standar mutu, akses menuju kawasan pedesaan dan sentra komoditas unggulan sulit dijangkau, serta pengembangan produk unggulan menjadi terhambat.

- ▶ Pada aspek monitoring evaluasi dan pelaporan, seluruh pemda belum melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan atas capaian pembangunan kawasan perdesaan dan belum berupaya menyediakan data yang lengkap dan akurat dalam mendukung pengukuran IPKP. Kondisi tersebut mengakibatkan pemda tidak dapat mengetahui capaian pembangunan dan permasalahan serta solusi yang dihadapi kawasan perdesaan sebagai dasar kebijakan pembangunan tahun berikutnya, dan IPKP yang dilaporkan tidak dapat diyakini sesuai dengan kondisi pembangunan kawasan perdesaan yang senyatanya.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati antara lain agar:

- ▶ Menetapkan kawasan perdesaan dengan peraturan kepala daerah dan lokasi kawasan perdesaan dengan keputusan kepala daerah, serta mengusulkan rancangan perda mengenai insentif dan kemudahan investasi.
- ▶ Menetapkan RPKP/RPKP Perubahan yang selaras dengan RPJMD, RKPD dan mendukung capaian IPKP, untuk selanjutnya mengusulkan program kegiatan pembangunan kawasan perdesaan beserta pendanaannya sesuai RPKP dalam APBD Kabupaten dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi,

pemerintah desa serta pihak lain untuk memenuhi pendanaan di luar APBD Kabupaten.

- ▶ Menginstruksikan masing-masing OPD pelaksana untuk melaksanakan dan mempromosikan kegiatan pengembangan komoditas unggulan dan penyediaan sarana prasarana pendukung kawasan dengan melibatkan masyarakat, UMKM, BUMDesa, penyuluh, dan pendamping.
 - ▶ Menginstruksikan TKPKP untuk melaksanakan monitoring evaluasi secara berkala atas pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan serta menyiapkan data dan dokumen yang lengkap dan mutakhir untuk mendukung penilaian IPKP tahun berikutnya.
- Pembangunan Desa Terpadu
 - ▶ Pemda belum sepenuhnya mendukung pemenuhan SDM desa yang berkapasitas dan melakukan kegiatan pendampingan yang memadai untuk penguatan kelembagaan pemerintahan desa sehingga upaya penguatan kelembagaan pemerintahan desa belum optimal.
 - ▶ Pemda belum melakukan evaluasi secara memadai atas penggunaan Dana Desa untuk memastikan bahwa penggunaan Dana Desa telah sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa sehingga pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa belum optimal serta tidak tepat sasaran.
 - ▶ Pemda belum melakukan pembinaan atas pengelolaan BUMDesa secara profesional sehingga BUMDesa berpotensi rugi.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati, antara lain sebagai berikut.

- ▶ Merencanakan program dan kegiatan untuk pengembangan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa dan BPD dalam bentuk pendidikan, pelatihan, penyuluhan sesuai kebutuhan.
- ▶ Menyusun Prosedur Operasi Standar dan melaksanakan evaluasi atas alokasi prioritas penggunaan Dana Desa.
- ▶ Berkoordinasi dengan Pemerintah Desa dan Pengawas BUMDesa dalam hal penertiban pembuatan laporan keuangan dan merencanakan kegiatan pelatihan kepada pengelola BUMDesa terkait peningkatan kompetensi atau *skill* dalam pengembangan unit usaha.

- Tata Kelola Keuangan dan Aset Desa
 - ▶ Pemda belum sepenuhnya mendukung penguatan kelembagaan desa, hal ini ditunjukkan oleh beberapa permasalahan, antara lain: (1) Pemda belum menetapkan regulasi melalui peraturan daerah atau peraturan kepala daerah dan belum menyelaraskan regulasi yang ada sesuai peraturan perundangan-undangan yang mutakhir; (2) Masih terdapat SDM yang tidak mengikuti pelatihan/pembinaan; dan (3) Kegiatan pendampingan desa melalui fungsi aparatur kabupaten dan kecamatan belum optimal. Akibatnya, kelembagaan desa belum optimal melaksanakan tugas dan fungsinya.
 - ▶ Pemda belum melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa secara memadai. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa permasalahan, antara lain: (1) Inspektorat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum melakukan pengawasan berbasis risiko atas pengelolaan keuangan desa; dan (2) Kecamatan belum mengevaluasi pengelolaan dan pertanggungjawaban APBDes. Akibatnya, tujuan pengelolaan keuangan desa yang baik, tertib dan akuntabel untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat tidak tercapai.
 - ▶ Pemda belum mendukung pemerintah desa dalam mengadakan, mengamankan, menatausahakan dan memanfaatkan aset desa sesuai perencanaan dan pengelolaan aset desa secara tepat guna serta tepat sasaran. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa permasalahan antara lain: (1) Inspektorat belum sepenuhnya mengawasi program dan kegiatan tata kelola aset desa; (2) Desa belum menuangkan rencana pengelolaan aset desa dan rencana kebutuhan aset desa dalam RPJMDes dan RKPDes; dan (3) Desa belum melaksanakan penatausahaan administrasi, pengamanan, penghapusan dan penilaian aset secara memadai. Hal ini mengakibatkan timbulnya risiko penyalahgunaan dan kehilangan aset desa, serta tidak optimalnya pemanfaatan aset yang dimiliki desa.
 - ▶ Pemda belum melakukan pembinaan atas pengelolaan BUMDesa secara profesional. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa permasalahan, antara lain: (1) Terdapat BUMDesa yang telah menyusun laporan keuangan namun belum sesuai dengan ketentuan dan BUMDesa yang belum menyusun laporan keuangan; (2) BUMDesa belum ditetapkan sebagai badan hukum oleh Kemenkumham; dan (3)

BUMDesa tidak memberikan kontribusi ke Pendapatan Asli Desa (PADes). Akibatnya, tujuan pendirian dan pengembangan BUMDesa untuk penguatan ekonomi daerah tidak tercapai.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala Daerah, antara lain sebagai berikut:

- ▶ Melengkapi dan menyelaraskan regulasi terkait penguatan kelembagaan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mutakhir.
- ▶ Melaksanakan program dan kegiatan untuk pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam bentuk pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sesuai kebutuhan.
- ▶ Menginstruksikan dinas terkait, Inspektorat dan Camat untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan aset desa sesuai ketentuan.
- ▶ Menginstruksikan dinas terkait untuk berkoordinasi dengan pemerintah desa dan Pengawas BUMDesa dalam penertiban administrasi hukum, pembuatan laporan keuangan dan merencanakan kegiatan pelatihan kepada pengelola BUMDesa terkait peningkatan kompetensi untuk pengembangan unit usaha.

Kelembagaan dan Keuangan Daerah

DALAM mencapai target Pembangunan Nasional, selain menggunakan dana APBN yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga (K/L), pemerintah pusat memberikan transfer daerah berupa *mandatory spending* yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemda. Pemda wajib mengalokasikan dana dari APBD untuk mendukung *mandatory spending* yang berasal dari PAD serta pendapatan daerah lainnya.

Mandatory spending dalam pengelolaan APBN dan APBD sebagai berikut. (1) Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD; (2) Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% dari APBD di luar gaji; (3) Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% ntuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi

kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah; dan (4) Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pemeriksaan BPK atas kelembagaan dan keuangan daerah dilaksanakan untuk mendorong pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan ke-10 terutama target 10.1 pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.



Pemeriksaan BPK meliputi:

- Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam rangka mendukung kebutuhan pendanaan penyediaan infrastruktur dan pengembangan wilayah tahun 2020 s.d. 2023 pada Kementerian Keuangan selaku Pengelola Fiskal, Kementerian PPN/Bappenas, dan instansi terkait lainnya.
- Pemeriksaan kinerja efektivitas upaya Kementerian Dalam Negeri dalam Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik (SPBE) pada Kementerian Dalam Negeri.
- Pemeriksaan kinerja Program Percepatan Pemetaan Nasional Skala Besar pada Badan Informasi Geospasial (BIG).
- Pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemerintah daerah dalam pengelolaan *mandatory spending* untuk mendukung belanja daerah yang berkualitas tahun 2021 s.d. Semester I 2023 pada 25 Pemda.
- Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan belanja wajib yang berkualitas dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Pendidikan jenjang SMP dan SMA TA 2021 s.d. 2023 pada dua pemerintah daerah yaitu Pemprov Kepulauan Riau (jenjang SMA), dan Pemkot Tanjungpinang (jenjang SMP).
- Pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang dilakukan terhadap 12 obrik pada 12 pemda.
- Pemeriksaan kepatuhan atas kegiatan operasional atas 27 BUMD pada 22 pemda. Pemeriksaan dilakukan pada 18 BPD/Bank Daerah, 4 PDAM, dan 5 BUMD yang bergerak di bidang lainnya. BUMD tersebut antara

lain di Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Tengah, Pemprov Sulawesi Tengah, dan Pemprov Sulawesi Tenggara.

Hasil pemeriksaan menunjukkan capaian/upaya pemerintah daerah yang dilakukan dalam kelembagaan dan keuangan daerah, antara lain:

- Pemerintah telah menyusun dan menetapkan peraturan pelaksanaan Perpres Nomor 38 Tahun 2015 tentang KPBU dalam penyediaan infrastruktur, antara lain terkait tata cara pelaksanaan, pemberian dukungan atas proyek KPBU, pengembalian investasi dalam bentuk *Availability Payment* (AP), dan pelaksanaan pengadaan badan usaha KPBU. Selain itu juga telah mempublikasikan daftar proyek infrastruktur KPBU serta memberikan fasilitas/dukungan, baik dalam bentuk *Project Development Facility* (PDF), *Viability Gap Fund* (VGF) maupun Penjaminan Infrastruktur terhadap proyek KPBU.
- Kemendagri telah menetapkan NSPK terkait dengan proses bisnis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) jenis Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah, antara lain Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Kemendagri juga telah berupaya mendukung penerapan SIPD dengan *Business Process Redesign* (BPR) Modul Informasi Keuangan Daerah pada SIPD, *manual book* baik untuk Modul Informasi Pembangunan Daerah maupun Modul Informasi Keuangan Daerah sebagai panduan bagi pemda dalam implementasi perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah melalui SIPD.
- BIG telah memenuhi salah satu target penyediaan peta dasar wilayah darat yaitu pada skala 1:250.000 dengan capaian 100% dari target yang tertuang dalam Perpres Kebijakan Satu Peta (KSP).
- Pemda dalam pengelolaan *mandatory spending*: (1) Pemenuhan alokasi anggaran *mandatory spending* pada fungsi pendidikan minimal 20% dari belanja daerah pada 13 pemda; (2) Pemenuhan anggaran *mandatory spending* belanja wajib penanganan dampak inflasi sebesar 2% yang bersumber dari DTU pada 11 pemda; (3) Program dan kegiatan fungsi pendidikan berorientasi kepada layanan “lebih besar” daripada belanja aparatur dan operasional rutin pada 9 pemda; dan (4) Program dan kegiatan bidang infrastruktur berorientasi kepada layanan “lebih besar” daripada belanja aparatur dan operasional rutin pada 14 pemda.

- Pemprov Kepulauan Riau telah memenuhi alokasi anggaran belanja wajib di bidang pendidikan minimal 20% dari belanja daerah dan berdasarkan kebutuhan di fungsi pendidikan, dan melakukan upaya pemenuhan jumlah dan distribusi Pendidik melalui penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
- Pemkot Tanjungpinang telah menyelaraskan perencanaan bidang pendidikan dalam RKPD, Renja Dinas Pendidikan dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan telah melakukan perhitungan capaian angka partisipasi kasar (APK) di tahun 2022 dengan nilai APK untuk SMP/MTs/Paket B sebesar 94,89% yang dimuat dalam indikator kinerja utama Dinas Pendidikan tahun 2022.

Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 848 temuan yang memuat permasalahan antara lain:

Pemerintah Pusat

- Kementerian PPN/Bappenas
 - ▶ Proses identifikasi, penetapan, pengusulan proyek KPBU oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah kepada Kementerian PPN/Bappenas belum didasarkan pada analisis yang komprehensif. Selain itu, penilaian Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka penetapan Daftar Rencana KPBU (DRK) dan Public Private Partnership (PPP) Book belum didukung dengan ketersediaan pedoman/panduan teknis. Hal tersebut mengakibatkan antara lain proyek-proyek KPBU yang termuat dalam DRK dan PPP Book berisiko tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan tepat waktu.
 - ▶ Sebanyak 4 proyek KPBU Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) belum sepenuhnya dipersiapkan dan dilaksanakan secara memadai. Permasalahan pada tahap penyiapan yaitu kajian prastudi kelayakan belum sepenuhnya handal dan perjanjian kerjasama pendukung berupa perjanjian *oftaker* belum sepenuhnya disusun secara selaras dengan perjanjian KPBU. Sedangkan pada tahap pelaksanaan terdapat permasalahan antara lain keterlambatan pemenuhan komitmen pemerintah baik pemerintah pusat/daerah dalam rangka mendukung penyelenggaraan proyek KPBU SPAM. Hal tersebut mengakibatkan antara lain Penanggung Jawab Proyek

Kerjasama (PJPK) proyek KPBU SPAM berisiko menanggung beban keuangan yang semakin meningkat dan perjanjian proyek KPBU SPAM berisiko mengalami pengakhiran perjanjian akibat cidera janji PJPK kepada BUP.

- Kementerian Dalam Negeri
 - ▶ SIPD belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan proses bisnis perencanaan pembangunan daerah serta penyesuaian kebijakan pusat dan daerah, antara lain belum sepenuhnya menerapkan *application control* yang memadai untuk penjadwalan penyusunan dokumen perencanaan daerah dan penyesuaian RKPD dan RPJMD, belum sepenuhnya menyediakan fitur sesuai kebutuhan pemilik proses bisnis, dan belum sepenuhnya mendukung penyesuaian kebijakan pusat dan daerah. Akibatnya, SIPD belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan untuk pembinaan kepada pemda terkait perencanaan pembangunan daerah, dan Kemendagri belum memiliki *database* nasional yang memuat informasi mengenai keselarasan dan konsistensi antarjenis dokumen perencanaan, baik pusat maupun daerah.
 - ▶ SIPD belum sepenuhnya mendukung transparansi pengelolaan keuangan daerah dan penyajian laporan keuangan berbasis akrual, yaitu belum sepenuhnya mengakomodasi proses pengelolaan keuangan daerah, dan belum sepenuhnya mendukung penyajian laporan keuangan berbasis akrual sesuai ketentuan yang berlaku. Akibatnya, pengelolaan keuangan daerah kurang optimal karena sebagian aktivitas atau *output* perlu dihasilkan secara manual atau melalui aplikasi lainnya, keterlambatan penyampaian LKPD *Unaudited* TA 2022 kepada BPK pada lima pemda yang diuji petik, dan data dan informasi dalam SIPD belum sepenuhnya dapat digunakan oleh pemangku kepentingan.
- Badan Informasi Geospasial
 - ▶ Terkait Penyediaan peta dasar yang berkualitas dan siap pakai sesuai kebutuhan pembangunan nasional, (1) BIG belum sepenuhnya dapat menyediakan dan memenuhi target peta dasar wilayah darat yang berkualitas dan siap pakai sesuai kebutuhan pembangunan nasional; (2) Data geospasial dasar dan informasi geospasial unsur

peta dasar wilayah laut dan pantai yang berkualitas dan siap pakai sesuai pembangunan nasional belum sepenuhnya tersedia; dan (3) Informasi geospasial unsur peta dasar batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang berkualitas dan siap pakai sesuai kebutuhan nasional belum sepenuhnya tersedia. Akibatnya, peta dasar wilayah darat, peta dasar wilayah laut dan pantai, serta peta dasar batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang berkualitas dan siap pakai sesuai kebutuhan pembangunan nasional belum sepenuhnya tersedia.

- ▶ Terkait penyediaan infrastruktur informasi geospasial yang berkualitas dengan dukungan kebijakan, standar, teknologi, kelembagaan dan SDM, (1) Regulasi, kebijakan dan standar informasi geospasial untuk mendukung pembangunan nasional belum sepenuhnya tersedia dan disosialisasikan kepada *Stakeholder*; (2) SDM pada BIG dan kelembagaan informasi geospasial belum sepenuhnya efektif dalam mendukung penyediaan peta dasar; dan (3) Pengelolaan, penyebaran, dan pemanfaatan peta dasar pada BIG belum sepenuhnya memadai. Akibatnya, penyediaan infrastruktur informasi geospasial yang berkualitas dengan dukungan kebijakan, standar, teknologi, kelembagaan dan SDM belum sepenuhnya tersedia

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada:

- Menteri PPN/Kepala Bappenas agar:
 - ▶ Memerintahkan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan untuk menyusun dan menetapkan secara formal pedoman/panduan teknis yang jelas dan komprehensif dalam melakukan penilaian usulan proyek KPBU dan penetapan ambang batas pengkategorian proyek KPBU, baik Dalam Proses Penyiapan (*Under Preparation*) maupun Siap Ditawarkan (*Ready to Offer*), untuk dimasukkan dalam DRK dan PPP Book.
 - ▶ Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Badan Usaha Pelaksana (BUP), BUMD sebagai PJPK atau pihak yang mewakili PJPK Proyek KPBU SPAM, pemda, PDAM *Offtaker*, dan Kementerian PUPR serta Kementerian/instansi lainnya untuk melakukan evaluasi guna perbaikan atas tata kelola pelaksanaan proyek KPBU SPAM antara lain berkaitan dengan keselarasan perjanjian KPBU dan perjanjian pendukungnya/perjanjian *offtaker* serta penyelesaian

pembangunan dukungan proyek SPAM untuk pencapaian target sambungan rumah.

- Menteri Dalam Negeri agar menginstruksikan kepada Kepala Pusdatin melalui: (1) Sekretaris Jenderal Kemendagri dan kepada Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk mengembangkan SIPD RI Modul Informasi Pembangunan Daerah yang sesuai dengan kebutuhan penyalarsan kebijakan pusat dan daerah, sesuai dengan proses bisnis perencanaan pembangunan daerah; dan (2) Sekretaris Jenderal Kemendagri dan kepada Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah untuk mengembangkan SIPD RI Modul Informasi Keuangan Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan pengguna.
- Kepala Badan Informasi Geospasial agar:
 - ▶ Berkoordinasi dengan kementerian/instansi terkait dalam rangka percepatan penyediaan unsur peta dasar wilayah darat untuk memenuhi amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 pada Penjelasan Pasal 18 yang menyebutkan bahwa Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1:5.000 harus tersedia untuk seluruh wilayah Indonesia dan berkoordinasi dengan pemda dalam rangka penyediaan peta dasar wilayah darat.
 - ▶ Menyusun, menetapkan dan menyosialisasikan rencana induk penyelenggaraan informasi geospasial, serta menyusun, menerbitkan dan menyosialisasikan regulasi, kebijakan dan standar teknis informasi geospasial khususnya yang diamanatkan oleh Undang-undang.

Pemerintah Daerah

- *Mandatory Spending*, pemeriksaan dilaksanakan pada 25 pemda.
 - ▶ Perencanaan *mandatory spending* dalam APBD pada 13 pemda belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, di antaranya:
 - Belum menyusun rencana kebutuhan pada fungsi pendidikan berdasarkan analisis kebutuhan pada APBD yaitu perhitungan kebutuhan hanya disusun berdasarkan bidang pendidikan secara umum dan tidak mengacu pada fungsi pendidikan dalam penyajiannya.

- Belum menyusun rencana kebutuhan pada bidang infrastruktur berdasarkan analisis kebutuhan yaitu sinkronisasi belanja infrastruktur pelayanan publik pada pemda, belum memperhatikan kebutuhan riil dalam pembangunan antarwilayah.

Akibatnya, pemda berpotensi tidak dapat mewujudkan belanja daerah yang berkualitas sesuai dengan target dalam RPJMN dan RPJMD.

- ▶ Pengelolaan *mandatory spending* fungsi pendidikan dan bidang infrastruktur belum sepenuhnya mendukung belanja daerah yang berkualitas, di antaranya:

- Pemda belum memenuhi target SPM Fungsi Pendidikan dan Bidang Infrastruktur serta belum didukung dengan data yang valid. Hasil pemeriksaan menunjukkan pengisian pemenuhan target SPM Fungsi Pendidikan dan Bidang Infrastruktur masih belum menggunakan data yang valid. Data tersebut tidak berdasarkan data riil yang dimiliki oleh pemda namun sebatas data untuk pemenuhan SPM sesuai dengan target SPM yang telah ditetapkan.
- Pemda belum merealisasikan belanja fungsi pendidikan dan bidang infrastruktur sesuai dengan rencana, transparan dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa capaian realisasi belanja fungsi pendidikan dan bidang infrastruktur belum sepenuhnya terealisasikan 100% sesuai dengan rencana kebutuhan yang ditetapkan serta di antaranya dimanfaatkan tidak sesuai dengan peruntukannya.

Hal tersebut mengakibatkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan fungsi pendidikan dan bidang infrastruktur berpotensi tidak dapat memenuhi target SPM, serta capaian indikator utama (*output* dan *outcome*) khususnya fungsi pendidikan dan bidang infrastruktur berpotensi tidak dapat tercapai.

- ▶ Pemda belum sepenuhnya menindaklanjuti hasil evaluasi atas pelaksanaan penerapan SPM dan evaluasi atas capaian kinerja, di antaranya:
 - Pemda belum melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas penerapan SPM (terkait *mandatory spending* yaitu pendidikan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat).

- Pemda belum menindaklanjuti hasil evaluasi gubernur/ Kemendagri/kementerian terkait atas pelaksanaan SPM. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tidak semua tindak lanjut yang dilakukan oleh SKPD sesuai dengan catatan.
- Pemda belum melaksanakan evaluasi atas capaian kinerja kunci *output* dan kinerja kunci *outcome* yang indikatornya diselaraskan dengan target dalam RPJMN.

Hal tersebut mengakibatkan pelaksanaan dan pemenuhan *mandatory spending* berpotensi tidak terpantau serta tidak dapat menjadi tolak ukur perbaikan dan penyusunan dokumen perencanaan berikutnya dan risiko pelaksanaan atas program/ kegiatan yang berkaitan dengan *mandatory spending* tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- ▶ Anggaran *mandatory spending* terkait keuangan untuk pemerintah kota yang memiliki desa lebih besar dibandingkan anggaran pada pemerintah kabupaten. Hal itu tercermin dari permasalahan regulasi penghitungan ADD pada pemkot belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dimana alokasi lebih besar dari kebutuhan desa yang ada dalam pemkot. Akibatnya, potensi anggaran ADD tidak terealisasi secara maksimal dan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA); serta pemenuhan anggaran *mandatory spending* sesuai ketentuan belum terwujud.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala Daerah antara lain agar:

- ▶ Memerintahkan TAPD untuk mengkaji kemampuan keuangan daerah dalam pemenuhan anggaran *mandatory spending* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan kebutuhan.
- ▶ Memerintahkan Tim Pelaksana SPM di pemda untuk membuat surat edaran kepada seluruh SKPD untuk memastikan data dalam e-SPM dan realisasi penerapan SPM telah diinput sesuai kondisi sebenarnya.
- ▶ Memerintahkan kepala SKPD terkait fungsi pendidikan dan bidang infrastruktur memastikan realisasi belanja telah sesuai dengan rencana pemanfaatan dan dapat digunakan.

- ▶ Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat di Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan terkait regulasi alokasi *mandatory spending* ADD yang belum mempertimbangkan karakteristik pemerintah kota yang masih memiliki desa.
- SPM Pendidikan
 - ▶ Pemda belum berupaya secara optimal dalam mengelola pembiayaan belanja wajib yang berkualitas dalam rangka pemenuhan SPM Pendidikan. Hal ini ditunjukkan oleh permasalahan di antaranya pemda belum memprioritaskan anggaran belanja pendidikan yang berkualitas, dan penggunaan dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berpotensi tidak dapat memenuhi pencapaian SPM Pendidikan. Akibatnya, dana pendidikan yang diterima tidak dialokasikan secara memadai untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan meningkatkan kualitas pendidikan pada satuan pendidikan.
 - ▶ Pemda belum berupaya secara optimal dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. Hal ini ditunjukkan oleh permasalahan belum disusunnya perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan, dan sarana prasarana pendidikan belum sesuai kebutuhan. Akibatnya, sarana dan prasarana tidak tersedia secara memadai untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.
 - ▶ Pemda belum berupaya secara optimal dalam pemenuhan jumlah dan distribusi pendidik, hal ini ditunjukkan oleh permasalahan di antaranya belum adanya pemetaan distribusi pendidik, serta perencanaan pemenuhan jumlah dan peserta pendidik belum sesuai kebutuhan. Hal tersebut mengakibatkan potensi tidak tercapainya target pemenuhan guru serta tidak meratanya distribusi guru.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada para Kepala Daerah antara lain agar:

- ▶ Memprioritaskan alokasi anggaran yang berorientasi pada pemenuhan layanan pokok pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian SPM Pendidikan; serta memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Inspektur agar meningkatkan pengawasan terhadap penganggaran dan pengelolaan Dana BOS dan atau SPP di satuan pendidikan.

- ▶ Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan agar menyusun perencanaan sarana dan prasarana berdasarkan skala prioritas serta data yang akurat.
- ▶ Menetapkan peraturan terkait penataan dan distribusi pendidik yang memuat perhitungan kebutuhan guru dengan mempertimbangkan kualifikasi dan linearitas guru, skala prioritas pemenuhan guru, serta jam mengajar guru.

- Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah

Hasil pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan RSUD dilakukan terhadap 12 obrik pada 12 pemda. Pemeriksaan dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan ke-16 terutama target 16.5, yaitu mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.



Hasil pemeriksaan memuat permasalahan antara lain:

- ▶ RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, terdapat pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, kurang volume, dan kelebihan perhitungan harga satuan yaitu pada pengadaan jasa konsultan *masterplan* dan *Detail Engineering Design* Kawasan RSUD sebesar Rp1,86 miliar, pengadaan pembangunan sistem informasi manajemen rumah sakit sebesar Rp3,05 miliar, pekerjaan pemeliharaan sarana RSUD sebesar Rp1,52 miliar, serta pekerjaan jasa kebersihan RSUD sebesar Rp5,38 miliar, serta pekerjaan lainnya sebesar Rp4,02 miliar. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp15,83 miliar.
- ▶ Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Kabupaten Nabire, terdapat pertanggungjawaban Bendahara TA 2023 (s.d. Triwulan III) yang tidak didukung dengan dokumen pertanggungjawaban belanja barang dan jasa yang lengkap sebesar Rp2,63 miliar. Hal tersebut mengakibatkan realisasi belanja yang dibebankan pada BLUD belum dapat dinilai ketepatan penggunaannya dan risiko terjadi penyalahgunaan atas realisasi belanja tersebut.
- ▶ RSUD Biak Kabupaten Biak Numfor, hasil pengadaan bangunan gedung *Neonatal Intensive Care Unit (NICU)* *Pediatric Intensive Care Unit (PICU)* dan alat kesehatan NICU PICU yang telah diuji

fungsi sebesar Rp12,10 miliar belum dimanfaatkan. Permasalahan tersebut mengakibatkan efektivitas tujuan pengadaan bangunan dan alat kesehatan sebesar Rp12,10 miliar belum tercapai.

- ▶ RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie, pembayaran belanja honorarium sebesar Rp2,22 miliar tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu pembayaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran, Tim Pengelola Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Unit Layanan Pengadaan TA 2022 dan 2023 tidak mengacu pada standar biaya umum; pemberian honorarium PPTK tumpang tindih; dan besaran honorarium Dewan Pengawas Tahun 2022 melebihi batas maksimal yang diatur dalam Permendagri. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran honorarium sebesar Rp2,22 miliar.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah terkait agar:

- ▶ Memerintahkan Direktur RSUD Siti Fatimah agar memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp15,83 miliar dan menyetorkan ke kas BLUD.
- ▶ Menginstruksikan Direktur RSUD Kabupaten Nabire untuk melengkapi dokumen pertanggungjawaban pengeluaran belanja sebesar Rp2,63 miliar dan berkoordinasi dengan Inspektorat untuk melakukan verifikasi atas dokumen pertanggungjawaban tersebut.
- ▶ Menginstruksikan Direktur RSUD Biak untuk melakukan langkah-langkah penertiban dan percepatan pemanfaatan bangunan NICU PICU lengkap dengan alat kesehatan penunjangnya.
- ▶ Memerintahkan Direktur RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie untuk menarik dan menyetor kelebihan pembayaran honorarium ke kas BLUD sebesar Rp2,22 miliar dan mengusulkan penetapan besaran honorarium yang diberikan kepada satuan pengawas internal sesuai dengan ketentuan.

Badan Usaha Milik Daerah

- Operasional Badan Usaha Milik Daerah

Hasil pemeriksaan kepatuhan atas operasional BUMD dilakukan terhadap 27 BUMD pada 23 pemda meliputi 18 BPD/Bank Daerah, 4 PDAM, dan 5 BUMD yang bergerak di bidang lainnya. Pemeriksaan ini

dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan ke-8 terutama target 8.1 – mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional, serta target 8.10 - memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi, dan jasa keuangan bagi semua.



Hasil pemeriksaan memuat permasalahan antara lain:

► PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

Pengelolaan kredit proyek pada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jateng atas 29 debitur tidak sesuai prosedur, antara lain: (1) Kontrak induk antara calon debitur dengan pemberi kerja tidak ditemukan/tidak lengkap; (2) Verifikasi dan peninjauan langsung ke lapangan untuk mengetahui kondisi calon debitur dan pekerjaan/proyek yang akan dibiayai tidak dilakukan/tidak memadai; (3) Jaminan kredit kurang dari yang dipersyaratkan; (4) Pencairan kredit dilakukan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan dan bukti yang dilampirkan terindikasi tidak riil; (5) Kredit digunakan untuk kebutuhan selain proyek; (6) Perpanjangan jangka waktu kredit tidak didukung dengan surat keterangan dari pemberi kerja; dan (7) Monitoring perkembangan pelaksanaan proyek tidak dilakukan sehingga PT BPD Jateng tidak mengetahui adanya pembayaran kepada debitur maupun pemutusan pekerjaan debitur oleh pemberi kerja. Selain itu, klaim asuransi atas kredit macet sebesar Rp154,48 miliar yang diajukan PT BPD Jateng ditolak karena klaim tidak sesuai dengan klausul Nota Penawaran Pertanggungjawaban/SPK dan debitur masih memiliki hutang *subrogasi* kepada pihak penjamin.

Permasalahan tersebut mengakibatkan PT BPD Jateng berpotensi tidak mendapatkan pelunasan kredit dari debitur sebesar Rp216,09 miliar dan pengalihan hak tanggungan kepada pihak asuransi dengan saldo utang *subrogasi* sebesar Rp154,48 miliar tidak sesuai dengan ketentuan.

► Perumda Pembangunan Sarana Jaya

Terdapat permasalahan dalam pengelolaan kegiatan operasional Perumda Pembangunan Sarana Jaya (PPSJ) pada Pemprov DKI Jakarta, antara lain:

- PPSJ melakukan perikatan perjanjian pengikatan jual beli dengan PT LA untuk pembelian tanah di Ujung Menteng dan telah membayar sebesar Rp155,49 miliar. Namun, sampai dengan batas waktu yang ditentukan, PT LA tidak dapat memenuhi kewajiban mensertifikatkan tanah a.n. PPSJ sehingga PPSJ membatalkan transaksi jual beli tanah tersebut. PT LA baru mengembalikan uang sebesar Rp10,00 miliar kepada PPSJ, sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp145,49 miliar. Akibatnya, piutang PPSJ sebesar Rp145,49 miliar tidak tertagih dan pendapatan denda dan bunga keterlambatan sebesar Rp7,22 miliar belum diterima.
 - PPSJ melakukan pembelian tanah seluas 240.897 m² di Rorotan dari PT CIP, namun terdapat bagian tanah seluas 29.981 m² atau sebesar Rp96,59 miliar merupakan tanah milik Pemprov DKI. Hal tersebut mengakibatkan kekurangan tanah seluas 29.981 m² atau sebesar Rp96,59 miliar atas tanah milik Pemprov DKI Jakarta yang dibeli PPSJ dari PT CIP.
 - PPSJ membeli tanah seluas 67.572 m² di Kampung Malaka, Rorotan dari sdr. FHW dan telah direalisasikan pembayaran uang muka sebesar Rp80,00 miliar. Hasil pemeriksaan diketahui antara lain sdr. FHW menawarkan tanah yang bukan miliknya, terdapat revisi Prosedur Pengadaan Tanah dengan merubah dasar pembayaran dari Akta Jual Beli menjadi PPJB, serta tanah yang ditawarkan diklaim oleh pihak lain. PPSJ telah melakukan pembatalan pembelian tanah, namun baru mengembalikan uang muka sebesar Rp8,00 miliar. Permasalahan tersebut mengakibatkan uang muka yang telah dibayarkan belum diterima kembali oleh PPSJ sebesar Rp72,00 miliar.
- ▶ PT Jakarta Propertindo

Pada tahap pelaksanaan pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) terdapat permasalahan: (1) Kekurangan volume sebesar Rp4,21 miliar, ketidaksesuaian spesifikasi sebesar Rp35,74 miliar, dan pembebanan biaya jaminan pelaksanaan, tambahan pajak penghasilan, dan harga satuan tiang pancang sebesar Rp23,49 miliar pada pekerjaan pembangunan JIS tidak sesuai dengan ketentuan; (2) Kekurangan volume sebesar Rp2,19 miliar

pada pekerjaan Hunian Pekerja Pendukung Operasional Kampung Susun Bayam JIS; dan (3) Keterlambatan penyelesaian pekerjaan pembangunan JIS belum dikenakan denda sebesar Rp7,26 miliar.

Hal tersebut mengakibatkan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp65,63 miliar dan kekurangan penerimaan sebesar Rp7,26 miliar.

► PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara

Permasalahan terkait dengan pengelolaan kredit antara lain:

- Pemberian kredit kepada Sdr WF, PT MIM dan grup usaha, CV ASM, dan Sdr. KHS tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian perbankan, seperti pelampauan plafon kredit terhadap kebutuhan, tidak selesainya proyek yang dibiayai dengan kredit investasi, pelanggaran *covenant*, dan tidak terpenuhinya syarat *self-financing* dalam proses pemberian kredit debitur.
- Klaim asuransi yang diajukan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bank Sumut) sebesar Rp19,69 miliar ditolak perusahaan asuransi, karena pengajuan klaim asuransinya terlambat, tidak membayar premi, dan jangka waktu kredit melebihi ketentuan.
- Pengalihan pembayaran tagihan prestasi pekerjaan pada Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) dan Kredit Modal Kerja Transaksional Rekanan (KMK-TR) menyebabkan kredit macet sebesar Rp8,27 miliar.
- Penanganan atas kredit macet sebesar Rp25,44 miliar dengan umur tunggakan di atas 10 tahun tidak dilakukan secara optimal.

Hal tersebut mengakibatkan antara lain PT Bank Sumut memiliki risiko kredit yang berpotensi merugikan keuangan bank atas kredit macet sebesar Rp110,35 miliar.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar:

► Direktur Utama PT BPD Jateng

- Menyusun langkah-langkah untuk pengembalian kredit sebesar Rp216,09 miliar dengan skala prioritas dan jadwal yang jelas sehingga dapat dikembalikan ke Kas Bank Jateng.

- Melakukan koordinasi dengan pihak asuransi untuk melakukan penyelesaian atas pembayaran subrogasi sebesar Rp154,48 miliar.
- ▶ Direktur Utama PPSJ
- Menagih piutang sebesar Rp145,49 miliar dan pendapatan denda dan bunga keterlambatan yang belum diterima sebesar Rp7,22 miliar dari PT LA serta mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan apabila penagihan tidak dapat dilaksanakan.
 - Memerintahkan PT CIP untuk menyelesaikan penggantian tanah seluas 29.981 m2 sebesar Rp96,59 miliar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Menarik kembali pembayaran uang muka pembelian tanah sebesar Rp72,00 miliar dari Sdr. FHW dan menyetorkan ke kas PPSJ, serta mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan apabila Sdr. FHW tidak segera mengembalikan uang muka tersebut.
- ▶ Direktur Utama PT Jakpro
- Memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp65,63 miliar kepada rekanan dan menyetorkan ke rekening proyek JIS atau memperhitungkan dengan pembayaran retensi.
 - Mengenaikan denda keterlambatan sebesar Rp7,26 miliar kepada rekanan.
- ▶ Direktur Utama PT Bank Sumut
- Memerintahkan pejabat terkait agar berkoordinasi dalam melakukan upaya penyelesaian dan penanganan kredit bermasalah sesuai kebijakan bank yang berlaku.
 - Memerintahkan Pemimpin Divisi Operasional agar lebih optimal dalam mengawasi dan memonitor pengelolaan pengajuan asuransi, penerbitan polis, masa berlaku asuransi, dan klaim asuransi kepada perusahaan asuransi.

- Memerintahkan Pemimpin Divisi Penyelamatan Kredit dan Pemimpin Divisi Pengawasan berkoordinasi untuk menelusuri kredit macet dengan umur tunggakan di atas sepuluh tahun dan menginventarisasi langkah penyelesaian yang dapat ditempuh oleh Bank.

Revolusi Mental & Pembangunan Kebudayaan

REVOLUSI mental & pembangunan kebudayaan pada RKP Tahun 2023 diarahkan pada (1) Memperkuat pelaksanaan gerakan nasional revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila; (2) Memperkuat pemajuan kebudayaan untuk mengembangkan nilai luhur budaya bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat; (3) Mengembangkan moderasi beragama untuk memperkuat kerukunan dan harmoni sosial; dan (4) Mengembangkan budaya literasi, kreativitas, dan inovasi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.

Pada tahun 2023, keberhasilan prioritas nasional revolusi mental & pembangunan kebudayaan diukur pada 5 sasaran yaitu: (1) Terwujudnya Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu; (2) Terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila; (3) Meningkatnya peran dan ketahanan keluarga dalam rangka pembentukan karakter; (4) Terbangunnya ekosistem kebudayaan untuk mendukung pemajuan kebudayaan; (5) Menguatnya pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang toleran, inklusif, dan moderat di kalangan umat beragam; dan (6) Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif.

Pencapaian sasaran prioritas nasional revolusi mental & pembangunan kebudayaan dilakukan melalui 4 program prioritas (PP). Atas 4 PP tersebut, BPK melaksanakan pemeriksaan tematik di tahun 2023 pada 4 PP yang difokuskan pada pemeriksaan-pemeriksaan sebagai berikut.

Tabel 4.1 Fokus Pemeriksaan BPK Tahun 2023 atas Prioritas Nasional 4 Revolusi Mental & Pembangunan Kebudayaan

Program Prioritas (PP)	Fokus Pemeriksaan Kegiatan Prioritas (KP)		Jumlah Objek Pemeriksaan
 <p>Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter (PP1)</p>	KP2	Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan	1
	KP4	Penguatan Pusat-Pusat Perubahan Gerakan Revolusi Mental	10
	KP6	Pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara	1
 <p>Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memengaruhi arah perkembangan peradaban dunia (PP2)</p>	KP1	Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal	16
	KP2	Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya	
	KP3	Perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya	
	KP4	Pengembangan diplomasi budaya	
	KP5	Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan	
 <p>Memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial (PP3)</p>	KP4	Peningkatan kualitas pelayanan ibadah haji	3
 <p>Peningkatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter (PP4)</p>	KP1	Peningkatan budaya literasi	1
	KP4	penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi	

Hasil Pemeriksaan

PADA semester II tahun 2023, BPK memeriksa prioritas nasional revolusi mental & pembangunan kebudayaan mencakup: (1) Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan (PP1 KP2); (2) Penguatan Pusat-Pusat Perubahan Gerakan Revolusi Mental (PP1 KP4); (3) Pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara (PP1 KP6); (4) Peningkatan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan (PP2); (5) Peningkatan kualitas pelayanan ibadah haji (PP3 KP4); dan (6) Peningkatan budaya literasi dan penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi (PP4 KP1 dan KP4).

Pemeriksaan prioritas nasional revolusi mental & pembangunan kebudayaan dilakukan pada 32 obrik yang terdiri atas 9 pemerintah pusat dan 23 obrik pemda. Pemeriksaan meliputi 30 obrik kinerja dan 2 obrik DTT-kepatuhan.

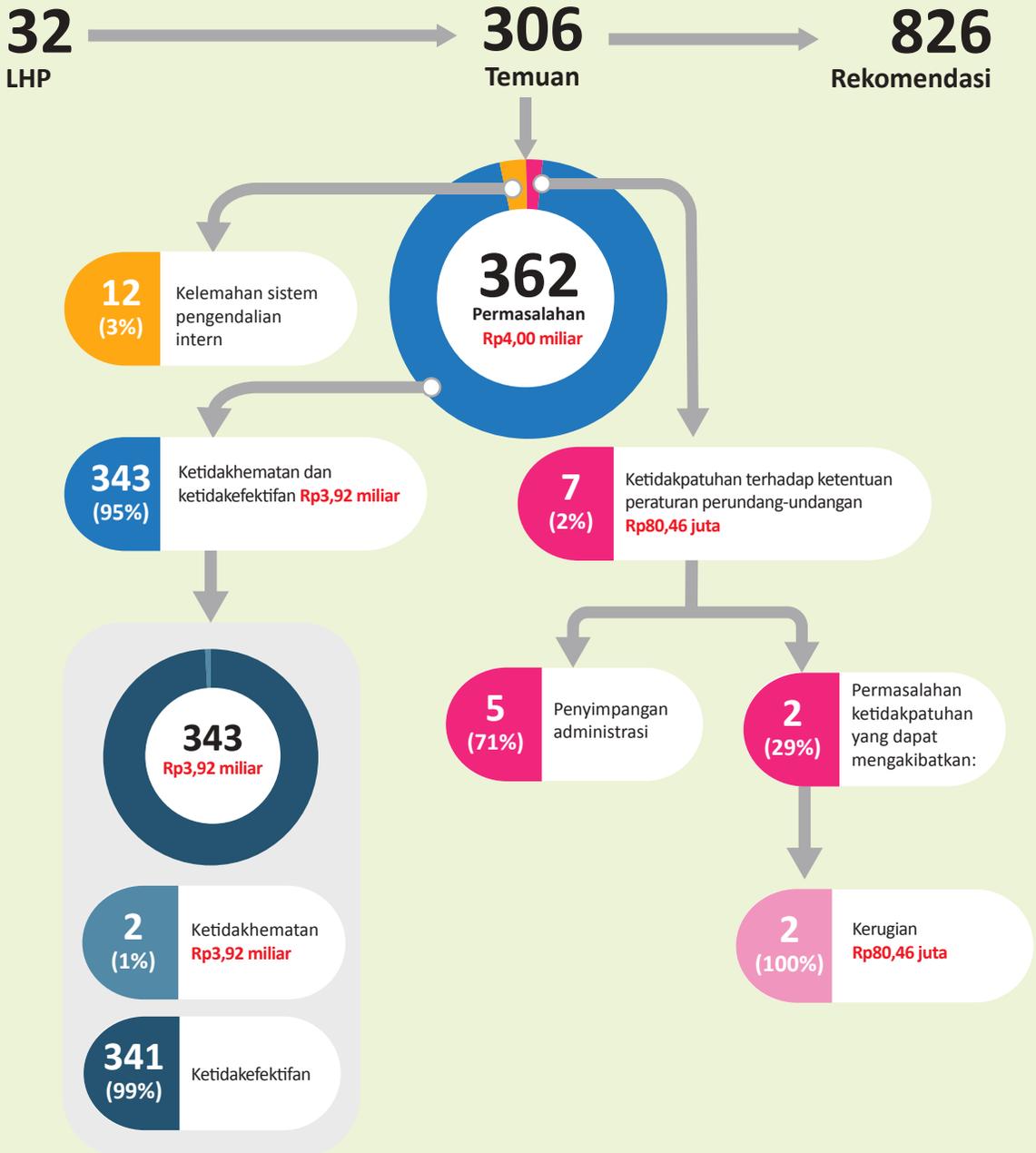
Tujuan dan simpulan hasil pemeriksaan menurut obrik atas prioritas nasional revolusi mental & pembangunan kebudayaan disajikan pada *Lampiran 5.3*.

Hasil pemeriksaan atas prioritas nasional revolusi mental & pembangunan kebudayaan mengungkapkan 306 temuan yang memuat 362 permasalahan sebesar Rp4,00 miliar. Permasalahan tersebut meliputi 12 kelemahan SPI, 7 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (selanjutnya disebut ketidakpatuhan) sebesar Rp80,46 juta, dan 343 permasalahan efisiensi, ekonomis, dan efektivitas (3E) sebesar Rp3,92 miliar. Perincian selengkapnya disajikan pada *Gambar 4.4*.

Sementara itu, rekapitulasi hasil pemeriksaan prioritas nasional revolusi mental & pembangunan kebudayaan menurut cakupan dan jenis pemeriksaan disajikan pada *Lampiran E.2* dan *Lampiran 5.4* pada *flash disk*.

Berikut ini hasil pemeriksaan atas prioritas nasional revolusi mental & pembangunan kebudayaan pada pemerintah pusat dan pemda.

GAMBAR 4.4
RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS REVOLUSI MENTAL
DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN



HASIL PEMERIKSAAN ATAS REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

(Nilai dalam Rp Juta)

Pemerintah	Jenis Pemeriksaan	Permasalahan Kelemahan SPI	Permasalahan Ketidapatuhan	Permasalahan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan	Penyetoran uang/ Penyerahan Aset Selama Proses Pemeriksaan
		Jumlah	Jumlah Nilai	Jumlah Nilai	Nilai
1. REVOLUSI MENTAL DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN (PP1-KP2)					
Pemerintah pusat	Kinerja	-	-	16	-
2. Penguatan Pusat-pusat Perubahan Gerakan Revolusi Mental (PP 1-KP 4)					
Pemerintah pusat	Kinerja	-	-	16	-
Pemerintah daerah	Kinerja	-	-	95	-
3. PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA, PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN, WAWASAN KEBANGSAAN DAN BELA NEGARA (PP 1-KP 6)					
Pemerintah pusat	Kinerja	-	-	11	-
4. PENINGKATAN PEMAJUAN DAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN (PP 2)					
Pemerintah pusat	Kinerja	-	-	9	-
Pemerintah daerah	Kinerja	-	1 51,25	154	-
5. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN IBADAH HAJI (PP 3-KP 4)					
Pemerintah pusat	Kinerja	-	-	22	-
	DTT	12	6 29,21	3 3.925,75	-
6. PENINGKATAN BUDAYA LITERASI DAN Penguatan Institusi Sosial Penggerak Literasi dan Inovasi (PP 4-KP 1 DAN KP 4)					
Pemerintah pusat	Kinerja	-	-	17	-
TOTAL		12	7 80,46	343 3.925,75	-



Revolusi Mental Dalam Tata Kelola Pemerintahan

SESUAI dengan RPJMN 2020-2024, pada PP1 terdapat Kegiatan Prioritas (KP) 2 yaitu “Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif”. KP 2 tersebut diturunkan menjadi dua ProP, antara lain ProP 2 adalah “Penerapan disiplin, *reward* dan *punishment* dalam birokrasi”. Salah satu instansi pelaksana selaku penanggung jawab proyek terkait PN 4, PP 1, KP 2, ProP 2 adalah Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hal ini dikarenakan agenda pembangunan tersebut erat kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi BKN dalam hal pengawasan dan pengendalian atas penerapan penghargaan dan hukuman disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan ke-16, khususnya target 16.5 mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.



BPK melaksanakan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengawasan dan pengendalian penegakan disiplin ASN dalam mendukung PN 4 – Revolusi Mental & Pembangunan Kebudayaan Tahun 2021 s.d. Triwulan III Tahun 2023 pada BKN dan instansi lain. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui BKN telah melakukan upaya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengendalian penegakan disiplin ASN, antara lain melaksanakan sosialisasi peraturan terkait pengawasan dan pengendalian penegakan disiplin ASN, serta memiliki layanan pengaduan terkait penegakan disiplin ASN berupa sistem informasi Integrated Disiplin (I'DIS).

Selain itu, hasil pemeriksaan mengungkapkan 11 temuan yang memuat permasalahan antara lain:

Pemerintah Pusat

- Badan Kepegawaian Negara
 - ▶ Regulasi terkait pengawasan dan pengendalian penegakan disiplin ASN belum selaras dengan regulasi penegakan disiplin ASN, karena Peraturan Pemerintah mengenai Gaji dan Tunjangan sebagaimana diamanatkan dalam UU ASN belum diterbitkan. Gaji dan tunjangan PNS yang berlaku saat ini masih mengacu pada PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP Nomor 15 Tahun 2019. Dengan belum diterbitkannya PP terkait Gaji dan Tunjangan, jenis Hukuman Disiplin

Sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja seharusnya belum berlaku. Permasalahan tersebut mengakibatkan potensi kesalahan penjatuhan hukuman disiplin oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

- ▶ Pemanfaatan I'DIS sebagai sistem informasi pelaporan proses hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Hukuman Disiplin ASN Pasal 39 Ayat (3) “pendokumentasian Keputusan hukuman disiplin termasuk dokumen dalam pemeriksaan diunggah ke dalam sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara”. Hasil pemeriksaan terhadap penggunaan I'DIS oleh instansi K/L/pemda diketahui bahwa tingkat penggunaan I'DIS yang masih rendah, yaitu versi 1 hanya 13,99% instansi yang menggunakan dan versi 2 hanya 11,94% yang menggunakan I'DIS. Berdasarkan uji petik atas 32 K/L/pemda, pemanfaatan I'DIS selama tahun 2021-2023 rata-rata sebesar 38,87%. Permasalahan tersebut mengakibatkan pemantauan pengawasan dan pengendalian penegakan disiplin ASN K/L/pemda belum optimal.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala BKN untuk:

- Berkoordinasi dengan Kementerian PANRB dalam rangka menetapkan regulasi terkait pengenaan hukuman disiplin yang berdampak pada pemotongan penghasilan ASN.
- Menginstruksikan Deputi Bidang Wasdal untuk melakukan diseminasi I'DIS kepada seluruh K/L/pemda dalam rangka penegakan disiplin ASN serta menerapkan sanksi sesuai ketentuan atas pelanggaran pelaporan penegakan disiplin ASN.

Penguatan Pusat-Pusat Perubahan Gerakan Revolusi Mental

MENGACU Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 dan sesuai dengan Pemutakhiran RKP Tahun 2023, arah kebijakan revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk penguatan pusat-pusat perubahan Gerakan Revolusi Mental (GRM) antara lain: (1) Peningkatan budaya kerja pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, efisien, dan terpercaya melalui penerapan penguatan budaya kerja ASN; (2) Penerapan disiplin, *reward*, dan *punishment* dalam birokrasi melalui upaya penegakan disiplin dan penerapan kebijakan manajemen

penghargaan ASN berbasis kinerja; dan (3) Penguatan peran gugus tugas serta pusat-pusat perubahan revolusi mental di K/L dan daerah untuk menginternalisasikan nilai esensial revolusi mental beserta kelima program Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) di masyarakat dan memperkuat jejaring pelaksanaan GNRM dalam melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan nilai-nilai esensial revolusi mental.

Salah satu sasaran PP1 adalah terwujudnya Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu, dengan indikator di antaranya nilai dimensi Gerakan Indonesia



Melayani (GIM) dengan target pada tahun 2023 dan 2024 masing-masing 79,30 dan 79,38. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan ke-16, khususnya target 16.5 mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

Untuk mendorong pelaksanaan agenda pembangunan nasional tersebut, BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas penguatan pusat-pusat perubahan GRM pada 10 obrik yang meliputi 2 obrik pemerintah pusat dan 8 obrik pemda.

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui pemerintah pusat dan pemda telah melakukan upaya, antara lain:

- Kemenko PMK telah menerbitkan pedoman umum pelaksanaan Program GNRM pada tahun 2021 yang menjadi pengganti pedoman umum dan peta jalan Program GNRM sebelumnya. Dalam pelaksanaan program GNRM berdasarkan Inpres Nomor 12 Tahun 2016, sampai dengan semester I tahun 2023 telah dibentuk Gugus Tugas Nasional GNRM di tingkat pusat, 8 Gugus Tugas K/L, 34 Gugus Tugas Provinsi, dan 474 Gugus Tugas Kabupaten/Kota.
- Kementerian PANRB telah meresmikan 139 Mal Pelayanan Publik (MPP) dan telah menyusun pedoman penyelenggaraan MPP.
- Pemerintah daerah telah menetapkan lokasi Mal Pelayanan Publik (MPP) yang strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat serta menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan MPP.

Selain itu, hasil pemeriksaan mengungkapkan 71 temuan yang memuat permasalahan antara lain:

Pemerintah Pusat

- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
 - ▶ Pelaksanaan Program GNRM belum memadai, seperti: (1) Kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian oleh Kemenko PMK dengan kementerian koordinator program gerakan dan gugus tugas belum dilaksanakan secara berkesinambungan dari tahun 2021 s.d. semester I tahun 2023; (2) Peta jalan dan pedoman umum GNRM telah disusun dan disosialisasikan, namun belum memadai seperti pedoman umum GNRM yang ditetapkan dengan Permenko PMK Nomor 6 Tahun 2021 tidak mengacu pada Inpres Nomor 12 Tahun 2016 dan diterbitkan 19 bulan sejak ditetapkannya RPJMN 2020-2024; dan (3) Kegiatan sosialisasi peta jalan dan pedoman umum GNRM telah dilaksanakan kepada pemerintah provinsi/kabupaten/kota, namun belum seluruhnya dan belum terdokumentasi dengan baik. Sedangkan kegiatan sosialisasi kepada K/L belum dilaksanakan. Akibatnya, pelaksanaan kegiatan GNRM di pusat dan daerah belum selaras dengan tujuan Inpres Nomor 12 Tahun 2016, pelaksanaan program dan kegiatan GNRM di provinsi dan kabupaten/kota tidak ada yang mengoordinasikan, menggerakkan, dan mengevaluasi serta program dan kegiatan GNRM tidak dapat terakselerasi secara komprehensif.
 - ▶ Pengukuran Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM) belum dilakukan atas masing-masing fokus program yang tertuang pada Inpres Nomor 12 Tahun 2016 dan pengukuran ICRM hanya dilakukan pada level provinsi, meskipun pengambilan sampel pengukuran keberhasilan pelaksanaan Program GNRM telah mewakili seluruh kabupaten/kota pada setiap provinsi. Permasalahan tersebut antara lain mengakibatkan nilai ICRM dan kenaikan nilai ICRM belum menggambarkan capaian hasil Program GNRM yang sebenarnya.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
 - ▶ Kementerian PANRB tidak menyusun pedoman nasional pelaksanaan GIM 2020-2023 dan tidak membentuk kelompok kerja GIM 2020-2023. Akibatnya, instansi tidak memiliki pedoman pelaksanaan Program GIM dan tujuan Program GIM dalam mendukung GNRM berpotensi tidak tercapai.

- ▶ Kementerian PANRB belum optimal dalam mengoordinasikan Program GIM, antara lain hanya mengoordinasikan Program GIM sebanyak dua kali untuk periode 2020 s.d. semester I 2023 kepada K/L dan belum mengoordinasikan Program GIM kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan instansi daerah. Akibatnya, pelaksanaan Program GIM secara nasional tidak terarah serta tujuan Program GIM dalam mendukung GNRM berpotensi tidak tercapai.
- ▶ Monitoring dan evaluasi Program GIM belum efektif, di antaranya laporan pelaksanaan GIM belum mencakup seluruh K/L/pemda dan tidak memuat indikator dan target pencapaian oleh K/L/pemda sehingga pencapaian Program GIM tidak dapat dievaluasi.
- ▶ Kementerian PANRB belum menyusun kebijakan terkait mekanisme dan prosedur pemberian layanan serta penyelenggaraan MPP digital. Akibatnya, pemberian layanan dalam MPP tidak teratur, tidak seragam, tidak terarah dan tujuan MPP dalam memberikan layanan yang cepat, mudah, terjangkau, nyaman dan aman berpotensi tidak tercapai.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada:

- Menko PMK agar:
 - ▶ Meningkatkan perannya dalam koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan GNRM sesuai Inpres Nomor 12 Tahun 2016, serta menyusun dan menetapkan peta jalan dan pedoman umum GNRM yang sesuai tujuan dalam Inpres Nomor 12 Tahun 2016.
 - ▶ Memerintahkan Gugus Tugas Nasional GNRM agar mengingatkan Koordinator Program Gerakan, Gugus Tugas Kementerian/Lembaga, Gugus Tugas Provinsi, dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota untuk menyusun dan menetapkan panduan pelaksanaan GNRM dan menyosialisasikannya secara aktif dan inovatif.
 - ▶ Menginstruksikan Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga dalam mengukur capaian hasil pelaksanaan Program GNRM melalui ICRM mempertimbangkan pengukuran atas pelaksanaan masing-masing fokus program pada setiap program gerakan yang tertuang dalam Inpres Nomor 12 Tahun 2016 tentang GNRM dan capaian kuantitatif lainnya.

- Menteri PANRB agar :
 - ▶ Menyusun pedoman nasional pelaksanaan Program GIM sebagai panduan pelaksanaan program GIM termasuk format laporan pencapaian program yang di dalamnya memuat kolom indikator, target pencapaian, dan hasil pencapaian pelaksanaannya.
 - ▶ Meningkatkan koordinasi pelaksanaan Program GIM dengan Menko PMK serta Mendagri tentang keberlanjutan Program GNRM, pelaksanaan dan sosialisasi Program GIM kepada K/L/pemda.
 - ▶ Menyusun peraturan terkait dengan mekanisme dan prosedur pemberian layanan dan penyelenggaraan MPP digital.

Pemerintah Daerah

- MPP belum memiliki dukungan kelembagaan yang ditetapkan secara formal, sehingga tujuan dalam mengintegrasikan pelayanan tidak tercapai dan komitmen untuk menyelenggarakan pelayanan publik tidak terlaksana secara optimal. Permasalahan tersebut terjadi pada 6 pemda, yaitu Kota Banda Aceh, Kota Tebing Tinggi, Kota Palembang, Kota Metro, Kabupaten Lebong, dan Kota Jambi.
- Pelayanan publik yang diberikan pada MPP belum mengupayakan kecepatan pelayanan, sehingga masyarakat pengguna tidak mendapat layanan yang optimal. Permasalahan tersebut terjadi pada 4 pemda, yaitu Kota Tebing Tinggi, Kota Jambi, Kabupaten Lebong, dan Kota Tangerang Selatan.
- Penyelenggaraan MPP belum didukung dengan monitoring dan evaluasi secara berkala, antara lain: (1) Belum semua MPP memiliki unit kerja khusus yang melakukan fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggaraan MPP, sedangkan untuk pemda yang telah memiliki tim monitoring dan evaluasi belum melaksanakan tugasnya; (2) Belum ada standar yang jelas terkait metodologi evaluasi yang digunakan, alat pengukuran, jadwal pemantauan, laporan hasil monitoring dan evaluasi, serta variabel lainnya; (3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) selaku penyelenggara MPP belum berkoordinasi dengan pejabat pengelola MPP dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Permasalahan tersebut terjadi pada 4 pemda, yaitu Kota Tebing Tinggi, Kota Palembang, Kota Metro, dan Kota Tangerang Selatan. Akibatnya kinerja penyelenggaraan MPP tidak dapat diukur dan dievaluasi.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepala daerah terkait agar:

- Berkoordinasi dengan Kemenpan RB dan Mendagri untuk meninjau ulang keberadaan MPP serta mengatur struktur organisasi, kewenangan, tugas, dan fungsi MPP dalam rangka memperkuat kelembagaan MPP.
- Bersama organisasi penyelenggara pelayanan yang tergabung dalam MPP untuk menyusun dan melaksanakan perjanjian kerja sama pelayanan, serta melakukan upaya yang optimal untuk melancarkan dan mempercepat layanan sesuai dengan SPM yang ditetapkan.
- Mengatur dan menetapkan unit kerja khusus yang melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan MPP, menyusun standar yang jelas terkait metodologi evaluasi yang digunakan, alat pengukuran, jadwal pemantauan, laporan hasil monitoring dan evaluasi, dan variabel lainnya, serta berkoordinasi dengan instansi pelaksana MPP untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi.

Pembinaan Ideologi Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara

ARAH kebijakan dan strategi Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) sesuai RPJMN 2020-2024 masuk dalam PN4 “Revolusi Mental & Pembangunan Kebudayaan”, PP1 “Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter”. Adapun kelompok kegiatan prioritasnya adalah KP6 “Pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme”. Sasaran strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) antara lain terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan ukuran keberhasilan terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam rangka mencapai sasaran strategis tersebut, dilakukan kegiatan diklat PIP yang menekankan pada pendidikan perubahan mental/sikap perilaku individu sehingga dapat memberikan teladan sosial di lingkungan sekitar.

Dalam rangka mendorong pelaksanaan kegiatan prioritas tersebut, BPK melakukan pemeriksaan pada 1 obrik pemerintah pusat yaitu pemeriksaan kinerja atas efektivitas kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka PIP pada BPIP. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-16, khususnya target 16.5 – mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.



Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui BPIP telah melakukan upaya yaitu menyusun peraturan terkait diklat PIP sesuai dengan metode dan tahapan yang telah ditetapkan dalam ketentuan, menugaskan pengajar diklat yang memenuhi kualifikasi akademis, dan menyelenggarakan fungsi evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas dan fungsi pada Direktorat Perencanaan Diklat dan Direktorat Standardisasi dan Kurikulum Diklat.

Selain itu, hasil pemeriksaan mengungkapkan 10 temuan yang memuat permasalahan antara lain:

Pemerintah Pusat

- **Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)**
 - ▶ Pemilihan jenis dan lokus diklat PIP belum dilakukan sesuai kebutuhan yaitu pemilihan lokus pelaksanaan diklat PIP belum sepenuhnya menyasar kepada daerah dengan nilai indeks Pancasila terendah. Akibatnya, daerah-daerah dengan indeks yang menggambarkan nilai Pancasila terendah belum menjadi prioritas dalam menentukan lokus dan jenis diklat.
 - ▶ Diklat PIP belum sepenuhnya diselenggarakan sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan, antara lain terkait dengan akreditasi penyelenggara dan sertifikasi pengajar yang belum dilaksanakan serta tahapan pelaksanaan aktualisasi Pancasila yang tidak dilaksanakan pada 4 dari 10 diklat PIP. Akibatnya BPIP belum dapat menyerahkan penyelenggaraan diklat PIP kepada pemda, lembaga negara dan K/L serta pengajar diklat PIP dan penceramah/fasilitator belum memiliki mutu pengajar sesuai standar yang ditetapkan, dan tujuan pembelajaran diklat PIP untuk menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya tercapai.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala BPIP agar menginstruksikan Deputi Bidang Diklat untuk :

- ▶ Membuat kajian analitis secara komprehensif dalam pemilihan jenis dan lokus diklat.
- ▶ Memerintahkan Direktur Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Diklat supaya menyelenggarakan pemberian akreditasi kepada penyelenggara diklat PIP pada pemerintah daerah, lembaga negara, dan K/L serta menyelenggarakan sertifikasi penjaminan mutu kompetensi pendidik dan pelatih Diklat PIP.
- ▶ Memerintahkan Direktur Pelaksanaan Diklat supaya menyelenggarakan tahapan pembelajaran diklat untuk semua diklat PIP sesuai ketentuan.

Peningkatan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan

MENGACU Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 dan sesuai dengan pemutakhiran RKP Tahun 2023, arah kebijakan memperkuat kemajuan kebudayaan untuk mengembangkan nilai luhur budaya bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat untuk pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya, antara lain: (1) pengembangan sarana prasarana kebudayaan, meliputi revitalisasi museum, taman budaya, sanggar, dan kelompok seni budaya, serta pemanfaatan gedung pemerintah yang tidak terpakai sebagai pusat kegiatan seni budaya; dan (2) penguatan peran pemerintah daerah dalam pengembangan ekosistem seni dan budaya lokal, termasuk fasilitasi pelaku seni budaya di daerah.

Sasaran PP2 adalah terbangunnya ekosistem kebudayaan untuk mendukung pemajuan kebudayaan, dengan indikator nilai dimensi warisan budaya, ekspresi budaya, dan ekonomi budaya. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan ke-11, khususnya target 11.3 mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.



Untuk mendorong pelaksanaan agenda pembangunan nasional tersebut, BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas peningkatan pemajuan dan pelestarian kebudayaan pada 16 obrik yang meliputi 1 obrik pemerintah pusat dan 15 obrik pemda.

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui pemerintah pusat dan pemda telah melakukan upaya, antara lain:

- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan dalam penyediaan pendanaan melalui *platform* Dana Indonesiana, di mana Kemendikbudristek telah memberikan fasilitasi bantuan pendanaan penyusunan kajian Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) dan Cagar Budaya (CB) tahun 2022, salah satunya digunakan untuk Kajian OPK sebesar Rp7,28 miliar atas 32 penerima.
- Pemerintah daerah:
 - ▶ Telah menyusun dan menetapkan struktur organisasi dan tata kerja yang menangani bidang kebudayaan.
 - ▶ Telah menyediakan sarana dan prasarana pemajuan kebudayaan antara lain berupa museum dan sanggar budaya.
 - ▶ Telah melakukan upaya internalisasi kebudayaan dalam kegiatan pendidikan melalui program penetapan kurikulum muatan lokal.

Selain itu, hasil pemeriksaan mengungkapkan 150 temuan yang memuat permasalahan antara lain:

Pemerintah Pusat

- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
 - ▶ Pemajuan kebudayaan belum didukung dengan regulasi yang memadai, antara lain (1) Sampai dengan tahun 2023, dari 35 aturan yang harus ditetapkan Kemendikbudristek baru menetapkan 7 peraturan menteri sedangkan 27 aturan lainnya belum ditetapkan, terdiri dari 18 rancangan permendikbudristek dalam proses penyusunan dan 9 aturan belum disusun; (2) Ketidaksiesuaian sistem zonasi yang diterapkan di Kawasan Candi Borobudur berdasarkan Keppres Nomor 1 Tahun 1992 dengan sistem zonasi yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2010 dan PP Nomor 1 Tahun 2022. Sampai saat ini belum ada aturan baru yang merevisi sistem zonasi tersebut; (3) Ketidaksiesuaian pembagian wewenang urusan kebudayaan antara UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang

Pemajuan Kebudayaan; dan (4) Belum ditetapkan kebijakan terkait pelibatan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan serta kebijakan untuk pemenuhan SDM dalam melaksanakan langkah strategis pemajuan kebudayaan. Akibatnya, tidak ada acuan yang memadai dalam melaksanakan pemajuan kebudayaan, sinergitas antara K/L serta pemda dalam pemajuan kebudayaan belum optimal, dan masyarakat belum dapat berperan secara optimal dalam program pemajuan kebudayaan.

- ▶ Kemendikbudristek belum optimal dalam melaksanakan langkah strategi pemajuan kebudayaan, di antaranya (1) upaya melindungi OPK/Warisan budaya tak benda (WBTb) belum berdasarkan analisis kondisi tingkat kepunahan OPK/WBTb; (2) belum memantau kondisi WBTb yang telah ditetapkan UNESCO menjadi *Intangible Cultural Heritage* (ICH); (3) belum mempunyai aturan terkait pemberian sanksi terhadap pelaku pengrusakan CB; (4) belum seluruh pemanfaatan Cagar Budaya Nasional (CBN) oleh pihak ketiga didukung oleh izin dari Kemendikbudristek, antara lain pemanfaatan bangunan Benteng Rotterdam Makassar dan kawasan CBN Kota Lama Semarang; dan (5) belum mempunyai mekanisme pemantauan atas dampak pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya. Akibatnya (1) OPK/WBTb/ICH berpotensi mengalami punah dan CB berpotensi hilang/rusak/diakui pihak lain; dan (2) pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya belum berfungsi dalam menghidupkan ekosistem kebudayaan serta belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara optimal.
- ▶ Pemajuan kebudayaan belum didukung dengan data terpadu yang memadai, antara lain (1) Kemendikbudristek belum membentuk dan mengelola Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu (SPKT) secara memadai; (2) Klasifikasi OPK pada aplikasi Data Pokok Kebudayaan (Dapobud) tidak berdasarkan klasifikasi dalam UU Pemajuan Kebudayaan; (3) atas 135.748 data CB, terdapat data ganda serta data yang telah berstatus valid hanya 8% dan di antaranya sebesar 92,29% belum didukung informasi yang lengkap; dan (4) data pelaku budaya dan lembaga kebudayaan, terdapat 35,63% dari data yang berstatus valid belum secara lengkap mencantumkan informasi mengenai riwayat aktivitas/kegiatan kebudayaan. Selain itu, belum tersedia informasi bidang keahlian pelaku budaya dan hubungan/relasi antara data pelaku budaya dengan lembaga kebudayaan maupun dengan jenis OPK. Akibatnya data dalam Dapobud belum

dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan terkait pemajuan kebudayaan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi agar:

- ▶ Menyelesaikan penyusunan rancangan peraturan menteri terkait pelaksanaan pemajuan kebudayaan dan pelestarian CB dan menetapkannya dalam peraturan menteri serta menyusun kajian keselarasan aturan-aturan terkait dalam menyelenggarakan pemajuan kebudayaan dan pelestarian CB, serta berkoordinasi dengan K/L terkait untuk menindaklanjuti hasil kajian tersebut.
- ▶ Menyusun rencana perlindungan OPK/WBTb/ICH berbasis tingkat kondisi kepunahan dan pedoman pengamanan CB, serta menyusun rencana strategis pengembangan warisan budaya.
- ▶ Menyusun rencana pengembangan SPKT yang jelas, terstruktur, dan komprehensif, serta mengelola aplikasi Dapobud yang mampu menyajikan data kebudayaan sebagai referensi pemajuan kebudayaan.

Pemerintah Daerah

- Pemajuan kebudayaan belum didukung dengan regulasi dan pokok pikiran kebudayaan daerah yang memadai di antaranya:
 - ▶ Kota Singkawang, Kota Tual, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Aceh, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Bangli belum menyusun dan menetapkan perda pemajuan kebudayaan.
 - ▶ Provinsi DKI Jakarta, Kota Bukittinggi, Kabupaten Paser, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Lembata, Kabupaten Toraja Utara, dan Kabupaten Ende telah menyusun perda pemajuan kebudayaan namun belum sepenuhnya lengkap dan selaras dengan peraturan perundang-undangan di bidang kebudayaan.
 - ▶ Kota Tual dan Kabupaten Lembata belum menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD).
 - ▶ Provinsi Aceh, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Ende, Kabupaten Paser, Kabupaten Toraja Utara, Kota Singkawang, Kota Bukittinggi, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Bangli, Kota Ternate, dan Kabupaten Lombok Tengah telah menyusun PPKD namun belum memadai.

Akibatnya, upaya pemda dalam pemajuan kebudayaan tidak memiliki acuan pelaksanaan yang lengkap dan jelas sehingga berpotensi kegiatan pemajuan kebudayaan tidak terlaksana secara optimal.

- Upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya belum optimal mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, karakter dan jati diri bangsa di antaranya:
 - ▶ Terkait upaya perlindungan warisan budaya, sebanyak 3.025 Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) belum ditetapkan sebagai CB dan 4.135 OPK belum ditetapkan sebagai WBTb, ODCB yang berasal dari hibah masyarakat belum dicatat sebagai barang milik daerah, pengamanan fisik atas ODCB belum dilaksanakan secara memadai, pemugaran ODCB/CB tanpa melalui pengkajian, pendokumentasian dan pengawasan yang memadai sehingga mengubah ODCB/CB dari bentuk aslinya.
 - ▶ Terkait upaya pengembangan warisan budaya, pelaksanaan pengkajian terhadap seluruh OPK belum optimal, pemda belum melakukan upaya pengayaan keberagaman OPK sehingga hanya dilakukan oleh para pelaku budaya secara mandiri, dan pengembangan (penelitian, revitalisasi, dan fasilitasi) CB belum dilaksanakan sesuai dengan kewenangan pemda.
 - ▶ Terkait upaya pemanfaatan warisan budaya, yaitu upaya internalisasi budaya melalui penggunaan OPK dalam kegiatan pendidikan berupa penyediaan bahan ajar muatan lokal (bahasa daerah, prakarya, dan seni budaya) belum dilaksanakan, pemda belum melaksanakan fasilitasi pengolahan OPK menjadi produk dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta pemanfaatan situs dan kawasan CB belum sepenuhnya didukung dengan sistem zonasi.

Akibatnya warisan budaya berisiko rusak/hilang/musnah, serta tujuan pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penguatan karakter dan jati diri bangsa belum tercapai.

- Data terpadu kebudayaan belum valid untuk mendukung perencanaan strategi pemajuan kebudayaan dan pembangunan daerah, antara lain :
 - ▶ Kota Bukittinggi, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Ende belum menetapkan Tim Pendataan Kebudayaan Terpadu.
 - ▶ Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Ende, Kota Tual, Kabupaten Paser, Kabupaten Lembata, Kabupaten Toraja Utara, Kota Bukittinggi, dan Kabupaten Lombok Tengah belum menetapkan uraian tugas dan tanggung jawab Tim Pendataan Kebudayaan Terpadu secara jelas.
 - ▶ Kabupaten Lembata, Kabupaten Bangli, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Lombok Tengah belum optimal mengupayakan hak akses Dapobud kepada Kemendikbudristek.
 - ▶ Kabupaten Ende, Kota Tual, Kota Singkawang, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Paser, Kabupaten Lembata, Kabupaten Toraja Utara, Kota Bukittinggi, Kabupaten Bangli, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Sleman, dan Provinsi Aceh belum memiliki mekanisme untuk inventarisasi data kebudayaan melalui SPKT.
 - ▶ Terdapat data OPK dalam Dapobud yang bukan termasuk OPK milik pemda pada Provinsi Aceh, Kota Singkawang, Kabupaten Paser, Kabupaten Lembata, dan Kabupaten Toraja Utara.
 - ▶ Terdapat duplikasi data dan kekeliruan penyajian kategori pada Provinsi DKI Jakarta, Kota Ternate, Kabupaten Lembata, Kabupaten Toraja Utara, dan Kabupaten Lombok Tengah.
 - ▶ Data tenaga dan lembaga kebudayaan belum lengkap yaitu pada Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Aceh, Kabupaten Ende, Kota Tual, Kota Ternate, Kota Singkawang, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Paser, Kabupaten Lembata, Kabupaten Toraja Utara, Kota Bukittinggi, Kabupaten Bangli, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Sleman.
 - ▶ Data SPKT/Dapobud belum dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perencanaan dan monitoring dan evaluasi pemajuan kebudayaan.

Akibatnya data kebudayaan pada SPKT tidak dapat diandalkan untuk menjadi acuan dalam menyusun perencanaan strategi pemajuan kebudayaan dan pembangunan daerah.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepala daerah agar:

- Menyusun dan memutakhirkan regulasi pemajuan kebudayaan secara lengkap mencakup WBTb dan CB yang selaras dengan UU Nomor 5 Tahun 2017 dan UU Nomor 11 Tahun 2010 beserta aturan turunannya, serta menyusun dan memutakhirkan PPKD secara periodik sesuai dengan kondisi riil di daerah mengacu kepada Perpres Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan PPKD dan Permendikbudristek Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi PPKD.
- Memproses penetapan ODCB menjadi CB dan OPK menjadi WBTb, melakukan pengkajian dan pengayaan keberagaman OPK serta pengembangan CB melalui penelitian, revitalisasi, dan fasilitasi, serta melakukan internalisasi budaya dalam kegiatan pendidikan, memfasilitasi peningkatan kualitas pengetahuan dan keterampilan masyarakat, dan menetapkan sistem zonasi di dalam rencana induk kawasan CB.
- Berkoordinasi dengan Kemendikbudristek untuk menyediakan layanan pendampingan penggunaan SPKT bagi pemda dan menginstruksikan kepala SKPD terkait untuk: (1) Menetapkan dan mengimplementasikan mekanisme pendataan, verifikasi, dan validasi Dapobud untuk menghasilkan data kebudayaan yang valid; (2) Menggunakan data SPKT yang valid untuk perencanaan strategi pemajuan kebudayaan dan pembangunan daerah.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Ibadah Haji

DALAM rangka memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial, maka dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan arah kebijakan melalui peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama yang di antaranya mencakup peningkatan kualitas penyelenggaraan haji dan umrah. Untuk mengukur peningkatan kualitas penyelenggaraan haji tersebut, maka telah ditetapkan indikator Indeks Kepuasan Layanan Ibadah Haji dengan target pada tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 85,99 dan 86,00.

Untuk mendorong pelaksanaan agenda pembangunan nasional tersebut, BPK melakukan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan kepatuhan atas pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan ibadah haji pada 3 obrik pemerintah pusat. Pemeriksaan dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan ke-16, terutama target 16.5-mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.



Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui pemerintah pusat dan pemda telah melakukan upaya, antara lain:

- Regulasi layanan akomodasi dan konsumsi di Arab Saudi serta transportasi udara yang ditetapkan oleh Kemenag telah selaras.
- Kemenag telah memberikan layanan konsumsi selama penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi sebanyak 3 kali sehari serta membentuk Pos Mina dalam rangka meningkatkan pengawasan atas keamanan dan keselamatan Jemaah haji.

Selain itu, hasil pemeriksaan mengungkapkan 38 temuan yang memuat permasalahan antara lain:

Pemerintah Pusat

- Kementerian Agama
 - ▶ Kebijakan pembatasan pendaftaran haji belum sepenuhnya mendukung pemerataan kesempatan. Daftar tunggu calon jemaah haji regular menurut data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) per 10 Oktober 2023 mencapai 5.211.899 orang, dengan masa tunggu selama 12 s.d. 48 tahun, karena pendaftaran calon jemaah haji lebih banyak dibandingkan dengan jemaah haji yang berangkat pada tahun tersebut. Untuk memberikan pemerataan kesempatan, Kemenag mengatur pendaftaran haji sekali dalam 10 tahun. Namun kebijakan tersebut belum dapat memberikan pemerataan kesempatan, sehingga terdapat 775 jemaah haji berangkat Tahun 1444H/2023M yang pernah berhaji dan 14.299 jemaah haji daftar tunggu yang pernah berhaji. Hal tersebut mengakibatkan belum terwujudnya pemerataan kesempatan haji bagi yang belum menunaikan ibadah haji.

- ▶ Regulasi dan penerapan *istithaah* kesehatan dalam penetapan jemaah haji berangkat belum sepenuhnya memadai antara lain: (1) Peraturan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) tidak memuat syarat *istithaah* kesehatan; (2) Sebanyak 203 jemaah haji tidak mengikuti pemeriksaan kesehatan tahap kedua; dan (3) Sebanyak 99.510 jemaah haji yang tidak memenuhi syarat *istithaah* kesehatan Jemaah haji, tetap berangkat haji. Akibatnya, terjadinya peningkatan kasus jemaah haji yang wafat, badal haji, safari wukuf dan penggunaan kursi roda.
- ▶ Penetapan besaran Bipih Reguler belum optimal dalam mendukung keberlanjutan keuangan haji dan berkeadilan bagi jemaah haji. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) periode 2010 s.d. 2023 mengalami peningkatan setiap tahun. BPIH Tahun 2010 sebesar Rp34,50 juta, sedangkan BPIH Tahun 2023 sebesar Rp90,05 juta, atau naik sebesar Rp55,55 juta (161%). Sementara itu, Bipih Tahun 2010 sebesar Rp30,05 juta dan Bipih Tahun 2023 sebesar Rp49,81 juta atau hanya naik sebesar Rp19,76 juta (65,78%). Sehingga, subsidi BPIH mengalami kenaikan sebesar Rp35,78 juta (803,41%) dari sebesar Rp4,45 juta pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp40,24 juta pada tahun 2023. Di sisi lain, kenaikan penerimaan nilai manfaat tidak sebanding dengan pengeluaran subsidi BPIH dan alokasinya ke *virtual account* belum mempertimbangkan asas keadilan. Penyelenggaraan ibadah haji dengan pengelolaan keuangan haji yang berlangsung selama ini memiliki potensi risiko terhadap sustainabilitas keuangan haji. Hal tersebut mengakibatkan distribusi nilai manfaat tidak mencerminkan asas keadilan bagi jemaah haji tunggu, serta risiko likuiditas dan keberlanjutan keuangan haji di masa yang akan datang.
- ▶ Pelayanan Masya'ir di Arafah, Mudzalifah, dan Mina (Armuzna) tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama antara lain pemberangkatan jemaah dari Mudzalifah menuju Mina terlambat dan penggunaan tenda maktab di Mina melebihi kapasitas. Akibatnya, kondisi jemaah kurang nyaman karena berdesakan/*overcapacity*.
- Kementerian Kesehatan
 - ▶ Penambahan 39 tenaga kesehatan haji kelompok terbang tahun 2023 tidak ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan, mengakibatkan biaya yang timbul atas penambahan tenaga

kesehatan haji Indonesia (TKHI) tidak didukung dengan dasar hukum yang memadai sesuai kewenangan administratif.

- ▶ Perencanaan kebutuhan obat haji tahun 2023 belum mempertimbangkan pola konsumsi obat dan/atau pola penyakit dan perencanaan pemenuhan kebutuhan obat untuk jemaah haji di Arab Saudi belum mempertimbangkan efisiensi biaya. Akibatnya, terdapat ketidakhematan pembelian obat dalam rangka penyelenggaraan layanan kesehatan haji tahun 1444 H/2023 M minimal sebesar Rp3,47 miliar.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada:

- Menteri Agama agar:
 - ▶ Menginstruksikan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk:
 - Melibatkan ulama untuk menyusun kajian tentang layanan haji regular hanya diberikan sekali kepada setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu, serta menyosialisasikan hasil kajian tersebut sebelum ditetapkan dalam peraturan menteri agama.
 - Mengusulkan dan menetapkan ketentuan tentang pemeriksaan kesehatan tahap kedua sebagai syarat pelunasan Bipih.
 - Melibatkan ulama untuk menyusun kajian tentang besaran alokasi nilai manfaat yang digunakan untuk menutupi BPIH dengan mempertimbangkan asas keadilan dan keberlangsungan dana haji, serta mengusulkan kepada DPR hasil kajian tersebut serta strategi penerapannya.
 - Menyepakati secara tertulis dengan syarikah penyedia layanan Armuzna mengenai mekanisme pengawasan pelayanan, serta memerintahkan Kepala Kantor Urusan Haji memperhitungkan kebutuhan fasilitas atas seluruh layanan di Armuzna sesuai jumlah jemaah haji Indonesia dan menegosiasikan kebutuhan fasilitas atas seluruh layanan di Armuzna dengan syarikah yang ditunjuk.

- ▶ Berkoordinasi dengan BPKH untuk menyusun kajian tentang mekanisme cicilan pelunasan selama masa tunggu untuk meringankan biaya pelunasan.
- Menteri Kesehatan agar memerintahkan :
 - ▶ Sekretaris Jenderal supaya menginstruksikan Kepala Puskes haji untuk :
 - Melengkapi dokumen terkait penetapan penambahan TKHI.
 - Memerintahkan Ketua Tim Kerja Pendayagunaan Sumber Daya dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Haji lebih cermat dalam melakukan perhitungan usulan kebutuhan obat dan perbekkes haji tahun 2023 dengan memperhitungkan seluruh data realisasi konsumsi obat dan pola penyakit pada penyelenggaraan haji tahun sebelumnya.
 - ▶ Direktur Jenderal Farmalkes supaya menginstruksikan:
 - Sekretaris Ditjen Farmalkes selaku KPA untuk memerintahkan PPK Penyedia Obat (selain obat *buffer*) melalui mekanisme non *e-purchasing* lebih cermat dalam melaksanakan pengadaan penyediaan obat dan perbekkes haji tahun 2023 dengan memperhitungkan efisiensi biaya dari pengadaan yang dilaksanakan.

Peningkatan Budaya Literasi dan Penguatan Institusi Sosial Pengerak Literasi dan Inovasi

LITERASI merupakan faktor esensial dalam upaya membangun fondasi yang kukuh bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan berkarakter. Pada era revolusi industri 4.0, masyarakat dengan budaya literasi tinggi mutlak diperlukan untuk menghadapi tantangan zaman, maka dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan arah kebijakan melalui PP4 - KP1 peningkatan budaya literasi dan KP4 penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.

Untuk mendorong pelaksanaan agenda pembangunan nasional tersebut, BPK melakukan pemeriksaan pada 1 obrik pemerintah pusat yaitu pemeriksaan kinerja atas efektivitas layanan pemustaka dalam rangka peningkatan budaya literasi pada Perpustakaan Nasional RI

(Perpusnas) dan instansi lain terkait. Pemeriksaan dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan ke-16, terutama target 16.5 - mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.



Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui Perpusnas telah melakukan upaya, antara lain hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan, akreditasi bagi perpustakaan kabupaten/kota dan provinsi telah mencapai 89,13% dari seluruh pemda, dan telah dilaksanakannya serangkaian kegiatan revisi regulasi Standar Nasional Perpustakaan (SNP) 2023.

Selain itu, hasil pemeriksaan mengungkapkan 12 temuan yang memuat permasalahan antara lain:

Pemerintah Pusat

- **Perpustakaan Nasional**
 - ▶ Perpunas belum mengelola koleksi serah simpan karya cetak dan karya rekam (KCKR) secara memadai, antara lain proses penerimaan, pengolahan, penyimpanan koleksi, pendayagunaan, pengawasan pelaksanaan kewajiban serah simpan, dan pelestarian preventif atas koleksi karya cetak belum sepenuhnya sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU Nomor 13 Tahun 2018. Akibatnya, karya cetak dari pelaksanaan serah simpan KCKR yang belum diolah tidak dapat segera didayagunakan dan berpotensi rusak sebelum diolah dan didayagunakan/dilayankan kepada pemustaka.
 - ▶ Perpunas belum melakukan sertifikasi pustakawan dan pelatihan teknis tenaga perpustakaan secara memadai, di antaranya tidak memilah secara jelas target peserta dalam merencanakan kegiatan sertifikasi dan pelatihan teknis tenaga perpustakaan. Akibatnya, perencanaan kebutuhan sertifikasi pustakawan belum terpetakan secara memadai dan banyak perpustakaan yang kualitas layanannya belum optimal karena tenaga perpustakaannya belum memperoleh pelatihan teknis.
 - ▶ Perpunas belum berkoordinasi dengan Kemendikbudristek dalam perumusan kebijakan dan penjaminan mutu layanan, serta belum memanfaatkan program literasi digital dari Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menyosialisasikan layanan Perpunas.

Akibatnya, fungsi penjaminan mutu layanan perpustakaan tidak berjalan, penyebaran informasi terkait layanan perpustakaan secara luas ke masyarakat belum optimal dan ketidakhematan anggaran akibat penggunaan aplikasi perpustakaan digital yang berbeda-beda.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala Perpustakaan agar memerintahkan :

- ▶ Direktur Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan (DPKP) untuk melakukan kajian terhadap jumlah penerimaan KCKR dengan baik sehingga dapat melakukan persiapan sarana penyimpanan dan melaksanakan koordinasi secara memadai untuk pengumpulan karya rekam yang dihasilkan lembaga negara dan lembaga daerah.
- ▶ Menggunakan data tenaga perpustakaan yang valid dalam merencanakan target dan pelaksanaan diklat agar dapat mengakomodir kebutuhan diklat.
- ▶ Berkoordinasi dengan Mendikbudristek untuk penyediaan fungsi pemberian nasihat, penyampaian aspirasi masyarakat serta pengawasan dan penjaminan mutu layanan perpustakaan nasional.
- ▶ Berkoordinasi dengan Menteri Kominfo untuk memanfaatkan program literasi digital dalam menyosialisasikan layanan Perpustakaan. Selain itu, berkoordinasi dengan K/L lain dalam mengembangkan aplikasi perpustakaan digital yang terintegrasi.

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Prioritas Nasional Pengembangan Wilayah dan Revolusi Mental & Pembangunan Kebudayaan

SECARA keseluruhan, hasil pemeriksaan atas prioritas nasional pengembangan wilayah dan revolusi mental & pembangunan kebudayaan pada 190 obrik mengungkapkan 1.995 temuan yang memuat 2.571 permasalahan sebesar Rp1,47 triliun. Permasalahan tersebut meliputi 529 kelemahan SPI, 401 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp1,23 triliun, dan 1.641 permasalahan 3E sebesar Rp240,56 miliar. Selama proses pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp19,47 miliar. Hasil pemeriksaan atas prioritas nasional pengembangan wilayah dan revolusi mental & pembangunan kebudayaan pada pemerintah pusat, pemda, dan BUMD, disajikan pada *Tabel 4.2.*

**Tabel 4.2 Hasil Pemeriksaan Prioritas Nasional Pengembangan Wilayah dan Revolusi Mental & Pembangunan Kebudayaan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan BUMD
(Nilai dalam Rp Juta)**

Uraian	Pemerintah Pusat		Pemerintah Daerah		BUMD		Total	
	Perma- salahan	Nilai	Perma- salahan	Nilai	Perma- salahan	Nilai	Perma- salahan	Nilai
A. Kelemahan SPI	26	-	141	-	362	-	529	-
• Kelemahan SPI	26	-	141	-	362	-	529	-
B. Ketidapatuhan	24	2.324,71	148	74.161,84	229	1.157.565,53	401	1.234.052,08
• Ketidapatuhan yang dapat mengakibatkan :								
• Kerugian	6	2.140,91	78	34.235,93	48	292.062,89	132	328.439,73
• Potensi Kerugian	2	-	9	1.586,82	78	710.120,18	89	711.707,00
• Kekurangan Penerimaan	1	183,80	28	38.339,09	26	155.382,46	55	193.905,35
Sub Total	9	2.324,71	115	74.161,84	152	1.157.565,53	276	1.234.052,08
• Penyimpangan Administrasi	15	-	33	-	77	-	125	-
C. Temuan 3E	172	17.223,88	1.458	13.791,40	11	209.548,92	1.641	240.564,20
• Ketidakhematan	4	11.223,88	10	1.684,32	9	209.548,92	23	222.457,12
• Ketidakefisienan	-	-	-	-	-	-	-	-
• Ketidakefektifan	168	6.000,00	1.448	12.107,08	2	-	1.618	18.107,08
Total (A+B+C)	222	19.548,59	1.747	87.953,24	602	1.367.114,45	2.571	1.474.616,28
Nilai penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan		930,89		5.407,48		13.132,08		19.470,45
Jumlah Temuan		183		1.436		376		1.995
Jumlah Rekomendasi		453		4.115		990		5.558
Jumlah LHP		19		144		27		190



**IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER II TAHUN 2023**



BAB V

Hasil Pemantauan BPK

UNTUK memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2006, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah oleh pemerintah. Hasil pemantauan tersebut selanjutnya disampaikan setiap satu semester sekali kepada lembaga perwakilan yaitu DPR, DPD, dan DPRD dalam bentuk IHPS. Selain itu, BPK memantau atas pemanfaatan hasil pemeriksaan investigatif (PI), penghitungan kerugian negara (PKN), dan pemberian keterangan ahli (PKA).

Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

IHPS II Tahun 2023 memuat hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) atas LHP yang diterbitkan tahun 2005-2023. Hasil pemantauan pelaksanaan TLRHP atas LHP yang diterbitkan tahun 2005-2009, 2010-2014, dan 2015-2019 disajikan secara umum, sedangkan hasil pemantauan atas LHP yang diterbitkan tahun 2020-2023 disajikan menurut entitas kementerian/lembaga, pemerintah daerah/BUMD, BUMN, dan badan lainnya.

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan/atau sanksi pidana.

BPK melakukan pemantauan pelaksanaan TLRHP untuk menentukan sejauh mana pejabat terkait telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan. Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi disampaikan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pejabat yang bertanggung jawab kepada BPK. Selanjutnya, BPK menelaah jawaban tersebut untuk menentukan apakah jawaban/penjelasan pejabat tersebut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK.

Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, hasil penelaahan tindak lanjut diklasifikasikan dalam **4 status** yaitu: (1) Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi; (2) Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi; (3) Rekomendasi belum ditindaklanjuti; dan (4) Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Suatu rekomendasi dinyatakan telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara memadai oleh pejabat dan tindak lanjut tersebut sudah sesuai dengan rekomendasi dan rencana aksi yang disertai dengan bukti pendukung. Rekomendasi BPK diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah/perusahaan pada entitas yang bersangkutan.

Dalam rangka pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan ini, BPK menatausahakan LHP dan menginventarisasi temuan, rekomendasi, dan status tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP, serta nilai penyerahan aset atau penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan. Secara umum, rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti dengan cara penyetoran uang/aset ke negara/daerah/perusahaan atau melengkapi pekerjaan/barang, dan tindakan administratif berupa pemberian peringatan, teguran, dan/atau sanksi kepada para penanggung jawab dan/atau pelaksana kegiatan. Tindakan administratif juga dapat berupa tindakan koreksi atas penatausahaan keuangan negara/daerah/perusahaan, melengkapi bukti pertanggungjawaban, dan perbaikan atas sebagian atau seluruh sistem pengendalian intern.

Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti adalah rekomendasi BPK yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional BPK antara lain perubahan organisasi yang berpengaruh terhadap keberadaan organisasi, perubahan regulasi, atau keadaan kahar.

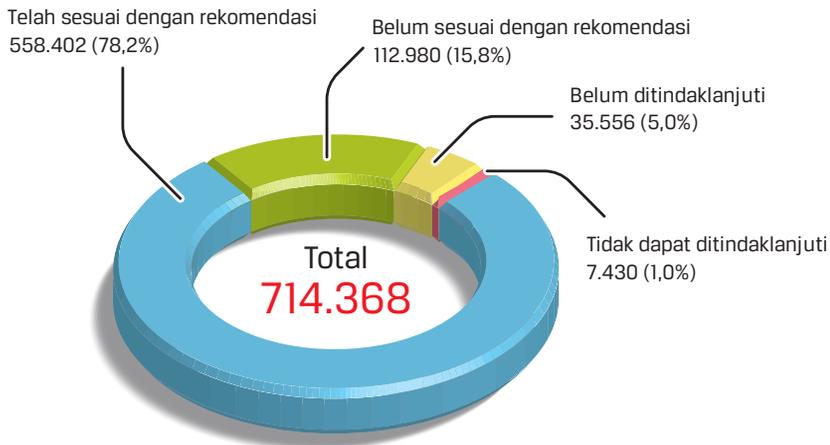
Pada periode 2005-2023, BPK telah menyampaikan **714.368 rekomendasi** hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa sebesar **Rp319,99 triliun**, dengan status tindak lanjut sebagai berikut.

- Sesuai dengan rekomendasi sebanyak 558.402 rekomendasi (78,2%) sebesar Rp158,37 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 112.980 rekomendasi (15,8%) sebesar Rp114,36 triliun.
- Belum ditindaklanjuti sebanyak 35.556 rekomendasi (5,0%) sebesar Rp22,60 triliun.
- Tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 7.430 rekomendasi (1,0%) sebesar Rp24,66 triliun.

Secara kumulatif sampai dengan tahun 2023, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-2023 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar **Rp136,88 triliun**, di antaranya sebesar **Rp21,87 triliun** atas hasil pemeriksaan periode RPJMN (2020-2023).

Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi periode 2005-2023 menurut jumlah rekomendasi disajikan pada *Grafik 5.1*.

**Grafik 5.1 Hasil Pemantauan TLRHP Periode 2005-2023
Menurut Jumlah Rekomendasi**



Rekapitulasi hasil pemantauan pelaksanaan TLRHP atas LHP yang diterbitkan tahun 2005-2023 dikelompokkan menurut periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yaitu RPJMN 2005-2009, 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024 (untuk LHP 2020-2023) disajikan pada *Grafik 5.2*.

Pemantauan TLRHP 2005–2009

BPK telah menyampaikan 138.888 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 2005-2009 kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp74,47 triliun, dengan hasil pemantauan sebagai berikut.

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 123.392 rekomendasi (88,9%) sebesar Rp57,87 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 11.390 rekomendasi (8,2%) sebesar Rp11,67 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 1.554 rekomendasi (1,1%) sebesar Rp553,09 miliar.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 2.552 rekomendasi (1,8%) sebesar Rp4,38 triliun.

GRAFIK 5.2

HASIL PEMANTAUAN TERHADAP PELAKSANAAN TLRHP OLEH ENTITAS MENURUT PERIODE RPJMN

2005-2009

- 123.392 (88,9%)
- 11.390 (8,2%)
- 1.554 (1,1%)
- 2.552 (1,8%)

Total
138.888

2010-2014

- 192.910 (86,0%)
- 24.103 (10,7%)
- 3.919 (1,7%)
- 3.537 (1,6%)

Total
224.469

2015-2019

- 162.035 (81,1%)
- 33.436 (16,7%)
- 3.061 (1,5%)
- 1.301 (0,7%)

Total
199.833

2020-2023

- 80.065 (52,9%)
- 44.051 (29,1%)
- 27.022 (17,9%)
- 40 (0,1%)

Total
151.178

Telah sesuai dengan rekomendasi

Belum sesuai dengan rekomendasi

Belum ditindaklanjuti

Tidak dapat ditindaklanjuti

Secara kumulatif sampai dengan tahun 2023, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-2009 yang ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp48,24 triliun.

Pemantauan TLRHP 2010–2014

BPK telah menyampaikan 224.469 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 2010-2014 kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp64,93 triliun, dengan hasil pemantauan sebagai berikut.

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 192.910 rekomendasi (86,0%) sebesar Rp35,44 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 24.103 rekomendasi (10,7%) sebesar Rp21,04 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 3.919 rekomendasi (1,7%) sebesar Rp645,78 miliar.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 3.537 rekomendasi (1,6%) sebesar Rp7,80 triliun.

Secara kumulatif sampai dengan tahun 2023, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2010-2014 yang ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp32,67 triliun.

Pemantauan TLRHP 2015–2019

BPK telah menyampaikan 199.833 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 2015-2019 kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp116,20 triliun, dengan hasil pemantauan sebagai berikut.

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 162.035 rekomendasi (81,1%) sebesar Rp49,73 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 33.436 rekomendasi (16,7%) sebesar Rp53,44 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 3.061 rekomendasi (1,5%) sebesar Rp567,18 miliar.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 1.301 rekomendasi (0,7%) sebesar Rp12,47 triliun.

Secara kumulatif sampai dengan tahun 2023, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2015-2019 yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp34,10 triliun.

Pemantauan TLRHP Tahun 2020–2023

BPK telah menyampaikan 151.178 rekomendasi atas hasil pemeriksaan tahun 2020-2023 kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp64,38 triliun, dengan hasil pemantauan sebagai berikut.

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 80.065 rekomendasi (52,9%) sebesar Rp15,33 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 44.051 rekomendasi (29,1%) sebesar Rp28,21 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 27.022 rekomendasi (17,9%) sebesar Rp20,84 triliun.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 40 rekomendasi (0,1%) sebesar Rp7,26 miliar.

Secara kumulatif rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan tahun 2020-2023 yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp21,87 triliun.

Perincian hasil pemantauan pelaksanaan TLRHP menurut periode RPJMN selengkapnya disajikan pada *Lampiran F.1*.

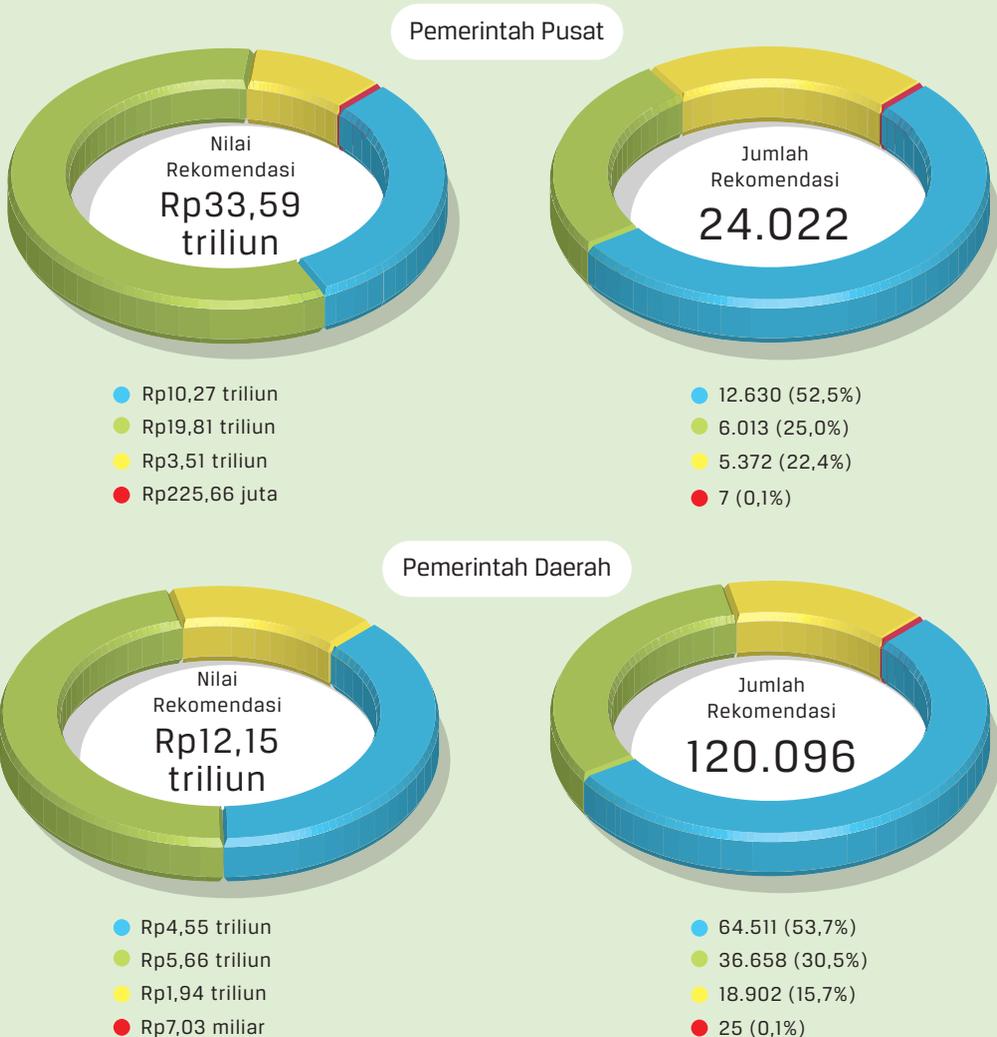
Adapun hasil pemantauan pelaksanaan TLRHP atas LHP yang diterbitkan tahun 2020-2023 untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan Badan Lainnya dapat dilihat pada *Grafik 5.3* dengan penjelasan sebagai berikut.

GRAFIK 5.3

HASIL PEMANTAUAN PELAKSANAAN TLRHP ATAS LHP YANG DITERBITKAN TAHUN 2020-2023

BPK telah menyampaikan 151.178 rekomendasi atas hasil pemeriksaan tahun 2020-2023 kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp64,38 triliun. Adapun hasil pemantauan pelaksanaan TLRHP untuk tahun tersebut baik pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN maupun Badan Lainnya sebagai berikut.

- Telah sesuai dengan rekomendasi
- Belum sesuai dengan rekomendasi
- Belum ditindaklanjuti
- Tidak dapat ditindaklanjuti



Total Tahun 2020-2023



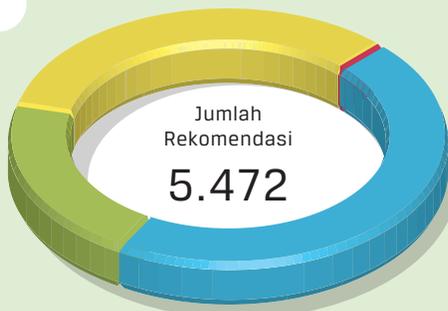
- 80.065 rekomendasi (52,9%) sebesar Rp15,33 triliun
- 44.051 rekomendasi (29,1%) sebesar Rp28,21 triliun
- 27.022 rekomendasi (17,9%) sebesar Rp20,84 triliun
- 40 rekomendasi (0,1%) sebesar Rp7,26 miliar

Secara kumulatif rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan tahun 2020-2023 yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp21,87 triliun. Perincian pemantauan TLRHP menurut jumlah dan nilai rekomendasi serta penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan per tahunnya dapat dilihat pada *Lampiran F.1*.

BUMN



- Rp263,97 miliar
- Rp2,48 triliun
- Rp3,01 triliun

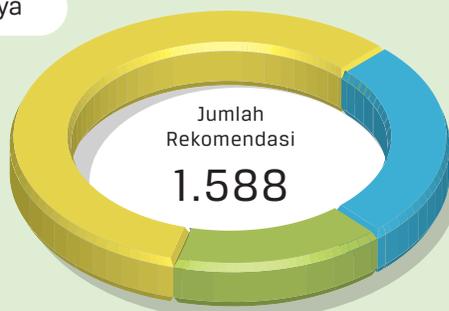


- 2.512 (46,0%)
- 1.128 (20,6%)
- 1.824 (33,3%)
- 8 (0,1%)

Badan Lainnya



- Rp248,69 miliar
- Rp252,63 miliar
- Rp12,38 triliun



- 412 (25,9%)
- 252 (15,9%)
- 924 (58,2%)

Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Pusat

BPK memantau pelaksanaan TLRHP tahun 2020-2023 pada kementerian/l lembaga sebanyak 24.022 rekomendasi sebesar Rp33,59 triliun. Dari jumlah tersebut, yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 12.630 rekomendasi (52,5%) sebesar Rp10,27 triliun. Sebanyak 6.013 rekomendasi (25,0%) sebesar Rp19,81 triliun belum sesuai dengan rekomendasi. Sebanyak 5.372 rekomendasi (22,4%) sebesar Rp3,51 triliun belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 7 rekomendasi (0,1%) tidak dapat ditindaklanjuti sebesar Rp225,66 juta. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset/penyetoran ke kas negara sebesar Rp14,61 triliun. Hasil pemantauan pelaksanaan TLRHP periode 2005-2023 pada entitas pemerintah pusat disajikan pada *Lampiran 6.1* dalam *flash disk*.

Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Daerah

BPK memantau pelaksanaan TLRHP tahun 2020-2023 pada pemerintah daerah sebanyak 120.096 rekomendasi sebesar Rp12,15 triliun. Dari jumlah tersebut, yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 64.511 rekomendasi (53,7%) sebesar Rp4,55 triliun. Sebanyak 36.658 rekomendasi (30,5%) sebesar Rp5,66 triliun belum sesuai dengan rekomendasi. Sebanyak 18.902 rekomendasi (15,7%) sebesar Rp1,94 triliun belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 25 rekomendasi (0,1%) sebesar Rp7,03 miliar tidak dapat ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/daerah sebesar Rp6,62 triliun. Hasil pemantauan pelaksanaan TLRHP periode 2005-2023 pada pemerintah daerah disajikan pada *Lampiran 6.2* dalam *flash disk*.

Hasil Pemantauan TLRHP pada BUMN

BPK memantau pelaksanaan TLRHP tahun 2020-2023 pada BUMN sebanyak 5.472 rekomendasi sebesar Rp5,76 triliun. Dari jumlah tersebut, yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 2.512 rekomendasi (46,0%) sebesar Rp263,97 miliar. Sebanyak 1.128 rekomendasi (20,6%) sebesar Rp2,48 triliun belum sesuai dengan rekomendasi, sebanyak 1.824 rekomendasi (33,3%) sebesar Rp3,01 triliun belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 8 rekomendasi (0,1%) tidak dapat ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/perusahaan sebesar Rp385,38 miliar. Hasil pemantauan pelaksanaan TLRHP periode 2005-2023 pada BUMN disajikan pada *Lampiran 6.3* dalam *flash disk*.

Hasil Pemantauan TLRHP pada Badan Lainnya

BPK memantau pelaksanaan TLRHP tahun 2020-2023 pada Badan Lainnya sebanyak 1.588 rekomendasi sebesar Rp12,88 triliun. Dari jumlah tersebut, yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 412 rekomendasi (25,9%) sebesar Rp248,69 miliar. Sebanyak 252 rekomendasi (15,9%) sebesar Rp252,63 miliar belum sesuai dengan rekomendasi, dan sebanyak 924 rekomendasi (58,2%) sebesar Rp12,38 triliun belum ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/badan lainnya sebesar Rp253,92 miliar. Hasil pemantauan pelaksanaan TLRHP periode 2005-2023 pada Badan Lainnya disajikan pada *Lampiran 6.4* dalam *flash disk*.

Selain itu, pelaksanaan atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang dilakukan oleh pejabat entitas selama periode 2020-2023 telah memberikan dampak antara lain:

- Peningkatan kualitas penyajian laporan keuangan baik pada Kementerian/ Lembaga/BUN (K/L/BUN) maupun pemerintah daerah. Hal ini ditunjukkan dari adanya kenaikan jumlah K/L/BUN yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari semula pada tahun 2019 sebesar 97% menjadi 99% pada tahun 2022. Sementara itu, untuk pemerintah daerah, dari semula pada tahun 2019 sebesar 89,5% menjadi 91% pada tahun 2022.
- Peningkatan pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK. Hal ini ditunjukkan oleh adanya peningkatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK sejak tahun 2005, yang semula sebesar 74,3% pada tahun 2019 menjadi sebesar 78,2% pada tahun 2023.
- Penyelamatan uang negara berupa penyetoran uang ke kas negara/daerah/ perusahaan sebesar Rp21,87 triliun dan penghematan keuangan negara yang berasal dari koreksi subsidi dan *cost recovery* masing-masing sebesar Rp8,25 triliun dan Rp8,13 triliun.
- Perbaikan pengelolaan keuangan negara dan pelayanan publik pada pemerintah daerah, antara lain:
 - Perbaikan pengelolaan kas melalui penertiban dan penetapan rekening kas daerah serta penerapan transaksi nontunai untuk setiap pengelolaan pendapatan dan belanja, di antaranya pada Pemkab Tebo, Pemkab Prabumulih, Pemkab Lumajang, dan Pemkab Aceh Singkil.

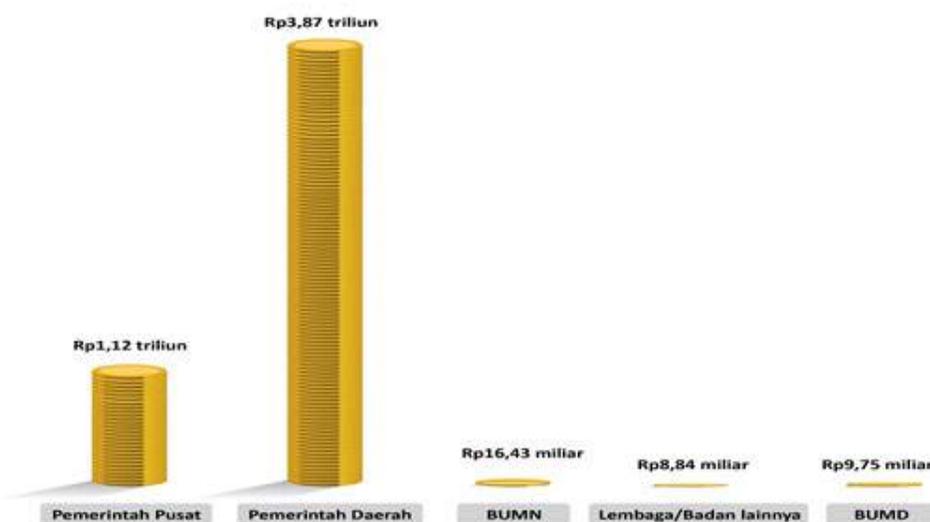
- ▶ Perbaiki pengelolaan perpajakan dan retribusi melalui penerbitan/ perubahan peraturan kepala daerah tentang tarif maupun mekanisme pemungutan pajak dan retribusi, pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak, layanan perpajakan secara *online* berupa pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pemberitahuan ketetapan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) kepada masyarakat, pemutakhiran nilai jual objek pajak (NJOP) sesuai dengan kondisi terkini, di antaranya pada Pemprov Bengkulu, Pemprov Lampung, Pemkab Tabalong, Pemkab Sumba Tengah, Pemkab Bogor, Pemkab Manggarai, dan Pemkab Batu Bara.
- ▶ Perbaiki kualitas data melalui pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) sebagai basis data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, pemutakhiran data pengguna sistem penyediaan air minum (SPAM) di wilayah pedesaan sebagai bahan monitoring pengelolaan SPAM oleh pemerintah desa, penyusunan Daftar Profil Investasi Sektor Pariwisata yang sudah terdaftar pada *Online Single Submission* (OSS), di antaranya pada Pemkab Belu, Pemkab Tana Tidung, Pemkot Tarakan, Pemprov DKI Jakarta, Pemkab Sumba Timur, Pemkab Tanah Laut.
- ▶ Perbaiki kualitas pelayanan melalui Program Pelayanan Perizinan *Mobile* (keliling) bagi pelaku usaha, pemutakhiran SOP dan standar pelayanan perizinan sesuai identifikasi waktu layanan, pemenuhan sarana prasarana pendukung penyediaan air minum, di antaranya pada Pemkot Medan, Pemkab Gorontalo, Pemkab Tangerang, dan Pemkot Tarakan.
- ▶ Perbaiki pengelolaan belanja barang dan jasa melalui penyusunan maupun pemutakhiran standar harga satuan yang mengacu pada Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, di antaranya pada Pemkab Balangan, Pemkab Tabalong, Pemkab Gorontalo Utara, Pemkab Bone Bolango, Pemkab Nias, dan Pemkab Tapanuli Selatan.
- ▶ Perbaiki tata kelola pelaporan keuangan melalui pemutakhiran kebijakan akuntansi yang ditetapkan melalui peraturan kepala daerah guna mendorong keandalan pelaporan keuangan, di antaranya pada Pemkab Kupang, Pemkab Tanah Bumbu, Pemkot Tangerang, dan Pemkot Banjarmasin.

Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah

IHPS II Tahun 2023 memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah periode 2005-2023 dengan status telah ditetapkan. Nilai penyelesaian ganti kerugian negara/daerah tersebut tidak termasuk nilai kerugian negara/daerah dari hasil penghitungan kerugian negara atas permintaan instansi yang berwenang dalam rangka penanganan kasus tindak pidana korupsi.

Hasil pemantauan menunjukkan kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan selama periode 2005-2023 sebesar Rp5,02 triliun. Kerugian negara/daerah tersebut terjadi pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, Lembaga/Badan Lainnya, dan BUMD, seperti disajikan pada *Grafik 5.4*.

Grafik 5.4 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Periode 2005-2023 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Pengelola Anggaran



Berdasarkan *Grafik 5.4*, kerugian negara/daerah yang terjadi pada pemerintah daerah sebesar Rp3,87 triliun (77,03%) merupakan nilai yang terbesar dari total kerugian negara/daerah dengan status telah ditetapkan periode 2005-2023 sebesar Rp5,02 triliun. Sementara itu, total kerugian negara pada pemerintah pusat, BUMN, Lembaga/Badan Lainnya, dan BUMD berturut-turut sebesar Rp1,12 triliun (22,27%), Rp16,43 miliar (0,33%), Rp8,84 miliar (0,18%), dan Rp9,75 miliar (0,19%).

Secara total, tingkat penyelesaian kerugian yang terjadi pada periode 2005-2023 tersebut menunjukkan terdapat angsuran sebesar Rp1,40 triliun (27,78%), pelunasan sebesar Rp1,80 triliun (35,86%), dan penghapusan sebesar Rp97,84 miliar (1,95%). Dengan demikian, masih terdapat sisa kerugian sebesar Rp1,73 triliun (34,41%).

Secara terperinci tingkat penyelesaian ganti kerugian negara/daerah dengan status telah ditetapkan melalui pengangsuran, pelunasan, dan penghapusan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, Lembaga/Badan Lainnya, dan BUMD masing-masing sebesar 74,34%, 63,45%, 19,12%, 22,33%, dan 29,27%. Data tersebut menunjukkan bahwa pemerintah pusat memiliki persentase penyelesaian ganti rugi negara yang paling tinggi.

Hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah tahun 2005-2023 menurut penanggung jawab dan pengelola anggaran dapat dilihat pada *Grafik 5.5* dengan penjelasan sebagai berikut.

Pemerintah Pusat

HASIL pemantauan penyelesaian ganti kerugian pada pemerintah pusat menunjukkan bahwa: terdapat kerugian negara sebesar Rp1,12 triliun dengan tingkat penyelesaian yang terdiri atas angsuran sebesar Rp461,38 miliar (41,25%), pelunasan sebesar Rp338,02 miliar (30,23%), dan penghapusan sebesar Rp32,02 miliar (2,86%). Sisa kerugian pada pemerintah pusat sebesar Rp287,01 miliar (25,66%).

Pemerintah Daerah

HASIL pemantauan penyelesaian ganti kerugian pada pemerintah daerah menunjukkan bahwa terdapat kerugian daerah sebesar Rp3,87 triliun dengan tingkat penyelesaian yang terdiri atas angsuran sebesar Rp927,53 miliar (23,97%), pelunasan sebesar Rp1,46 triliun (37,78%), dan penghapusan sebesar Rp65,65 miliar (1,70%). Sisa kerugian pada pemerintah daerah sebesar Rp1,42 triliun (36,55%).

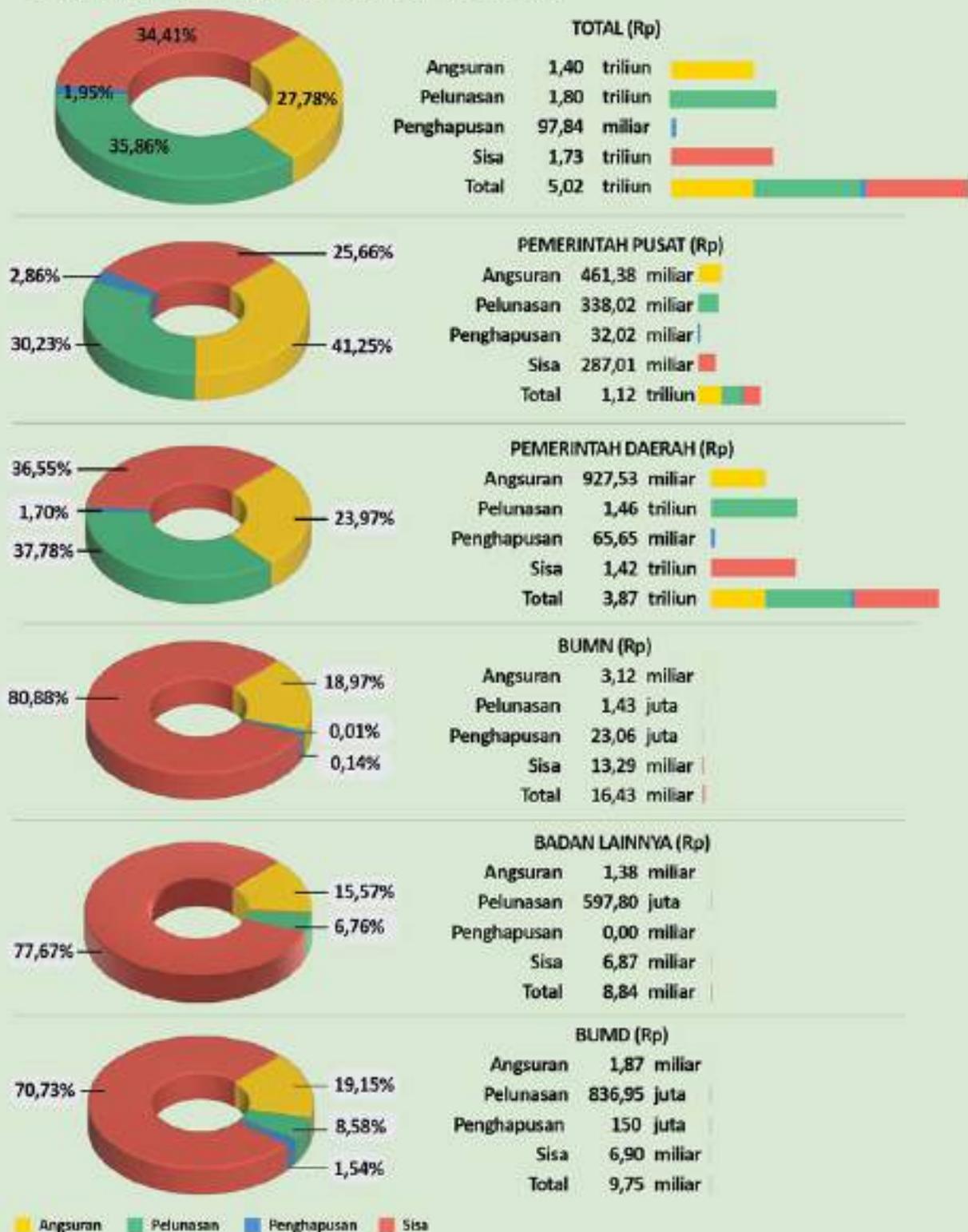
BUMN

HASIL pemantauan penyelesaian ganti kerugian pada BUMN menunjukkan bahwa terdapat kerugian sebesar Rp16,43 miliar dengan tingkat penyelesaian yang terdiri atas angsuran sebesar Rp3,12 miliar (18,97%), pelunasan sebesar Rp1,43 juta (0,01%), dan penghapusan sebesar Rp23,06 juta (0,14%). Sisa kerugian pada BUMN sebesar Rp13,29 miliar (80,88%).

GRAFIK 5.5

HASIL PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH PERIODE 2005-2023

Dengan status telah ditetapkan menurut tingkat penyelesaian



Badan Lainnya

HASIL pemantauan penyelesaian ganti kerugian pada Lembaga/Badan Lainnya menunjukkan bahwa terdapat kerugian daerah sebesar Rp8,84 miliar dengan tingkat penyelesaian yang terdiri atas angsuran sebesar Rp1,38 miliar (15,57%), pelunasan sebesar Rp597,80 juta (6,76%), dan tidak terdapat penghapusan. Sisa kerugian pada Lembaga/Badan Lainnya sebesar Rp6,87 miliar (77,67%).

BUMD

HASIL pemantauan penyelesaian ganti kerugian pada BUMD menunjukkan bahwa terdapat kerugian sebesar Rp9,75 miliar dengan tingkat penyelesaian yang terdiri atas angsuran sebesar Rp1,87 miliar (19,15%), pelunasan sebesar Rp836,95 juta (8,58%), dan penghapusan sebesar Rp150 juta (1,54%). Sisa kerugian pada BUMD sebesar Rp6,90 miliar (70,73%).

Adapun perincian hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah tahun 2005-2023 menurut penanggung jawab dan pengelola anggaran disajikan dalam *Lampiran F.2.1* dan *F.2.2*.

Pemantauan atas Pemanfaatan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli

IHPS II Tahun 2023 memuat hasil pemantauan atas pemanfaatan laporan hasil PI dan PKN serta PKA yang diterbitkan periode 2017-2023. Pemantauan dilakukan terhadap pemanfaatan laporan hasil PI dalam proses penyidikan dan penyelidikan; pemanfaatan laporan hasil PKN dalam persiapan P-21 (berkas penyidikan sudah lengkap) dan proses penyidikan; serta PKA yang dihadiri BPK untuk digunakan dalam tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

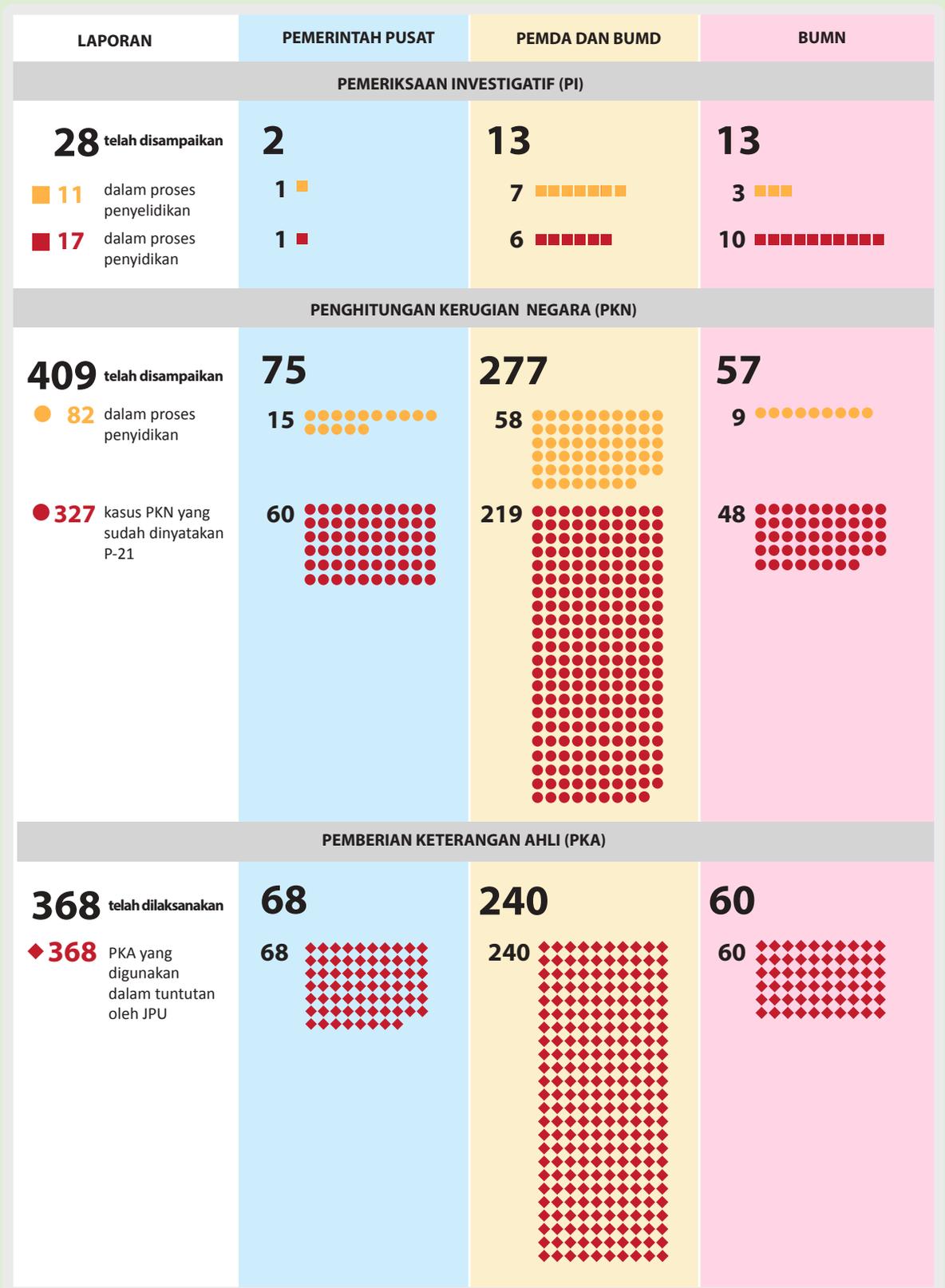
Pada periode 2017-2023, BPK menyampaikan 28 laporan hasil PI dengan nilai indikasi kerugian negara/daerah sebesar Rp32,53 triliun dan 409 laporan hasil PKN dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp60,91 triliun kepada instansi yang berwenang. BPK juga telah melaksanakan PKA atas 368 kasus pada tahap persidangan. Pemanfaatan atas laporan hasil PI dan PKN serta pemberian keterangan ahli adalah sebagai berikut.

- 28 laporan hasil PI yang sudah disampaikan, 11 laporan telah dimanfaatkan dalam proses penyelidikan dan 17 laporan dimanfaatkan dalam proses penyidikan;
- 409 laporan hasil PKN yang telah disampaikan, 82 laporan sudah dimanfaatkan dalam proses penyidikan dan 327 kasus sudah dinyatakan P-21 (berkas penyidikan sudah lengkap); serta
- 368 pemberian keterangan ahli di persidangan seluruhnya digunakan dalam tuntutan oleh JPU.

Perincian hasil pemantauan atas pemanfaatan laporan hasil PI, PKN, dan PKA periode 2017-2023 oleh instansi yang berwenang disajikan dalam *Grafik 5.6*.

GRAFIK 5.6

PEMANFAATAN LAPORAN HASIL PI, PKN, DAN PKA PERIODE 2017-2023 OLEH INSTANSI YANG BERWENANG





**IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER II TAHUN 2023**

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2023 pada Pemerintah Pusat

No. Urut	Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan	
A. Setiap Komisi				
Komisi I				
1	1	Kementerian Luar Negeri	1	Kinerja atas Efektivitas Pelindungan Warga Negara Indonesia dan Kerja Sama dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Luar Negeri pada Kementerian Luar Negeri, Perwakilan RI, serta Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023
	2		1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Barang Milik Negara pada Kementerian Luar Negeri Tahun 2021 s.d. Semester I 2023 di Jakarta, New York, Los Angeles, dan Den Haag
2	3	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Penyiaran Tahun 2021 s.d. Semester I Tahun 2023 pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dan Instansi Lain Terkait
3	4	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (s.d. Semester I) pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dan Instansi Lain Terkait
		Jumlah	4	
Komisi II				
1	5	Badan Kepegawaian Negara	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja dan Aset Tahun Anggaran 2022 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2023 pada Badan Kepegawaian Negara
2	6	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan Tahun 2022 s.d. Semester I Tahun 2023 pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
3	7	Kementerian Dalam Negeri	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun 2023 (s.d. Triwulan III) pada Kementerian Dalam Negeri di DKI Jakarta dan Jawa Barat
4	8	Komisi Pemilihan Umum	1	Kinerja atas Efektivitas Persiapan dan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya
	9		1	Kinerja atas Efektivitas Persiapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Independen Pemilihan di Wilayah Provinsi Aceh dan Instansi Terkait Lainnya
	10		1	Kinerja atas Efektivitas Persiapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum di Wilayah Provinsi Banten dan Instansi Terkait Lainnya
	11		1	Kinerja atas Efektivitas Persiapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Instansi Terkait Lainnya
	12		1	Kinerja atas Efektivitas Persiapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Instansi Terkait Lainnya
	13		1	Kinerja atas Efektivitas Persiapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum di Wilayah Provinsi Lampung dan Instansi Terkait Lainnya

No. Urut	Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
14		1	Kinerja atas Efektivitas Persiapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Instansi Terkait Lainnya
5	Lembaga Administrasi Negara	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Akademis dan Perkuliahan Politeknik STIA LAN Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023 pada Lembaga Administrasi Negara dan Instansi Lain Terkait
	Jumlah	11	
Komisi III			
1	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	1	DTT atas Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Tahun Anggaran 2022 s.d. Semester I 2023 pada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
2	Kejaksaan Republik Indonesia	1	DTT Kepatuhan atas Manajemen Aset Tahun 2022 s.d. Semester I Tahun 2023 pada Kejaksaan RI dan Instansi Terkait di DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat
3	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1	Kinerja atas Manajemen Pemasarakatan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Instansi Terkait Lainnya Tahun 2020 s.d. Semester I Tahun 2023
19		1	DTT atas Manajemen Aset pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022 dan Semester I 2023
20		1	DTT atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan, Belanja Barang, dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bangka Belitung, Bengkulu, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan
4	Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	Kinerja atas Efektivitas Pemolisian Masyarakat Melalui Bhabinkamtibmas Tahun 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
22		1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Barang Milik Negara pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023 di Mabes Polri, Polda Sumatera Barat, dan Polda Jawa Tengah
5	Komisi Yudisial	1	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Laporan Masyarakat Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Tahun 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Komisi Yudisial dan Instansi Terkait
6	Mahkamah Agung	1	Kinerja atas Efektivitas Pelayanan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2022 dan 2023 (s.d. Semester I) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya
25		1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya
7	Mahkamah Konstitusi	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Mahkamah Konstitusi
	Jumlah	11	

No. Urut	Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan	
Komisi IV				
1	27	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1	Kinerja atas Kesiapan Implementasi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur dan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut untuk Mendukung Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Tahun 2022 s.d. 2023 (s.d. Triwulan III) pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara
2	28	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	Kinerja atas Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lainnya Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Tenggara
	29		1	DTT atas Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Pemegang Perizinan Berusaha dan Persetujuan Lingkungan Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2020 s.d. 2023 pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara
		Jumlah	3	
Komisi V				
1	30	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	1	DTT atas Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) TA 2020 s.d. Semester I 2023 pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
2	31	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	1	Kinerja atas Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)
3	32	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1	DTT Kepatuhan atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 dan Semester I Tahun Anggaran 2023 pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Perumahan, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jambi, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Maluku
4	33	Kementerian Perhubungan	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Jaringan Trayek Angkutan Laut Perintis Penumpang Tahun 2022 dan Semester I Tahun 2023 pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Sumatera Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, dan Papua Barat
	34		1	Kinerja atas Perencanaan, Pengaturan, dan Penyelenggaraan Layanan Angkutan Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan (Buy The Service/BTS) pada Kementerian Perhubungan dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Bali Tahun Anggaran 2022 s.d. Semester I 2023
	35		1	Kinerja atas Efektivitas Pelayanan Pemeriksaan, Pengujian dan Pemeliharaan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan Kementerian Perhubungan dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2022 s.d. Semester I Tahun 2023
	36		1	DTT atas Pelaksanaan Anggaran Belanja dan Pengelolaan Aset Tahun 2021 dan 2022 pada Perwakilan Kementerian Perhubungan di DKI Jakarta, Tokyo dan Singapura
	37		1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Barang Milik Negara pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Tahun 2021 dan 2022
		Jumlah	8	
Komisi VI				
1	38	Kementerian Perdagangan	1	DTT atas Kerja Sama Perdagangan Internasional dan Pengembangan Ekspor Nasional Tahun 2022 s.d. Semester I Tahun 2023 pada Kementerian Perdagangan dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta dan Daerah
		Jumlah	1	

No. Urut	Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan	
Komisi VII				
1	39	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif Tahun 2022 s.d. Semester I Tahun 2023 pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) dan Instansi Lain Terkait
2	40	Badan Riset dan Inovasi Nasional	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pendapatan Penelitian/Riset dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023 pada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Instansi Lain Terkait
	41		1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Aset Tetap dan Belanja Tahun Anggaran 2023 pada Badan Riset dan Inovasi Nasional
3	42	Kementerian Perindustrian	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Semester II Tahun 2021 s.d. Semester I Tahun 2023 pada Kementerian Perindustrian dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta dan Daerah
		Jumlah	4	
Komisi VIII				
1	43	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Penurunan Risiko Bencana Hidrometeorologi Tahun 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Instansi Lain Terkait
2	44	Kementerian Sosial	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023 (s.d. Triwulan III) pada Kementerian Sosial dan Instansi Lain Terkait
3	45	Kementerian Agama	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pesantren Tahun Anggaran 2022 s.d. 2023 (Semester I) dan Bantuan Inkubasi Bisnis Pesantren Tahun Anggaran 2021 s.d. 2023 (Semester I) pada Kementerian Agama dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan
		Jumlah	3	
Komisi IX				
1	46	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan Instansi Lain Terkait
2	47	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	1	DTT Kepatuhan atas Penempatan Pekerja Migran Indonesia Program Government To Government Korea Selatan Tahun 2022 dan Semester I Tahun 2023 pada Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Instansi Lain Terkait
3	48	Badan Pengawas Obat dan Makanan	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2022 dan Semester I 2023 di DKI Jakarta dan Daerah
4	49	Kementerian Kesehatan	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Kementerian Kesehatan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Daerah
	50		1	DTT Kepatuhan atas Pelaksanaan Program Indonesia-Supporting Primary Health Care Reform/Indonesia Supporting Primary and Referral Health Care Reform (I-Sphere) Tahun 2022 dan 2023 pada Kementerian Kesehatan dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta
	51		1	DTT Kepatuhan atas Pelaksanaan Program Indonesia Emergency Response To COVID-19 Tahun 2022 dan 2023 pada Kementerian Kesehatan di DKI Jakarta
	52		1	DTT atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2023 pada Kementerian Kesehatan dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta dan Daerah
5	53	Kementerian Ketenagakerjaan	1	Kinerja atas Efektivitas Pelatihan Tenaga Kerja Bidang Otomotif dalam Rangka Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tahun Anggaran 2018 s.d. 2022 pada Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bandung Kementerian Ketenagakerjaan dan Instansi Lain Terkait

No. Urut	Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan	
54		1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Tahun Anggaran 2018 s.d. 2022 pada Kementerian Ketenagakerjaan dan Instansi Lain terkait	
	Jumlah	9		
Komisi X				
1	55	Kementerian Pemuda dan Olahraga	1	Kinerja atas Efektivitas Implementasi Desain Besar Olahraga Nasional Terhadap Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Tahun 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Instansi Lain Terkait
2	56	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	57	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendidikan Profesi Guru pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2021 s.d. 2023 di Jakarta dan Daerah
	58		1	DTT Kepatuhan atas Belanja Tahun 2022 dan 2023 pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi pada Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta dan Daerah
	Jumlah	4		
Komisi XI				
1	59	Kementerian Keuangan	1	Kinerja Pengelolaan Informasi Perpajakan dalam Mendukung Optimalisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2021 s.d. 2023 pada Direktorat Jenderal Pajak dan Instansi Terkait Lainnya
	60		1	DTT atas Pengelolaan Utang Pemerintah dan Penggunaannya untuk Pendanaan Infrastruktur Ekonomi, Perkotaan, dan Energi Ketenagalistrikan Tahun 2020 s.d. 2022 pada Kementerian Keuangan Selaku Bendahara Umum Negara dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
	61		1	DTT atas Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang Berasal dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Tahun 2021 s.d. 2022 pada Kementerian Keuangan Selaku Bendahara Umum Negara dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta dan Daerah
	62	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)	1	Kinerja atas Efektivitas Tata Kelola Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2020 s.d. Semester I Tahun 2023 pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta dan Daerah
	63	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1	DTT atas Pengelolaan Katalog Elektronik Nasional serta Pembinaan Pengelolaan Katalog Elektronik Sektor dan Lokal dalam Mendukung Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri serta Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2022 s.d. Semester I Tahun 2023 pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Daerah
	Jumlah	5		
B. Lintas Komisi				
1	64	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	1	LK Bagian Anggaran Belanja Lainnya (BA 999.08) Tahun 2022 pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (UAKPA BUN) Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Instansi Terkait Lainnya
	Jumlah	1		
Jumlah LHP pada Pemerintah Pusat		64		

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2023 pada Pemerintah Daerah dan BUMD

No. Urut	Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan	
I	Provinsi Aceh			
1	1	Pemerintah Aceh	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Aceh
2	2	Kabupaten Aceh Barat	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah - Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat di Meulaboh
3	3	Kabupaten Aceh Barat Daya	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah - Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya di Blangpidie
4	4	Kabupaten Aceh Besar	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah - Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar di Jantho
5	5	Kabupaten Aceh Utara	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara di Lhoksukon
6	6		1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara di Lhoksukon
7	7	Kabupaten Gayo Lues	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren
8	8	Kabupaten Nagan Raya	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah - Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue
9	9	Kabupaten Pidie	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah - Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Pidie di Sigli
10	10	Kabupaten Simeulue	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah - Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Simeulue di Sinabang
11	11	Kota Langsa	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah - Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kota Langsa di Langsa
12	12	Kota Subulussalam	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kota Subulussalam dan Instansi Terkait Lainnya
		Jumlah	12	
II	Provinsi Sumatera Utara			
1	13	Provinsi Sumatera Utara	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Medan
	14		1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Instansi Terkait Lainnya di Medan Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2023
	15		1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Jalan Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Medan
2	16	Kabupaten Asahan	1	DTT Kepatuhan atas Pengadaan Barang dan Jasa TA 2023 pada Pemerintah Kabupaten Asahan di Kisaran
3	17	Kabupaten Dairi	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Membangun Destinasi, Pemasaran dan Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata untuk Mendukung Peningkatan Kunjungan Wisatawan Tahun Anggaran 2022 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Dairi dan Instansi Terkait Lainnya di Sidikalang

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
4	18	Kabupaten Deli Serdang	1	DTT Kepatuhan atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang di Lubuk Pakam
5	19	Kabupaten Humbang Hasundutan	1	DTT Kepatuhan atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan di Dolok Sanggul
6	20	Kabupaten Labuhanbatu	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dan Instansi Terkait Lainnya di Rantau Prapat
	21		1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Jalan Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu
7	22	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	1	DTT Kepatuhan atas Pengadaan Barang dan Jasa TA 2023 pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Instansi Terkait Lainnya di Kota Pinang
8	23	Kabupaten Labuhanbatu Utara	1	DTT Kepatuhan atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara di Aek Kanopan
9	24	Kabupaten Langkat	1	DTT Kepatuhan atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Langkat di Stabat
10	25	Kabupaten Mandailing Natal	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dan Instansi Terkait Lainnya di Panyabungan
	26		1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Jalan TA 2023 pada Kabupaten Mandailing Natal
11	27	Kabupaten Nias Utara	1	DTT Kepatuhan atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Nias Utara di Lotu
12	28	Kabupaten Padang Lawas Utara	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan TA 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dan Instansi Terkait Lainnya di Gunung Tua
	29		1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Jalan Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara di Gunung Tua
13	30	Kabupaten Simalungun	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> TA 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Simalungun dan Instansi Terkait Lainnya di Pamatang Raya
	31		1	DTT Kepatuhan atas Pengadaan Barang dan Jasa TA 2023 pada Pemerintah Kabupaten Simalungun
14	32	Kabupaten Tapanuli Tengah	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah
15	33	Kota Medan	1	DTT Kepatuhan atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kota Medan di Medan
16	34	Kota Pematangsiantar	1	DTT Kepatuhan atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kota Pematangsiantar di Pematangsiantar
17	35	Kota Tanjung Balai	1	DTT Kepatuhan atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kota Tanjung Balai di Tanjung Balai
		Jumlah	23	
III	Provinsi Sumatera Barat			
1	36	Provinsi Sumatera Barat	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
	37		1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
2	38	Kabupaten Dharmasraya	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
3	39	Kabupaten Kepulauan Mentawai	1	Kinerja atas Efektivitas Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata dan Destinasi Pariwisata Tahun 2022 s.d. 2023 (Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Instansi Terkait Lainnya di Tua Pejat
4	40	Kabupaten Pasaman	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan pada Pemerintah Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III 2023
5	41	Kabupaten Pasaman Barat	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
6	42	Kabupaten Solok	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Solok
7	43	Kabupaten Tanah Datar	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2023 pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar
8	44	Kota Padang	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (s.d. 30 November 2023) pada Pemerintah Kota Padang
9	45	Kota Padang Panjang	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kota Padang Panjang
10	46	Kota Sawahlunto	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kota Sawahlunto
		Jumlah	11	
IV	Provinsi Riau			
1	47	Provinsi Riau	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Provinsi Riau
	48		1	Kinerja atas Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan Tahun Anggaran 2022 s.d. 2023 (Semester I) di Pekanbaru dan Instansi Terkait Lainnya
	49		1	Kinerja atas Efektivitas Pelayanan Rawat Inap dan Farmasi pada RSUD Arifin Achmad Tahun Anggaran 2022 s.d. Semester I Tahun 2023 di Pekanbaru
	50		1	Kinerja atas Upaya Pemerintah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Provinsi Riau dan Instansi Terkait Lainnya
2	51	Kabupaten Bengkalis	1	DTT Kepatuhan atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis
3	52	Kabupaten Indragiri Hilir	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan Instansi Terkait Lainnya di Tembilahan
4	53	Kabupaten Kampar	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Kampar dan Instansi Terkait Lainnya
5	54	Kabupaten Kepulauan Meranti	1	DTT Kepatuhan atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti di Selatpanjang
6	55	Kabupaten Rokan Hilir	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir di Bagansiapiapi serta Instansi Terkait Lainnya
7	56	Kabupaten Rokan Hulu	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dan Instansi Terkait Lainnya di Pasir Pengaraian
8	57	Kota Pekanbaru	1	DTT Kepatuhan atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2023 pada Pemerintah Kota Pekanbaru di Pekanbaru
		Jumlah	11	

No. Urut	Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan	
V	Provinsi Sumatera Selatan			
1	58	Provinsi Sumatera Selatan	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Instansi Terkait Lainnya di Palembang
2	59	Kabupaten Banyuasin	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai
	60		1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan Instansi Terkait Lainnya di Pangkalan Balai
3	61	Kabupaten Lahat	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Lahat dan Instansi Terkait Lainnya di Lahat
4	62	Kabupaten Muara Enim	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan Instansi Terkait Lainnya di Muara Enim
5	63	Kabupaten Musi Rawas	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan Instansi Terkait Lainnya
6	64	Kabupaten Ogan Ilir	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dan Instansi Terkait Lainnya di Indralaya
7	65	Kabupaten Ogan Komering Ilir	1	Kinerja atas Efektivitas Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir di Kayuagung
8	66	Kabupaten Ogan Komering Ulu	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu TA 2021 s.d. Triwulan III 2023
9	67	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	1	Kinerja atas Efektivitas Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Instansi Terkait Lainnya di Muara Dua
10	68	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Instansi Terkait Lainnya di Martapura
11	69	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan Instansi Terkait Lainnya di Talang Ubi
12	70	Kota Lubuk Linggau	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kota Lubuklinggau di Lubuklinggau
13	71	Kota Pagar Alam	1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kota Pagar Alam dan Instansi Terkait Lainnya di Pagar Alam
		Jumlah	14	
VI	Provinsi Jambi			
1	72	Provinsi Jambi	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan Tahun Anggaran 2021 s.d. 2023 (Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Jambi di Jambi
	73		1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Provinsi Jambi di Jambi
2	74	Kabupaten Batang Hari	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Operasi dan Belanja Modal TA 2023 pada Pemerintah Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
3	75	Kabupaten Bungo	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 di Muara Bungo

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
4	76	Kabupaten Kerinci	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kerinci di Siulak
5	77	Kabupaten Muaro Jambi	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi di Sengeti
6	78	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak
7	79	Kota Sungai Penuh	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kota Sungai Penuh dan Instansi Terkait Lainnya di Sungai Penuh
		Jumlah	8	
VII	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			
1	80	Kabupaten Bangka	1	Kinerja Atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bangka
2	81	Kabupaten Bangka Barat	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dan Instansi Terkait Lainnya di Mentok
	82		1	DTT Kepatuhan atas Manajemen Aset Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dan Instansi Terkait Lainnya di Mentok
3	83	Kabupaten Bangka Selatan	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 s.d. Oktober 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dan Instansi Terkait Lainnya di Toboali
4	84	Kabupaten Belitung	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Belitung dan Instansi Terkait Lainnya di Tanjungpandan
5	85	Kota Pangkalpinang	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kota Pangkalpinang
	86		1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Instansi Terkait Lainnya
		Jumlah	7	
VIII	Provinsi Bengkulu			
1	87	Provinsi Bengkulu	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Provinsi Bengkulu di Bengkulu
2	88	Kabupaten Bengkulu Selatan	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan di Manna
3	89	Kabupaten Bengkulu Utara	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara di Arga Makmur
4	90	Kabupaten Kepahiang	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah Dana Bos, dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kepahiang di Kepahiang
5	91	Kabupaten Rejang Lebong	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan TA 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong
	92		1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong di Curup

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
6	93	Kabupaten Seluma	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Seluma di Tais
	94		1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Seluma dan Instansi Terkait Lainnya di Tais
		Jumlah	8	
IX	Provinsi Lampung			
1	95	Provinsi Lampung	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Provinsi Lampung
	96		1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Provinsi Lampung
2	97	Kabupaten Lampung Tengah	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih
3	98	Kabupaten Lampung Timur	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur di Sukadana
4	99	Kabupaten Lampung Utara	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi
5	100	Kabupaten Mesuji	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Mesuji di Wiralaga Mulya
6	101	Kabupaten Pesawaran	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Pesawaran di Gedong Tataan
7	102	Kabupaten Pesisir Barat	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat di Kruai
8	103	Kabupaten Pringsewu	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Pringsewu di Pringsewu
9	104	Kabupaten Tanggamus	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Tanggamus di Kota Agung
10	105	Kota Bandar Lampung	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung
		Jumlah	11	
X	Provinsi Kepulauan Riau			
1	106	Provinsi Kepulauan Riau	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang
2	107	Kabupaten Bintan	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan
3	108	Kabupaten Karimun	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Karimun di Tanjung Balai Karimun
4	109	Kabupaten Kepulauan Anambas	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan TA 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa
5	110	Kabupaten Natuna	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Natuna dan Instansi Terkait Lainnya di Ranai
		Jumlah	5	

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
XI		Provinsi DKI Jakarta		
1	111	Provinsi DKI Jakarta	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
	112		1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (Dinas KPKP) Tahun Anggaran (TA) 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta Instansi Terkait Lainnya
	113		1	DTT atas Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) yang Berasal dari Pemenuhan Kewajiban yang Bersumber dari Pihak Ketiga s.d. Laporan Keuangan Semester I TA 2022 pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya
	114		1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Jakarta
	115		1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
	116		1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
		Jumlah	6	
XII		Provinsi Jawa Barat		
1	117	Provinsi Jawa Barat	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat
	118		1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Jalan Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Instansi Terkait Lainnya di Bandung dan Kabupaten/Kota Lainnya
2	119	Kabupaten Bandung	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Rawat Jalan dalam Rangka Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Melalui Puskesmas dan RSUD Tahun Anggaran 2022 s.d. 2023 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Bandung dan Instansi Terkait Lainnya di Soreang
3	120	Kabupaten Bandung Barat	1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat di Ngamprah
4	121	Kabupaten Bogor	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bogor dan Instansi Terkait Lainnya di Cibinong
5	122	Kabupaten Cianjur	1	Kinerja atas Efektivitas Penanggulangan Bencana Gempa Bumi dalam Masa Tanggap Darurat dan Transisi Darurat ke Pemulihan Tahun Anggaran (TA) 2022 s.d. Triwulan III TA 2023 pada Pemerintah Kabupaten Cianjur dan Instansi Terkait Lainnya di Cianjur
6	123	Kabupaten Cirebon	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Cirebon
	124		1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Instansi Terkait Lainnya
7	125	Kabupaten Garut	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 (s.d. 16 Desember 2023) pada Pemerintah Kabupaten Garut di Garut
8	126	Kabupaten Karawang	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Karawang
	127		1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Karawang dan Instansi Terkait Lainnya di Karawang

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
9	128	Kabupaten Kuningan	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Rawat Jalan dalam Rangka Penguatan Layanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Melalui Puskesmas dan RSUD Tahun Anggaran 2022 s.d. 2023 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Kuningan dan Instansi Terkait Lainnya di Kuningan
10	129	Kabupaten Majalengka	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Rawat Jalan dalam Rangka Penguatan Layanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Melalui Puskesmas dan RSUD TA 2022 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Majalengka dan Instansi Terkait Lainnya di Majalengka
11	130	Kota Bandung	1	DTT atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (s.d. 30 November 2023) pada Pemerintah Kota Bandung di Bandung
		Jumlah	14	
XIII	Provinsi Jawa Tengah			
1	131	Provinsi Jawa Tengah	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Instansi Terkait Lainnya di Semarang dan Kabupaten/Kota Lainnya
	132		1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Instansi Terkait Lainnya di Semarang dan Kabupaten/Kota Lainnya
2	133	Kabupaten Banjarnegara	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan Instansi Terkait Lainnya di Banjarnegara
3	134	Kabupaten Banyumas	1	Kinerja atas Operasional Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Satria Kabupaten Banyumas Tahun 2021 s.d. Semester I 2023
4	135	Kabupaten Blora	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Blora dan Instansi Terkait Lainnya di Blora
5	136	Kabupaten Boyolali	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Boyolali dan Instansi Terkait Lainnya di Boyolali
6	137	Kabupaten Brebes	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Brebes dan Instansi Terkait Lainnya di Brebes
7	138	Kabupaten Cilacap	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Cilacap dan Instansi Terkait Lainnya di Cilacap
8	139	Kabupaten Demak	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Demak dan Instansi Terkait Lainnya di Demak
9	140	Kabupaten Grobogan	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Grobogan dan Instansi Terkait Lainnya di Purwodadi
10	141	Kabupaten Jepara	1	DTT Kepatuhan atas Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Jepara di Jepara
11	142	Kabupaten Kebumen	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kebumen dan Instansi Terkait Lainnya di Kebumen
12	143	Kabupaten Klaten	1	DTT Kepatuhan atas Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari APBD Kepada Desa Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Klaten dan Instansi Terkait Lainnya
13	144	Kabupaten Magelang	1	Kinerja atas Operasional Penyediaan Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang Tahun 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Magelang dan Instansi Terkait Lainnya di Mungkid
14	145	Kabupaten Pati	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Pati dan Instansi Terkait Lainnya di Pati

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
15	146	Kabupaten Pekalongan	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan Instansi Terkait Lainnya di Kajen
16	147	Kabupaten Pemalang	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur TA 2023 pada Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Instansi Terkait Lainnya di Pemalang
17	148	Kabupaten Purbalingga	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Instansi Terkait Lainnya di Purbalingga
18	149	Kabupaten Rembang	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Rembang dan Instansi Terkait Lainnya di Rembang
19	150	Kabupaten Semarang	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Semarang dan Instansi Terkait Lainnya di Ungaran
20	151	Kabupaten Sragen	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sragen dan Instansi Terkait Lainnya di Sragen
21	152	Kabupaten Sukoharjo	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan Instansi Terkait Lainnya di Sukoharjo
22	153	Kabupaten Tegal	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Tegal dan Instansi Terkait Lainnya di Slawi
23	154	Kabupaten Wonogiri	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri dan Instansi Terkait Lainnya di Wonogiri
24	155	Kabupaten Wonosobo	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan Instansi Terkait Lainnya di Wonosobo
25	156	Kota Pekalongan	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kota Pekalongan dan Instansi Terkait Lainnya di Pekalongan
26	157	Kota Semarang	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kota Semarang dan Instansi Terkait Lainnya di Semarang
27	158	Kota Surakarta	1	DTT Kepatuhan atas Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kota Surakarta di Surakarta
28	159	Kota Tegal	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur TA 2023 pada Pemerintah Kota Tegal dan Instansi Terkait Lainnya di Tegal
		Jumlah	29	
XIV	Provinsi D.I. Yogyakarta			
1	160	Provinsi D.I. Yogyakarta	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Aset yang Bersumber dari Dana Keistimewaan TA 2019 s.d. (Semester I) 2023 pada Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Yogyakarta, Sleman, Bantul, Wates dan Wonosari
	161		1	Kinerja Atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan pada Pemerintah Daerah D.I Yogyakarta di Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2023
	162		1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
2	163	Kabupaten Bantul	1	Kinerja atas Efektivitas Penyelenggaraan Sistem BLUD untuk Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2022 s.d. Semester I 2023 pada RSUD Panembahan Senopati dan Instansi Terkait Lainnya di Bantul
3	164	Kabupaten Gunungkidul	1	Kinerja atas Efektivitas Penyelenggaraan Sistem BLUD untuk Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2022 s.d. Semester I 2023 pada RSUD Wonosari dan Instansi Terkait Lainnya di Wonosari
4	165	Kabupaten Kulon Progo	1	Kinerja atas Pengelolaan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun Anggaran 2021 s.d. 2023 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo di Wates

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
5	166	PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Pihak Ketiga dan Perkreditan Tahun Buku 2021 s.d. Semester I 2023 pada PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Instansi Terkait Lainnya di Yogyakarta, Sleman, Bantul, Wates, dan Wonosari
		Jumlah	7	
XV	Provinsi Jawa Timur			
1	167	Kabupaten Bangkalan	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bangkalan di Bangkalan dan Sidoarjo
2	168	Kabupaten Blitar	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Blitar di Kanigoro dan Sidoarjo
3	169	Kabupaten Bojonegoro	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Permasalahan Operasi BUMD yang Tidak Optimal Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Instansi Terkait Lainnya di Bojonegoro
	170		1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Bidang Infrastruktur TA 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di Bojonegoro dan Sidoarjo
4	171	Kabupaten Bondowoso	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso di Bondowoso dan Sidoarjo
5	172	Kabupaten Gresik	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Gresik dan Instansi Terkait Lainnya di Gresik dan Sidoarjo
6	173	Kabupaten Jember	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Jember dan Instansi Terkait Lainnya di Jember dan Sidoarjo
	174		1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Jember dan Instansi Terkait Lainnya di Jember dan Sidoarjo
7	175	Kabupaten Jombang	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Jombang dan Instansi Terkait Lainnya di Jombang dan Sidoarjo
8	176	Kabupaten Kediri	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Permasalahan Operasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang Tidak Optimal Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kediri dan Instansi Terkait Lainnya di Kediri dan Sidoarjo
9	177	Kabupaten Lamongan	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Lamongan dan Instansi Terkait Lainnya di Lamongan dan Sidoarjo
10	178	Kabupaten Lumajang	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Instansi Terkait Lainnya di Lumajang dan Sidoarjo
11	179	Kabupaten Magetan	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Bidang Infrastruktur TA 2023 pada Pemerintah Kabupaten Magetan
12	180	Kabupaten Malang	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Malang di Kepanjen dan Sidoarjo
	181		1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Malang dan Instansi Terkait Lainnya di Kepanjen dan Sidoarjo
13	182	Kabupaten Mojokerto	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan Instansi Terkait Lainnya di Mojokerto dan Sidoarjo
14	183	Kabupaten Nganjuk	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan Instansi Terkait Lainnya di Nganjuk dan Sidoarjo

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
15	184	Kabupaten Ngawi	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Ngawi dan Instansi Terkait Lainnya di Ngawi dan Sidoarjo
16	185	Kabupaten Pacitan	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Pacitan dan Instansi Terkait Lainnya di Pacitan dan Sidoarjo
17	186	Kabupaten Pamekasan	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Permasalahan Operasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang Tidak Optimal Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan dan Instansi Terkait Lainnya di Pamekasan dan Sidoarjo
	187		1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan di Pamekasan dan Sidoarjo
18	188	Kabupaten Pasuruan	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan Instansi Terkait Lainnya di Bangil dan Sidoarjo
19	189	Kabupaten Ponorogo	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Permasalahan Operasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang Tidak Optimal Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan Instansi Terkait Lainnya di Ponorogo dan Sidoarjo
20	190	Kabupaten Probolinggo	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Permasalahan Operasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang Tidak Optimal Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan Instansi Terkait Lainnya di Kraksaan dan Sidoarjo
21	191		1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan Instansi Terkait Lainnya di Kraksaan dan Sidoarjo
22	192	Kabupaten Sampang	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Permasalahan Operasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang Tidak Optimal Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sampang dan Instansi Terkait Lainnya di Sampang dan Sidoarjo
23	193	Kabupaten Sidoarjo	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Instansi Terkait Lainnya di Sidoarjo
24	194	Kabupaten Situbondo	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Situbondo di Situbondo dan Sidoarjo
25	195	Kabupaten Sumenep	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Bidang Infrastruktur TA 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sumenep di Sumenep dan Sidoarjo
26	196	Kabupaten Trenggalek	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek di Trenggalek dan Sidoarjo
27	197	Kabupaten Tuban	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Permasalahan Operasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang Tidak Optimal Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Tuban dan Instansi Terkait Lainnya di Tuban
28	198	Kabupaten Tulungagung	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Modal Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung di Tulungagung dan Sidoarjo
29	199	Kota Batu	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2023 pada Pemerintah Kota Batu dan Instansi Terkait Lainnya di Batu dan Sidoarjo
30	200	Kota Kediri	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kota Kediri dan Instansi Terkait Lainnya di Kediri dan Sidoarjo
31	201	Kota Madiun	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kota Madiun dan Instansi Terkait Lainnya di Madiun dan Sidoarjo
32	202	Kota Malang	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kota Malang dan Instansi Terkait Lainnya di Malang dan Sidoarjo

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
33	203	Kota Surabaya	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2023 pada Pemerintah Kota Surabaya dan Instansi Terkait Lainnya di Surabaya dan Sidoarjo
	204		1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kota Surabaya dan Instansi Terkait Lainnya di Surabaya dan Sidoarjo
		Jumlah	38	
XVI	Provinsi Banten			
1	205	Provinsi Banten	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan Tahun 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Provinsi Banten dan Instansi Terkait Lainnya di Wilayah Provinsi Banten
	206		1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Jalan Tahun Anggaran 2023 (s.d. 30 November 2023) pada Pemerintah Provinsi Banten dan Instansi Terkait Lainnya di Wilayah Provinsi Banten
2	207	Kabupaten Pandeglang	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Instansi Terkait Lainnya di Pandeglang
	208		1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan Tahun 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Instansi Terkait Lainnya di Pandeglang
	209		1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Jalan Tahun Anggaran 2023 (s.d. 30 November) pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Instansi Terkait Lainnya di Pandeglang
3	210	Kabupaten Tangerang	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan Tahun 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Instansi Terkait Lainnya di Tigaraksa
	211		1	DTT Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Jalan Tahun Anggaran 2023 (s.d. 30 November) pada Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Instansi Terkait Lainnya di Tigaraksa
		Jumlah	7	
XVII	Provinsi Bali			
1	212	Provinsi Bali	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Bali di Denpasar
2	213	Kabupaten Badung	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Badung di Mangupura
3	214	Kabupaten Gianyar	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Gianyar di Gianyar
4	215	Kabupaten Jembrana	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Jembrana dan Instansi Terkait Lainnya di Negara
	216		1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Jembrana di Negara
5	217	Kabupaten Karangasem	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Karangasem di Amlapura
6	218	Kabupaten Tabanan	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Tabanan di Tabanan
		Jumlah	7	

No. Urut	Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan	
XVIII	Provinsi Nusa Tenggara Barat			
1	219	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat
2	220	Kabupaten Dompu	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Dompu dan Instansi Terkait Lainnya di Dompu
3	221	Kabupaten Lombok Barat	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat di Gerung
4	222	Kota Bima	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kota Bima dan Instansi Terkait Lainnya di Raba
5	223	Kota Mataram	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kota Mataram di Mataram
		Jumlah	5	
XIX	Provinsi Nusa Tenggara Timur			
1	224	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
2	225	Kabupaten Alor	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Alor di Kalabahi
3	226	Kabupaten Flores Timur	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Flores Timur di Larantuka
4	227	Kabupaten Kupang	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kupang dan Instansi Terkait Lainnya di Oelamasi
5	228	Kabupaten Lembata	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun 2022 dan 2023 di Lewoleba
6	229	Kabupaten Manggarai	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Manggarai dan Instansi Terkait Lainnya di Ruteng
7	230	Kabupaten Manggarai Barat	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo
8	231	Kabupaten Nagekeo	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Nagekeo di Mbay
9	232	Kabupaten Rote Ndao	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dan Instansi Terkait Lainnya di Ba'a
10	233	Kabupaten Sabu Raijua	1	Kinerja atas Efektivitas Penatausahaan Pengamanan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua di Seba
11	234	Kabupaten Sikka	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sikka di Maumere
12	235	Kabupaten Sumba Barat Daya	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dan Instansi Terkait Lainnya di Tambolaka
13	236	Kabupaten Sumba Timur	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sumba Timur dan Instansi Terkait Lainnya di Waingapu
14	237	Kabupaten Timor Tengah Utara	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara di Kefamenanu
15	238	Kota Kupang	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kota Kupang di Kupang
		Jumlah	15	

No. Urut	Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan	
XX	Provinsi Kalimantan Barat			
1	239	Provinsi Kalimantan Barat	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (s.d. 30 November) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
2	240	Kabupaten Kapuas Hulu	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (s.d. 30 November) pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
3	241	Kabupaten Kayong Utara	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dan Instansi Terkait Lainnya di Sukadana
4	242	Kabupaten Ketapang	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (s.d. 30 November) pada Pemerintah Kabupaten Ketapang di Ketapang
5	243	Kabupaten Kubu Raya	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (s.d. 30 November 2023) pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
6	244	Kabupaten Landak	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Landak dan Instansi Terkait Lainnya di Ngabang
7	245	Kabupaten Melawi	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Melawi dan Instansi Terkait Lainnya di Nanga Pinoh
8	246	Kabupaten Mempawah	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (s.d. 30 November) pada Pemerintah Kabupaten Mempawah
9	247	Kabupaten Sanggau	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (s.d. 30 November) pada Pemerintah Kabupaten Sanggau di Sanggau
		Jumlah	9	
XXI	Provinsi Kalimantan Tengah			
1	248	Provinsi Kalimantan Tengah	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
2	249	Kabupaten Barito Utara	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh
3	250	Kabupaten Gunung Mas	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun
4	251	Kabupaten Katingan	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Katingan di Kasongan
5	252	Kabupaten Kotawaringin Timur	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
6	253	Kabupaten Lamandau	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik
7	254	Kabupaten Murung Raya	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu
8	255	Kabupaten Sukamara	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Sukamara di Sukamara
		Jumlah	8	
XXII	Provinsi Kalimantan Selatan			
1	256	Provinsi Kalimantan Selatan	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru dan Banjarmasin
2	257	Kabupaten Balangan	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Balangan di Paringin
3	258	Kabupaten Barito Kuala	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan Instansi Terkait Lainnya di Banjarbaru dan Marabahan

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
4	259	Kabupaten Kotabaru	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan Instansi Terkait Lainnya di Banjarbaru dan Kotabaru
	260		1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kotabaru
5	261	Kabupaten Tanah Bumbu	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
6	262	Kota Banjarbaru	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kota Banjarbaru di Banjarbaru
		Jumlah	7	
XXIII Provinsi Kalimantan Timur				
1	263	Provinsi Kalimantan Timur	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Instansi Terkait Lainnya di Samarinda, Tanjung Redeb, Sangatta, Tenggarong, Balikpapan, Penajam, dan Tana Paser
2	264	Kabupaten Kutai Barat	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan Instansi Terkait Lainnya di Sendawar
3	265	Kabupaten Kutai Kartanegara	1	Kinerja atas Upaya Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Instansi Terkait Lainnya di Tenggarong
4	266	Kabupaten Mahakam Ulu	1	DTT atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dan Instansi Terkait Lainnya di Ujoh Bilang
5	267	Kabupaten Penajam Paser Utara	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Instansi Terkait Lainnya di Penajam
6	268	Kota Bontang	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kota Bontang dan Instansi Terkait Lainnya di Bontang
7	269	Kota Samarinda	1	Kinerja atas Pengendalian Banjir Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kota Samarinda dan Instansi Terkait Lainnya di Samarinda
		Jumlah	7	
XXIV Provinsi Kalimantan Utara				
1	270	Provinsi Kalimantan Utara	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor
2	271	Kabupaten Bulungan	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
3	272	Kabupaten Malinau	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Malinau di Malinau
4	273	Kabupaten Nunukan	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Nunukan di Nunukan
5	274	Kota Tarakan	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kota Tarakan di Tarakan
		Jumlah	5	
XXV Provinsi Sulawesi Utara				
1	275	Provinsi Sulawesi Utara	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Manado
2	276	Kabupaten Bolaang Mongondow	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow di Lolak
3	277	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Instansi Terkait Lainnya di Manado dan Bolaang UKI

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
4	278	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Instansi Terkait Lainnya di Manado dan Tutuyan
5	279	Kabupaten Kepulauan Talaud	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud di Melonguane
6	280	Kabupaten Minahasa	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa di Tondano
7	281	Kabupaten Minahasa Selatan	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan di Amurang
8	282	Kabupaten Minahasa Tenggara	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan
9	283	Kota Bitung	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kota Bitung di Bitung
10	284	Kota Manado	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kota Manado di Manado
		Jumlah	10	
XXVI	Provinsi Sulawesi Tengah			
1	285	Provinsi Sulawesi Tengah	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
2	286	Kabupaten Banggai	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Banggai
3	287	Kabupaten Banggai Kepulauan	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan
4	288	Kabupaten Banggai Laut	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Banggai Laut dan Instansi Terkait Lainnya
5	289	Kabupaten Buol	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Buol
6	290	Kabupaten Donggala	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Donggala dan Instansi Terkait Lainnya
7	291	Kabupaten Morowali	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2021 s.d. 2023 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Morowali
8	292	Kabupaten Morowali Utara	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara
9	293	Kabupaten Parigi Moutong	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong
10	294	Kabupaten Sigi	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sigi dan Instansi Terkait Lainnya
	295		1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sigi
11	296	Kabupaten Tojo Una-Una	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2021 s.d. 2023 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una
12	297	Kabupaten Tolitoli	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Tolitoli
13	298	Kota Palu	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kota Palu
		Jumlah	14	

No. Urut	Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan	
XXVII	Provinsi Sulawesi Selatan			
1	299	Provinsi Sulawesi Selatan	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2022 dan 2023 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2	300	Kabupaten Bantaeng	1	DTT Kepatuhan atas Operasional Bidang Kesehatan Tahun 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Bantaeng
3	301	Kabupaten Barru	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Barru di Barru
4	302	Kabupaten Bone	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Pemerintah Kabupaten Bone di Watampone
5	303	Kabupaten Bulukumba	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bulukumba di Bulukumba
6	304	Kabupaten Enrekang	1	DTT Kepatuhan atas Operasional Bidang Kesehatan pada Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) di Enrekang
7	305	Kabupaten Jeneponto	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Jeneponto dan Instansi Terkait Lainnya di Bontosunggu
8	306	Kabupaten Luwu	1	DTT Kepatuhan atas Operasional Bidang Kesehatan Tahun 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Luwu di Belopa
9	307	Kabupaten Luwu Timur	1	DTT Kepatuhan atas Operasional Bidang Kesehatan Tahun 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur di Malili
10	308	Kabupaten Maros	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Maros dan Instansi Terkait Lainnya di Turikale
11	309	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Pangkajene
12	310	Kabupaten Pinrang	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Pinrang di Pinrang
13	311	Kabupaten Sidenreng Rappang	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng
14	312	Kabupaten Sinjai	1	DTT Kepatuhan atas Operasional Bidang Kesehatan Tahun 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Sinjai di Sinjai
15	313	Kabupaten Soppeng	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Soppeng di Watansoppeng
16	314	Kabupaten Tana Toraja	1	DTT Kepatuhan atas Operasional Bidang Kesehatan pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) di Makale
17	315	Kota Palopo	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kota Palopo di Palopo
		Jumlah	17	
XXVIII	Provinsi Sulawesi Tenggara			
1	316	Provinsi Sulawesi Tenggara	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari
	317		1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Reklamasi dan Pascatambang pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Instansi Terkait Lainnya di Kendari
2	318	Kabupaten Bombana	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bombana dan Instansi Terkait Lainnya di Rumbia
	319		1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bombana di Rumbia

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
3	320	Kabupaten Buton	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Buton dan Instansi Terkait Lainnya di Pasarwajo
4	321	Kabupaten Buton Selatan	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dan Instansi Terkait Lainnya di Batauga
5	322	Kabupaten Buton Tengah	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Buton Tengah dan Instansi Terkait Lainnya di Labungkari
	323		1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Buton Tengah di Labungkari
6	324	Kabupaten Buton Utara	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Buton Utara di Buranga
7	325	Kabupaten Kolaka Timur	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur di Tirawuta
8	326	Kabupaten Konawe Utara	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Konawe Utara di Wanggudu
		Jumlah	11	
XXIX	Provinsi Gorontalo			
1	327	Provinsi Gorontalo	1	DTT Kepatuhan Belanja Daerah TA 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Gorontalo di Gorontalo
2	328	Kabupaten Bone Bolango	1	DTT Kepatuhan Belanja Daerah TA 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango di Suwawa
3	329	Kabupaten Gorontalo	1	DTT Kepatuhan Belanja Daerah TA 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo di Limboto
4	330	Kabupaten Pohuwato	1	DTT Kepatuhan Belanja Daerah TA 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Pohuwato di Marisa
5	331	Kota Gorontalo	1	DTT Kepatuhan Belanja Daerah TA 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kota Gorontalo di Gorontalo
		Jumlah	5	
XXX	Provinsi Sulawesi Barat			
1	332	Provinsi Sulawesi Barat	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 s.d. Oktober 2023 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju
2	333	Kabupaten Mamasa	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Mamasa dan Instansi Terkait Lainnya di Mamasa
3	334	Kabupaten Mamuju	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Mamuju dan Instansi Terkait Lainnya di Mamuju
4	335	Kabupaten Mamuju Tengah	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 s.d. Oktober 2023 pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah di Tobadak
5	336	Kabupaten Pasangkayu	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 s.d. Oktober 2023 pada Pemerintah Kabupaten Pasangkayu di Pasangkayu
6	337	Kabupaten Polewali Mandar	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan Instansi Terkait Lainnya di Polewali
		Jumlah	6	

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
XXXI	Provinsi Maluku			
1	338	Provinsi Maluku	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Provinsi Maluku
2	339	Kabupaten Buru	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Buru
3	340	Kabupaten Buru Selatan	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Buru Selatan
4	341	Kabupaten Kepulauan Aru	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru
5	342	Kabupaten Seram Bagian Barat	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat
6	343	Kota Ambon	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kota Ambon
		Jumlah	6	
XXXII	Provinsi Maluku Utara			
1	344	Provinsi Maluku Utara	1	DTT Kepatuhan atas Manajemen Aset Tetap TA 2022 dan 2023 (Semester I) pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara di Sofifi
	345		1	DTT Kepatuhan atas Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah TA 2022 dan TA 2023 (s.d. Oktober 2023) pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara di Sofifi
2	346	Kabupaten Halmahera Barat	1	DTT Kepatuhan atas Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah TA 2022 dan TA 2023 (s.d. Oktober 2023) pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
3	347	Kabupaten Halmahera Selatan	1	DTT Kepatuhan atas Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah TA 2022 dan TA 2023 (s.d. Oktober 2023) pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan di Labuha
4	348	Kabupaten Halmahera Tengah	1	DTT Kepatuhan atas Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah TA 2022 dan TA 2023 (s.d. Oktober 2023) pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah di Weda
5	349	Kabupaten Halmahera Utara	1	DTT Kepatuhan atas Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah TA 2022 dan TA 2023 (s.d. Oktober 2023) pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo
6	350	Kabupaten Kepulauan Sula	1	DTT Kepatuhan atas Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah TA 2022 dan TA 2023 (s.d. Oktober 2023) pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula di Sanana
7	351	Kota Tidore Kepulauan	1	DTT Kepatuhan atas Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah TA 2022 dan TA 2023 (s.d. Oktober 2023) pada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan
		Jumlah	8	
XXXIII	Provinsi Papua			
1	352	Provinsi Papua	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2022 dan 2023 (s.d. Semester I) pada Pemerintah Provinsi Papua Di Jayapura
2	353	Kabupaten Jayapura	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Jayapura di Sentani
3	354	Kabupaten Kepulauan Yapen	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2023 pada Kabupaten Kepulauan Yapen di Serui
4	355	Kabupaten Supiori	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Supiori di Sorendiweri
		Jumlah	4	

No. Urut	Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan	
XXXIV	Provinsi Papua Pegunungan			
1	356	Provinsi Papua Pegunungan	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan di Wamena
	357		1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan di Wamena
2	358	Kabupaten Jayawijaya	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) dan Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Kaitan Pembentukan Daerah Otonom Baru Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Jayawijaya di Wamena
3	359	Kabupaten Mamberamo Tengah	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah di Kobakma
		Jumlah	4	
XXXV	Provinsi Papua Selatan			
1	360	Provinsi Papua Selatan	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Provinsi Papua Selatan di Merauke
	361		1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Papua Selatan di Merauke
2	362	Kabupaten Mappi	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Mappi di Kapi
3	363	Kabupaten Merauke	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) dan Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Kaitan Pembentukan Daerah Otonom Baru Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Merauke dan Entitas Terkait Lainnya di Merauke
		Jumlah	4	
XXXVI	Provinsi Papua Tengah			
1	364	Provinsi Papua Tengah	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Provinsi Papua Tengah di Nabire
	365		1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Papua Tengah di Nabire
2	366	Kabupaten Nabire	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) dan Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Kaitan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Nabire dan Entitas Terkait Lainnya di Nabire
		Jumlah	3	
XXXVII	Provinsi Papua Barat			
1	367	Provinsi Papua Barat	1	Kinerja atas Efektivitas Manajemen Aset Tahun Anggaran 2022 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Instansi Terkait Lainnya di Manokwari
	368		1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (s.d. 30 September 2023) pada Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Instansi Terkait Lainnya di Manokwari
2	369	Kabupaten Kaimana	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (s.d. 30 September 2023) pada Pemerintah Kabupaten Kaimana dan Instansi Terkait Lainnya di Kaimana
3	370	Kabupaten Teluk Wondama	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (s.d. 30 September 2023) pada Kabupaten Teluk Wondama dan Instansi Terkait Lainnya di Rasiei
		Jumlah	4	

No. Urut	Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan	
XXXVIII	Provinsi Papua Barat Daya			
1	371	Provinsi Papua Barat Daya	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya di Sorong
2	372	Kabupaten Maybrat	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (s.d. 30 September 2023) pada Pemerintah Kabupaten Maybrat dan Instansi Terkait Lainnya di Kumorkek
3	373	Kabupaten Sorong	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (s.d. 31 Oktober 2023) pada Pemerintah Kabupaten Sorong dan Instansi Terkait Lainnya di Aimas
4	374	Kabupaten Sorong Selatan	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (s.d. 30 September 2023) pada Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dan Instansi Terkait Lainnya di Teminabuan
5	375	Kota Sorong	1	DTT Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (s.d. 30 September 2023) pada Pemerintah Kota Sorong dan Instansi Terkait Lainnya di Sorong
		Jumlah	5	
		Jumlah LHP pada Pemerintah Daerah dan BUMD	375	

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2023 pada BUMN dan Badan Lainnya

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
Komisi VI				
1	1	Perum Jasa Tirta II	1	Kinerja atas Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Tahun 2022 s.d. Semester I Tahun 2023 pada Perum Jasa Tirta II dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Jawa Barat
2	2	PT Geo Dipa Energi (Persero)	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Keuangan Kegiatan Eksploitasi, Pemanfaatan, dan Operasional Tahun 2022 s.d. Semester I Tahun 2023 pada PT Geo Dipa Energi (Persero) di DKI Jakarta dan Daerah
3	3	PT Indofarma Tbk	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan, Beban, dan Kegiatan Investasi Tahun 2020 s.d. Semester I Tahun 2023 pada PT Indofarma Tbk, Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait di Jawa Barat dan DKI Jakarta
4	4	PT Pegadaian	1	DTT atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi Tahun 2021 dan 2022 pada PT Pegadaian dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara
5	5	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Buku 2020 dan 2021 pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait di DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan
6	6	PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Kalimantan Timur	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Beban Operasional dan Investasi Tahun 2020, 2021 dan 2022 pada PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Kalimantan Timur dan Instansi Terkait Lainnya di Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat dan DKI Jakarta
7	7	PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Indonesia Logistik	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan, Beban Operasional, dan Investasi Tahun 2020, 2021, 2022, dan Semester I 2023 pada PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Indonesia Logistik dan Instansi Terkait Lainnya di Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta
8	8	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	1	DTT atas Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur Tahun 2020 s.d. Semester I Tahun 2022 pada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan Instansi Terkait Lainnya
9	9	PT Sarinah	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan, Beban, dan Investasi Tahun 2020 s.d. 2022 pada PT Sarinah di DKI Jakarta
		Jumlah	9	
Komisi VI dan Komisi XI				
1	10	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	1	DTT atas Pengelolaan Kredit <i>Wholesale Banking</i> Tahun Buku 2019 dan 2020 pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
2	11	PT Jaminan Kredit Indonesia	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi Tahun Buku 2021 dan 2022 pada PT Jaminan Kredit Indonesia dan Anak Perusahaan serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Bali, dan Sumatera Utara
		Jumlah	2	
Komisi IX				
1	12	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Kepesertaan, iuran dan Belanja Manfaat Tahun 2021 s.d. Semester I Tahun 2023 pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta dan Daerah
2	13	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	1	DTT Kepatuhan atas Beban Operasional dan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023 pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
		Jumlah	2	

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
Komisi X				
1	14	Institut Teknologi Bandung	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan, Belanja, dan Aset pada Institut Teknologi Bandung, Entitas Anak Usaha, dan Instansi Terkait Tahun 2022 s.d. 2023 di DKI Jakarta dan Jawa Barat
2	15	Universitas Brawijaya	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan, Belanja, Aset dan Kekayaan Awal pada Universitas Brawijaya dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2022 s.d. 2023 di DKI Jakarta dan Jawa Timur
3	16	Universitas Diponegoro	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan, Belanja, dan Aset pada Universitas Diponegoro, Entitas Anak Usaha, dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2022 s.d. 2023 di DKI Jakarta dan Jawa Tengah
4	17	Universitas Gadjah Mada	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan, Belanja, dan Aset pada Universitas Gadjah Mada, Entitas Anak, dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2022 s.d. 2023 di DKI Jakarta dan D.I. Yogyakarta
5	18	Universitas Indonesia	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan, Belanja, dan Aset pada Universitas Indonesia, Entitas Usaha Lain, dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2022 s.d. 2023 di DKI Jakarta dan Jawa Barat
6	19	Universitas Sumatera Utara	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan, Belanja, dan Aset pada Universitas Sumatera Utara, Entitas Anak, dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2022 s.d. 2023 di DKI Jakarta dan Sumatera Utara
		Jumlah	6	
Komisi XI				
1	20	Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Aset BP Tapera Tahun 2022 s.d. Semester I Tahun 2023 pada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat dan Instansi Lain Terkait
2	21	Bank Indonesia	1	DTT atas Pencetakan, Pengeluaran, dan Pemusnahan Rupiah Tahun 2022 pada Bank Indonesia dan Instansi Terkait Lainnya
3	22	Otoritas Jasa Keuangan	1	DTT atas Pengaturan dan Pengawasan Kegiatan Perkreditan dan Pembiayaan Sektor Perbankan dan Industri Keuangan Nonbank Tahun 2020 s.d. Semester I 2022 pada Otoritas Jasa Keuangan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
		Jumlah	3	
Jumlah LHP pada BUMN dan Badan Lainnya			22	

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2023 pada Pemeriksaan Prioritas Nasional

No Urut		Entitas		Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
PRIORITAS NASIONAL 2 - PENGEMBANGAN WILAYAH					
A		Pemerintah Pusat			
I		Komisi II			
	1	1	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	1	Kinerja atas Efektivitas Pembangunan Kawasan Perbatasan untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan di Kawasan Perbatasan Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Papua, Kalimantan Utara, dan Nusa Tenggara Timur
	2	2	Kementerian Dalam Negeri	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Kementerian Dalam Negeri dalam Penetapan Batas Desa dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa untuk Mendukung Pembangunan Desa Terpadu Tahun 2021 s.d. Semester I 2023 pada Kementerian Dalam Negeri dan Instansi Terkait Lainnya
	3	3		1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Kementerian Dalam Negeri dalam Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik pada Kementerian Dalam Negeri dan Instansi Terkait Lainnya
			Jumlah	3	
II		Komisi IV			
	1	4	Kementerian Pertanian	1	DTT Kepatuhan atas Pelaksanaan Belanja Barang dan Belanja Modal untuk Mendukung Pengembangan Komoditas Unggulan Tahun 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada Kementerian Pertanian dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tengah
			Jumlah	1	
II		Komisi V			
	1	5	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	1	Kinerja atas Pengembangan Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional Tahun 2021 s.d. Semester I Tahun 2023 pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Instansi Lain Terkait
	2	6	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1	Kinerja atas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara Tahun Anggaran 2022 s.d. 2023 (Triwulan III) sebagai Bagian Pembangunan Tahap I Tahun 2022-2024 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta dan Kalimantan Timur
			Jumlah	2	
III		Komisi VI			
	1	7	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	1	Kinerja atas Efektivitas Penyelenggaraan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Tahun Anggaran 2020 s.d. Tahun 2023 (Semester I) pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) dan Instansi Terkait Lainnya di Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar, dan Jakarta
			Jumlah	1	

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
IV	Komisi VII			
1	8	Badan Informasi Geospasial	1	Kinerja atas Efektivitas Penyediaan Peta Dasar dan Infrastruktur Informasi Geospasial Pendukung yang Berkualitas dan Siap Pakai dalam Rangka Mendukung Ketersediaan Akses dan Pemanfaatan Informasi Geospasial Nasional Tahun Anggaran 2022 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2023 pada Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Instansi Terkait Lainnya di Jawa Barat, Aceh dan Sulawesi Utara
		Jumlah	1	
V	Komisi XI			
1	9	Kementerian Keuangan	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Rangka Mendukung Kebutuhan Pendanaan Penyediaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Tahun 2020 s.d. 2023 pada Kementerian Keuangan selaku Pengelola Fiskal, Kementerian PPN/Bappenas, dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Daerah dan Luar Negeri
		Jumlah	1	
VI	Lintas Komisi			
1	10	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	1	DTT atas Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus Tahun 2019 s.d. 2023 pada Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta dan Daerah
		Jumlah	1	
		Jumlah LHP PN 2 - Pengembangan Wilayah pada Pemerintah Pusat	10	
B	Pemerintah Daerah			
I	Provinsi Aceh			
1	11	Kabupaten Aceh Singkil	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penguatan Kelembagaan Desa, Pengendalian Penggunaan Dana Desa dan Pengelolaan BUM Desa untuk Mendukung Pembangunan Desa Terpadu Tahun 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Instansi Terkait Lainnya
2	12	Kabupaten Aceh Tenggara	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan <i>Mandatory Spending</i> untuk Mendukung Belanja Daerah yang Berkualitas Telah Memadai pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara TA 2021 s.d. Semester I 2023
3	13	Kabupaten Aceh Timur	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengembangan, Ekonomi, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan Instansi Terkait Lainnya di Idi Rayeuk
4	14	PT Bank Aceh Syariah	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pembiayaan Tahun Buku 2022 dan Semester I 2023 pada PT Bank Aceh Syariah di Kantor Pusat, Kantor Cabang Utama, dan Kantor Cabang
		Jumlah	4	
II	Provinsi Sumatera Utara			
1	15	Provinsi Sumatera Utara	1	Kinerja atas Pemeriksaan Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Instansi Terkait Lainnya di Medan

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
2	16	Kabupaten Samosir	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan Pantai Pasir Putih Parbaba untuk Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Samosir dan Instansi Terkait Lainnya di Pangururan
3	17	Kabupaten Simalungun	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Simalungun dan Instansi Terkait Lainnya di Pamatang Raya
4	18	Kabupaten Tapanuli Selatan	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan <i>Mandatory Spending</i> untuk Mendukung Belanja Daerah yang Berkualitas Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Instansi Terkait Lainnya di Sipirok
5	19	Kabupaten Tapanuli Utara	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan <i>Mandatory Spending</i> untuk Mendukung Belanja Daerah yang Berkualitas Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan Instansi Terkait Lainnya di Tarutung
6	20	Kabupaten Toba	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengembangan Ekonomi, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Toba dan Instansi Terkait Lainnya di Balige
7	21	PDAM Tirtanadi	1	DTT Kepatuhan atas Operasional Perusahaan Umum Daerah Tirtanadi Tahun Anggaran 2022 dan Semester I 2023
8	22	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Kredit pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tahun Buku 2022 s.d. Triwulan III 2023 dan Instansi Terkait Lainnya di Medan
		Jumlah	8	
III	Provinsi Sumatera Barat			
1	23	Kabupaten Agam	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Produktivitas Padi dan Jagung Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Agam
2	24	Kabupaten Padang Pariaman	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Produktivitas Padi dan Kakao TA 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang
3	25	Kabupaten Pesisir Selatan	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengembangan Ekonomi, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Instansi Terkait Lainnya di Painan
4	26	Kabupaten Sijunjung	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Produktivitas Padi dan Jagung Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sijunjung
5	27	Kabupaten Solok Selatan	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Produktivitas Padi dan Jagung Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan
6	28	Kota Pariaman	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Produk Unggulan UMKM Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kota Pariaman

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
7	29	Kota Payakumbuh	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Produk Unggulan UMKM TA 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kota Payakumbuh
8	30	Kota Solok	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Produk Unggulan UMKM Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kota Solok dan Instansi Terkait Lainnya di Solok
		Jumlah	8	
IV	Provinsi Riau			
1	31	Kabupaten Indragiri Hulu	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penguatan Kelembagaan Desa, Pengendalian Penggunaan Dana Desa dan Pengelolaan BUM Desa untuk Mendukung Pembangunan Desa Terpadu Tahun 2021 s.d. (Semester I) 2023 pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dan Instansi Terkait Lainnya di Rengat
2	32	Kabupaten Kuantan Singingi	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penguatan Kelembagaan Desa, Pengendalian Penggunaan Dana Desa dan Pengelolaan BUM Desa untuk Mendukung Pembangunan Desa Terpadu Tahun Anggaran 2021 s.d. (Semester I) 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dan Instansi Terkait Lainnya di Teluk Kuantan
3	33	Kota Dumai	1	Kinerja atas Pelaksanaan Program Mobilitas Penduduk & Penataan Permukiman Kumuh dalam Mendukung Pengembangan Kawasan Perkotaan Tahun Anggaran 2021 s.d. 2023 (Semester I) pada Pemerintah Kota Dumai dan Instansi Terkait Lainnya di Dumai
		Jumlah	3	
V	Provinsi Jambi			
1	34	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penguatan Kelembagaan Desa, Pengendalian Penggunaan Dana Desa dan Pengelolaan BUM Desa untuk Mendukung Pembangunan Desa Terpadu Tahun 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Instansi Terkait Lainnya di Kuala Tungkal
		Jumlah	1	
VI	Provinsi Sumatera Selatan			
1	35	Provinsi Sumatera Selatan	1	DTT atas Operasional BLUD RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021, 2022, dan 2023 di Palembang
2	36	Kabupaten Musi Rawas Utara	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Desa dalam Rangka Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Tahun Anggaran 2021 s.d. 2023 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dan Instansi Terkait Lainnya di Rupit
3	37	Kota Prabumulih	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan <i>Mandatory Spending</i> untuk Mendukung Belanja Daerah yang Berkualitas Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kota Prabumulih dan Instansi Terkait Lainnya
4	38	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	1	DTT Kepatuhan atas Kegiatan Operasional Tahun Buku 2021 s.d. 2023 (Semester I) pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Sumatera Selatan
		Jumlah	4	
VII	Provinsi Bengkulu			
1	39	Kota Bengkulu	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan <i>Mandatory Spending</i> untuk Mendukung Belanja Daerah yang Berkualitas Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kota Bengkulu dan Instansi Terkait Lainnya di Bengkulu
		Jumlah	1	

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
VIII Provinsi Lampung				
1	40	Kabupaten Tulang Bawang	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengembangan Ekonomi, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang di Menggala dan Instansi Terkait Lainnya
2	41	Kabupaten Tulang Bawang Barat	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan <i>Mandatory Spending</i> untuk Mendukung Belanja Daerah yang Berkualitas Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan dan Instansi Terkait Lainnya
3	42	PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Kegiatan Operasional Tahun 2022 dan 2023 pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda AM) Way Rilau Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung dan Instansi Terkait Lainnya
		Jumlah	3	
IX Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				
1	43	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan <i>Mandatory Spending</i> untuk Mendukung Belanja Daerah yang Berkualitas Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Instansi Terkait Lainnya di Pangkalpinang, Toboali, Tanjungpandan, dan Manggar
	44		1	DTT Kepatuhan atas Operasional PT Jamkrida Babel (Perseroda) TA 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Instansi Terkait Lainnya di Pangkalpinang
	45		1	DTT Kepatuhan atas Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C) Ir. Soekarno Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Instansi Terkait Lainnya di Merawang
2	46	Kabupaten Bangka	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan <i>Mandatory Spending</i> untuk Mendukung Belanja Daerah yang Berkualitas Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bangka dan Instansi Terkait Lainnya di Sungailiat
3	47	Kabupaten Bangka Tengah	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan <i>Mandatory Spending</i> untuk Mendukung Belanja Daerah yang Berkualitas Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan Instansi Terkait Lainnya di Koba
4	48	PDAM Tirta Dharma Kota Pangkalpinang	1	DTT Kepatuhan atas Operasional Perumda Air Minum Tirta Pinang Tahun 2022 s.d. Triwulan III 2023 di Pangkalpinang
		Jumlah	6	
X Provinsi Kepulauan Riau				
1	49	Provinsi Kepulauan Riau	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Wajib yang Berkualitas dalam Rangka Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Atas Tahun Anggaran 2021 s.d. 2023 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Instansi Terkait Lainnya di Tanjungpinang
2	50	Kota Batam	1	Kinerja atas Pelaksanaan Program Pengarahan Mobilitas Penduduk dan Penataan Permukiman Kumuh dalam Mendukung Pengembangan Kawasan Perkotaan pada Pemerintah Kota Batam dan Instansi Terkait Lainnya di Batam Tahun Anggaran 2021 s.d. 2023 di Batam

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan	
	3	51	Kota Tanjungpinang	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Wajib yang Berkualitas dalam Rangka Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2021 s.d. 2023 pada Pemerintah Kota Tanjungpinang dan Instansi Terkait Lainnya di Tanjungpinang
			Jumlah	3	
XI	Provinsi DKI Jakarta				
	1	52	PT Jakarta Propertindo	1	DTT Kepatuhan atas Penugasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Kepada PT Jakarta Propertindo untuk Pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu Tahun Anggaran (TA) 2019 s.d. 2022
	2	53	PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk.	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Operasional Tahun Buku 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
	3	54	PT Transportasi Jakarta	1	DTT Kepatuhan atas Kegiatan Operasional Tahun Buku 2022 dan 2023 (s.d. TW III) pada PT Transportasi Jakarta di Jakarta
	4	55	PD Pembangunan Sarana Jaya	1	DTT Kepatuhan atas Kegiatan Operasional Tahun Buku (TB) 2020 dan Semester I 2021 pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
			Jumlah	4	
XII	Provinsi Jawa Barat				
	1	56	Kabupaten Bekasi	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Desa dalam Rangka Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Instansi Terkait Lainnya di Cikarang
	2	57	Kabupaten Sukabumi	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Desa dalam Rangka Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Instansi Terkait Lainnya di Palabuhanratu
	3	58	Kabupaten Tasikmalaya	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Desa dalam Rangka Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Tahun Anggaran (TA) 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan Instansi Terkait Lainnya di Singaparna
	4	59	Kota Bogor	1	Kinerja atas Pelaksanaan Program Mobilitas Penduduk dan Penataan Permukiman Kumuh dalam Mendukung Pengembangan Kawasan Perkotaan Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I Tahun 2023 pada Pemerintah Kota Bogor dan Instansi Terkait Lainnya di Bogor
	5	60	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	1	DTT atas Kegiatan Operasional Tahun Buku 2021 s.d. Semester I Tahun 2023 pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.
			Jumlah	5	
XIII	Provinsi Jawa Tengah				
	1	61	Provinsi Jawa Tengah	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Kredit Proyek Tahun Buku 2017 s.d. Semester I Tahun 2023 pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DKI Jakarta serta Instansi Terkait Lainnya
	2	62	Kabupaten Banyumas	1	DTT Kepatuhan atas Operasional PT BPR BKK Purwokerto (Perseroda) Tahun 2022 s.d. 2023 (Semester I) di Purwokerto
	3	63	Kabupaten Karanganyar	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penguatan Kelembagaan Desa, Pengendalian Penggunaan Dana Desa dan Pengelolaan BUM Desa untuk Mendukung Pembangunan Desa Terpadu Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan Instansi Terkait Lainnya di Karanganyar

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan	
	4	64	Kabupaten Kendal	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan TA 2020 s.d. Semester I 2023 pada Kabupaten Kendal dan Instansi Terkait Lainnya di Kendal
	5	65	Kabupaten Purworejo	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Kredit dan Penghimpunan Dana Tahun Buku 2019 s.d. 2023 (Semester I) pada Perumda BPR Bank Purworejo dan Instansi Terkait Lainnya di Purworejo
	6	66	Kabupaten Temanggung	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan, Belanja dan Aset Tahun Anggaran 2023 s.d. Oktober pada BLUD RSUD Kabupaten Temanggung dan Instansi Terkait Lainnya di Temanggung
	7	67	Kota Magelang	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan <i>Mandatory Spending</i> untuk Mendukung Belanja Daerah yang Berkualitas Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kota Magelang dan Instansi Terkait Lainnya di Magelang
	8	68	Kota Salatiga	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan <i>Mandatory Spending</i> untuk Mendukung Belanja Daerah yang Berkualitas Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kota Salatiga dan Instansi Terkait Lainnya di Salatiga
			Jumlah	8	
XIV	Provinsi Jawa Timur				
	1	69	Provinsi Jawa Timur	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Instansi Terkait Lainnya di Sidoarjo, Surabaya dan Malang
	2	70	Kabupaten Banyuwangi	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penguatan Kelembagaan Desa, Pengendalian, Penggunaan Dana Desa dan Pengelolaan BUM Desa untuk Mendukung Pembangunan Desa Terpadu Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Instansi Terkait Lainnya di Banyuwangi dan Sidoarjo
	3	71	Kabupaten Ponorogo	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penguatan Kelembagaan Desa, Pengendalian Penggunaan Dana Desa dan Pengelolaan BUM Desa untuk Mendukung Pembangunan Desa Terpadu Tahun 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan Instansi Terkait Lainnya di Ponorogo dan Sidoarjo
			Jumlah	3	
XV	Provinsi Banten				
	1	72	Provinsi Banten	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung Tahun 2020 s.d. Semester I Tahun 2023 pada Pemerintah Provinsi Banten dan Instansi Terkait Lainnya
	2	73	Kabupaten Pandeglang	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung Tahun 2020 s.d. Semester I Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Instansi Terkait Lainnya
			Jumlah	2	
XVI	Provinsi Bali				
	1	74	Kabupaten Buleleng	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sektor Unggulan untuk Komoditas Kopi Arabika dan Kopi Robusta Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Instansi Terkait Lainnya di Singaraja

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
2	75	Kabupaten Klungkung	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengembangan Ekonomi, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Klungkung dan Instansi Terkait Lainnya di Semarang
3	76	Kota Denpasar	1	Kinerja atas Efektivitas Pelaksanaan Program Mobilitas Penduduk, Pengelolaan Sampah di TPST, dan Penyelenggaraan Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada dalam Mendukung Pengembangan Kawasan Perkotaan Tahun 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kota Denpasar dan Instansi Terkait Lainnya di Denpasar
4	77	PT Bank Pembangunan Daerah Bali	1	DTT Kepatuhan atas Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023 dan Instansi Terkait Lainnya di Denpasar
		Jumlah	4	
XVII	Provinsi Nusa Tenggara Barat			
1	78	Kabupaten Sumbawa	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar
2	79	PDAM Giri Menang	1	DTT Kepatuhan atas Operasional Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Giri Menang Tahun 2022 s.d. Semester I Tahun 2023 dan Instansi Terkait Lainnya di Gerung dan Mataram
3	80	PT Bank NTB Syariah	1	DTT Kepatuhan atas Operasional PT Bank NTB Syariah Tahun Buku 2022 s.d. Triwulan III 2023 di Mataram
		Jumlah	3	
XVIII	Provinsi Nusa Tenggara Timur			
1	81	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
2	82	Kabupaten Belu	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Program Pembangunan untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan di Kawasan Perbatasan Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Belu dan Instansi Terkait Lainnya di Atambua
3	83	Kabupaten Ende	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penguatan Kelembagaan Desa, Pengendalian Penggunaan Dana Desa, dan Pengelolaan BUM Desa untuk Mendukung Pembangunan Desa Terpadu Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Ende dan Instansi Terkait Lainnya di Ende
4	84	Kabupaten Manggarai Barat	1	Kinerja Atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengembangan Ekonomi, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan Instansi Terkait Lainnya di Labuan Bajo
5	85	Kabupaten Ngada	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sektor Unggulan untuk Komoditas Kopi Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Ngada dan Instansi Terkait Lainnya di Bajawa
6	86	Kabupaten Sumba Barat	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan <i>Mandatory Spending</i> untuk Mendukung Belanja Daerah Yang Berkualitas Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat dan Instansi Terkait Lainnya di Waikabubak

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
7	87	Kabupaten Sumba Timur	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengembangan Ekonomi, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sumba Timur dan Instansi Terkait Lainnya di Waingapu
8	88	PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	1	DTT Kepatuhan atas Operasional Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023 dan Instansi Terkait Lainnya di Kupang, Labuan Bajo, dan Waingapu
		Jumlah	8	
XIX	Provinsi Kalimantan Barat			
1	89	Provinsi Kalimantan Barat	1	DTT Kepatuhan atas Operasional Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. Soedarso Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023 dan Instansi Terkait Lainnya di Pontianak
2	90	Kabupaten Bengkayang	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sektor Unggulan untuk Komoditas Jagung Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang dan Instansi Terkait Lainnya di Bengkayang
3	91	Kabupaten Sambas	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Program Pembangunan untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan di Kawasan Perbatasan Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sambas dan Instansi Terkait Lainnya di Sambas
4	92	Kabupaten Sekadau	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penguatan Kelembagaan Desa, Pengendalian Penggunaan Dana Desa dan Pengelolaan BUM Desa untuk Mendukung Pembangunan Desa Terpadu Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sekadau dan Instansi Terkait Lainnya di Sekadau
5	93	Kabupaten Sintang	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penguatan Kelembagaan Desa, Pengendalian Penggunaan Dana Desa dan Pengelolaan BUM Desa untuk Mendukung Pembangunan Desa Terpadu Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sintang dan Instansi Terkait Lainnya di Sintang
6	94	Kota Pontianak	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan <i>Mandatory Spending</i> untuk Mendukung Belanja Daerah yang Berkualitas Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kota Pontianak dan Instansi Terkait Lainnya di Pontianak
7	95	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	1	DTT Kepatuhan atas Operasional Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023 dan Instansi Terkait Lainnya di Pontianak dan Jakarta
		Jumlah	7	
XX	Provinsi Kalimantan Tengah			
1	96	Provinsi Kalimantan Tengah	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan <i>Mandatory Spending</i> untuk Mendukung Belanja Daerah yang Berkualitas Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Instansi Terkait Lainnya di Palangka Raya
2	97	Kabupaten Barito Utara	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sektor Unggulan untuk Komoditas Jagung Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan Instansi Terkait Lainnya di Muara Teweh
3	98	Kabupaten Kapuas	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sektor Unggulan untuk Komoditas Padi Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kapuas dan Instansi Terkait Lainnya di Kuala Kapuas

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
4	99	Kabupaten Kotawaringin Barat	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Instansi Terkait Lainnya di Pangkalan BUN
		Jumlah	4	
XXI	Provinsi Kalimantan Selatan			
1	100	Kabupaten Banjar	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengembangan Ekonomi, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Banjar dan Instansi Terkait Lainnya di Banjarbaru dan Martapura
2	101	Kabupaten Barito Kuala	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Kabupaten Barito Kuala dan Instansi Terkait Lainnya di Banjarbaru dan Marabahan
3	102	Kabupaten Tanah Laut	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sektor Unggulan untuk Komoditas Kelapa Sawit Rakyat Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan Instansi Terkait Lainnya di Banjarbaru dan Pelaihari
4	103	Kota Banjarmasin	1	Kinerja atas Pelaksanaan Program Mobilitas Penduduk dan Penataan Permukiman Kumuh dalam Mendukung Pengembangan Kawasan Perkotaan Tahun 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kota Banjarmasin dan Instansi Terkait Lainnya di Banjarbaru dan Banjarmasin
5	104	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	1	DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Operasional Bank Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023 pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Banjarmasin dan Jakarta
		Jumlah	5	
XXII	Provinsi Kalimantan Timur			
1	105	Provinsi Kalimantan Timur	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
2	106	Kabupaten Berau	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sektor Unggulan untuk Komoditas Kelapa, Kakao dan Jagung Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Berau dan Instansi Terkait Lainnya
	107		1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Berau dan Instansi Terkait Lainnya di Tanjung Redeb
3	108	Kabupaten Kutai Timur	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengembangan Ekonomi, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan Instansi Terkait Lainnya di Sangatta

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	109		1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
4	110	Kota Balikpapan	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan <i>Mandatory Spending</i> untuk Mendukung Belanja Daerah yang Berkualitas Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kota Balikpapan dan Instansi Terkait Lainnya di Balikpapan
5	111	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	1	DTT Kepatuhan atas Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Tahun Buku 2022 s.d. Triwulan III 2023
		Jumlah	7	
XXIII	Provinsi Kalimantan Utara			
1	112	Provinsi Kalimantan Utara	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan <i>Mandatory Spending</i> untuk Mendukung Belanja Daerah yang Berkualitas Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Instansi Terkait Lainnya di Tanjung Selor
2	113	Kabupaten Nunukan	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Program Pembangunan untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan di Kawasan Perbatasan Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Nunukan dan Instansi Terkait Lainnya di Nunukan
		Jumlah	2	
XXIV	Provinsi Sulawesi Utara			
1	114	Provinsi Sulawesi Utara	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Instansi Terkait Lainnya di Manado dan Bitung
2	115	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sektor Unggulan untuk Komoditas Pala Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan Instansi Terkait Lainnya
3	116	Kabupaten Minahasa Utara	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengembangan Ekonomi, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan Instansi Terkait Lainnya di Manado dan Airmadidi
4	117	Kota Tomohon	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan <i>Mandatory Spending</i> untuk Mendukung Belanja Daerah yang Berkualitas TA 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kota Tomohon dan Instansi Terkait Lainnya di Tomohon
5	118	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	1	DTT Kepatuhan atas Operasional Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (Bank Sulutgo) Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023 dan Instansi Terkait Lainnya di Manado, Gorontalo, Bitung, Tondano, Airmadidi, Tomohon dan Jakarta
		Jumlah	5	
XXV	Provinsi Sulawesi Tengah			
1	119	Kabupaten Banggai	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sektor Unggulan Komoditas Kelapa Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Banggai dan Instansi Terkait Lainnya

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
2	120	Kabupaten Buol	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengembangan Ekonomi, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Buol dan Instansi Terkait Lainnya
3	121	Kabupaten Morowali	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengembangan Ekonomi, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Morowali dan Instansi Terkait Lainnya
4	122	Kabupaten Poso	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengembangan Ekonomi, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Poso dan Instansi Terkait Lainnya di Poso
	123		1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sektor Unggulan untuk Komoditas Kakao dan Kopi Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Poso dan Instansi Terkait Lainnya
5	124	Kota Palu	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan <i>Mandatory Spending</i> untuk Mendukung Belanja Daerah yang Berkualitas Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kota Palu dan Instansi Terkait Lainnya di Palu
6	125	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah	1	DTT Kepatuhan atas Operasional Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023
		Jumlah	7	
XXVI	Provinsi Sulawesi Selatan			
1	126	Provinsi Sulawesi Selatan	1	DTT Kepatuhan atas Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Tahun 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Instansi Terkait Lainnya di Makassar
2	127	Kabupaten Luwu Utara	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengembangan Ekonomi, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Luwu Utara di Masamba
3	128	Kabupaten Takalar	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan <i>Mandatory Spending</i> untuk Mendukung Belanja Daerah yang Berkualitas dan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Takalar Di Pattallassang
4	129	Kabupaten Wajo	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sektor Unggulan untuk Komoditas Persuteraan Alam TA 2021 s.d. Semester I Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Wajo dan Instansi Terkait Lainnya di Sengkang
5	130	Kota Makassar	1	Kinerja atas Efektivitas Pelaksanaan Program Mobilitas Penduduk dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Mendukung Pengembangan Kawasan Perkotaan Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kota Makassar dan Instansi Terkait Lainnya di Makassar
	131		1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan <i>Mandatory Spending</i> untuk Mendukung Belanja Daerah yang berkualitas dan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah TA 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kota Makassar dan Instansi Terkait Lainnya di Makassar

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
6	132	Kota Pare-Pare	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan <i>Mandatory Spending</i> untuk Mendukung Belanja Daerah yang Berkualitas dan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah TA 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kota Pare-Pare
		Jumlah	7	
XXVII	Provinsi Sulawesi Tenggara			
1	133	Kabupaten Kolaka	1	Kinerja atas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kolaka dan Instansi Terkait Lainnya di Kolaka
2	134	Kabupaten Konawe Selatan	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dan Instansi Terkait Lainnya di Andoolo
3	135	Kabupaten Wakatobi	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Wakatobi dan Instansi Terkait Lainnya di Wangi-Wangi
4	136	Kota Baubau	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan <i>Mandatory Spending</i> untuk Mendukung Belanja Daerah yang Berkualitas Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kota Baubau dan Instansi Terkait Lainnya di Baubau
5	137	Kota Kendari	1	DTT Kepatuhan atas Operasional RSUD Kota Kendari Tahun 2021 s.d. Semester I Tahun 2023 pada Pemerintah Kota Kendari di Kendari
6	138	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara	1	DTT Kepatuhan atas Kegiatan Operasional pada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara serta Instansi Terkait Lainnya Tahun Buku 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) di Kendari
		Jumlah	6	
XXVIII	Provinsi Gorontalo			
1	139	Kabupaten Boalemo	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengembangan Ekonomi, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Boalemo dan Instansi Terkait Lainnya di Tilamuta
		Jumlah	1	
XXIX	Provinsi Sulawesi Barat			
1	140	Kabupaten Majene	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penguatan Kelembagaan Desa, Pengendalian Penggunaan Dana Desa, dan Pengelolaan BUM Desa untuk Mendukung Pembangunan Desa Terpadu Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Majene dan Instansi Terkait Lainnya di Majene
2	141	Kabupaten Mamuju	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sektor Unggulan untuk Komoditas Kakao dan Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Mamuju dan Instansi Terkait Lainnya di Mamuju
		Jumlah	2	
XXX	Provinsi Maluku			
1	142	Kabupaten Maluku Tengah	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sektor Unggulan untuk Komoditas Perikanan Tangkap Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan Instansi Terkait Lainnya di Masohi

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	143		1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan Instansi Terkait Lainnya di Masohi
2	144	Kabupaten Seram Bagian Timur	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dan Instansi Terkait Lainnya di Bula
3	145	PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku utara	1	DTT Kepatuhan atas Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023
		Jumlah	4	
XXXI	Provinsi Maluku Utara			
1	146	Provinsi Maluku Utara	1	DTT Kepatuhan atas Penganggaran dan Pelaksanaan Pendapatan, Belanja serta Pengelolaan Utang RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie TA 2022 dan 2023 (s.d. Oktober) pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara
2	147	Kabupaten Pulau Taliabu	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu dan Instansi Terkait Lainnya di Bobong
		Jumlah	2	
XXXII	Provinsi Papua			
1	148	Provinsi Papua	1	DTT Kepatuhan atas Operasional Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura dan BLUD RSUD Abepura Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Papua dan Instansi Terkait Lainnya di Jayapura
2	149	Kabupaten Biak Numfor	1	DTT Kepatuhan atas Operasional Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Biak Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan Instansi Terkait Lainnya di Biak
3	150	Kota Jayapura	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan <i>Mandatory Spending</i> untuk Mendukung Belanja Daerah yang Berkualitas Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kota Jayapura dan Instansi Terkait Lainnya di Jayapura
4	151	PT Bank Pembangunan Daerah Papua	1	DTT Kepatuhan atas Operasional Bank Pembangunan Daerah Papua Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023
		Jumlah	4	
XXXIII	Provinsi Papua Selatan			
1	152	Kabupaten Merauke	1	DTT Kepatuhan atas Operasional Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Merauke dan Instansi Terkait Lainnya di Merauke
		Jumlah	1	
XXXIV	Provinsi Papua Tengah			
1	153	Kabupaten Mimika	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan <i>Mandatory Spending</i> untuk Mendukung Belanja Daerah yang Berkualitas Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Mimika dan Instansi Terkait Lainnya di Mimika
2	154	Kabupaten Nabire	1	DTT Kepatuhan atas Operasional Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Nabire dan Instansi Terkait Lainnya di Nabire
		Jumlah	2	

No Urut		Entitas		Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
XXXV	Provinsi Papua Barat				
	1	155	Kabupaten Fakfak	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sektor Unggulan untuk Komoditas Pala Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Fakfak dan Instansi Terkait Lainnya di Fakfak
	2	156	Kabupaten Manokwari	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengembangan Ekonomi, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Manokwari dan Instansi Terkait Lainnya di Manokwari
	3	157	Kabupaten Teluk Bintuni	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan <i>Mandatory Spending</i> untuk Mendukung Belanja Daerah yang Berkualitas Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dan Instansi Terkait Lainnya di Bintuni
			Jumlah	3	
XXXVI	Provinsi Papua Barat Daya				
	1	158	Kabupaten Raja Ampat	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan Instansi Terkait Lainnya
			Jumlah	1	
	Jumlah LHP PN 2 - Pengembangan Wilayah pada Pemerintah Daerah			148	
	Jumlah LHP Prioritas Nasional 2 - Pengembangan Wilayah			158	
PRIORITAS NASIONAL 4 - REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN					
A	Pemerintah Pusat				
I	Komisi II				
	1	1	Badan Kepegawaian Negara	1	Kinerja atas Efektivitas Pengawasan dan Pengendalian Penegakan Disiplin ASN dalam Mendukung Prioritas Nasional 4 - Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Tahun 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada BKN dan Instansi Lain Terkait
	2	2	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	1	Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2022 s.d. Semester I Tahun 2023 pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Instansi Lain Terkait
	3	3	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	1	Kinerja atas Efektivitas Penyelenggaraan Gerakan Indonesia Melayani dalam Mendukung Prioritas Nasional 4 - Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Tahun 2021 s.d. Semester I 2023 pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Instansi Lain Terkait
			Jumlah	3	
II	Komisi VIII				
	1	4	Kementerian Agama	1	Kinerja atas Efektivitas Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444H/2023M pada Kementerian Agama dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta

No Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	2	5	Kementerian Agama	1	DTT Kepatuhan atas Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444H/2023M pada Kementerian Agama dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta dan Arab Saudi
			Jumlah	2	
III	Komisi IX				
	1	6	Kementerian Kesehatan	1	DTT atas Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Penyelenggaraan Kesehatan Haji Tahun 2023 pada Kementerian Kesehatan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Arab Saudi
			Jumlah	1	
IV	Komisi X				
	1	7	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemajuan Kebudayaan dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2023 di DKI Jakarta dan Daerah
	2	8	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	1	Kinerja atas Efektivitas Layanan Pemustaka dalam Rangka Peningkatan Budaya Literasi Tahun 2021 s.d. Semester I Tahun 2023 pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Instansi Lain Terkait di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta
			Jumlah	2	
V	Lintas Komisi				
	1	9	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	1	Kinerja atas Efektivitas Program Gerakan Nasional Revolusi Mental Tahun 2021 s.d. Semester I Tahun 2023 pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Instansi Lain Terkait
			Jumlah	1	
	Jumlah LHP PN 4 - Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan pada Pemerintah Pusat			9	
B	Pemerintah Daerah				
I	Provinsi Aceh				
	1	10	Pemerintah Aceh	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah untuk Pemajuan Kebudayaan dalam Rangka Mendukung Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Aceh dan Instansi Terkait Lainnya
	2	11	Kota Banda Aceh	1	Kinerja atas Efektivitas Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dalam Rangka Mengintegrasikan Pelayanan untuk Meningkatkan Kecepatan, Kemudahan, Jangkauan, Kenyamanan dan Keamanan Pelayanan untuk Mendukung Gerakan Indonesia Melayani Tahun 2021 s.d. Semester I Tahun 2023 pada Pemerintah Kota Banda Aceh dan Instansi Terkait Lainnya di Banda Aceh
			Jumlah	2	
II	Provinsi Sumatera Utara				
	1	12	Kota Tebing Tinggi	1	Kinerja atas Efektivitas Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dalam Rangka Mengintegrasikan Pelayanan untuk Meningkatkan Kecepatan, Kemudahan, Jangkauan, Kenyamanan, dan Keamanan Pelayanan untuk Mendukung Gerakan Indonesia Melayani Tahun 2022 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi dan Instansi Terkait Lainnya di Tebing Tinggi
			Jumlah	1	

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
III	Provinsi Sumatera Barat			
1	13	Kota Bukittinggi	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah untuk Pemajuan Kebudayaan dalam Rangka Mendukung Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kota Bukittinggi di Bukittinggi
		Jumlah	1	
IV	Provinsi Jambi			
1	14	Kota Jambi	1	Kinerja atas Efektivitas Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) dalam Rangka Mengintegrasikan Pelayanan untuk Meningkatkan Kecepatan, Kemudahan, Jangkauan, Kenyamanan, dan Keamanan Pelayanan untuk Mendukung Gerakan Indonesia Melayani Tahun 2022 s.d. 2023 (Semester I) pada Pemerintah Kota Jambi dan Instansi Terkait Lainnya di Jambi
		Jumlah	1	
V	Provinsi Sumatera Selatan			
1	15	Kota Palembang	1	Kinerja atas Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam Rangka Mendukung Gerakan Indonesia Melayani Melalui Mal Pelayanan Publik Tahun 2021 s.d. 2023 (Semester I) pada Pemerintah Kota Palembang di Palembang
		Jumlah	1	
VI	Provinsi Bengkulu			
1	16	Kabupaten Lebong	1	Kinerja atas Efektivitas Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) dalam Rangka Mengintegrasikan Pelayanan untuk Meningkatkan Kecepatan, Kemudahan, Jangkauan, Kenyamanan, dan Keamanan Pelayanan untuk Mendukung Gerakan Indonesia Melayani Tahun 2022 s.d. 2023 pada Pemerintah Kabupaten Lebong dan Instansi Terkait Lainnya
		Jumlah	1	
VII	Provinsi Lampung			
1	17	Kota Metro	1	Kinerja atas Efektivitas Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dalam Rangka Mengintegrasikan Pelayanan untuk Meningkatkan Kecepatan, Kemudahan, Jangkauan, Kenyamanan, dan Keamanan Pelayanan untuk Mendukung Gerakan Indonesia Melayani Tahun 2022 sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 pada Pemerintah Kota Metro di Metro dan Instansi Terkait Lainnya
		Jumlah	1	
VIII	Provinsi DKI Jakarta			
1	18	Provinsi DKI Jakarta	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah untuk Pemajuan Kebudayaan dalam Rangka Mendukung Pembangunan Daerah pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III Tahun Anggaran 2023 di Jakarta
		Jumlah	1	
IX	Provinsi D.I. Yogyakarta			
1	19	Kabupaten Sleman	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah untuk Pemajuan Kebudayaan dalam Rangka Mendukung Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sleman di Sleman
		Jumlah	1	
X	Provinsi Banten			
1	20	Kota Tangerang Selatan	1	Kinerja atas Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dalam Rangka Mendukung Gerakan Indonesia Melayani Tahun 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan di Ciputat
		Jumlah	1	

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
XI	Provinsi Bali			
1	21	Kabupaten Bangli	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah untuk Pemajuan Kebudayaan dalam Rangka Mendukung Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bangli di Bangli
		Jumlah	1	
XII	Provinsi Nusa Tenggara Barat			
1	22	Kabupaten Lombok Tengah	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah untuk Pemajuan Kebudayaan dalam Rangka Mendukung Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah di Praya
		Jumlah	1	
XIII	Provinsi Nusa Tenggara Timur			
1	23	Kabupaten Ende	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah untuk Pemajuan Kebudayaan dalam Rangka Mendukung Pembangunan Daerah Tahun Anggaran (TA) 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Ende dan Instansi Terkait Lainnya di Ende
2	24	Kabupaten Lembata	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah untuk Pemajuan Kebudayaan dalam Rangka Mendukung Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Lembata dan Instansi Terkait Lainnya di Lewoleba
		Jumlah	2	
XIV	Provinsi Kalimantan Barat			
1	25	Kota Singkawang	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah untuk Pemajuan Kebudayaan dalam Rangka Mendukung Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kota Singkawang di Singkawang
		Jumlah	1	
XV	Provinsi Kalimantan Tengah			
1	26	Kabupaten Pulang Pisau	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah untuk Pemajuan Kebudayaan dalam Rangka Mendukung Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dan Instansi Terkait Lainnya di Pulang Pisau
		Jumlah	1	
XVI	Provinsi Kalimantan Timur			
1	27	Kabupaten Paser	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah untuk Pemajuan Kebudayaan dalam Rangka Mendukung Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Paser di Tana Paser
		Jumlah	1	
XVII	Provinsi Sulawesi Utara			
1	28	Kota Kotamobagu	1	Kinerja atas Efektivitas Usaha Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Investasi dan Mewujudkan Pelayanan Perizinan Prima Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kota Kotamobagu dan Instansi Terkait Lainnya di Manado dan Kotamobagu
		Jumlah	1	
XVIII	Provinsi Sulawesi Tengah			
1	29	Kabupaten Tolitoli	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah untuk Pemajuan Kebudayaan dalam Rangka Mendukung Pembangunan Daerah Tahun Anggaran (TA) 2021 s.d. Triwulan (TW) III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Tolitoli
		Jumlah	1	

No Urut		Entitas		Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
XIX	Provinsi Sulawesi Selatan				
1	30	Kabupaten Toraja utara		1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah untuk Pemajuan Kebudayaan dalam Rangka Mendukung Pembangunan Daerah TA 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dan Instansi Terkait Lainnya di Rantepao
		Jumlah		1	
XX	Provinsi Maluku				
1	31	Kota Tual		1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah untuk Pemajuan Kebudayaan dalam Rangka Mendukung Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kota Tual di Tual
		Jumlah		1	
XXI	Provinsi Maluku Utara				
1	32	Kota Ternate		1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemajuan Kebudayaan dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kota Ternate di Ternate
		Jumlah		1	
	Jumlah LHP PN 4 - Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan pada Pemerintah Daerah			23	
Jumlah LHP Prioritas Nasional 4 - Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan				32	
Jumlah LHP pada Pemeriksaan Prioritas Nasional				190	

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Pusat Menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta)

No.	Tema/Subtema Pemeriksaan	TOTAL					Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Permasalahan Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan (3E)	
		Jml LHP	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan
A	PENGUATAN KETAHANAN EKONOMI									
1	Kesiapan Implementasi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur dan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut	1	7	22	9	-	-	-	9	-
2	Pengelolaan PNBP Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing	1	6	16	7	-	-	-	7	-
3	Pengelolaan Informasi Perpajakan	1	8	19	8	-	-	-	8	-
B	PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA									
1	Upaya Pemerintah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i>	3	21	94	29	-	-	-	29	-
2	Pelayanan Pemeriksaan, Pengujian, dan Pemeliharaan Kesehatan	1	7	12	7	-	-	-	7	-
3	Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pesantren	1	11	32	14	-	-	-	14	-
4	Pengelolaan Pendidikan Profesi Guru	1	11	31	13	-	-	-	13	-
5	Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan	1	16	42	16	-	-	-	16	-
6	Implementasi Desain Besar Olahraga Nasional terhadap Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional	1	12	42	15	-	-	-	15	-
7	Pelatihan Tenaga Kerja Bidang Otomotif	1	8	18	9	-	-	-	9	-
8	Pengelolaan Akademis dan Perkuliahan Politeknik STIA LAN	1	8	26	8	-	-	-	8	-
C	PENGUATAN INFRASTRUKTUR									
1	Pengelolaan Jaringan Trayek Angkutan Laut Perintis Penumpang	1	16	25	21	-	-	-	21	-
2	Perencanaan, Pengaturan, dan Penyelenggaraan Layanan Angkutan Perkotaan	1	9	21	11	-	-	-	11	-
3	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan	1	8	22	9	-	-	-	9	-
4	Pengelolaan Penyiaran	1	9	22	13	-	-	-	13	-

No.	Tema/Subtema Pemeriksaan	TOTAL					Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Permasalahan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan (3E)	
		Jml LHP	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan
D	PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP									
1	Pengelolaan Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif	1	10	28	13	-	-	-	13	-
2	Upaya Penurunan Risiko Bencana Hidrometeorologi	1	7	26	8				8	-
3	Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Kehutanan serta Penggunaan Lahan Lainnya	1	9	16	9	-	-	-	9	-
E	PENGUATAN STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK									
1	Persiapan Penyelenggaraan Pemilu	7	65	138	65	-	-	-	65	-
2	Pelindungan WNI dan Kerja Sama dalam Upaya Pemberantasan TPPO	1	9	25	12	-	-	-	12	-
3	Pelayanan Peradilan Tata Usaha Negara	1	25	80	41	-	-	-	41	-
4	Penanganan Laporan Masyarakat Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim	1	9	26	11	-	-	-	11	-
5	Manajemen Pemasarakatan	1	4	23	9	413,41	2	215,95	7	197,46
6	Pengelolaan PNBPN Pendapatan Penelitian/Riset dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan & Teknologi	1	16	38	17	-	-	-	17	-
7	Tata Kelola Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	1	11	27	12	-	-	-	12	-
8	Pemolisian Masyarakat melalui Bhabinkamtibmas	1	10	17	12	-	-	-	12	-
	Total	34	332	888	398	413,41	2	215,95	396	197,46

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT –Kepatuhan pada Pemerintah Pusat Menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta)

No.	Tema/Subtema Pemeriksaan	TOTAL				Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	Permasalahan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Permasalahan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan (3E)		Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan	
		Jml LHP	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Jml Permasalahan		Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan		Nilai Temuan
A PENGUATAN KETAHANAN EKONOMI												
1	Kerja Sama Perdagangan Internasional dan Pengembangan Ekspor Nasional	1	9	14	11	639,25	4	4	639,25	3	-	360,02
2	Pengelolaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	2	11	36	15	2.049,71	12	2	597,80	1	1.451,91	142,80
3	Pengelolaan Pendapatan dan Belanja	13	175	475	293	681.600,25	97	172	525.167,90	24	156.432,35	274.149,11
B PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA												
4	Kesehatan	2	10	20	13	64,02	4	6	64,02	3	-	-
C PENGUATAN INFRASTRUKTUR												
5	Pengelolaan Utang Pemerintah dan Penggunaan untuk Pendanaan Infrastruktur	1	9	17	13	219.005,50	11	1	-	1	219.005,50	-

No.	Tema/Subtema Pemeriksaan	TOTAL				Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	Permasalahan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Permasalahan Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan (3E)	Nilai Penyerahan Aset atau Penyerahan ke Kas Negara atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan
		Jml Temuan LHP	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Jml Permasalahan		Jml Permasalahan	Nilai Temuan		
D PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP										
6	Pemenuhan Kewajiban Pemegang Perizinan Berusaha dan Persetujuan Lingkungan terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1	8	15	11	-	5	6	-	-
E PENGUATAN STABILITAS POLHUKANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK										
7	Penempatan Pekerja Migran Indonesia	1	10	25	17	13.808,92	7	9	344,82	13.464,10
8	Pengelolaan Barang Milik Negara	8	62	204	133	53.210,56	61	65	15.985,61	37.224,95
	Total	29	294	806	506	970.378,21	201	265	542.799,40	427.578,81
										279.951,49

Keterangan:

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per tanggal 29 Desember 2023

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Daerah Menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta)

No.	Tema/Subtema Pemeriksaan	TOTAL				Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	Permasalahan Terhadap Ketepatan Peraturan Perundang-undangan		Permasalahan Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas (3E)		Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/ Perusahaan atas Temuan yang Telah Ditindak Lanjuti dalam Proses Pemeriksaan
		Jml LHP	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Jml Permasalahan		Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	
A Penguatan Ketahanan Ekonomi											
1	Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata dan Destinasi Pariwisata	2	18	55	31	-	-	-	31	-	-
2	Pengelolaan Dana Pihak Ketiga dan Perkreditan	1	15	23	16	-	-	-	16	-	-
B Pembangunan Sumber Daya Manusia											
1	Penurunan Prevalensi Stunting	44	320	1.208	423	34,92	1	34,92	422	-	-
2	Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	3	41	175	59	-	-	-	59	-	-
3	Pelayanan Kesehatan	1	11	68	11	-	-	-	11	-	-
4	Kinerja Rumah Sakit Jiwa	1	7	48	10	339,87	1	339,87	9	-	-
C Penguatan Infrastruktur											
1	Penyelenggaraan Jalan untuk Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan	33	290	808	315	1.593,79	11	1.593,79	304	-	85,45
2	Operasional Perusahaan Umum Daerah	2	16	104	20	1.882,77	1	1.882,77	19	-	-
D Pembangunan Lingkungan Hidup											
1	Program Pengendalian Banjir	1	6	26	6	-	-	-	6	-	-
2	Penanggulangan Bencana Gempa Bumi	1	7	30	7	-	-	-	7	-	-

No.	Tema/Subtema Pemeriksaan	TOTAL				Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	Permasalahan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan		Permasalahan Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas (3E)		Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/ Perusahaan atas Temuan yang Telah Ditindak Lanjuti dalam Proses Pemeriksaan
		Jml LHP	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Jml Permasalahan		Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	
E	Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik										
1	Pengelolaan BMD	5	52	116	62	-	-	-	62	-	-
2	Pengelolaan Aset yang Bersumber Dari Dana Keistimewaan	1	9	21	9	-	-	-	9	-	-
3	Penyelesaian Permasalahan Operasi Badan Usaha Milik Daerah	7	21	75	21	-	-	-	21	-	-
4	Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum	2	21	55	24	27,61	-	1	27,61	23	-
5	Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	1	9	39	10	-	-	-	10	-	-
6	Pengelolaan PBB-P2	1	7	17	12	-	-	-	12	-	-
	Total	106	850	2.868	1.036	3.878,96	-	15	3.878,96	1.021	85,45

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT –Kepatuhan pada Pemerintah Daerah Menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta)

No.	Tema/Subtema Pemeriksaan	TOTAL					Permasalahan Klemahan Sistem Pengendalian Intern	Permasalahan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Permasalahan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan (3E)		Nilai Penyerahan Aset atau Penyerahan ke Kas Negara/Daerah/Perusahaan atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti dalam Proses pemeriksaan
		Jml LHP	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Jml Permasalahan	Nilai Temuan		Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai temuan	
A Penguatan Ketahanan Ekonomi												
1	Pengelolaan Pendapatan	14	164	482	247	39.742,54	176	70	39.742,54	1	-	1.145,83
2	Pengelolaan Belanja	175	1.711	4.910	2.709	944.375,07	408	2.163	855.169,18	138	89.205,89	121.891,76
B Pembangunan Sumber Daya Manusia												
1	Operasional Bidang Kesehatan	6	126	329	200	13.067,95	132	49	4.867,46	19	8.200,49	3.087,10
C Penguatan Infrastruktur												
1	Pengelolaan Belanja Infrastruktur	59	278	810	425	266.444,22	14	405	260.631,42	6	5.812,80	99.111,82
2	Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Umum	1	13	35	32	4.663,27	17	15	4.663,27	-	-	-
D Pembangunan Lingkungan Hidup												
1	Pengelolaan Reklamasi dan Pascatambang	1	18	29	18	-	-	18	-	-	-	-
E Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik												
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	13	106	387	201	956,28	61	138	956,28	2	-	105,16
Total		269	2.416	6.982	3.832	1.269.249,33	808	2.858	1.166.030,15	166	103.219,18	225.341,67

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada BUMN dan Badan Lainnya menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta)

No.	Tema/Subtema Pemeriksaan	TOTAL					Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Permasalahan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan (3E)	
		Jml LHP	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan
BUMN DAN BADAN LAINNYA										
1	Prioritas Nasional (PN) 5									
1	Penguatan infrastruktur									
1	Pengelolaan Sumber Daya Air Untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat	1	8	27	12	20.466,36	1	20.466,36	11	-
Total		1	8	27	12	20.466,36	1	20.466,36	11	-

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT -Kepatuhan pada BUMN dan Badan Lainnya Menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta)

No.	Tema/Subtema Pemeriksaan	TOTAL				Permasalahan Klemahan Sistem Pengendalian Intern	Permasalahan Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Permasalahan Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan (3E)		Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Perusahaan atas Temuan yang Telah Ditindak Lanjuti dalam Proses Pemeriksaan	
		Jml LHP	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Jml Permasalahan		Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan		Nilai Temuan
A PENGUATAN KETAHANAN EKONOMI												
1	Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN dan Badan Lainnya	11	143	410	250	1.515.856,58	110	1.417.324,08	30	98.532,50	1.544,07	
2	Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan	1	15	27	18	-	17	-	-	-	-	
3	Pencetakan, Pengeluaran, dan Pemusnahan Rupiah	1	3	11	7	-	4	-	-	-	-	
B PEMBANGUNAN SDM												
1	Pengelolaan Kepesertaan, Iuran dan Belanja Manfaat BPJS Kesehatan	1	18	44	35	2.021.559,94	19	2.021.559,94	-	-	-	
2	Pengelolaan PTN BH	6	95	253	169	47.023,22	86	43.341,02	4	3.682,20	1.106,30	
C PENGUATAN INFRASTRUKTUR												
1	Pembiayaan Infrastruktur	1	19	45	24	15.688,67	19	15.688,67	-	-	-	
Total		21	293	790	503	3.600.128,41	255	3.497.913,71	34	102.214,70	2.650,37	

Keterangan:

Nilai valas telah dikonsversikan sesuai nilai kurs tengah BI per tanggal 29 Desember 2023

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan atas Prioritas Nasional Pengembangan Wilayah Tahun 2023 Semester II
(Nilai dalam Rp Juta)

No.	Tema/Entitas/Jenis Pemeriksaan	TOTAL				Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	Permasalahan Ketidkpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		Permasalahan Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas (3E)		Nilai penyerahan Aset atau penytoran ke Kas Negara atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan
		Jml LHP	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Jml Permasalahan		Nilai (Rp)	Jml Per-masalah-an	Nilai Temuan (Rp)	Jml Per-masalah-an	
PN 2 Pengembangan Wilayah		158	1.689	4.732	2.209	1.470.610,24	517	1.233.971,74	1.298	236.638,46	19.470,45
1. Pengembangan Kawasan Strategis (KP1)		11	108	204	120	183,80	8	183,80	107	-	-
1. Pemerintah Pusat		2	19	43	24	183,80	8	183,80	11	-	-
a. Pemeriksaan Kinerja		1	9	28	11	-	-	-	11	-	-
b. Pemeriksaan DTT		1	10	15	13	183,80	8	183,80	-	-	-
2. Pemerintah Daerah		9	89	161	96	-	-	-	96	-	-
a. Pemeriksaan Kinerja		9	89	161	96	-	-	-	96	-	-
2. Pengembangan Sektor Unggulan (KP2)		22	232	672	291	15.409,83	6	2.111,70	272	13.298,13	930,89
1. Pemerintah Pusat		1	8	23	22	15.409,83	6	2.111,70	3	13.298,13	930,89
a. Pemeriksaan DTT		1	8	23	22	15.409,83	6	2.111,70	3	13.298,13	930,89
1. Pemerintah Daerah		21	224	649	269	-	-	-	269	-	-
a. Pemeriksaan Kinerja		21	224	649	269	-	-	-	269	-	-
3. Pengembangan Kawasan Perkotaan (KP3)		7	77	268	79	-	-	-	79	-	-
1. Pemerintah Pusat		1	14	51	14	-	-	-	14	-	-
a. Pemeriksaan Kinerja		1	14	51	14	-	-	-	14	-	-
2. Pemerintah Daerah		6	63	217	65	-	-	-	65	-	-
a. Pemeriksaan Kinerja		6	63	217	65	-	-	-	65	-	-

No.	Tema/Entitas/Jenis Pemeriksaan	TOTAL					Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	Permasalahan Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		Permasalahan Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas (BE)		Nilai penyerahan Aset atau penyeroran ke Kas Negara atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan
		Jml LHP	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Jml Permasalahan	Nilai Temuan (Rp)		Jml Permasalahan	Nilai Temuan (Rp)	Jml Permasalahan	Nilai Temuan (Rp)	
4.	Pengembangan Daerah Tertinggal, Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi (KP4)	49	424	1.158	492	-	-	-	-	-	-	-
	1. Pemerintah Pusat	3	20	54	20	-	-	-	-	-	-	-
	a. Pemeriksaan Kinerja	3	20	54	20	-	-	-	-	-	-	-
	2. Pemerintah Daerah	46	404	1.104	472	-	-	-	-	-	-	-
	a. Pemeriksaan Kinerja	46	404	1.104	472	-	-	-	-	-	-	-
5.	Kelembagaan dan Keuangan Daerah (KP5)	69	848	2.430	1.227	1.455.016,61	503	376	1.231.676,24	348	223.340,33	18.539,56
	1. Pemerintah Pusat	3	28	76	30	-	-	-	-	-	-	-
	a. Pemeriksaan Kinerja	3	28	76	30	-	-	-	-	-	-	-
	2. Pemerintah Daerah	39	444	1.364	595	87.902,07	141	147	74.110,64	307	13.791,41	5.407,48
	a. Pemeriksaan Kinerja	27	250	867	302	35.021,92	1	6	35.021,92	295	-	-
	b. Pemeriksaan DTT	12	194	497	293	52.880,15	140	141	39.088,72	12	13.791,41	5.407,88
	3. Badan Usaha Milik Daerah	27	376	990	602	1.367.114,54	362	229	1.157.565,60	11	209.548,92	13.132,08
	a. Pemeriksaan DTT	27	376	990	602	1.367.114,54	362	229	1.157.565,60	11	209.548,92	13.132,08
	JUMLAH	158	1.689	4.732	2.209	1.470.610,24	517	394	1.233.971,74	1.298	236.638,46	19.470,45

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan atas Prioritas Nasional Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Tahun 2023 Semester II
(Nilai dalam Rp Juta)

Tema/Entitas/Jenis Pemeriksaan	TOTAL					Permasalahan Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	Permasalahan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		Permasalahan Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas (3E)	
	Jml LHP	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Jml Permasalahan	Nilai Temuan (Rp)			Jml Permasalahan	Nilai Temuan (Rp)	Jml Permasalahan	Nilai Temuan (Rp)
PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	32	306	826	362	4.006,21	12	7	80,46	343	3.925,75	
PP 1 Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila	12	106	253	138	-	-	-	-	138	-	
KP 2 Revolusi Mental dalam Tata Kelola Pemerintahan	1	11	16	16	-	-	-	-	16	-	
1. Pemerintah Pusat	1	11	16	16	-	-	-	-	16	-	
a. Pemeriksaan Kinerja	1	11	16	16	-	-	-	-	16	-	
KP 4 Penguatan Pusat-Pusat Perubahan Gerakan Revolusi Mental	10	85	222	111	-	-	-	-	111	-	
1. Pemerintah Pusat	2	14	32	16	-	-	-	-	16	-	
a. Pemeriksaan Kinerja	2	14	32	16	-	-	-	-	16	-	
2. Pemerintah Daerah	8	71	190	95	-	-	-	-	95	-	
a. Pemeriksaan Kinerja	8	71	190	95	-	-	-	-	95	-	
KP 6 Pembinaan Ideologi Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara	1	10	15	11	-	-	-	-	11	-	
1. Pemerintah Pusat	1	10	15	11	-	-	-	-	11	-	
a. Pemeriksaan Kinerja	1	10	15	11	-	-	-	-	11	-	
PP 2 Peningkatan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan	16	150	468	164	51,25	-	1	51,25	163	-	
1. Pemerintah Pusat	1	9	38	9	-	-	-	-	9	-	
a. Pemeriksaan Kinerja	1	9	38	9	-	-	-	-	9	-	
2. Pemerintah Daerah	15	141	430	155	51,25	-	1	51,25	154	-	
a. Pemeriksaan Kinerja	15	141	430	155	51,25	-	1	51,25	154	-	

Tema/Entitas/Jenis Pemeriksaan	TOTAL					Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		Permasalahan Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		Permasalahan Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas (3E)	
	Jml LHP	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Jml Permasalahan	Nilai Temuan (Rp)	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan (Rp)	Jml Permasalahan	Nilai Temuan (Rp)
PP 3 Memperkuat Moderasi Beragama	3	38	76	43	3.954,96	12	6	29,21	25	3.925,75	
KP 4 Peningkatan Kualitas Pelayanan Ibadah Haji	3	38	76	43	3.954,96	12	6	29,21	25	3.925,75	
1. Pemerintah Pusat	3	38	76	43	3.954,96	12	6	29,21	25	3.925,75	
a. Pemeriksaan Kinerja	1	18	38	22	-	-	-	-	22	-	
b. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	2	20	38	21	3.954,96	12	6	29,21	3	3.925,75	
PP 4 Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas	1	12	29	17	-	-	-	-	17	-	
KP 1 dan KP 4 Peningkatan Budaya Literasi dan Penguatan Institusi Sosial Penggerak Literasi dan Inovasi	1	12	29	17	-	-	-	-	17	-	
1. Pemerintah Pusat	1	12	29	17	-	-	-	-	17	-	
a. Pemeriksaan Kinerja	1	12	29	17	-	-	-	-	17	-	
JUMLAH	32	306	826	362	4.006,21	12	7	80,46	343	3.925,75	

Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan per 31 Desember 2023 (Nilai dalam Rp)

Total Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Dibrindaklanjuti dengan Penyerahan/ Perubahan aset Negara/Daerah atau Perusahaan Negara/ Daerah						
	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dengan Rekomendasi				Belum Dibrindaklanjuti			Tidak Dapat Dibrindaklanjuti		
			Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai		Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai
Total 2005-2009	138.888	74.472.173.132.460,60	123.392	88,9%	57.870.716.168.520,10	11.390	8,2%	11.669.106.380.741,80	1.554	1,1%	553.091.393.479,02	2.552	1,8%	4.379.259.189.719,68	48.244.867.220.814,10
2005	15.034	6.677.734.256.922,99	13.268	88,2%	5.024.859.621.069,65	1.237	8,2%	928.423.352.468,86	100	0,7%	23.204.233.634,26	429	2,9%	701.247.049.750,22	4.150.348.729.183,37
2006	21.028	8.552.214.957.537,75	18.850	89,7%	4.324.457.591.131,33	1.500	7,1%	1.907.445.764.786,20	193	0,9%	31.227.610.158,58	485	2,3%	2.289.083.991.461,63	2.610.702.236.323,89
2007	28.465	12.918.893.546.372,90	25.505	89,7%	11.447.190.481.546,80	2.005	7,0%	947.608.958.337,50	400	1,4%	305.784.525.436,34	555	1,9%	219.309.581.052,23	9.667.229.172.937,84
2008	34.605	30.935.151.923.281,40	30.835	89,2%	24.182.076.076.334,50	2.886	8,3%	5.933.231.320.445,90	388	1,1%	64.807.481.592,56	496	1,4%	755.037.044.908,43	24.778.179.001.584,40
2009	39.756	15.387.178.448.345,50	34.934	87,8%	12.892.132.398.437,70	3.762	9,5%	1.952.396.984.703,33	473	1,2%	128.067.542.657,28	587	1,5%	414.581.532.547,17	7.038.408.080.784,56
Total 2010-2014	224.469	64.930.774.732.389,00	192.910	86,0%	35.437.347.565.562,10	24.103	10,7%	21.045.253.430.350,20	3.919	1,7%	645.786.719.454,94	3.537	1,6%	7.802.387.017.021,72	32.666.555.592.802,70
2010	41.748	9.740.133.351.612,10	36.775	88,1%	7.094.971.536.575,18	3.811	9,1%	2.267.096.281.458,91	529	1,3%	185.326.657.268,44	633	1,5%	192.738.876.309,57	4.616.222.454.940,93
2011	46.140	8.748.622.771.404,93	39.418	85,4%	5.157.518.554.391,65	4.755	10,3%	3.119.085.334.542,85	1.223	2,7%	113.165.344.207,67	744	1,6%	358.853.538.262,76	4.124.523.360.642,40
2012	46.078	8.789.438.712.788,70	39.431	85,5%	5.016.616.601.968,66	4.774	10,4%	2.361.954.699.701,26	963	2,1%	170.915.165.389,21	910	2,0%	1.239.932.245.729,57	3.899.865.716.433,91
2013	44.666	15.739.412.097.993,50	38.252	85,7%	9.019.480.368.683,81	4.928	11,0%	6.260.308.110.517,23	661	1,5%	102.861.238.189,17	825	1,8%	356.762.380.603,28	4.090.005.318.244,51
2014	45.837	21.913.167.798.889,80	39.034	85,2%	9.148.760.503.942,84	5.835	12,7%	7.036.809.004.129,97	543	1,2%	73.518.314.400,45	425	0,9%	5.654.079.976.116,54	15.935.938.742.540,90
Total 2015-2019	199.833	116.204.610.738.712,00	162.035	81,1%	49.730.320.321.251,00	33.436	16,7%	53.437.725.731.142,10	3.061	1,5%	567.179.158.092,86	1.301	0,7%	12.469.385.528.225,70	34.101.850.525.166,90
2015	42.810	18.097.839.409.144,10	36.035	84,2%	7.958.797.351.165,20	5.498	12,8%	8.745.983.395.680,06	690	1,6%	29.874.040.197,03	587	1,4%	1.363.184.622.101,77	4.337.011.054.415,12
2016	42.640	32.579.351.372.213,30	35.740	83,8%	9.643.203.287.531,53	6.091	14,3%	15.164.481.317.917,00	515	1,2%	19.964.828.181,95	294	0,7%	7.752.101.938.582,82	5.386.761.839.128,92
2017	39.044	38.044.463.741.725,90	32.166	82,5%	18.625.172.979.708,70	6.070	15,5%	16.401.930.164.390,70	597	1,5%	126.211.795.269,21	211	0,5%	2.891.148.808.357,21	8.894.729.864.012,45
2018	39.273	14.086.856.865.734,70	31.024	79,0%	7.307.129.515.210,40	7.545	19,2%	6.242.632.308.417,07	552	1,4%	107.275.291.185,54	152	0,4%	429.819.550.921,74	8.911.566.685.010,93
2019	36.066	13.396.099.349.893,60	27.070	75,0%	6.196.017.187.635,14	8.232	22,8%	6.882.698.344.737,20	707	2,0%	284.253.203.259,13	57	0,2%	33.130.614.262,17	6.571.787.082.599,44
Total 2020-2023	151.178	64.384.369.832.694,90	80.065	52,9%	15.332.583.144.392,20	44.051	29,1%	28.205.497.235.068,70	27.022	17,9%	20.839.025.846.335,70	40	0,1%	7.263.606.898,37	21.869.891.593.648,50
2020	35.046	17.628.524.055.273,50	25.191	71,8%	5.733.183.077.559,31	8.862	25,3%	6.772.692.092.975,17	973	2,8%	5.119.270.233.563,63	20	0,1%	3.378.651.375,37	7.314.691.273.869,57
2021	36.955	21.347.970.860.800,80	23.899	64,7%	4.452.839.136.158,26	11.328	30,7%	14.879.528.181.755,40	1.710	4,6%	2.014.053.604.540,15	18	0,0%	1.549.938.353,00	6.584.011.392.494,32
2022	35.124	11.891.595.792.971,00	19.125	54,4%	3.583.815.978.064,09	12.873	36,7%	3.942.122.513.583,44	3.125	8,9%	4.365.657.301.323,45	1	0,0%	-	5.136.799.610.270,42
2023	44.053	13.516.279.123.643,70	11.850	26,9%	1.562.744.952.810,49	10.988	24,9%	2.611.154.446.754,73	21.214	48,2%	9.340.044.706.908,47	1	0,0%	2.335.017.170,00	2.834.389.317.014,19
Total 2005-2023	714.368	319.991.928.436.256,00	558.402	78,2%	158.370.967.199.725,00	112.980	15,8%	114.357.582.777.303,00	35.556	5,0%	22.605.083.117.362,50	7.430	1,0%	24.658.295.341.865,50	136.883.164.932.432,00

Pemerintah Pusat	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditrindaklanjuti dengan Pelebaran/ Penyerahan Aset Negara/ Daerah atau Perusahaan Negara/ Daerah						
	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Ditrindaklanjuti		Tidak Dapat Ditrindaklanjuti						
			Jml	% Jml	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai					
Total 2005-2009	18.921	17.424.930.645.044,40	16.855	89,1%	10.108.029.479.806,90	848	4,5%	6.186.589.490.602,28	291	1,5%	7.935.143.798,10	927	4,9%	1.122.376.530.837,03	14.937.198.102.041,50
2005	3.659	2.721.461.335.884,14	3.324	90,8%	1.926.946.779.978,35	135	3,7%	277.965.782.601,13	3	0,1%	54.002.203,21	197	5,4%	519.494.771.101,45	1.819.241.373.528,79
2006	3.331	2.432.737.796.984,28	2.972	89,3%	1.249.969.880.007,67	121	3,6%	1.120.111.942.897,63	7	0,2%	26.907.134,96	231	6,9%	62.629.066.944,02	1.104.414.145.403,24
2007	3.653	4.232.151.520.950,24	3.117	85,4%	4.112.127.954.292,65	140	3,8%	59.413.704.524,95	143	3,9%	5.178.817.967,99	253	6,9%	55.431.044.164,65	7.919.982.142.799,39
2008	3.356	6.032.073.480.965,09	3.062	91,2%	1.639.010.324.665,80	174	5,2%	4.232.589.496.452,76	24	0,7%	320.523.487,40	96	2,9%	160.153.135.890,14	1.526.756.606.422,16
2009	4.922	2.003.506.510.729,60	4.380	89,1%	1.179.974.540.862,48	278	5,6%	496.508.564.125,81	114	2,3%	2.354.893.004,54	150	3,0%	324.668.512.736,77	2.566.803.833.887,96
Total 2010-2014	29.914	22.620.505.675.642,40	25.360	84,8%	13.175.510.392.407,10	2.511	8,4%	7.317.968.652.981,76	1.257	4,2%	173.632.388.453,73	786	2,6%	1.953.394.241.799,72	21.596.186.857.801,90
2010	4.783	3.861.366.470.693,15	4.244	88,7%	3.086.386.127.963,03	237	5,0%	546.988.368.319,20	183	3,8%	137.847.469.508,88	119	2,5%	90.144.504.902,04	2.529.422.627.332,13
2011	5.706	4.071.875.864.269,24	4.556	79,8%	2.126.193.542.284,97	372	6,5%	1.694.442.499.606,20	598	10,5%	24.301.041.850,21	180	3,2%	226.938.780.527,86	2.718.865.313.215,71
2012	5.665	2.219.512.906.779,78	4.816	85,0%	1.061.291.918.649,90	397	7,0%	202.599.252.975,42	287	5,1%	5.846.096.393,64	165	2,9%	949.775.638.760,82	1.696.402.127.453,66
2013	5.709	6.171.457.624.780,54	4.885	85,5%	4.307.500.286.161,85	495	8,7%	1.658.696.674.358,21	83	1,5%	3.854.445.808,00	246	4,3%	201.406.218.452,48	2.153.163.548.138,18
2014	8.051	6.296.292.809.119,64	6.859	85,3%	2.594.138.517.347,39	1.010	12,5%	3.215.241.857.722,73	106	1,3%	1.783.334.893,00	76	0,9%	485.129.099.156,52	12.498.333.241.662,20
Total 2015-2019	29.267	38.323.383.478.633,30	22.919	78,2%	18.576.546.396.432,40	5.400	18,5%	18.364.102.356.411,20	402	1,4%	103.430.589.864,19	546	1,9%	1.279.304.135.925,50	14.201.493.440.709,40
2015	6.693	6.505.531.910.130,19	5.181	77,5%	1.391.109.194.871,54	1.065	15,9%	4.952.718.983.077,25	123	1,8%	565.601.330,88	324	4,8%	161.138.130.850,52	902.980.224.880,65
2016	6.383	13.142.489.035.875,20	5.139	80,5%	4.590.630.060.176,11	1.103	17,3%	7.624.011.795.994,96	60	0,9%	4.032.582.778,00	81	1,3%	923.814.596.926,17	2.234.198.751.039,15
2017	5.258	6.721.305.924.118,81	4.158	79,1%	4.203.184.134.349,50	962	18,3%	2.359.175.740.394,77	54	1,0%	24.731.584.545,09	84	1,6%	134.214.464.829,45	1.309.138.821.089,80
2018	5.851	5.013.418.255.745,26	4.698	80,3%	4.258.777.816.868,53	1.042	17,8%	685.838.858.597,22	65	1,1%	8.963.683.167,15	46	0,8%	59.837.897.112,36	6.043.123.904.954,17
2019	5.082	6.940.638.352.763,81	3.743	73,6%	4.132.845.190.166,71	1.228	24,2%	2.742.356.978.347,03	100	2,0%	65.137.138.043,07	11	0,2%	299.046.207,00	3.712.051.738.745,66
Total 2020-2023	24.022	33.590.638.271.315,30	12.630	52,5%	10.273.501.216.431,90	6.013	25,0%	19.807.389.404.759,00	5.372	22,4%	3.509.521.981.174,40	7	0,1%	225.668.950,00	14.609.599.647.842,80
2020	6.424	8.450.334.030.903,35	4.726	73,7%	4.353.157.686.128,40	1.435	22,3%	4.083.065.731.045,58	260	4,0%	13.884.944.779,37	3	0,0%	225.668.950,00	5.724.831.986.382,68
2021	6.235	16.355.877.005.360,40	4.024	64,5%	3.147.687.500.183,52	1.952	31,3%	13.207.989.478.376,90	255	4,1%	200.026.800,00	4	0,1%	-	4.930.853.385.990,54
2022	5.442	5.147.612.145.408,64	2.700	49,6%	2.613.940.087.351,81	1.785	32,8%	1.738.542.195.349,40	957	17,6%	795.125.862.707,43	-	-	-	3.374.465.534.401,60
2023	5.921	3.636.815.089.642,93	1.180	19,9%	158.715.942.768,14	841	14,2%	777.791.999.987,19	3.900	65,9%	2.700.307.146.887,60	-	-	-	579.448.741.067,99
Total 2005-2023	102.124	111.959.458.070.635,00	77.764	76,1%	52.133.587.485.078,40	14.772	14,5%	51.676.049.904.754,30	7.322	7,2%	3.794.520.103.290,42	2.266	2,2%	4.355.300.577.512,25	65.344.478.048.395,60

Pemerintah Daerah	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Dihindarkan/ dengan Penyetoran/ Penyerahan Aset Negara/ Daerah atau Perusahaan Negara/ Daerah						
	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
			Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	
Total 2005-2009	116.410	14.115.608.792.781,20	103.330	88,7%	8.130.487.996.869,23	10.471	9,0%	4.703.189.612.129,36	1.111	1,0%	545.156.249.680,92	1.498	1,3%	736.774.934.101,68	6.906.460.480.738,20
2005	10.940	2.479.389.091.126,02	9.524	87,1%	1.709.950.821.077,16	1.096	10,0%	621.496.360.589,04	97	0,9%	23.150.231.431,05	223	2,0%	124.971.678.028,77	1.588.913.470.281,44
2006	16.604	2.149.935.737.028,88	14.911	89,8%	1.418.118.058.096,89	1.366	8,2%	515.767.771.328,61	131	0,8%	31.200.703.023,62	196	1,2%	184.849.204.579,76	1.053.045.648.945,98
2007	24.014	2.748.252.814.563,73	21.639	90,1%	1.413.397.301.732,20	1.832	7,6%	883.702.258.106,55	255	1,1%	300.605.707.468,35	288	1,2%	150.547.547.254,63	1.128.724.588.839,08
2008	30.722	3.060.671.078.855,90	27.360	89,0%	1.547.032.570.597,44	2.705	8,8%	1.261.167.641.135,01	269	0,9%	64.486.958.105,16	388	1,3%	187.983.909.018,29	1.590.494.797.533,84
2009	34.130	3.677.360.071.208,66	29.896	87,5%	2.041.989.245.365,54	3.472	10,2%	1.421.055.580.970,15	359	1,1%	125.712.049.652,74	403	1,2%	88.602.595.220,23	1.545.281.975.137,86
Total 2010-2014	185.920	17.045.032.919.195,60	159.756	85,9%	8.334.303.823.244,21	21.298	11,5%	7.789.618.624.396,63	2.502	1,3%	447.947.822.651,81	2.364	1,3%	472.962.648.902,98	7.041.975.886.424,60
2010	36.069	2.944.145.984.817,26	31.733	87,9%	1.510.890.903.060,46	3.555	9,9%	1.307.742.734.106,03	319	0,9%	47.479.187.759,56	462	1,3%	78.033.159.891,21	1.430.700.797.599,41
2011	38.528	2.817.953.084.800,09	33.100	86,0%	1.386.021.341.806,61	4.364	11,3%	1.264.719.062.063,90	584	1,5%	88.864.302.357,46	480	1,2%	78.348.378.572,12	1.122.109.138.766,91
2012	38.816	3.585.284.229.480,10	33.193	85,6%	1.740.596.382.908,91	4.324	11,1%	1.532.883.242.905,65	660	1,7%	165.069.068.995,57	639	1,6%	146.735.534.669,98	1.517.378.386.161,34
2013	36.827	3.035.945.345.600,51	31.435	85,4%	1.743.514.393.876,22	4.332	11,8%	1.120.824.718.011,39	529	1,4%	79.634.636.032,17	531	1,4%	91.971.597.680,73	1.336.865.463.739,70
2014	35.680	4.661.704.274.497,67	30.295	85,0%	1.953.480.801.592,02	4.723	13,2%	2.563.448.867.309,66	410	1,1%	66.900.627.507,05	252	0,7%	77.873.978.086,94	1.634.922.100.157,23
Total 2015-2019	159.245	18.469.828.862.153,30	129.575	81,4%	8.827.343.659.727,98	26.595	16,7%	8.299.571.005.729,24	2.519	1,6%	256.905.088.264,06	556	0,3%	1.086.009.108.432,03	8.639.622.820.207,70
2015	33.862	4.130.793.503.949,38	28.807	85,0%	1.577.078.256.839,35	4.289	12,7%	1.853.600.133.358,44	562	1,7%	29.308.438.866,15	204	0,6%	670.806.674.885,44	1.274.155.350.933,43
2016	34.029	4.469.891.541.514,76	28.585	84,1%	2.377.531.873.225,70	4.844	14,2%	1.932.752.171.982,59	454	1,3%	15.532.245.403,95	146	0,4%	144.075.250.902,52	2.177.648.794.491,36
2017	31.521	3.786.915.481.845,13	26.048	82,7%	1.748.623.647.447,13	4.834	15,3%	1.920.117.617.549,12	540	1,7%	101.480.210.724,12	99	0,3%	16.694.006.124,76	1.603.245.288.986,55
2018	30.508	3.397.077.145.179,96	24.049	78,8%	1.780.333.769.241,42	5.974	19,6%	1.344.443.827.484,10	412	1,4%	20.464.538.632,66	73	0,2%	251.835.009.821,78	1.810.056.614.560,67
2019	29.325	2.685.151.189.664,08	22.086	75,3%	1.343.776.112.974,38	6.654	22,7%	1.248.657.255.354,99	551	1,9%	90.119.654.637,18	34	0,1%	2.598.166.697,53	1.774.516.771.255,69
Total 2020-2023	120.096	12.155.241.207.024,70	64.511	53,7%	4.546.413.176.067,48	36.658	30,5%	5.662.618.746.217,89	18.902	15,7%	1.939.171.346.790,99	25	0,1%	7.037.937.948,37	6.620.980.675.124,68
2020	26.568	2.654.889.664.433,49	19.054	71,8%	1.286.986.277.090,14	6.991	26,3%	1.337.020.081.976,56	512	1,9%	27.730.322.941,42	11	0,0%	3.152.982.425,37	1.444.922.432.471,94
2021	29.057	2.438.458.456.200,89	19.037	65,5%	1.175.386.993.397,88	9.062	31,2%	1.069.484.708.576,45	946	3,3%	192.036.815.873,56	12	0,0%	1.549.938.353,00	1.467.567.219.181,17
2022	27.537	2.499.279.066.229,13	15.768	57,3%	902.131.969.857,90	10.491	38,1%	1.423.491.724.162,95	1.277	4,6%	173.655.372.208,28	1	0,0%	-	1.687.672.422.455,38
2023	36.934	4.562.614.020.161,22	10.652	28,8%	1.181.907.935.721,56	10.114	27,4%	1.832.622.231.501,93	16.167	43,8%	1.545.748.835.767,73	1	0,0%	2.335.017.170,00	2.020.818.601.016,19
Total 2005-2023	581.671	61.785.711.781.154,90	457.172	78,6%	29.838.748.655.908,90	95.022	16,3%	26.454.997.988.473,10	25.034	4,3%	3.189.180.507.387,78	4.443	0,8%	2.302.784.629.385,06	29.209.039.862.495,20

BUMN	Rekomendasi			Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Dihindarkan/ dengan Pemetaan/ Penyerahan Asst Negara/ Daerah atau Perusahaan Negara/ Daerah						
	Periode	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dengan Rekomendasi				Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
				Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai		Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai
Total 2005-2009	2.945	37.245.547.112.317,60	2.614	88,7%	33.969.031.356.116,70	70	2,4%	779.327.278.010,15	152	5,2%	-	109	3,7%	2.497.188.478.190,80	26.365.981.577.209,80	
2005	413	1.473.883.829.912,83	398	96,3%	1.387.962.020.014,14	6	1,5%	28.961.209.278,69	-	-	-	9	2,2%	56.960.600.620,00	742.193.885.373,14	
2006	905	3.430.182.921.746,13	786	86,9%	1.117.119.983.248,32	13	1,4%	271.566.050.559,96	55	6,1%	-	51	5,6%	2.041.496.887.937,85	429.102.877.186,54	
2007	587	1.045.939.508.539,07	538	91,7%	1.028.115.523.200,12	33	5,6%	4.492.995.706,00	2	0,3%	-	14	2,4%	13.330.989.632,95	618.215.292.201,37	
2008	463	21.703.529.437.510,20	352	76,1%	20.878.655.254.652,10	7	1,5%	439.474.182.858,13	95	20,5%	-	9	1,9%	385.400.000.000,00	21.660.007.887.628,40	
2009	577	9.592.011.414.609,42	540	93,6%	9.557.178.575.002,05	11	1,9%	34.832.839.607,37	-	-	-	26	4,5%	-	2.916.461.634.820,29	
Total 2010-2014	7.083	9.174.462.810.045,13	6.444	90,9%	5.847.095.224.385,71	247	3,5%	2.913.794.050.613,25	154	2,2%	24.206.508.349,40	238	3,4%	389.367.026.696,77	3.118.257.839.950,41	
2010	819	634.566.909.337,61	726	88,6%	200.840.518.787,61	17	2,1%	412.365.179.033,68	27	3,3%	-	49	6,0%	21.361.211.516,32	290.702.413.162,23	
2011	1.478	1.198.356.871.704,51	1.377	93,1%	1.000.342.837.719,76	17	1,2%	159.923.772.872,75	35	2,4%	-	49	3,3%	38.090.261.112,00	264.051.184.214,91	
2012	1.297	1.261.833.813.948,27	1.186	91,5%	983.392.972.605,73	38	2,9%	176.407.103.895,26	16	1,2%	-	57	4,4%	102.033.737.447,28	571.977.013.620,06	
2013	1.869	2.988.363.239.373,02	1.690	90,4%	1.898.435.636.698,71	84	4,5%	1.007.170.881.855,24	49	2,6%	19.372.156.349,00	46	2,5%	63.384.564.470,07	596.568.836.431,05	
2014	1.620	3.091.341.975.681,73	1.465	90,4%	1.764.083.258.573,91	91	5,6%	1.157.927.112.956,32	27	1,7%	4.834.352.000,40	37	2,3%	164.497.252.151,10	1.394.958.392.522,16	
Total 2015-2019	8.809	28.314.639.387.424,40	7.553	85,6%	5.196.284.161.758,15	1.044	11,9%	13.545.943.311.777,00	31	0,4%	62.675.600,00	181	2,1%	9.571.785.157.089,26	10.458.929.473.279,00	
2015	1.837	2.949.463.921.662,80	1.655	90,1%	1.941.415.441.584,34	121	6,6%	975.567.413.347,57	5	0,3%	-	56	3,0%	32.481.066.730,89	2.153.970.115.663,31	
2016	1.625	10.457.165.864.261,10	1.481	91,1%	1.389.617.931.065,29	87	5,4%	2.414.688.596.987,64	1	0,1%	-	56	3,4%	6.652.859.336.208,13	729.683.107.367,61	
2017	1.816	8.772.084.581.016,32	1.604	88,3%	409.559.450.450,67	183	10,1%	5.622.484.743.162,65	3	0,2%	-	26	1,4%	2.740.240.331.403,00	5.961.674.881.782,07	
2018	2.315	2.533.526.621.462,35	1.882	81,3%	770.317.519.054,22	382	16,5%	1.647.238.081.018,53	19	0,8%	-	32	1,4%	115.971.021.389,60	564.340.007.057,06	
2019	1.216	3.602.398.399.021,91	931	76,6%	685.573.763.603,63	271	22,3%	2.885.964.477.260,64	3	0,2%	62.675.600,00	11	0,9%	30.233.401.357,64	1.049.261.361.408,94	
Total 2020-2023	5.472	5.760.801.426.692,08	2.512	46,0%	263.974.123.923,22	1.128	20,6%	2.482.849.763.409,30	1.824	33,3%	3.013.977.539.359,56	8	0,1%	-	385.382.810.161,93	
2020	1.667	1.589.908.340.556,38	1.170	70,1%	88.287.041.935,77	403	24,2%	1.350.790.270.333,03	88	5,3%	150.831.028.287,58	6	0,4%	-	136.927.065.524,51	
2021	1.356	1.095.378.419.509,52	762	56,2%	112.020.371.812,81	255	18,8%	590.896.800.374,73	337	24,9%	392.461.247.321,98	2	0,1%	-	167.354.485.116,26	
2022	1.755	1.504.580.389.701,46	579	33,0%	63.666.710.174,64	442	25,2%	541.162.692.701,54	734	41,8%	899.750.986.825,28	-	-	-	70.379.231.090,69	
2023	694	1.570.934.276.924,73	1	0,2%	-	28	4,0%	-	665	95,8%	1.570.934.276.924,73	-	-	-	10.722.028.430,47	
Total 2005-2023	24.309	80.495.450.736.479,30	19.123	78,7%	45.276.384.866.183,80	2.489	10,2%	19.721.914.403.809,70	2.161	8,9%	3.038.810.804.508,96	536	2,2%	12.458.340.661.976,80	40.328.551.700.601,10	

Badan Lainnya	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyelesaian Ases/ Negara/ Daerah atau Perusahaan Negara/ Daerah						
	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
			Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	Jml	% Jml	Nilai	
Total 2005-2009	612	5.686.086.582.317,38	593	96,9%	5.663.167.335.727,21	1	0,2%	-	-	-	18	2,9%	22.910.246.590,17	35.227.060.824,58	
2005	22	-	22	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2006	188	539.358.501.778,45	181	96,3%	539.249.669.778,45	-	-	-	-	-	7	3,7%	108.832.000,00	24.139.564.788,13	
2007	211	4.893.549.702.321,88	211	100,0%	4.893.549.702.321,88	-	-	-	-	-	-	-	-	307.149.098,00	
2008	64	138.877.926.419,20	61	95,3%	117.377.926.419,20	-	-	-	-	-	3	4,7%	21.500.000.000,00	919.710.000,00	
2009	127	114.300.451.797,85	118	92,9%	112.990.037.207,68	1	0,8%	-	-	-	8	6,3%	1.310.414.590,17	9.860.636.938,45	
Total 2010-2014	1.552	16.090.773.327.505,90	1.350	87,0%	8.080.238.125.525,06	47	3,0%	3.023.872.102.358,58	6	0,4%	-	149	9,6%	4.986.663.099.622,25	910.135.008.625,84
2010	77	2.300.053.986.764,08	72	93,5%	2.296.853.986.764,08	2	2,6%	-	-	-	3	3,9%	3.200.000.000,00	365.396.616.847,16	
2011	428	660.436.950.631,09	385	89,9%	644.960.832.580,31	2	0,5%	-	6	1,4%	-	35	8,2%	15.476.118.050,78	19.497.724.444,87
2012	300	1.722.807.762.580,54	236	78,7%	1.231.335.327.804,12	15	5,0%	450.065.099.924,93	-	-	-	49	16,3%	41.407.334.851,49	114.108.189.198,84
2013	261	3.543.645.888.239,42	242	92,7%	1.070.030.051.947,03	17	6,5%	2.473.615.836.292,39	-	-	-	2	0,8%	-	3.407.469.935,59
2014	486	7.863.828.739.290,76	415	85,4%	2.837.057.926.429,52	11	2,3%	100.191.166.141,26	-	-	-	60	12,3%	4.926.579.646.719,98	407.725.008.199,38
Total 2015-2019	2.512	31.096.759.010.500,60	1.988	79,2%	17.130.146.103.332,50	397	15,8%	13.228.109.057.224,60	109	4,3%	206.216.723.164,61	18	0,7%	532.287.126.778,92	801.804.790.970,74
2015	418	4.512.050.073.401,69	392	93,8%	3.049.194.457.869,97	23	5,5%	964.096.865.896,80	-	-	-	3	0,7%	498.758.749.634,92	5.905.362.937,73
2016	603	4.509.804.930.562,25	535	88,7%	1.285.423.423.064,43	57	9,5%	3.193.028.752.951,82	-	-	-	11	1,8%	31.352.754.546,00	245.231.186.230,80
2017	449	18.764.157.754.745,60	356	79,3%	12.264.005.691.461,40	91	20,3%	6.500.152.063.284,20	-	-	-	2	0,4%	-	20.664.872.174,03
2018	599	3.142.834.843.347,18	395	66,0%	497.700.410.046,23	147	24,5%	2.565.111.741.317,22	56	9,3%	77.847.069.385,73	1	0,2%	2.175.622.598,00	494.046.158.439,03
2019	443	167.911.408.443,84	310	70,0%	33.822.120.890,42	79	17,8%	5.719.633.774,54	53	12,0%	128.369.653.778,88	1	0,2%	-	35.957.211.189,15
Total 2020-2023	1.588	12.877.688.927.1662,80	412	25,9%	248.694.627.969,58	252	15,9%	252.639.320.682,50	924	58,2%	12.376.354.979.010,70	-	-	-	253.928.460.519,08
2020	387	4.933.392.019.380,26	241	62,3%	4.752.072.205,00	33	8,5%	1.816.009.620,00	113	29,2%	4.926.823.937.555,26	-	-	-	8.009.789.490,44
2021	307	1.458.256.979.735,99	76	24,8%	17.744.270.764,05	59	19,2%	11.157.194.427,34	172	56,0%	1.429.355.514.544,61	-	-	-	18.236.302.206,35
2022	390	2.740.124.191.631,75	78	20,0%	4.077.210.679,74	155	39,7%	238.925.901.369,55	157	40,3%	2.497.121.079.582,46	-	-	-	4.282.422.322,75
2023	504	3.745.915.736.914,81	17	3,4%	222.121.074.320,79	5	1,0%	740.215.265,61	482	95,6%	3.523.054.447.328,41	-	-	-	223.399.946.499,54
Total 2005-2023	6.264	65.751.307.847.986,70	4.343	69,3%	31.122.246.192.554,30	697	11,1%	16.504.620.480.265,70	1.039	16,6%	12.582.571.702.175,40	185	3,0%	5.541.869.472.991,34	2.001.095.320.940,24

Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2005–2023 dengan Status Telah Ditetapkan
(Nilai dalam Rupiah dan Valas)

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Angsuran		Pembayaran Lunas		Penghapusan		Sisa	
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
Data Keseluruhan											
BENDAHARA	NAD	1	100.000,00	0	-	0	-	0	-	1	100.000,00
	HKD	1	311,75	0	-	1	311,75	0	-	0	-
	USD	28	593.617,08	5	115.344,01	18	113.334,27	2	146.374,07	3	218.564,73
	EUR	3	27.162,36	2	27.025,36	1	137,00	0	-	0	-
	FID	1	47,54	0	-	1	47,54	0	-	0	-
	IDR	1.832	503.360.475.199,91	470	58.054.940.709,67	1.032	36.813.187.002,93	31	3.715.176.718,87	299	404.777.170.768,44
	SEK	1	45,00	0	-	1	45,00	0	-	0	-
	KES	1	2.000.000,00	0	-	0	-	1	2.000.000,00	0	-
	PGK	1	5.362,86	0	-	1	5.362,86	0	-	0	-
	PKR	1	308.749,16	1	308.749,16	0	-	0	-	0	-
	AUD	1	4.459,76	0	-	1	4.459,76	0	-	0	-
	NZD	1	1.336,37	0	-	1	1.336,37	0	-	0	-
	NOK	1	1.027,72	0	-	1	1.027,72	0	-	0	-
BUKAN BENDAHARA/ PEJABAT LAIN											
	USD	618	2.748.599,29	53	194.716,93	545	1.249.759,48	3	100.251,14	17	1.203.871,74
	GBP	11	253.510,04	0	-	5	718,68	1	2.759,36	5	250.032,00
	AUD	33	1.433.830,44	0	-	21	192.384,69	0	-	12	1.241.445,75
	MYR	18	122.669,81	1	1.094,00	17	121.575,81	0	-	0	-
	ARS	3	922,55	0	-	3	922,55	0	-	0	-
	SEK	1	2.599,00	0	-	1	2.599,00	0	-	0	-
	EUR	71	249.050,74	1	75.175,58	67	144.360,26	0	-	3	29.514,90
	PGK	4	35.107,03	0	-	4	35.107,03	0	-	0	-

Subjek	Mata Uang	Kerugian						Pembayaran						Sisa				
		Jml Kasus			Nilai			Angsuran			Lunas			Penghapusan			Jml Kasus **)	Nilai
		Jml Kasus	Nilai	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Nilai	Jml Kasus	Nilai			
	IDR	92.519	2.106.775.931.048,80	14.613	625.856.613.318,26	68.613	622.518.827.297,81	323	35.458.511.227,45	8.970	822.941.979.205,28							
	QAR	1	18.267,75	0	-	0	-	0	-	1	18.267,75							
	CHF	1	99,20	0	-	1	99,20	0	-	0	-							
	SGD	13	71.125,89	0	-	5	5.960,00	8	65.165,89	0	-							
	CAD	17	69.310,25	1	91,05	16	29.710,25	0	-	0	-						39.508,95	
	JPY	2	33.657.200,34	0	-	0	-	0	-	2	33.657.200,34							
	ZAR	2	48.235,00	0	-	2	48.235,00	0	-	0	-							
	HKD	16	99.647,90	2	47.000,00	14	52.647,90	0	-	0	-							
	BND	1	1.110,00	0	-	1	1.110,00	0	-	0	-							
	NZD	6	2.531,34	0	-	6	2.531,34	0	-	0	-							
PIHAK KETIGA	IDR	29.429	2.305.754.524.743,45	4.693	699.330.096.360,17	22.602	1.113.660.007.747,90	133	53.687.186.529,67	2.001	439.077.234.105,71							
PENGLOLA KEUANGAN	IDR	109	23.258.395.869,34	33	5.385.329.898,29	54	1.427.151.284,08	3	164.244.743,00	19	16.581.669.943,97							
	JPY	2	833.775,00	0	-	2	833.775,00	0	-	0	-							
TOTAL	NAD	1	100.000,00	0	-	0	-	0	-	1	100.000,00							
	NOK	1	1.027,72	0	-	1	1.027,72	0	-	0	-							
	HKD	17	99.959,65	2	47.000,00	15	52.959,65	0	-	0	-							
	USD	646	3.342.216,37	58	310.060,94	563	1.363.093,75	5	246.625,21	20	1.422.436,47							
	GBP	11	253.510,04	0	-	5	718,68	1	2.759,36	5	250.032,00							
	EUR	74	276.213,10	3	102.200,94	68	144.497,26	0	-	3	29.514,90							
	AUD	34	1.438.290,20	0	-	22	196.844,45	0	-	12	1.241.445,75							
	MYR	18	122.669,81	1	1.094,00	17	121.575,81	0	-	0	-							
	ARS	3	922,55	0	-	3	922,55	0	-	0	-							
	FID	1	47,54	0	-	1	47,54	0	-	0	-							
	SEK	2	2.644,00	0	-	2	2.644,00	0	-	0	-							
	IDR	123.889	4.939.149.326.861,50	19.809	1.388.626.980.286,39	92.301	1.774.119.173.332,72	490	93.025.119.218,99	11.289	1.683.378.054.023,40							
	PGK	5	40.469,89	0	-	5	40.469,89	0	-	0	-							

Subjek	Mata Uang	Kerugian				Pembayaran				Sisa	
		Angsuran		Lunas		Penghapusan		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai				
	KES	1	2.000.000,00	0	-	0	-	1	2.000.000,00	0	-
	QAR	1	18.267,75	0	-	0	-	0	-	1	18.267,75
	PKR	1	308.749,16	1	308.749,16	0	-	0	-	0	-
	CHF	1	99,20	0	-	1	99,20	0	-	0	-
	SGD	13	71.125,89	0	-	5	5.960,00	8	65.165,89	0	-
	CAD	17	69.310,25	1	91,05	16	29.710,25	0	-	0	-
	JPY	4	34.490.975,34	0	-	2	833.775,00	0	-	2	33.657.200,34
	ZAR	2	48.235,00	0	-	2	48.235,00	0	-	0	-
	NZD	7	3.867,71	0	-	7	3.867,71	0	-	0	-
	BND	1	1.110,00	0	-	1	1.110,00	0	-	0	-
TOTAL VALAS EKUIVALEN *)	IDR	861	83.132.469.533,23	66	6.646.080.170,94	736	26.869.758.614,40	15	4.816.219.324,76	44	44.800.411.423,14
TOTAL KERUGIAN	IDR		5.022.281.796.394,73		1.395.273.060.457,33		1.800.988.931.947,12		97.841.338.543,75		1.728.178.465.446,54

Keterangan:

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 29 Desember 2023, beberapa mata uang disajikan berdasarkan nilai kurs tengah menurut <https://cuex.com/en> per 29 Desember 2023

**) Jumlah sisa kasus kerugian tidak dapat dijumlahkan secara matematis

Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2005–2023 dengan Status Telah Ditetapkan pada Pemerintah Pusat, BUMN, Lembaga/Badan Lainnya, Pemerintah Daerah dan BUMD (Nilai dalam Rupiah dan Valas)

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Penggantian				Penghapusan Mutlak		Sisa			
		Jml Kasus	Nilai	Angsuran	Pelunasan		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus (**)	Nilai	
Pemerintah Pusat													
BENDAHARA	NAD	1	100.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	1	100.000,00
	HKD	1	311,75	0	-	0	311,75	0	-	0	-	0	-
	USD	28	593.617,08	5	115.344,01	18	113.334,27	2	146.374,07	3	218.564,73		
	PKR	1	308.749,16	1	308.749,16	0	-	0	-	0	-	0	-
	EUR	3	27.162,36	2	27.025,36	1	137,00	0	-	0	-	0	-
	AUD	1	4.459,76	0	-	1	4.459,76	0	-	0	-	0	-
	IDR	143	55.141.661.101,30	75	14.347.681.896,48	44	2.391.854.499,48	21	2.263.483.840,87	3	36.138.640.864,47		
	NZD	1	1.336,37	0	-	1	1.336,37	0	-	0	-	0	-
	FJD	1	47,54	0	-	1	47,54	0	-	0	-	0	-
	KES	1	2.000.000,00	0	-	0	-	1	2.000.000,00	0	-	0	-
	SEK	1	45,00	0	-	1	45,00	0	-	0	-	0	-
	PGK	1	5.362,86	0	-	1	5.362,86	0	-	0	-	0	-
	NOK	1	1.027,72	0	-	1	1.027,72	0	-	0	-	0	-
BUKAN BENDAHARA/PEJABAT LAIN													
	CHF	1	99,20	0	-	1	99,20	0	-	0	-	0	-
	USD	618	2.748.599,29	53	194.716,93	545	1.249.759,48	3	100.251,14	17	1.203.871,74		
	GBP	11	253.510,04	0	-	5	718,68	1	2.759,36	5	250.032,00		
	CAD	17	69.310,25	1	91,05	16	29.710,25	0	-	0	-	0	-
	ZAR	2	48.235,00	0	-	2	48.235,00	0	-	0	-	0	-
	SGD	13	71.125,89	0	-	5	5.960,00	8	65.165,89	0	-	0	-
	JPY	2	33.657.200,34	0	-	0	-	0	-	2	33.657.200,34		
	MVR	18	122.669,81	1	1.094,00	17	121.575,81	0	-	0	-	0	-
	AUD	33	1.433.830,44	0	-	21	192.384,69	0	-	12	1.241.445,75		

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Penggantian				Sisa	
		Jml Kasus	Nilai	Angsuran		Pelunasan		Penghapusan Mutlak	
Penganggung Jawab				Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
	ARS	3	922,55	0	-	3	922,55	0	-
	FJD	1	47,54	0	-	1	47,54	0	-
	SEK	2	2.644,00	0	-	2	2.644,00	0	-
	PGK	5	40.469,89	0	-	5	40.469,89	0	-
	BND	1	1.110,00	0	-	1	1.110,00	0	-
	KES	1	2.000.000,00	0	-	0	-	1	2.000.000,00
	QAR	1	18.267,75	0	-	0	-	0	-
TOTAL VALAS EKUIVALEN*)	IDR	859	83.041.137.819,73	66	6.646.080.170,94	734	26.778.426.900,90	15	4.816.219.324,76
TOTAL KERUGIAN	IDR		1.118.427.040.771,88		461.377.471.681,09		338.021.814.946,98		32.019.260.574,31
BUMN									
BENDAHARA		0	-	0	-	0	-	0	-
BUKAN BENDAHARA/ PEJABAT LAIN		0	-	0	-	0	-	0	-
PIHAK KETIGA	IDR	5	5.300.523.220,00	2	744.835.528,00	0	-	2	8.819.000,00
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	11	11.130.879.678,00	7	2.371.974.072,00	1	1.430.000,00	2	14.244.743,00
TOTAL KERUGIAN	IDR		16.431.402.898,00		3.116.809.600,00		1.430.000,00		23.063.743,00
LEMBAGA/BADAN LAINNYA									
BENDAHARA		0	-	0	-	0	-	0	-
BUKAN BENDAHARA/ PEJABAT LAIN	IDR	2	212.400.000,00	0	-	2	212.400.000,00	0	-
PIHAK KETIGA	IDR	4	6.169.123.545,39	1	232.398.946,39	2	5.294.043,00	0	-
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	37	2.371.166.905,29	7	1.144.904.883,29	29	288.771.651,00	0	-
	JPY	2	833.775,00	0	-	2	833.775,00	0	-
									13.290.099.555,00
									287.008.493.569,51
									44.800.411.423,14
									4.546.868.692,00
									8.743.230.863,00
									5.931.430.556,00
									937.490.371,00

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Penggantian				Sisa			
		Jml Kasus	Nilai	Angsuran		Pelunasan		Penghapusan Mutlak			
Penganggung Jawab				Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai		
TOTAL	IDR	43	8.752.690.450,68	8	1.377.303.829,68	33	506.465.694,00	0	-	2	6.868.920.927,00
	JPY	2	833.775,00	0	-	2	833.775,00	0	-	0	-
TOTAL VALAS EKUIVALEN*)	IDR	2	91.331.713,50	0	-	2	91.331.713,50	0	-	0	-
TOTAL KERUGIAN	IDR		8.844.022.164,18		1.377.303.829,68		597.797.407,50		0,00		6.868.920.927,00

PEMERINTAH DAERAH

BENDAHARA	IDR	1.689	448.218.814.098,61	395	43.707.258.813,19	988	34.421.332.503,45	10	1.451.692.878,00	296	368.638.529.903,97
BUKAN BENDAHARA/ PEJABAT LAIN	IDR	85.830	1.673.859.047.659,96	12.800	434.473.839.767,23	64.397	543.639.116.614,11	279	25.328.730.609,96	8.354	670.417.360.668,66
PIHAK KETIGA	IDR	26.211	1.746.745.119.516,05	4.136	449.351.925.823,14	20.083	883.470.490.842,00	125	38.868.590.738,48	1.867	375.054.112.112,43
PENGELOLA KEUANGAN		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
TOTAL KERUGIAN	IDR		3.868.822.981.274,62		927.533.024.403,56		1.461.530.939.959,56		65.649.014.226,44		1.414.110.002.685,06

BUMD

BENDAHARA		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
BUKAN BENDAHARA/ PEJABAT LAIN		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
PIHAK KETIGA		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
PENGELOLA KEUANGAN		61	9.756.349.286,05	19	1.868.450.943,00	24	836.949.633,08	1	150.000.000,00	17	6.900.948.709,97
TOTAL KERUGIAN	IDR		9.756.349.286,05		1.868.450.943,00		836.949.633,08		150.000.000,00		6.900.948.709,97

Keterangan:

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 29 Desember 2023, beberapa mata uang disajikan berdasarkan nilai kurs tengah menurut <https://cux.com/en> per 29 Desember 2023

**) Jumlah sisa kasus kerugian tidak dapat dijumlahkan secara matematis

Daftar Singkatan & Akronim

A

ABK	:	Analisis Beban Kerja
ADD	:	Alokasi Dana Desa
Adpin	:	Advokasi, Penggerakan dan Informasi
AHS	:	Analisa Harga Satuan
AiIB	:	<i>Asian Infrastructure Investment Bank</i>
Aloptama	:	Alat Operasional Utama
Amdal	:	Analisis mengenai dampak lingkungan
APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APH	:	Aparat Penegak Hukum
ASIK	:	Aplikasi Sehat Indonesiaku
ASN	:	Aparatur Sipil Negara

B

Balai Hatpen	:	Balai Kesehatan Penerbangan
Banparpol	:	Bantuan Partai Politik
Bapas	:	Balai Pemasarakatan
BAPP	:	Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu
Bappenas	:	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Baran	:	Barang Rampasan Negara
Basarnas	:	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
BAST	:	Berita Acara Serah Terima
BBNKB	:	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

BBL	:	Bayi Baru Lahir
BDPK	:	Bank Dengan Pengawasan Khusus
Bhabinkamtibmas	:	Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
BGS	:	Bangun Guna Serah
BI	:	Bank Indonesia
BIG	:	Badan Informasi Geospasial
Bimtek	:	Bimbingan Teknis
Binmas	:	Pembinaan Masyarakat
Bipih	:	Biaya Perjalanan Ibadah Haji
BKAD	:	Badan Keuangan dan Aset Daerah
BKKBN	:	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
BKN	:	Badan Kepegawaian Negara
BKT	:	Biaya Kuliah Tunggal
BLU	:	Badan Layanan Umum
BLUD	:	Badan Layanan Umum Daerah
BMD	:	Barang Milik Daerah
BMHP	:	Bahan Medis Habis Pakai
BMKG	:	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
BMN	:	Barang Milik Negara
BNPB	:	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BNPP	:	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
BNPT	:	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
BOS	:	Bantuan Operasional Sekolah
BP	:	Bukan Pekerja
BPBD	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPD	:	Bank Pembangunan Daerah

BPD	:	Bank Permusyawaratan Desa
BPHTB	:	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPIP	:	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
BPJS	:	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKB	:	Buku Pemilik Kendaraan Bermotor
BPKS	:	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
B POM	:	Badan Pengawas Obat dan Makanan
BPPD	:	Badan Pelayanan Pajak Daerah
BPPD	:	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
BP2MI	:	Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
BPR	:	Bank Perkreditan Rakyat
BPRS	:	Bank Perkreditan Rakyat Syariah
BPSDMI	:	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri
BTS	:	<i>Buy The Service</i>
BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah
BUM Desa	:	Badan Usaha Milik Desa
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
BUN	:	Bendahara Umum Negara
BUPP	:	Badan Usaha Pembangun dan Pengelola
BUS	:	Badan Usaha Syariah
BWN-KP	:	Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan
B3	:	Bahan Berbahaya Beracun

C

CB	:	Cagar Budaya
CBN	:	Cagar Budaya Nasional
CCIT	:	<i>Center for Computing and Information Technology</i>
COVID-19	:	<i>Corona Virus Disease</i>

D

DAK	:	Dana Alokasi Khusus
Dapobud	:	Data Pokok Kebudayaan
DBON	:	Desain Besar Olahraga Nasional
Dikbangspes	:	Pendidikan Pengembangan Spesialisasi
Dinkes	:	Dinas Kesehatan
Direktorat PP ASAF	:	Direktorat Penempatan Pemerintah Kawasan Asia dan Afrika
Dirjen	:	Direktur Jenderal
Dirjen Hubla	:	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Disperkim	:	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Ditjen Dukcapil	:	Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Ditjen PDASRH	:	Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan
Ditjen PSKP	:	Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan
Dit. Belmawa	:	Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
DIY	:	Daerah Istimewa Yogyakarta
DJS	:	Dana Jaminan Sosial
DLI	:	<i>Disbursement Linked Indicator</i>
DLR	:	<i>Disbursement Linked Results</i>
DPA	:	Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DPK	:	Dana Pihak Ketiga
DPMPSTP	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
DPP	:	Destinasi Pariwisata Prioritas
DPPT	:	Departemen Jasa Perbankan, Perizinan dan Operasional Tresuri
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPS	:	Departemen Pengadaan Strategis
DPT	:	Daerah Pesisir Teluk
DPU	:	Departemen Pengelolaan Uang
DPW/D/C	:	Dewan Pimpinan Wilayah/Daerah/Cabang
DTKS	:	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
DTT	:	Dengan Tujuan Tertentu
DTU	:	Dana Transfer Umum

E

Elsimil	:	<i>Elektronik Siap Nikah Siap Hamil</i>
EMIS	:	<i>Education Management Information System</i>
ESDM	:	Energi dan Sumber Daya Mineral
e-PPGBM	:	<i>Electronic</i> (aplikasi) Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat
3E	:	Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan

F

FMCG	:	<i>Fast Moving Consumer Goods</i>
FOLU	:	<i>Forestry and Other Land Uses</i>
FTA	:	<i>Free Trade Agreement</i>

G

GIM	:	Gerakan Indonesia Melayani
GIS	:	<i>Geographic Information System</i>
GNRM	:	Gerakan Nasional Revolusi Mental
GRK	:	Gas Rumah Kaca
GRM	:	Gerakan Revolusi Mental
<i>G to G</i>	:	<i>Government to Government</i>

H

HAM	:	Hak Asasi Manusia
HCTS	:	Hasil Cetak Tidak Sempurna
HPL	:	Hak Pengelolaan
Hudev	:	<i>Human Development</i>

I

IBK	:	Insentif Berbasis Kinerja
ICH	:	<i>Intangible Cultural Heritage</i>

ICRM	:	Indeks Capaian Revolusi Mental
ICS	:	<i>Interoperability Communication System</i>
IHPS	:	Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
IJP	:	Imbal Jasa Penjaminan
IKM	:	Industri Kecil Menengah
IKN	:	Ibu Kota Nusantara
IKNB	:	Industri Keuangan Non Bank
IPAL	:	Instalasi Pengolahan Air Limbah
IPI	:	Iuran Pengembangan Institusi
IPKP	:	Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan
IPKTrans	:	Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi
IPM	:	Indeks Pembangunan Manusia
IPO	:	<i>Initial Public Offering</i>
IPPR	:	Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang
ITPC	:	<i>Indonesian Trade Promotion Center</i>
IUP	:	Izin Usaha Pertambangan
IUPK	:	Izin Usaha Pertambangan Khusus
I-SPHERE	:	<i>Indonesia-Supporting Primary Health Care Reform/Indonesia Supporting Primary and Referral Health Care Reform</i>
I'DIS	:	<i>Integrated</i> Disiplin

J

JIS	:	<i>Jakarta International Stadium</i>
JKN	:	Jaminan Kesehatan Nasional
JPU	:	Jaksa Penuntut Umum

K

KAK	:	Kerangka Acuan Kerja
Kakorbinmas	:	Kepala Korps Pembinaan Masyarakat
KBI	:	Kawasan Barat Indonesia
KCKR	:	Karya Cetak dan Karya Rekam

KEK	:	Kawasan Ekonomi Khusus
Kemendagri	:	Kementerian Dalam Negeri
Kemendesa PDTT	:	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kemendikbudristek	:	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi
Kemenhub	:	Kementerian Perhubungan
Kemenkes	:	Kementerian Kesehatan
Kemenko PMK	:	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Kemenkumham	:	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kemempora	:	Kementerian Pemuda dan Olahraga
Kementerian ATR/BPN	:	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Kementerian LHK	:	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kementerian PANRB	:	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
KI	:	Kawasan Industri
KIB	:	Kartu Inventaris Barang
KIE	:	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
KIPT	:	Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi
KIR	:	Kartu Inventaris Ruangan
KKPR	:	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
KMKB	:	Kendali Mutu dan Kendali Biaya
KMK-TR	:	Kredit Modal Kerja Transaksional Rekanan
KP	:	Kegiatan Prioritas
KPB	:	Kuasa Pengguna Barang
KPBU	:	Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
KPM	:	Keluarga Penerima Manfaat
KTI	:	Kawasan Timur Indonesia
KTPN	:	Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional
KUR	:	Kredit Usaha Rakyat
K/L	:	Kementerian/Lembaga

L

Lapas	:	Lembaga Pemasyarakatan
LHP	:	Laporan Hasil Pemeriksaan
LKD	:	Lembaga Kemasyarakatan Desa
LM	:	Lembaga Manajemen
LPDP	:	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
LPJ	:	Laporan Pertanggungjawaban
LPP RRI	:	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
LPP TVRI	:	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
LPS	:	Lembaga Penjamin Simpanan
LPU	:	Layanan dan Pengembangan Usaha
LSP	:	Lembaga Sertifikasi Profesi
LVI	:	Lembaga Verifikasi Independen

M

MA	:	Mahkamah Agung
Mabes	:	Markas Besar
MBTK	:	Maloy Batuta Trans Kalimantan
Monev	:	Monitoring dan Evaluasi
MoU	:	<i>Memorandum of Understanding</i>
MPP	:	Mal Pelayanan Publik
MSIB	:	Magang dan Studi Independen Bersertifikat
3M1K	:	Mapadegat, Madobag, Muntei dan Katiet

N

NICU	:	<i>Neonatal Intensive Care Unit</i>
NIK	:	Nomor Induk Kependudukan
NJOP	:	Nilai Jual Objek Pajak
NJOPTKP	:	Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak

NKRI	:	Negara Kesatuan Republik Indonesia
NTN	:	Nilai Tukar Nelayan
NTP	:	Nilai Tukar Petani
NSPK	:	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria

O

Obrik	:	Objek Pemeriksaan
ODCB	:	Objek Diduga Cagar Budaya
ODGJ	:	Orang dengan Gangguan Jiwa
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan
OPD	:	Organisasi Perangkat Daerah
OPK	:	Obyek Pemajuan Kebudayaan
OSS	:	<i>Online Single Submission</i>
OSS	:	<i>Online Submission System</i>
OTK	:	Organisasi dan Tata Kerja
OTS	:	<i>On The Spot</i>

P

PAD	:	Pendapatan Asli Daerah
PBB-P2	:	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
PBG	:	Persetujuan Bangunan Gedung
PBI	:	Penerima Bantuan Iuran
PBI JK	:	Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
PBPH	:	Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
PBPU	:	Pekerja Bukan Penerima Upah
PDN	:	Produk Dalam Negeri
PDTT	:	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
PDRB	:	Produk Domestik Regional Bruto
Pemda	:	Pemerintah Daerah
Pemda DIY	:	Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Pemkab	:	Pemerintah Kabupaten
Pemkot	:	Pemerintah Kota
Pemprov	:	Pemerintah Provinsi
PEN	:	Pemulihan Ekonomi Nasional
Perbup	:	Peraturan Bupati
Pergub	:	Peraturan Gubernur
Perkada	:	Peraturan Kepala Daerah
Permendagri	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri
Perpres	:	Peraturan Presiden
Perum	:	Perusahaan Umum
Perumda	:	Perusahaan Umum Daerah
Perumdam	:	Perusahaan Umum Daerah Air Minum
Perum Peruri	:	Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia
PI	:	Pemeriksaan Investigatif
PICU	:	<i>Pediatric Intensive Care Unit</i>
PIP	:	Pembinaan Ideologi Pancasila
PJKK	:	Penanggung Jawab Proyek Kerjasama
PKA	:	Pemberian Keterangan Ahli
PKB	:	Pajak Kendaraan Bermotor
PKH	:	Program Keluarga Harapan
PKN	:	Penghitungan Kerugian Negara
PKPT	:	Program Kerja Pengawasan Tahunan
PKS	:	Perjanjian Kerja Sama
PKSN	:	Pusat Kegiatan Strategis Nasional
PMI	:	Pekerja Migran Indonesia
PN	:	Prioritas Nasional
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
Polda	:	Kepolisian Daerah
Polhukhankam	:	Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
Polri	:	Kepolisian Negara Republik Indonesia
PP	:	Peraturan Pemerintah
PP	:	Program Prioritas
PPB Des	:	Penetapan dan Penegasan Batas Desa

PPDT	:	Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
PPG	:	Pendidikan Profesi Guru
PPJB	:	Perjanjian Pengikatan Jual Beli
PPK	:	Pejabat Pembuat Komitmen
PPK	:	Perjanjian Pemenuhan Kewajiban
PPS	:	Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>
PPKD	:	Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah
PPSJ	:	Perumda Pembangunan Sarana Jaya
PPTK	:	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
PSDH DR	:	Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi
PSU	:	Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
PTKP	:	Penghasilan Tidak Kena Pajak
PTN BH	:	Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum
PUD	:	Produk Unggulan Daerah
PUPR	:	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PUPR	:	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Pusdik	:	Pusat Pendidikan
P3DN	:	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

R

RAD	:	Rencana Aksi Daerah
RAN PASTI	:	Rencana Aksi Nasional Penurunan Angka <i>Stunting</i> Indonesia
RBA	:	<i>Risk Based Approach</i>
RBS	:	<i>Risk Based Supervision</i>
RDTR	:	Rencana Detail Tata Ruang
Renja	:	Rencana Kerja
Renstra	:	Rencana Strategis
RIPPARKAB	:	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten
RI SPKAD	:	Rancangan Induk Strategi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa
RKA	:	Rencana Kerja dan Anggaran
RKP	:	Rencana Kerja Pemerintah
RKPD	:	Rencana Kerja Pemerintah Daerah

RKS	:	Rencana Kerja dan Syarat-Syarat
RKBMD	:	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
RPJMD	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPD	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPKP	:	Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan
RP2P	:	Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan
RSUD	:	Rumah Sakit Umum Daerah
RTH	:	Ruang Terbuka Hijau
RTRW	:	Rencana Tata Ruang Wilayah
Rupbasan	:	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara
RUPS	:	Rapat Umum Pemegang Saham

S

SDA	:	Sumber Daya Air
SDGs	:	<i>Sustainable Development Goals</i>
SDM	:	Sumber Daya Manusia
Sigizi	:	Sistem Informasi Gizi
SIMRS	:	Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
SINSW	:	Sistem Indonesia <i>National Single Window</i>
SJSN	:	Sistem Jaminan Sosial Nasional
SK	:	Surat Keputusan
SKKNI	:	Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
SKPD	:	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKPD	:	Surat Ketetapan Pajak Daerah
SKPDKB	:	Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
SNP	:	Standar Nasional Perpustakaan
SOP	:	Standar Operasional Prosedur
SOTK	:	Susunan Organisasi dan Tata Kerja
SPAM	:	Sistem Penyediaan Air Minum
SPI	:	Satuan Pengawas Internal
SPI	:	Sistem Pengendalian Intern/Sistem Pengendali Intern
SPK	:	Surat Perintah Kerja

SPKT	:	Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu
SPM	:	Standar Pelayanan Minimal
SPTPD	:	Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
Strada	:	Strategi Daerah
Stranas	:	Strategi Nasional

T

TA	:	Tahun Anggaran
TAPD	:	Tim Anggaran Pemerintah Daerah
TE	:	Tahun Emisi
TKDN	:	Tingkat Komponen Dalam Negeri
TKHI	:	Tenaga Kesehatan Haji Indonesia
TKMKB	:	Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya
TKPKP	:	Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
TLRHP	:	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
TPA	:	Tempat Pengolahan Akhir
TPB	:	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
TPPO	:	Tindak Pidana Perdagangan Orang
TPT	:	Tingkat Pengangguran Terbuka
TPPS	:	Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>
TTD	:	Tablet Tambah Darah

U

UKT	:	Uang Kuliah Tunggal
UMKM	:	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UP	:	Uang Persediaan
UPT	:	Unit Pelaksana Teknis
UU	:	Undang-Undang
UUD	:	Undang-Undang Dasar

W

WBP : Warga Binaan Pemasyarakatan

WBTb : Warisan Budaya Tak Benda

WNI : Warga Negara Indonesia

WP : Wajib Pajak

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian

A

<i>Account Representative</i>	:	<ul style="list-style-type: none"> • Jabatan pelaksana pada Kantor Pelayanan Pajak dengan beberapa tingkatan jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. • Seseorang yang ditunjuk dan ditetapkan untuk memberikan bimbingan, imbauan, konsultasi, analisis, dan pengawasan terhadap wajib pajak.
<i>Automatic Stabilizer</i>	:	Penguatan belanja dalam mengantisipasi ketidakpastian.
<i>Availability Payment</i>	:	Pembayaran Ketersediaan Layanan adalah pembayaran secara berkala oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan Infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.

B

Baku Mutu Emisi	:	Ukuran batas atau kadar maksimum dan/atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.
Bangun Guna Serah	:	Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
Bantuan Inkubasi Bisnis Pesantren	:	Bantuan pemerintah yang diberikan dalam bentuk uang untuk pengembangan kerja sama terkait penguatan unit bisnis pesantren dengan mengembangkan proyek-proyek inkubasi bisnis.
<i>Bezetting</i>	:	Jumlah pegawai yang dimiliki saat ini.
Biaya Kuliah Tunggal	:	Keseluruhan biaya operasional per tahun yang terkait langsung dengan proses pembelajaran mahasiswa pada program studi di perguruan tinggi negeri.
Bukan Pekerja	:	Setiap orang yang bukan termasuk kelompok Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima upah (PBPU), Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), dan penduduk yang didaftarkan daerah.
<i>Business Process Redesign</i>	:	Diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja yang berdaya guna dan berhasil guna.
<i>Buy The Service</i>	:	Skema pemberian subsidi berupa pembelian layanan dari perusahaan angkutan umum untuk penyelenggaraan angkutan penumpang umum di kawasan perkotaan kepada masyarakat.

C

<i>Clearance</i>	:	Pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam.
<i>Commitment Fee</i>	:	Biaya yang digunakan untuk tetap menyediakan saldo komitmen pinjaman yang belum ditarik.
<i>Corporate Social Responsibility</i>	:	Tanggung jawab sosial perusahaan.
<i>Corporate Plan</i>	:	Informasi mengenai gambaran perusahaan, analisis usaha, target pasar, operasional, rencana pemasaran, rencana pengembangan usaha, aspek finansial (modal, investasi, hutang, piutang, pembelian, penjualan dan laba rugi) maupun prospek usaha.
<i>Cost Recovery</i>	:	Penggantian biaya operasi oleh pemerintah kepada kontraktor sesuai perjanjian (kontrak kerja sama/ <i>production sharing contract</i>), biasanya dibayar dalam bentuk hasil produksi, di mana hasil produksi tersebut dinilai dengan <i>weighted average price</i> .
<i>Covenant</i>	:	Perjanjian.

D

Dana Pengembangan Institusi	:	Dana dari pelaksanaan kerja sama antara ITB dan mitra yang dialokasikan untuk pengembangan institusi ITB.
Dana Kapitasi	:	Besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	:	Data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
<i>Decent job</i>	:	Pekerjaan yang layak.
<i>Deforestation</i>	:	<ul style="list-style-type: none"> • Penggundulan hutan. • Kegiatan menebang hutan atau tegakan pohon sehingga lahannya dapat dialihgunakan untuk penggunaan nonhutan.
<i>Detail Engineering Design</i>	:	Dokumen desain teknis bangunan yang terdiri dari gambar teknis, spesifikasi teknis dan spesifikasi umum, volume serta biaya pekerjaan.
<i>Disaster Recovery Centre</i>	:	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Pemulihan Data. • Pusat data yang dirancang untuk mempersiapkan dalam menghadapi risiko dari bencana alam atau gangguan teknis.
<i>Disbursement Linked Indicator (DLI)</i>	:	Pemberian dana anggaran berdasarkan pencapaian indikator kinerja.

<i>District Meter Area</i>	: Suatu cara penurunan kehilangan air dengan cara membagi satu jaringan pasokan air menjadi zona-zona kawasan bermeter yang bertujuan untuk mendeteksi suatu kebocoran pada suatu bagian sistem jaringan distribusi yang difokuskan menjadi satu wilayah deteksi kebocoran.
DLI 1	: Kabupaten/Kota yang tercakup di <i>Dashboard</i> Data dan Informasi Kesehatan.
DLI 2	: Puskesmas yang menggunakan aplikasi mHealth yang menunjang pelaksanaan PIS-PK yang disempurnakan.
DLI 3	: Puskesmas mendapatkan akreditasi yang lebih tinggi di luar Kawasan Timur Indonesia.
DLI 5	: Komisi Akreditasi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (KAFKTP) berfungsi sebagai Komisi Independen.
DLI 6	: Kabupaten/Kota bermasalah yang menghasilkan rencana dan anggaran tahunan yang lebih baik.
DLI 7	: Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan.
DLI 8	: Fasilitas pelayanan primer dapat mengimplementasikan Kapasitas JKN berdasarkan indikator kinerja.
DLI 9	: Kabupaten/Kota yang menunjukkan peningkatan minimal setengah dari indikator kinerja dalam penetapan DAK non fisik.
DLI 10	: Jumlah provinsi yang menerapkan sistem rujukan terpadu dan terintegrasi.
<i>Drainase</i>	: Sebuah konstruksi yang menjadi media untuk mengalirkan air dari satu titik ke titik lain yang dinilai sangat penting untuk membantu proses pengaliran air seperti curah hujan, agar tidak terjadi genangan atau banjir.
<i>Dynamic Domain Name System</i>	: Metode untuk memperbarui IP pada <i>hostname</i> secara otomatis di DNS (<i>Domain Name System</i>), sehingga tidak perlu melakukan perubahan secara manual pada DNS ketika terjadi perubahan IP pada koneksi yang digunakan.

E

Eksplorasi	: Tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	: Lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu. Gas Rumah Kaca adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Jenis emisi GRK meliputi senyawa karbon dioksida (CO ₂), metana (CH ₄), dinitro oksida (N ₂ O), hidrofluorokarbon (HFCs), perfluorokarbon (PFCs), dan sulfur heksafluorida (SF ₆).
<i>Executing Agency</i>	: Kementerian negara/lembaga yang menjadi penanggung jawab secara keseluruhan atas pelaksanaan kegiatan.
<i>e-commerce</i>	: <ul style="list-style-type: none"> • Transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. • Suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik.

F

<i>Feasibility Study</i>	:	<ul style="list-style-type: none">• Studi kelayakan.• Analisis dan evaluasi dari proyek yang direncanakan untuk menentukan apakah proyek tersebut layak secara teknis, layak dari sisi perkiraan biaya dan menguntungkan, terutama dilakukan ketika terdapat jumlah besar modal dipertaruhkan.
<i>Fluorescent Under UV light</i>	:	Pemendaran yang hanya bisa dilihat di bawah sinar ultraviolet.
<i>Fraud</i>	:	Setiap tindakan ilegal yang ditandai dengan tipu daya, penyembunyian atau pelanggaran kepercayaan. Tindakan ini tidak tergantung pada penerapan ancaman kekerasan atau kekuatan fisik. Penipuan yang dilakukan oleh individu, dan organisasi untuk memperoleh uang, kekayaan atau jasa; untuk menghindari pembayaran atau kerugian jasa; atau untuk mengamankan keuntungan bisnis pribadi.
<i>Freeze</i>	:	Membekukan/pembekuan.
<i>Full Cost Recovery</i>	:	Pemulihan Biaya Penuh merupakan tarif air minum yang ditetapkan PDAM untuk mendukung biaya operasional.

G

Garis Kemiskinan Bukan Makanan	:	Nilai minimum pengeluaran untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok non-makanan lainnya.
Garis Kemiskinan Makanan (GKM)	:	Jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari.
<i>Geographic Information System (GIS)</i>	:	<ul style="list-style-type: none">• Suatu sistem yang terdiri komponen-komponen yang bekerja bersama secara efektif. Dari memasukan, menyimpan, memperbaiki, memperbaharui, mengelola, memanipulasi, mengintegrasikan, menganalisa dan menampilkan data dalam suatu informasi berbasis geografis.• GIS menggunakan data yang berbasis spasial yaitu sebuah data yang berorientasi geografi, memiliki sistem koordinat tertentu sebagai dasar referensinya.
Gerakan Indonesia Melayani (GIM)	:	Gerakan para penyelenggara negara dan masyarakat untuk meningkatkan perilaku pelayanan publik berintegritas agar negara hadir melindungi kepentingan warganya sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
<i>Good Corporate Governance</i>	:	Prinsip-prinsip yang diterapkan oleh perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan, serta menjaga keberlanjutan perusahaan secara jangka panjang.
<i>Government to Government (G to G)</i>	:	Kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah dari berbagai negara atau tingkat pemerintahan yang berbeda.
<i>Grand Design</i>	:	Rancangan besar yang berisi arah kebijakan pelaksanaan kegiatan atau tujuan tertentu pada kurun waktu tertentu, merupakan acuan bagi kementerian/lembaga/pemerintah dalam melaksanakan kegiatan atau tujuan yang ditetapkan.

<i>Gross Up Pajak</i>	: Metode pemotongan/pengenaan pajak dengan menggunakan penghasilan kotor karyawan. (memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan).
-----------------------	--

H

Harga Perkiraan Sendiri	: Perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
Hidrometeorologi	: Suatu fenomena bencana alam atau proses merusak yang terjadi atmosfer (meteorologi), air (hidrologi), atau lautan (oseanografi) yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa, cedera atau dampak kesehatan lainnya, kerusakan harta benda, hilangnya mata pencaharian dan layanan, gangguan sosial dan ekonomi, atau kerusakan lingkungan.

I

Imbal Jasa Penjaminan	: Sejumlah uang yang diterima oleh Perusahaan Penjaminan dari Terjamin dalam rangka kegiatan penjaminan.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	: Indeks untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup.
<i>Initial Public Offering</i>	: Suatu perusahaan atau emiten menawarkan dan menjual efek-efek yang diterbitkannya dalam bentuk saham kepada masyarakat secara luas.
<i>Institutional Fee</i>	: Kontribusi yang wajib diberikan dari setiap perjanjian/kontrak kerja sama Tridarma Perguruan Tinggi kepada Rektorat dan Fakultas/Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)/Badan Pengelola Usaha (BPU).
<i>Intangible Cultural Heritage</i>	: Praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, atau keterampilan, serta instrumen, objek, artefak, dan ruang budaya yang dianggap oleh UNESCO sebagai bagian dari warisan budaya suatu tempat.
<i>Isolation Transportation</i>	: Perangkat isolasi yang menyediakan ruang dengan sistem filtrasi bertekanan negatif untuk perlindungan dan keamanan operasional bagi pasien/benda yang terkontaminasi dan tenaga kesehatan.
<i>Istithaah</i>	: Kemampuan Jemaah Haji secara jasmaniah, ruhaniah, pembekalan dan keamanan untuk menunaikan ibadah haji tanpa menelantarkan kewajiban terhadap keluarga.
IUP Eksplorasi	: Izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
IUP Operasi Produksi	: Izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang	: Izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon yang akan memanfaatkan ruang, secara prinsip diperkenankan memanfaatkan ruang dalam batasan sub zona tertentu sesuai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi, serta memenuhi persyaratan administrasi dan teknis berdasarkan aspek teknis, politis, sosial, budaya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

J

Jaminan Pascatambang	:	Dana yang disediakan oleh pemegang IUP sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan pascatambang.
Jaminan Reklamasi	:	Dana yang disediakan oleh pemegang IUP sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan reklamasi.

K

Kegiatan Pascatambang (Pascatambang)	:	Kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
<i>Key Performance Indicator</i>	:	Alat penting dalam mengukur dan menilai kinerja suatu organisasi atau perusahaan.
Klaim	:	Tuntutan pembayaran kepada penjamin yang diakibatkan nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.
Kegiatan Prioritas	:	Kegiatan yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai Program Prioritas.
Kredit Usaha Rakyat	:	Kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada UMKMK di bidang usaha yang produktif dan layak namun belum <i>bankable</i> yang sebagian dijamin oleh Perusahaan Penjaminan.

L

<i>Lender</i>	:	Pemberi pinjaman.
<i>Letter of Credit</i>	:	Sebuah cara pembayaran internasional yang memungkinkan eksportir menerima pembayaran tanpa menunggu berita dari luar negeri setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan ke luar negeri (kepada pemesan/importir) dan akan memudahkan pihak-pihak yang berada di dalamnya.
<i>Link and Match</i>	:	Keterpautan dan kesepadanan.
<i>Linearitas Guru</i>	:	Kesesuaian antara sertifikat pendidik atau ijazah seorang guru dengan mata pelajaran yang diampu.
<i>Loan Agreement</i>	:	Kontrak/perjanjian antara BUMN di bidang pembiayaan dengan Pemerintah.
<i>Long Term Athletes Development (LTAD)</i>	:	<ul style="list-style-type: none">• Pembinaan atlet secara jangka panjang.• Program pelatihan, kompetisi dan pemulihan (<i>recovery</i>) berdasarkan pada usia biologis atlet (tingkat kematangan individu) dan bukan berdasarkan pada usia kronologis.
<i>Low Carbon Model Town</i>	:	Bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dengan bangunan, transportasi, dan sistem tenaga hemat energi dan rendah emisi.

M

<i>Mandatory Spending</i>	: Anggaran yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan yang meliputi pemenuhan anggaran: a. belanja pendidikan; b. belanja kesehatan; c. Alokasi Dana Desa; dan d. belanja infrastruktur, dalam APBD sesuai persentase yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.
<i>Masterplan</i>	: Rencana Induk.
<i>Memorandum of Understanding (MoU)</i>	: Sebuah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara dua atau lebih belah pihak.
Mitigasi	: Tindakan mengurangi dampak bencana.

N

<i>Neonatal Intensive Care Unit (NICU) Pediatric Intensive Care Unit (PICU)</i>	: NICU adalah unit perawatan intensif untuk disediakan khusus bayi baru lahir (sampai usia 28 hari) dengan kondisi kritis atau memiliki gangguan kesehatan berat yang memerlukan pengobatan dan perawatan khusus, guna mencegah dan mengobati terjadinya kegagalan organ-organ vital. Sedangkan PICU dikhususkan untuk bayi di atas usia 1 bulan dan anak-anak berusia 1–18 tahun dengan kondisi kritis.
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	: Rasio antara indeks harga yang diterima nelayan (I_n) dengan indeks harga yang dibayar nelayan (I_b) dinyatakan dalam persentase. NTN mengukur kemampuan tukar produk perikanan tangkap yang dihasilkan nelayan dengan barang atau jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga nelayan dan keperluan mereka dalam menghasilkan produk perikanan tangkap.
Nilai Tukar Petani (NTP)	: Indikator yang mengukur perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (I_n) dengan indeks harga yang dibayar petani (I_b). NTP memberikan gambaran tentang daya beli petani terhadap barang dan jasa yang diperlukan untuk produksi maupun konsumsi rumah tangga.

O

<i>Online Scam</i>	: Kasus penipuan ketenagakerjaan dan perdagangan manusia.
<i>Offtaker</i>	: PDAM yang menjadi pembeli dari hasil proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Pemipaan Air Minum (KPBU SPAM).
Operasi Produksi	: Tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
Opini	: Pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	: Opini pemeriksa yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya pemeriksa meyakini berdasarkan bukti-bukti pemeriksaan yang dikumpulkan, pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.
--------------------------------------	--

P

Pangan Fortifikasi	: Salah satu metode penambahan vitamin serta mineral tertentu ke dalam bahan pangan yang merupakan sebuah peluang dalam menyediakan pangan bergizi bagi seluruh lapisan masyarakat, terlebih lagi bagi populasi rawan gizi.
Pekerja Bukan Penerima Upah	: Setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.
Pemeriksaan Investigatif	: Pemeriksaan yang dilakukan guna mengungkap adanya indikasi Kerugian Negara/Daerah dan/atau unsur pidana.
Pemberian Keterangan Ahli	: Keterangan yang diberikan oleh orang yang ditunjuk BPK karena kompetensinya untuk memberikan keterangan mengenai Kerugian Negara/Daerah dalam proses penyidikan dan/atau peradilan berdasarkan permintaan instansi yang berwenang.
Penguatan <i>Spending Better</i>	: Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan efektivitas transformasi ekonomi yang didukung dengan reformasi fiskal yang holistik.
Perhitungan Kerugian Negara	: Pemeriksaan investigatif yang dilakukan untuk menghitung nilai Kerugian Negara/Daerah yang terjadi akibat penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah.
Pertumbuhan Ekonomi	: Peningkatan kemampuan suatu perekonomian untuk memproduksi barang dan jasa. Hal ini menunjuk pada perubahan kuantitatif dan biasanya diukur dengan data produk domestik bruto (PDB) atau pendapatan <i>output</i> per kapita.
<i>Planned Deforestation</i>	: Penggundulan hutan terencana.
<i>Plotting</i>	: Merencanakan/penempatan peserta.
Prasarana	: Kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
Prevalensi	: Jumlah keseluruhan kasus penyakit yang terjadi pada suatu waktu tertentu di suatu wilayah.
Prioritas Nasional	: Program/kegiatan/proyek untuk pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan kebijakan Presiden lainnya.
Produk Domestik Bruto	: Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Produk Domestik Regional Bruto	:	Nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah dalam suatu jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).
Program Prioritas	:	Program yang diselenggarakan oleh SKPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal.
<i>Project Development Facility</i> (PDF)	:	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas Penyiapan Proyek. • Fasilitas yang disediakan oleh Kementerian Keuangan untuk membantu Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) menyusun kajian akhir prastudi kelayakan, dokumen lelang, dan mendampingi PJPK dalam transaksi proyek KPBU hingga memperoleh pembiayaan dari lembaga pembiayaan (<i>financial close</i>).
<i>Public Awareness</i>	:	Kesadaran publik dan masyarakat.
<i>Public Private Partnership</i> (PPP)	:	Bentuk perjanjian antara sektor publik (Pemerintah) dengan sektor privat (Swasta) untuk mengadakan sarana layanan publik yang diikat dengan perjanjian, terbagi menjadi beberapa bentuk tergantung kontrak dan pembagian risiko.

R

Rasio Gini (Koefisien Gini)	:	Ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau konsumsi dalam suatu populasi.
Reforestasi	:	Penanaman hutan kembali secara alami atau buatan .
Reklamasi	:	Kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	:	Dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Repatriasi	:	Pemulangan kembali orang ke tanah airnya (ke negeri asalnya).
<i>Rescuer on Call</i>	:	Regu pencarian dan pertolongan yang sedang tidak melaksanakan tugas jaga siaga namun dapat dipanggil sewaktu-waktu untuk melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan apabila diperlukan
Restorasi Gambut	:	Upaya pemulihan untuk menjadikan fungsi Ekosistem Gambut atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.
<i>Restorative Justice</i>	:	Keadilan <i>restorative</i> . Salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrument pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung), namun pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum optimal.

Revolusi Mental	:	Gerakan untuk mengubah cara pikir, cara kerja, dan cara hidup bangsa Indonesia yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong berdasarkan Pancasila yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan.
<i>Reward and Punishment</i>	:	Dua bentuk metode dalam memotivasi petugas layanan publik untuk melakukan memberikan pelayanan prima dan meningkatkan prestasinya.
<i>Roadmap</i>	:	Rencana kerja terperinci yang menggambarkan apa yang harus dilakukan.
RPJM Nasional	:	Dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode lima tahun.

S

<i>Safe Deposit Box</i>	:	Jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khasanah yang kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman bagi penggunaannya.
Sarana	:	Fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
<i>Screen House</i>	:	Program terobosan Kementerian Pertanian (Kementan) guna membangun pertanian modern dan meningkatkan minat kaum milenial di sektor pertanian sehingga produksi sayur-sayuran meningkat dengan kualitas dan kemasan yang bernilai tambah tinggi hingga menembus pasar modern dan ekspor.
<i>Self Assessment</i>	:	Proses di mana seseorang secara mandiri menilai dan mengevaluasi dirinya sendiri dalam berbagai aspek, termasuk kemampuan, keterampilan, perilaku, dan pencapaian.
<i>Self-Financing</i>	:	<ul style="list-style-type: none"> • Pendanaan sendiri. • Bagian dari keutuhan dana untuk pembiayaan yang dapat disediakan sendiri oleh pemohon kredit, sedangkan kekurangannya diberikan oleh bank atau pihak pemberi kredit.
<i>Stunting</i>	:	Kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Anak tergolong <i>stunting</i> apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus dua standar deviasi panjang atau tinggi anak seumurnya.
<i>Subrogasi</i>	:	Pengalihan hak tagih Penerima Jaminan kepada Terjamin menjadi hak tagih Penjamin.
Surat Izin Penghunian	:	Keputusan yang menyatakan izin penghunian rumah negara.
<i>Survelains</i>	:	Pengamatan yang dilakukan secara terus-menerus secara sistematis terhadap permasalahan <i>stunting</i> .

T

Tahun Emisi	:	Tahun di mana uang rupiah diterbitkan oleh Bank Indonesia.
Tantiem	:	<ul style="list-style-type: none">• Salah satu dari jenis bonus tahunan.• Keuntungan perusahaan yang dihadiahkan kepada direksi dan komisaris oleh pemegang saham berdasarkan persentase atau jumlah tertentu dari laba bersih yang ditentukan dalam pasal 70 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).
Temuan 3E	:	<p>Temuan yang memuat permasalahan mengenai ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan.</p> <ol style="list-style-type: none">a. Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/ kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/ kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.b. Temuan mengenai ketidakefisienan mengungkap permasalahan rasio penggunaan kuantitas/kualitas input untuk satu satuan <i>output</i> yang lebih besar dari seharusnya.c. Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (<i>outcome</i>), yaitu temuan yang mengungkap adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai. <p>Temuan 3E terdapat dalam pemeriksaan kinerja dan DTT, dan termasuk permasalahan yang tidak berdampak finansial.</p>
Temuan Kelemahan SPI	:	<p>Temuan yang memuat permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja serta kelemahan struktur pengendalian intern.</p> <ol style="list-style-type: none">a. Temuan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan mengungkap kelemahan sistem pengendalian terkait kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan yang dapat mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan dan pengamanan atas aset.b. Temuan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja mengungkap kelemahan pengendalian terkait dengan pemungutan dan penyetoran penerimaan negara/ daerah serta pelaksanaan program/ kegiatan pada entitas yang diperiksa dan dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan serta membuka peluang terjadinya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.c. Temuan kelemahan struktur pengendalian intern mengungkap kelemahan yang terkait dengan ada/tidak adanya struktur pengendalian intern atau efektivitas struktur pengendalian intern yang ada dalam entitas yang diperiksa dan berpengaruh terhadap efektivitas sistem pengendalian intern secara keseluruhan. <p>Temuan kelemahan SPI terdapat dalam pemeriksaan keuangan dan DTT, dan memuat permasalahan yang tidak berdampak finansial.</p>

Temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	: Temuan yang memuat permasalahan mengenai ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan, administrasi dan indikasi tindak pidana. a. Temuan kerugian, mengungkap permasalahan berkurangnya kekayaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. b. Temuan potensi kerugian, mengungkap adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya. c. Temuan kekurangan penerimaan, mengungkap adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/ daerah atau perusahaan milik negara/daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. d. Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian atau potensi kerugian negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah, tidak mengurangi hak negara/daerah, (kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana. e. Temuan indikasi tindak pidana mengungkap adanya perbuatan yang diduga memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan. Temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terdapat dalam pemeriksaan keuangan, kinerja dan DTT. Temuan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan memuat permasalahan yang berdampak finansial. Sedangkan temuan administrasi memuat permasalahan yang tidak berdampak finansial. Sementara temuan indikasi tindak pidana akan disampaikan BPK kepada aparat penegak hukum.
Temuan Pemeriksaan	: Indikasi permasalahan yang ditemui di dalam pemeriksaan di lapangan. Berdasarkan hal/kondisi yang diungkapkan, dalam satu temuan pemeriksaan, dapat mengandung satu atau lebih permasalahan. Temuan pemeriksaan diklasifikasikan dalam tiga kelompok yaitu: a) ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, b) kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), dan c) temuan 3E (ekonomis, efisiensi dan efektivitas).
Tingkat Kemiskinan (%)	: Persentase jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan yaitu minimum untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara.
Tingkat Pengangguran Terbuka	: Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

<i>Training Need Analysis (TNA)</i>	: Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) merupakan langkah awal yang sangat penting dalam penyusunan program diklat untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai yang tidak hanya didapatkan dari diklat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS pasal 203 yang menjelaskan bahwa pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sekurang-kurangnya 20 jam pelatihan per tahun.
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development Goals</i>)	: <ul style="list-style-type: none"> • Disingkat dengan SDGs adalah 17 tujuan dengan 169 capaian dan 232 indikator yang terukur dan tenggat yang dihasilkan dari Sidang Umum PBB pada tanggal 25 September 2015 di New York, Amerika Serikat, dengan dihadiri dan disetujui oleh 193 perwakilan negara, sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi, yang harus dicapai oleh bangsa-bangsa di dunia pada tahun 2030. SDGs merupakan kelanjutan dari MDGs (<i>Millenium Development Goals</i>) hasil sidang umum PBB Tahun 2000 yang harus dicapai pada tahun 2015. • Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

U

Uang Kuliah Tunggal (UKT)	: Sebagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya dan ditetapkan berdasarkan biaya kuliah tunggal dikurangi biaya yang ditanggung oleh Pemerintah.
<i>Unavailable Balance</i>	: Komitmen dana pinjaman dari lender sesuai perjanjian namun tidak bisa dilakukan penarikan karena sebab tertentu.
<i>Underlying Transaction</i>	: Kegiatan yang mendasari transaksi Bank dengan Bank Indonesia untuk mendukung penyelesaian transaksi menggunakan mata uang lokal negara mitra.
<i>Unplanned Deforestation</i>	: Penggundulan hutan tidak terencana/deforestasi tidak terencana.
Utilitas Umum	: Kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.

V

<i>Viability Gap Fund</i>	: Dukungan Kelayakan atau <i>Viability Gap Fund</i> (VGF) adalah Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi sebagian biaya konstruksi yang diberikan secara tunai pada proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang sudah memiliki kelayakan ekonomi namun belum memiliki kelayakan finansial. Dukungan Kelayakan dapat diberikan setelah tidak terdapat lagi alternatif lain untuk membuat Proyek Kerja Sama layak secara finansial. Pemerintah Daerah dapat berkontribusi atas pemberian dukungan ini setelah memperoleh persetujuan dari DPRD.
---------------------------	---

W

Windows Dressing : Upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempercantik laporan keuangan dengan cara memanipulasi laporan keuangan untuk terlihat lebih baik sebelum dipublikasikan. Perusahaan akan memanipulasi laporan keuangan untuk menunjukkan hasil bisnis yang lebih menguntungkan.

Daftar Lampiran pada *Flash Disk*

Lampiran 1.1	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester II Tahun 2023 pada Pemerintah Pusat
Lampiran 1.2	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester II Tahun 2023 pada Pemerintah Daerah dan BUMD
Lampiran 1.3	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2023 pada Partai Politik
Lampiran 1.4	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per tema Semester II Tahun 2023 pada BUMN dan Badan Lainnya
Lampiran 1.5	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester II Tahun 2023 pada Pemeriksaan Prioritas Nasional
Lampiran 2.1	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Pusat
Lampiran 2.2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada Pemerintah Pusat
Lampiran 3.1	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Daerah dan BUMD
Lampiran 3.2.1	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada Pemerintah Daerah dan BUMD
Lampiran 3.2.2	Rekapitulasi Permasalahan Pemeriksaan DTT-Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Daerah
Lampiran 3.2.3	Rekapitulasi Permasalahan Pemeriksaan DTT-Kepatuhan Pengelolaan Belanja Infrastruktur pada Pemerintah Daerah
Lampiran 4	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT-Kepatuhan pada BUMN dan Badan Lainnya
Lampiran 5.1	Daftar Tujuan dan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Prioritas Nasional Pengembangan Wilayah
Lampiran 5.2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan atas Prioritas Nasional Pengembangan Wilayah
Lampiran 5.3	Daftar Tujuan dan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Prioritas Nasional Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
Lampiran 5.4	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan atas Prioritas Nasional Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Lampiran 6.1	Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat IHPS II Tahun 2023
Lampiran 6.2	Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah IHPS II Tahun 2023
Lampiran 6.3	Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN IHPS II Tahun 2023
Lampiran 6.4	Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Badan Lainnya IHPS II Tahun 2023



**IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER II TAHUN 2023**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 31, Jakarta Pusat, 10210
Telp. (021) 25549000, Fax. (021) 57950288
www.bpk.go.id